

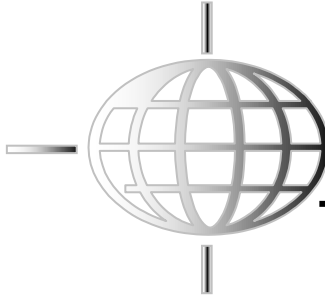
# **LAPORAN AKHIR**

## **PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)**

**KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 - 2019**



**PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kami sehingga laporan Akhir penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pontianak 2015 s/d 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selesainya pembuatan laporan Akhir ini berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Kepala Bappeda Kota Pontianak beserta seluruh kepala dinas terkait yang telah memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan program ini.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik serta Dinas-Dinas terkait yang terlibat langsung telah berbuat banyak untuk penyusunan program ini dengan memberikan data-data yang dibutuhkan.
3. Pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Teriring do'a semoga apa yang telah kita perbuat pada pelaksanaan penyusunan laporan Akhir Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pontianak 2015 s/d 2019 ini, menjadi bagian terpenting dalam upaya memajukan masyarakat kita sehingga dapat terfasilitasi secara maksimal, semoga apa yang telah kita perbuat menjadi dicatat Tuhan sebagai sebuah kebaikan dan ditempatkan-Nya kita di tempat yang terpuji, Amiin.

Laporan Akhir Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pontianak 2015 s/d 2019 ini kami yakini masih jauh dari sempurna

maka dari itu kami mohon masukan dan sarannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Pontianak, 08 Desember 2015

PT. Trias Erisko

Joko Susilo  
Direktur

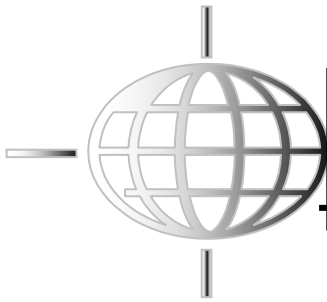


	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	Iii
Daftar Tabel	Vi
Daftar Gambar	Viii
Daftar Grafik	Xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I – 12
1.3. Landasan Hukum .....	I – 12
1.4. Ruang Lingkup Penyusunan SPKD .....	I – 13
1.5. Sistematika Penyusunan SPKD .....	I – 15
BAB II : KONDISI UMUM DAERAH	
2.1. Keadaan Geografi .....	II – 1
2.2. Keadaan Iklim .....	II – 2
2.3. Wilayah Administrasi .....	II – 3
2.4. Penduduk .....	II – 4
2.5. Ketenagakerjaan .....	II – 5
2.6. Pertumbuhan Ekonomi .....	II – 8
2.7. Infrastruktur dan Permukiman .....	II – 10
BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH	
3.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan .....	III – 1
3.1.1 Perspektif Kemiskinan .....	III – 1
3.1.2 Pemahaman Kemiskinan .....	III – 2
3.1.3 Konsep dan Pengukuran Kemiskinan .....	III – 12
3.1.4 Indikator Kemiskinan .....	III – 24
3.2. Kondisi Umum Kemiskinan .....	III – 26
3.2.1 Jumlah Kemiskinan Antar Waktu dan Antar Wilayah .....	III – 26
3.2.2 Garis Kemiskinan .....	III – 27
3.2.3 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Wilayah di Kalbar .....	III – 28
3.2.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) .....	III – 30
3.2.5 Distribusi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Penduduk Miskin .....	III – 31
3.2.6 Distribusi Jumlah Rumah dan Individu Penduduk Miskin Tahun 2105 hasil verifikasi PPLS 2011 .....	III – 37



	3.2.7 Pertumbuhan Ekonomi .....	III – 39
	3.2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	III – 39
	3.2.9 Bidang Ketenagakerjaan .....	III – 41
BAB IV	: ANALISIS INDIKATOR KEMISKINAN	
	4.1. Bidang Kemiskinan .....	IV – 1
	4.2. Bidang Kesehatan .....	IV – 8
	4.3. Bidang Pendidikan .....	IV – 20
	4.4. Bidang Infrastruktur Dasar .....	IV – 42
	4.4.1 Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu .....	IV – 42
	4.5. Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi .....	IV – 49
	4.5.1 Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu .....	IV – 50
BAB V	: ANALISIS PENGANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....	
	5.1. Komposisi Anggaran Belanja .....	V – 1
	5.2. Komposisi Belanja Daerah .....	V – 3
	5.3 Analisis Anggaran Belanja Sektoral .....	V – 7
	5.3.1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja .....	V – 7
	5.3.2 Bidang Kesehatan .....	V – 9
	5.3.3 Bidang Pendidikan .....	V – 11
	5.3.4 Bidang Pemberdayaan .....	V – 13
	5.4 Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan .....	V – 15
	5.4.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan .....	V – 15
	5.4.2 Bidang Kesehatan .....	V – 17
	5.4.4 Bidang Pendidikan .....	V – 18
BAB VI	: TARGET DAN PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	VI - 1
	6.1. Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan .....	VI – 1
	6.2. Metode Pendekatan Analisis.....	VI – 8
	6.3 Masalah Pokok Penanggulangan Kemiskinan .....	VI – 8
	6.4. Sasaran Dan Strategi Utama .....	VI – 9
	6.5. Tujuan Dan Target Percepatan Penurunan Kemiskinan	VI – 11
BAB VII	: ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH	VII – 1
	7.1. Skenario Dan Fokus Pembangunan Tahun 2015-2019	VII – 1
	7.2. Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Dan Arah Pembangunan	VI – 2
	7.3. Rencana Aksi Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan	VI – 14
BAB VIII	: SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	VIII – 1
BAB IX	: PENUTUP	

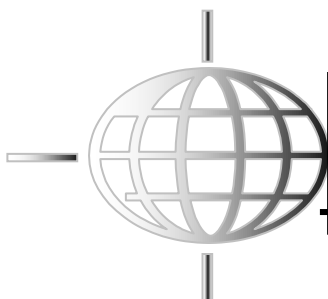
9.1. Risalah SPKD .....	IX – 1
9.2. Legalisasi .....	IX – 2
9.3. Sosialisasi .....	IX – 2



# DAFTAR TABEL

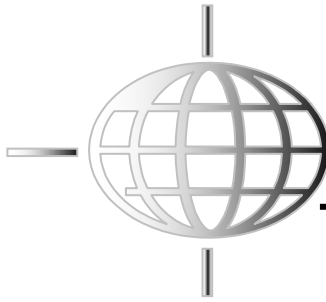
- Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kecamatan, 2013
- Tabel 2.3.1 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Pontianak, 2013
- Tabel 2.4.1 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak
- Tabel 2.5.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Pontianak, 2010-2013
- Tabel 2.5.2 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pontianak, 2013
- Tabel 2.6.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2009- 2013
- Tabel 2.6.2 Tabel Inflasi tahun 2010 – 2014
- Tabel 3.1 Indikator Penanggulangan Kemiskinan
- Tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2009 s/d 2014
- Tabel 3.2.2 Kondisi dan Indikator Kemiskinan di Kota Pontianak Tahun 2003-2014
- Tabel 3.2.3 Tingkat Kemiskinan Kalimantan Barat Tahun 2008 s/d 2014
- Tabel 3.2.4 Perubahan data kemiskinan Tahun 2012 dan 2013
- Tabel 3.2.5 Jumlah Individu Bekerja dan Tidak Bekerja diatas 15 Tahun
- Tabel 3.2.6 Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga
- Tabel 3.2.7 Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan
- Tabel 3.2.8 Jumlah Individu Miskin Berdasarkan Usia Kota Pontianak
- Tabel 3.2.9 Jumlah KK dan Jiwa Miskin Berdasarkan Kelurahan Tahun 2015
- Tabel 3.2.10 Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2004 – 2014
- Tabel 3.2.11 Nilai Indeks Komponen IPM 1996 – 2013 Kota Pontianak
- Tabel 3.2.12 Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota 2005-2013
- Tabel 3.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kalimantan Barat Tahun 2008-2013
- Tabel 4.1.1 Penduduk usia 15 + Menurut Kegiatan Terbanyak Dan Utama Tahun 2011~2014
- Tabel 4.1.2 Capaian Indikator Bidang Kemiskinan Kota Pontianak, Provinsi & Nasional Tahun 2014
- Tabel 4.2.1 Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kota Pontianak, Provinsi & Nasional Tahun 2014
- Tabel 4.3.1 Capaian Indikator Bidang Pendidikan Kota Pontianak, Provinsi & Nasional Tahun 2014

Tabel 4.4.1	Capaian Indikator Bidang Infrastruktur Dasar Kota Pontianak, Provinsi & Nasional Tahun 2014
Tabel 4.5.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2009-2014
Tabel 4.5.2	Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2009 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)
Tabel 4.5.3	Location Qoutient Kota Pontianak Tahun 2013
Tabel 4.5.4	Klassen Tipologi Kecamatan 2013
Tabel 4.5.5	Capaian Indikator Bidang Ekonomi Kota Pontianak, Provinsi & Nasional Tahun 2014
Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2009-2014
Tabel 5.2	Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2009 – 2014
Tabel 5.3	Rekapitulasi Target Belanja Langsung SKPD Tahun anggaran 2009-2014
Tabel 5.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung SKPD Tahun anggaran 2009-2014
Tabel 5.5	Komposisi Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2009-2014
Tabel 5.6	Komposisi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Tabel 5.7	Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menurut Program
Tabel 5.8	Komposisi Belanja Dinas Kesehatan
Tabel 5.9	Realisasi Belanja Dinas Kesehatan menurut Program
Tabel 5.10	Komposisi Belanja Dinas Pendidikan
Tabel 5.11	Realisasi Belanja Dinas Pendidikan menurut Program
Tabel 5.12	Komposisi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana
Tabel 5.13	Realisasi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana menurut Program
Tabel 5.14	Relevansi Biaya terhadap Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Tabel 5.15	Relevansi Biaya terhadap Bidang Kesehatan
Tabel 5.16	Relevansi Biaya terhadap Bidang Pendidikan
Tabel 6.1	Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1
Tabel 6.2	Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 2
Tabel 6.3	Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan Oleh SKPD
Tabel 6.4	Target dan Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan
Tabel 7.1	Skenario dan Fokus Pembangunan Pembangunan Tahunan Periode 2015-2019
Tabel 7.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019
Tabel 7.3	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Tabel 7.4	Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah



# DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1.1 Bagan Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 1.1.2 Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 1.1.3 Pemerataan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 1.1.4 Nawacita Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 1.1.5 Melinium Development Goal Sustainable Development Goal
- Gambar 1.1.6 Target Melinium Development Goal Sustainable Development Goal
- Gambar 2.5.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kejiata Utama Tahun 2013
- Gambar 3.1 Perencanaan dan Monitoring
- Gambar 3.2 Bagan Kemiskinan
- Gambar 6.1 Masalah Pokok Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 6.2 Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
- Gambar 7.1 Dimensi Kebijakan
- Gambar 7.2 Alur Isu Strategis
- Gambar 8.1 Alur Monitoring dan Evaluasi
- Gambar 8.2 Sistem dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi



# DAFTAR GRAFIK

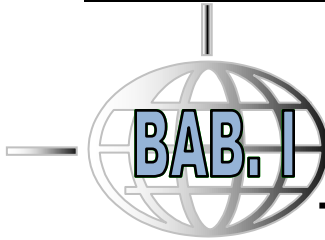
- Grafik 1.1.1 Target Pencapaian Tingkat Kemiskinan Nasional
- Grafik 1.1.2 Kesenjangan Prosentase Kemiskinan Antar Wilayah
- Grafik 1.1.3 Ketidakmerataan Sebaran Penduduk Miskin Antar Wilayah
- Grafik 1.1.4 Garis Kemiskinan Terhadap Jumlah Penduduk
- Grafik 1.1.5 Efektifitas Penargetan Program Perlindungan Sosial
- Grafik 1.1.6 Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Tahun 2011
- Grafik 1.1.7 Target Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Gini Ratio 2015-2019
- Grafik 2.1 Persentase Luas Wilayah Kota Pontianak
- Grafik 2.5.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kejiata Utama Tahun 2013
- Grafik 3.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
- Grafik 3.2.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Antar Wilayah Kabupaten Tahun 2013
- Grafik 3.2.3 Perbandingan Prosentase (%) Penduduk Miskin Antar Kota / Kabupaten Tahun 2014
- Grafik 3.2.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pontianak Tahun 2003 s/d 2013
- Grafik 3.2.5 Jumlah Rumah Tangga Dan Individu, Menurut Kecamatan
- Grafik 3.2.6 Jumlah Rumah Tangga Dan Individu, Menurut Kelurahan
- Grafik 4.1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2003 – 2014
- Grafik 4.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Pontianak Tahun 2003 s/d 2013
- Grafik 4.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pontianak Tahun 2003 s/d 2013
- Grafik 4.1.4 Keterkaitan Antar Indikator Utama dengan Indikator Pendukung
- Grafik 4.1.5 Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) PO Kota Pontianak Terhadap Provisi & Nasional Tahun 2002 – 2015
- Grafik 4.1.6 Relevansi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (%) P1 Kota Pontianak Terhadap Provinsi & Nasional Tahun 2002 - 2013
- Grafik 4.1.7 Relevansi Tingkat Keparahan Kemiskinan (%) P2 Kota Pontianak Terhadap Nasional Tahun 2002 – 2013
- Grafik 4.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2007-2014
- Grafik 4.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Wilayah Tahun 2014
- Grafik 4.1.10 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Pontianak 2013
- Grafik 4.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Pontianak 2002 – 2015
- Grafik 4.2.2 Angka Kematian Balita Kota Pontianak Tahun 2010 – 2015

- Grafik 4.2.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2002 – 2015
- Grafik 4.2.4 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) 2010 – 2014
- Grafik 4.2.5 Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
- Grafik 4.2.6 Rasio Dokter Terhadap 100.000 Jumlah Penduduk Tahun 2010 – 2014
- Grafik 4.2.7 Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 2010 – 2014
- Grafik 4.2.8 Angka Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Tahun 2002-2014
- Grafik 4.2.9 Perkembangan Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kota Pontianak, Tahun 2005 – 2014
- Grafik 4.2.10 Perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.2.11 Perkembangan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.2.12 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Tahun 2002-2014
- Grafik 4.2.13 Perkembangan Angka Morbiditas (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.2.14 Perkembangan beberapa jenis penyakit Tahun 2010-2014
- Grafik 4.2.15 Prioritas Wilayah Intervensi
- Grafik 4.3.1 Posisi Relatif Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Barat 2013
- Grafik 4.3.2 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.3.3 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Barat 2013
- Grafik 4.3.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.3.5 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Barat 2013
- Grafik 4.3.6 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kota Pontianak Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.3.7 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Barat 2013
- Grafik 4.3.8 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.3.9 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Barat 2013
- Grafik 4.3.10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.3.11 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Barat 2013
- Grafik 4.3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kota Pontianak, Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.3.13 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Tahun 2004-2014
- Grafik 4.3.14 Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Tahun 2004-2014



- Grafik 4.3.15 Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) Tahun 2004-2014
- Grafik 4.3.16 Posisi Relatif Jarak Sekolah Dasar SMP/MTs (km) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.3.17 Perkembangan Jarak Sekolah SD/MI (Km) Tahun 2008-2014
- Grafik 4.3.18 Posisi Relatif Jarak Sekolah SMA/MA (km) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.3.19 Perkembangan Jarak Sekolah SMP/MTs (Km) Tahun 2005-2014
- Grafik 4.3.20 Posisi Relatif Jarak Sekolah SMA/MA (km) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.3.21 Perkembangan Jarak Sekolah SMA/MA (Km) Tahun 2005-2014
- Grafik 4.3.22 Posisi Relatif Jarak Sekolah SMK (km) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.3.23 Perkembangan Jarak Sekolah SMA/MA (%) Tahun 2005-2014
- Grafik 4.3.24 Rasio Siswa/Kelas SD/MI Tahun 2004 – 2014
- Grafik 4.3.25 Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) 2005 – 2014
- Grafik 4.3.26 Rasio Siswa/Kelas SMA/MA Tahun 2004 – 2014
- Grafik 4.3.27 Rasio Siswa/Kelas SMK Tahun 2004 – 2014
- Grafik 4.3.28 Rasio Siswa/Guru SD/MI Tahun 2004 – 2014
- Grafik 4.3.29 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Tahun 2004-2014
- Grafik 4.3.30 Rasio Siswa/Guru SMA/MA Tahun 2005 – 2014
- Grafik 4.3.31 Rasio Siswa/Guru SMK Tahun 2006 – 2014
- Grafik 4.3.32 Rasio Guru/Kelas SD/MI Tahun 2007 – 2014
- Grafik 4.3.33 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Tahun 2004-2014
- Grafik 4.3.34 Rasio Guru/Kelas SMA/MA Tahun 2007 – 2014
- Grafik 4.3.35 Rasio Siswa/Guru SMK Tahun 2007 – 2014
- Grafik 4.4.1 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.4.2 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Tahun 2002 – 2014
- Grafik 4.4.3 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Bersih (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.4.4 Perkembangan Cakupan Pelayanan PDAM Kota Pontianak, Tahun 2008 – 2015
- Grafik 4.4.5 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.4.6 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kota Pontianak tahun 2002-2014
- Grafik 4.4.7 Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.4.8 Posisi Relatif Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014

- Grafik 4.4.9 Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.4.10 Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.4.11 Posisi Relatif Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014
- Grafik 4.4.12 Perkembangan Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kota Pontianak 2014
- Grafik 4.5.1 Perkembangan Harga Beras Lokal Tahun 2010-2015 Kota Pontianak
- Grafik 4.5.2 Perkembangan Kebutuhan Pokok Kota Pontianak Tahun 2010-2014
- Grafik 4.5.3 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral Tahun 2014
- Grafik 4.5.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak 2009-2014
- Grafik 4.5.5 Perkembangan Inflasi Kota Pontianak dan Nasional
- Grafik 4.5.6 Prosentase jenis-jenis inflasi
- Grafik 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2009-2014
- Grafik 5.2 Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2009 – 2014
- Grafik 5.3 Komposisi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- Grafik 5.4 Komposisi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Menurut Program
- Grafik 5.5 Komposisi Belanja Dinas Kesehatan
- Grafik 5.6 Komposisi Belanja Dinas Kesehatan Menurut Program
- Grafik 5.7 Komposisi Belanja Dinas Pendidikan
- Grafik 5.8 Komposisi Belanja Dinas Pendidikan Menurut Program
- Grafik 5.9 Komposisi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana
- Grafik 5.10 Komposisi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana Menurut Program
- Grafik 5.11 Relevansi Biaya terhadap Perkembangan Tingkat Kemiskinan
- Grafik 5.12 Relevansi Biaya terhadap Bidang Kesehatan
- Grafik 5.13 Relevansi Biaya terhadap Bidang Pendidikan
- Grafik 6.1 Target Pengurangan Tingkat Kemiskinan



# PENDAHULUAN

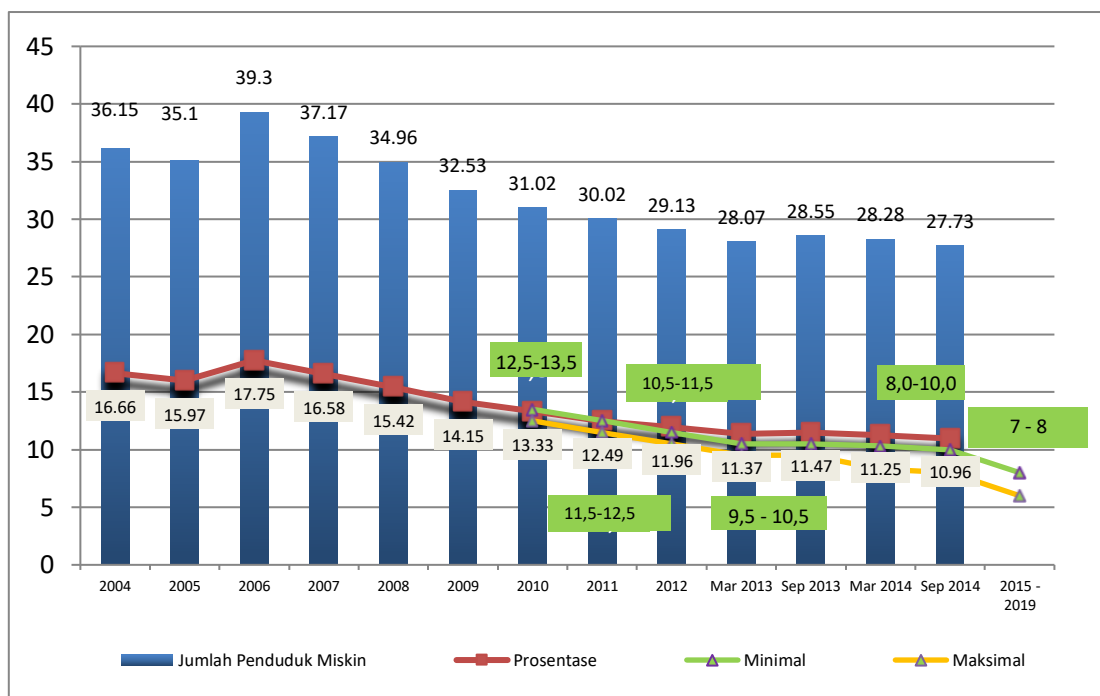
## 1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah- langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. target RPJMN 2015-2019 yang mencanangkan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7-8 persen pada akhir 2019. Skenario optimis penurunan tingkat kemiskinan berkisar pada angka 7 persen, sedangkan skenario moderat terdapat pada kisaran angka 8 persen dengan pertimbangan terjadi faktor-faktor eksternal seperti krisis ekonomi dunia yang berpengaruh pada kenaikan tingkat kemiskinan.

Penanggulangan Kemiskinan secara Nasional menghadapi beberapa permasalahan utama diantaranya :

1. angka kemiskinan walaupun terjadi pengurangan namun dirasakan lambat dan capaian dari tahun ke tahun semakin menurun.

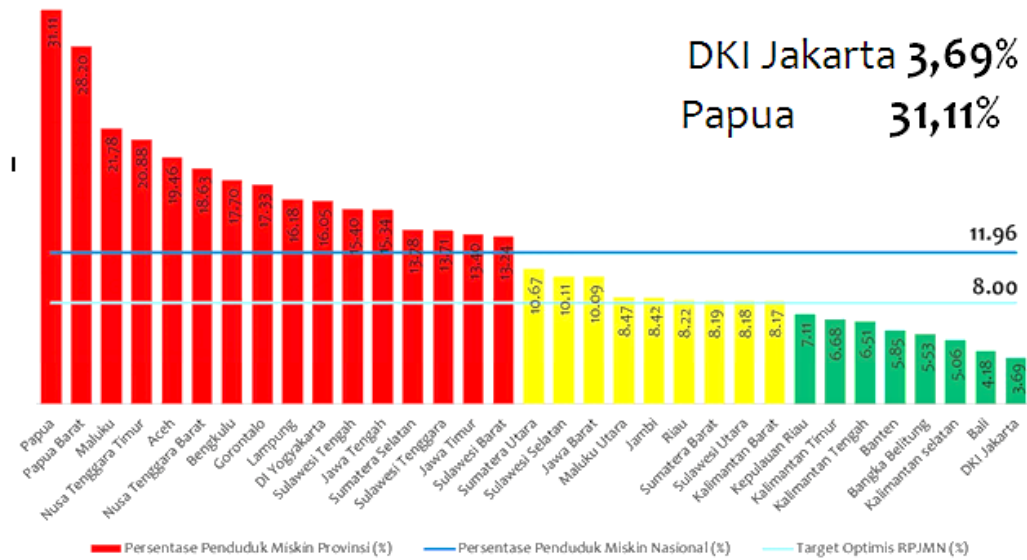
**Grafik 1.1.1**  
**Target Pencapaian Tingkat Kemiskinan Nasional**



2. Kesenjangan Prosentase Kemiskinan antar wilayah yang begitu besar

Grafik 1.1.2

**KESENJANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH**

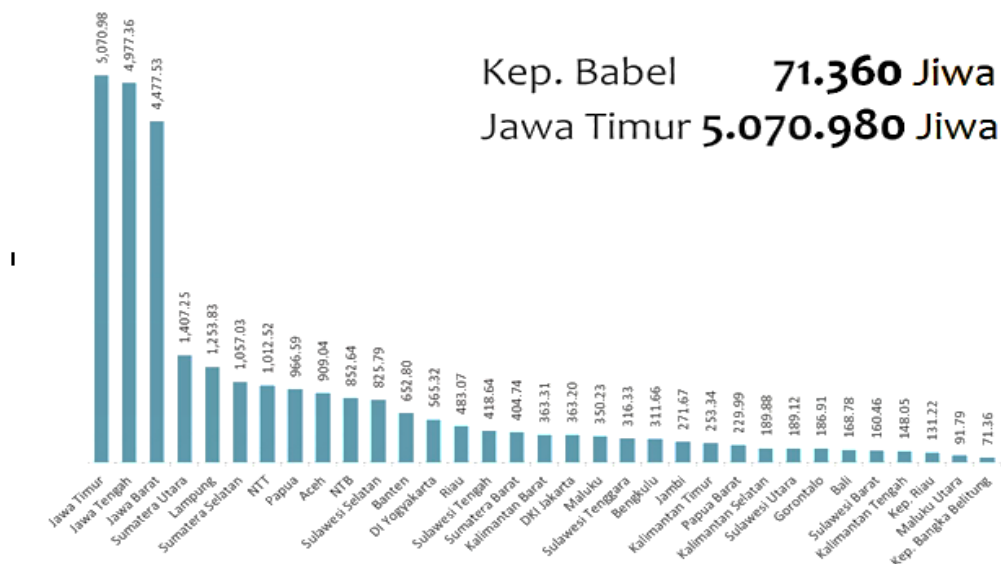


Sumber: BPS – Susenas (Maret 2012)

3. Ketidakmerataan sebaran penduduk miskin antar wilayah

Grafik 1.1.3

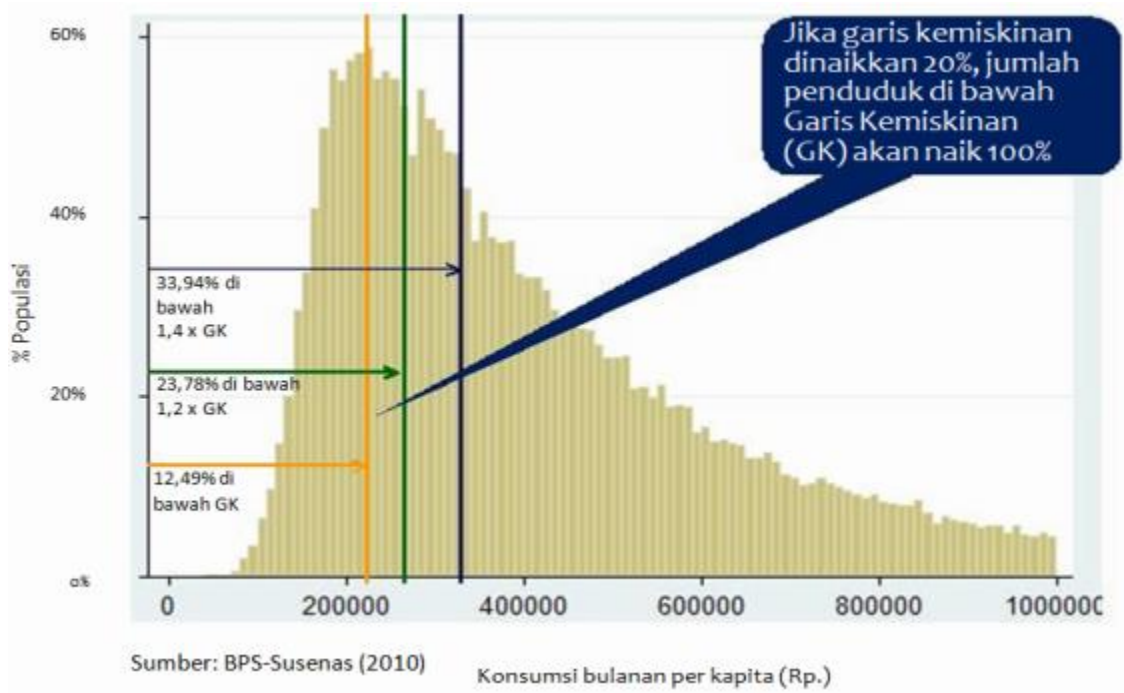
**KETIDAKMERATAAN SEBARAN PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH**



Sumber: BPS (2011)

4. Kerentanan terhadap Garis Kemiskinan (GK), Jika Garis Kemiskinan (GK) dinaikan 20%, Jumlah penduduk di bawah Garis Kemiskinan (GK) akan naik menjadi 100%

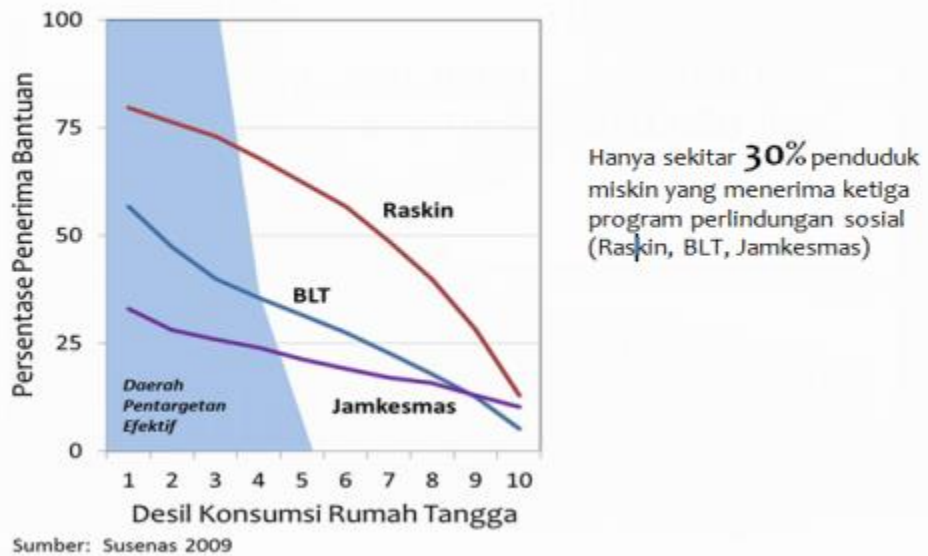
**Grafik 1.1.4**  
**Garis Kemiskinan Terhadap Jumlah Penduduk**



- Efektifitas Penargetan Program Perlindungan Sosial hanya sekitar 30% Penduduk miskin yang menerima ke tiga program Raskin, BLT & Jamkesmas

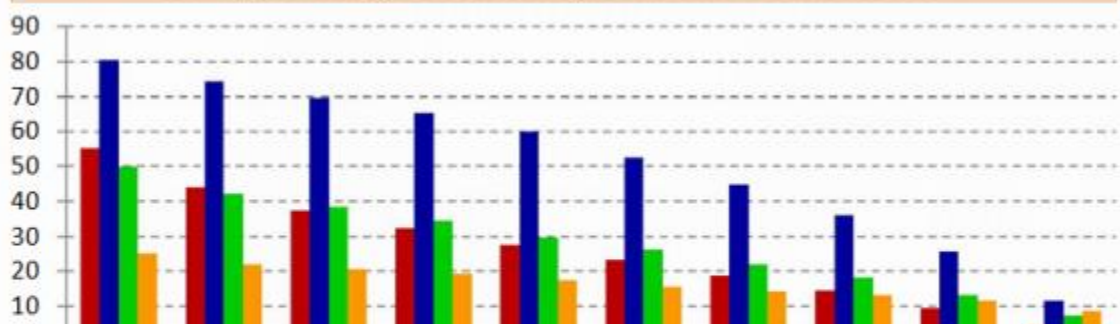
**Grafik 1.1.5**

**EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL**



**Grafik 1.1.6**

**Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Tahun 2011**



Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan memuat 4 (empat) pokok strategi yaitu :

- 1) Perbaikan program perlindungan sosial;
- 2) Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar;
- 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
- 4) Pembangunan inklusif; yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah. Tujuan Perpres No. 15 Tahun 2010 adalah meningkatkan efektivitas upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Efektivitas tersebut berjalan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kemudian arah dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut dijabarkan dalam program-program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

**Gambar 1.1.1**

Bagan Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan



Sumber: TNP2K, 2011

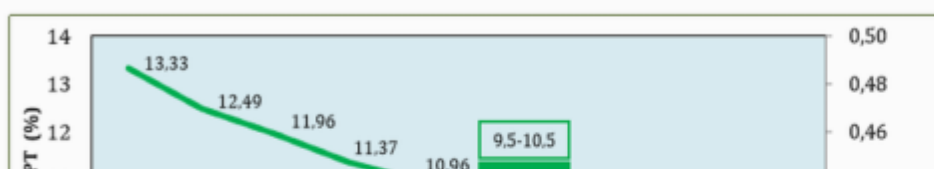
Implikasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah pembentukan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang dilegitimasi dengan Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem kelembagaan bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJMD, sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan MDG's.

Kinerja TKPKD salah satunya diukur dengan mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dokumen SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD dengan masa berlaku selama 1 periode kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, dokumen SPKD penting sekali untuk disusun secara mandiri oleh sumberdaya TKPK sendiri (bukan pihak ketiga), bersifat evaluatif dan menjadi payung bagi program penanggulangan kemiskinan selanjutnya.

Selanjutnya kebijakan penanggulangan kemiskinan mengalami perubahan pada pemerintahan Jokowi, dengan target tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio 2015-2019 sebagai berikut

**Grafik 1.1.7**

## TARGET TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN GINI RATIO 2015-2019



### SASARAN

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,0%-10,0 persen dan pengangguran terbuka menjadi 5,2%-5,5% di tahun 2016.





Gambar 1.1.2

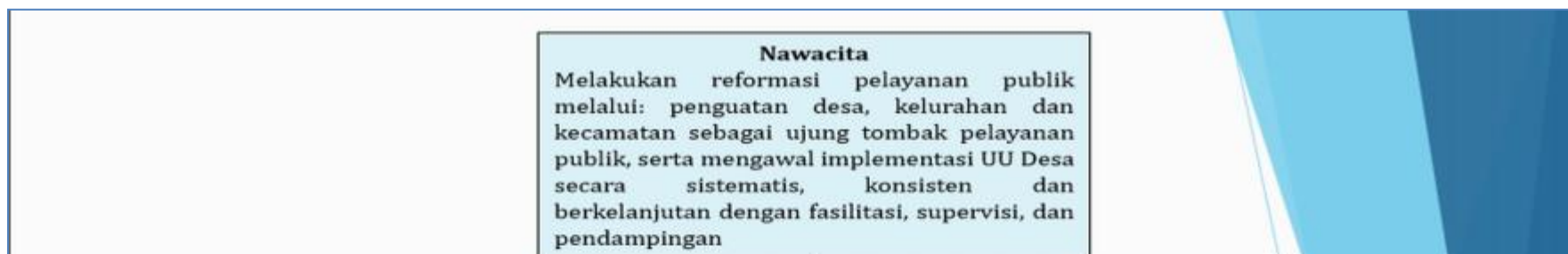


Gambar 1.1.3

**PEMERATAAN DAN PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Berdasarkan Agenda Nawacita 1, 3, 5, 6, 7, dan 9 yang dituangkan di dalam RPJMN 2015 - 2019**

**Gambar 1.1.4**



**Gambar 1.1.5**

**MILLENIUM  
DEVELOPMENT GOALS**

1. Penghapusan Kemiskinan

**SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS**

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Berkualitas



Gambar 1.1.6



## 1.2. MAKSUD & TUJUAN PENYUSUNAN SPKD

*Maksud* penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan semua pelaku dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak. Dimana kegiatan penanggulangan kemiskinan harus lebih terkoordinasi, lebih terarah dan berkesinambungan. Untuk target yang akan di capai sebesar 4,5% di tahun 2019.

Tujuan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai berikut :

1. Terkumpulnya data yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
2. Pembahasan berbagai data, indikator, pengertian, analisa dan rekomendasi program SPKD untuk dipakai sebagai dokumen perencanaan yang mengandung konsekwensi mendapat alokasi anggaran pro poor.
3. Sebagai pedoman kebijakan strategis daerah yang menyeluruh, terpadu ( lintas SKPD), antar sektor dan antar stakeholders yang terencana dan berkesinambungan.
4. Sebagai sarana untuk koordinasi, membangun konsensus (kesepakatan), integrasi dan alokasi program penanggulangan kemiskinan.

Definisi *strategi* menurut UU No. 25/2004 adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi memperhatikan kondisi daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, program kewilayahan dan rencana kerja regulasi

## 1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
5. Inpres No. 21 tahun 1998 tentang: Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan



6. Inpres RI No. 5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF, Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 05/Kep/Menko/Kesra/II/2006 tentang: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
8. Surat Edaran Mendagri No. 412.6/3186/SJ tentang: Tindak Lanjut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
9. Keputusan Walikota Pontianak No. 279 tahun 2015 tentang: Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak.
10. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
11. Permendagri 42/2010: Fungsi TKPK dalam masing-masing tugas pokok
12. Perda No. 6 tahun 2014 tentang : Renstra/RPJM Tahun 2015 s/d 2019 Kota Pontianak, dimana salah satu indikator kinerja daerah dalam penurunan angka kemiskinan 5,09% Tahun 2015 & 4,50% Tahun 2019
13. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pontianak

#### 1.4. RUANG LINGKUP PENYUSUNAN SPKD

Mekanisme perencanaan pembangunan di Kota Pontianak, sekarang ini telah dilaksanakan secara lebih partisipatif dengan melibatkan beberapa elemen *stakeholder*, dimana dengan cara ini diharapkan akan dapat menghasilkan prioritas kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan bersama, yang kemudian dituangkan dalam APBD sebagai penjabaran Arah dan Kebijakan Umum Tahunan yang merupakan *breakdown* dari Arah dan Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Pontianak.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di Kota Pontianak, baik yang diusulkan oleh masyarakat, dari mulai perencanaan di tingkat yang paling bawah sampai tingkat kota, maupun yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga ditetapkannya menjadi APBD, maka usulan program dan kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah penanggulangan kemiskinan seyogyanya mengacu pada dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Sehingga eksistensi dokumen SPKD akan diposisikan sebagai acuan atau panduan bagi arah dan kebijakan dalam program khusus penanggulangan kemiskinan di

Kota Pontianak, sebagaimana dokumen Renstrada yang diposisikan sebagai dokumen acuan pembangunan secara umum. Sehingga di masa mendatang diharapkan Kota Pontianak akan memiliki program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan pembiayaan daerah.

Agar adanya integrasi arah dan kebijakan dalam pembangunan secara umum, maka dokumen SPKD yang merupakan dokumen khusus penanggulangan kemiskinan dalam perumusannya harus tetap mengacu pada dokumen RPJM Kota Pontianak 2015-2019, sehingga diharapkan tidak ada (*overlapping*) tumpang tindih dalam arah dan kebijakannya.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak, secara umum strategi penanggulangan kemiskinannya dikelompokkan menjadi 5 (lima) pilar, yaitu:

1. Perluasan Kesempatan Kerja, khususnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat miskin, baik yang diupayakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
2. Pemberdayaan Masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat miskin agar mempunyai akses dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, khususnya peningkatan kapasitas SDM masyarakat miskin agar mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Perlindungan Sosial, agar masyarakat miskin mendapatkan perlindungan, perlakuan manusiawi, kemudahan, bantuan dan rasa aman dalam segala aspeknya.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan, agar kualitas lingkungan masyarakat miskin dapat sesuai dengan standar kesehatan lingkungan.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SPKD**

Sistematika penyusunan SPKD ini adalah sebagai berikut :

Sistematika Penulisan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pontianak berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD dari Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TNP2K) sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

**BAB II KONDISI UMUM DAERAH**

**BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

**BAB IV. ANALISIS INDIKATOR KEMISKINAN**

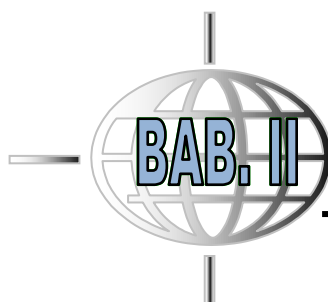
**BAB V. ANALISISIS PENGANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**BAB VI. TARGET DAN PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN**

**BAB VII. ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH**

**BAB VIII. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**BAB IX. PENUTUP**



## KONDISI UMUM DAERAH

### 2.1. KEADAAN GEOGRAFI

Kota Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilintasi oleh garis Khatulistiwa, yaitu terletak pada 0° 02' 24" Lintang Utara sampai dengan 0° 05' 37" Lintang Selatan, dan 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter diatas permukaan laut.

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

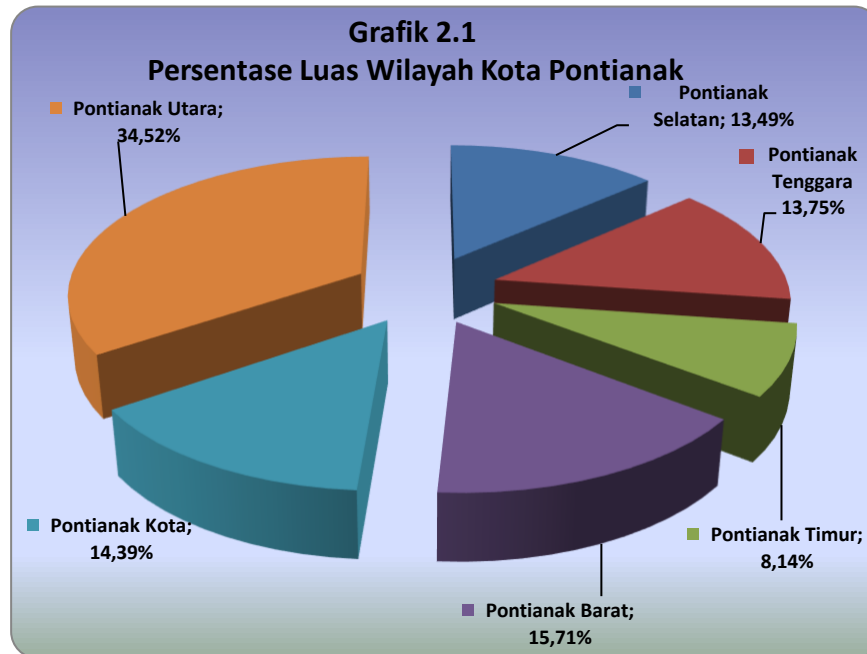
- Bagian Utara: Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak
- Bagian Selatan: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bagian Barat: Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bagian Timur: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,25 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen).

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kecamatan, 2013**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas (km <sup>2</sup> ) <i>Area (km<sup>2</sup>)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)
Pontianak Selatan	14,54	13,49
Pontianak Tenggara	14,83	13,75
Pontianak Timur	8,78	8,14
Pontianak Barat	16,94	15,71
Pontianak Kota	15,51	14,39
Pontianak Utara	37,22	34,52
<b>Kota Pontianak</b>	<b>107,82</b>	<b>100,00</b>

*Sumber/ Source : Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak*



Di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai dan parit yang keseluruhannya berjumlah 55 sungai/parit. Sungai/parit tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi.

Kantong kemiskinan di wilayah kota pontianak sebagian besar terletak pada pinggiran sungai, terutama di kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Barat, dan sebagian lainnya tersebar di Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara.

## 2.2. KEADAAN IKLIM

Hasil pencatatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menunjukkan bahwa pada tahun 2012 rata-rata temperatur udara di Kota Pontianak berkisar antara 24,5 °C hingga 33,0°C, sedangkan rata-rata tekanan udaranya berkisar antara 1.010,3 milibar hingga 1.012,0 milibar

Rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak berkisar antara 1,5 knot hingga 4,4 knot dengan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan Maret yaitu sebesar 32,0 knot.

Selama tahun 2012 hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan November yaitu sebanyak 29 hari dengan curah hujan sebesar 529,2 mm.

### 2.3. WILAYAH ADMINISTRASI

Dalam perkembangan sejarahnya, Kota Pontianak pada awalnya merupakan daerah kesultanan, kemudian pada tahun 1959 dikembangkan menjadi Kotapraja dengan status Daerah Otonomi Tingkat II. Selanjutnya daerah otonom ini disesuaikan dengan perkembangan dalam bidang pemerintahan, maka berdasarkan SK DPRD Gotong Royong No. 12/KPTS.DPRD.GR/65 tanggal 31 Desember 1965, terbentuklah Kota Pontianak yang terdiri dari tiga kecamatan.

Setelah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah administrasi, pada tahun 2008 terbentuk lagi satu kecamatan baru yaitu Pontianak Tenggara yang terdiri dari empat kelurahan, sehingga di Kota Pontianak pada saat ini terdapat enam kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pontianak Selatan
2. Kecamatan Pontianak Timur
3. Kecamatan Pontianak Barat
4. Kecamatan Pontianak Kota
5. Kecamatan Pontianak Utara
6. Kecamatan Pontianak Tenggara

Secara keseluruhan, di Kota Pontianak terdapat 29 kelurahan yang terbagi menjadi 548 Rukun warga (RW) dan 2.471 Rukun Tetangga (RT).

**Tabel 2.3.1**  
**Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)**  
**Menurut Kecamatan di Kota Pontianak, 2013**

Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)
Pontianak Selatan	5	91	404
Pontianak Tenggara	4	43	178
Pontianak Timur	7	75	364
Pontianak Barat	4	103	543
Pontianak Kota	5	120	499
Pontianak Utara	4	116	483
Jumlah	29	548	2.471

*Sumber/Source : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak*

### 2.4. PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 587.169 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.446 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 9.932 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.201 jiwa per km<sup>2</sup>.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pontianak pada periode 1990-2000 adalah 0,7 persen pertahun, sedangkan untuk periode 2000-2010 meningkat menjadi sebesar 1,8 persen per tahun.

Pada tiga tahun terakhir, perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak menunjukkan jumlah yang cukup berimbang, hal ini dapat dilihat dari Sex Ratio yang rata-rata bernilai 100, ini berarti terdapat 100 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

**Tabel 2.4.1**  
**Kepadatan Penduduk Kota Pontianak**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
	Km <sup>2</sup>	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pontianak Selatan	15,14	14,04	86.601	14,75	5.720
Pontianak Tenggara	14,22	13,19	47.474	8,09	3.339
Pontianak Timur	8,78	8,14	87.199	14,85	9.932
Pontianak Barat	16,47	15,28	130.202	22,17	7.905
Pontianak Kota	15,98	14,82	116.543	19,85	7.293
Pontianak Utara	37,22	34,52	119.150	20,29	3.201
<b>Kota Pontianak</b>	<b>107,81</b>	<b>100,00</b>	<b>587.169</b>	<b>100,00</b>	<b>5.446</b>

Berdasarkan Data PPLS tahun 2008 dari BPS kota Pontianak jumlah penduduk miskin sebanyak 18.288 Rumah Tangga Sasaran (RTS), dimana penduduk miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Pontianak Utara sebesar 28,4 % atau 5.174 Rumah Tangga, disusul Kecamatan Pontianak Barat 25,8% atau 4.696 Rumah Tangga dan di Kecamatan Pontianak Pontianak Timur 24,4% atau 4.451 Rumah Tangga.

Berdasarkan Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) PPLS tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak sebanyak 16.849 Kepala Keluarga, dimana penduduk miskin terbanyak



terdapat di Kecamatan Pontianak Utara sebesar 32,4 % atau 5.466 Rumah Tangga, disusul Kecamatan Pontianak Timur 25,3% atau 4.721 Kepala Keluarga dan di Kecamatan Pontianak Pontianak Barat 22,2% atau 3.737 Kepala Keluarga.

Beberapa permasalahan Demografi yang muncul :

- Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah, sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.

## **2.5. KETENAGAKERJAAN**

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, terdiri dari:

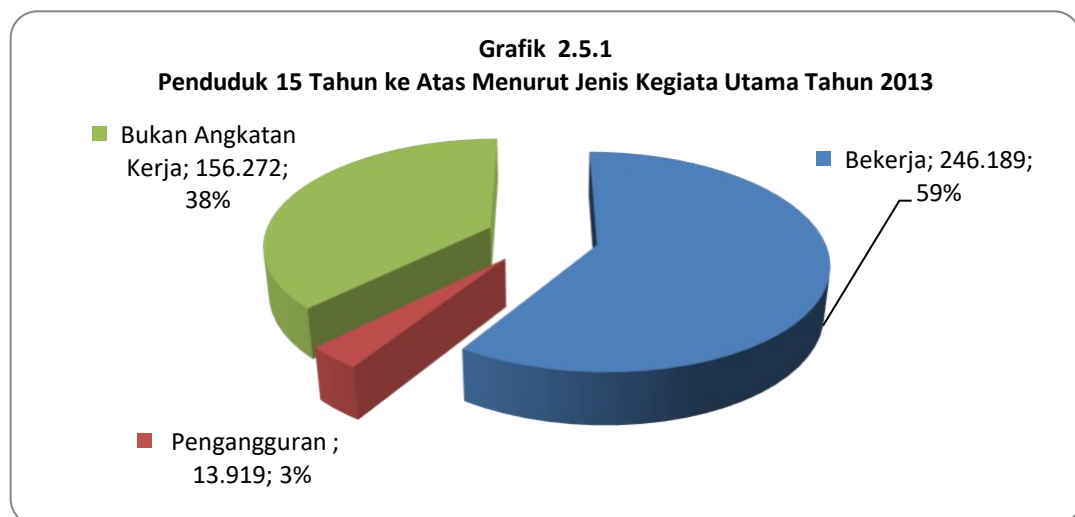
1. Angkatan Kerja, yaitu:
  - Bekerja
  - Pengangguran
2. Bukan Angkatan Kerja, yaitu:
  - Sekolah
  - Mengurus rumah tangga
  - Lainnya (pensiun, jompo, dll).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013 adalah 264.090 jiwa atau sebesar 61,13 persen dari penduduk usia kerja, dengan kata lain TPAK Kota Pontianak pada tahun 2013 adalah sebesar 61,13 persen. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 165.906 orang (77,67 persen), dan penduduk perempuan sebanyak 98.184 orang (44,96 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kota Pontianak relatif didominasi oleh pekerja laki-laki.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kota Pontianak cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran Kota Pontianak adalah sebesar 6,12 persen atau sekitar 16.166 orang dari 264.090 angkatan kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran di Kota Pontianak didominasi oleh tamatan SLTA ke atas.

Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Pontianak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, UMR yang ditetapkan untuk Kota Pontianak adalah Rp. 1.165.000,- atau naik sebesar Rp. 170.000,- dibandingkan dengan tahun 2012. UMR ini merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya



**Tabel 2.5.1.**  
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Pontianak, 2010-2013

Jenis Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. Angkatan Kerja</b>	260.892	259.987	260.108	264.090
1. Bekerja	240.576	241.100	246.189	247.924
2. Pengangguran	20.316	18.887	13.919	16.166
<b>II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah tangga dan Lainnya)</b>	136.738	146.722	156.272	167.922
Jumlah	397.630	406.709	416.380	432.012
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	65,61	63,92	62,47	61,13
<b>Tingkat Pengangguran</b>	7,79	7,26	5,35	6,12

**Tabel 2.5.2**  
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pontianak, 2013

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Angkatan Kerja</b>	165.906	98.184	264.090
1. Bekerja	154.896	93.028	247.924
2. Pengangguran	11.010	5.156	16.166
<b>II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah tangga dan Lainnya)</b>	47.707	120.215	167.922
Jumlah	213.613	218.399	432.012
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	77,67	44,96	61,13
<b>Tingkat Pengangguran</b>	6,64	5,25	6,12

Sumber/Source : Sakernas 2012

- Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

## 2.6. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2010–2014 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi diatas rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pontianak adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,27%, di tahun 2014 disusul oleh sektor bangunan sebesar 7,66% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai pertumbuhan sebesar 6,96%. sebagai konsekuensi tumbuhnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan utamanya dalam penggunaan moda transportasi arus distribusi barang dan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, serta peningkatan volume bongkar muat di pelabuhan Pontianak berpengaruh positif pada sektor pengangkutan dan komunikasi.

**Tabel 2-6.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2009-2014**

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian	5,09	3,44	5,22	3,83	4,90	4,83
2. Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	3,61	2,34	2,50	2,71	3,06	3,03
4. Listrik dan Air Bersih	6,41	4,28	4,36	4,50	7,83	5,88
5. Bangunan	10,79	5,27	5,81	6,46	7,65	7,66
6. Perdag, Hotel & Restoran	4,40	6,24	7,24	6,66	8,13	6,96
7. Pengangkutan & Kom	6,28	9,11	9,04	9,19	8,03	9,27
8. Keu. Persewaan, & Jasa Persh	4,30	5,55	5,64	6,03	6,91	6,06
9. Jasa Jasa	2,51	2,42	2,93	3,34	5,18	3,57
<b>PDRB</b>	<b>5,36</b>	<b>5,38</b>	<b>5,89</b>	<b>6,06</b>	<b>6,92</b>	<b>6,52</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Perkembangan laju inflasi di Kota Pontianak dalam kurun waktu 2010-2014 terlihat fluktuatif. Hal ini disebabkan pengaruh dari kondisi perekonomian nasional serta stabilitas stok harga barang-barang di dalam negeri khususnya di Kota Pontianak. Berikut gambaran laju inflasi dalam kurun waktu 2010-2014

**Tabel 2.6.2**  
**Tabel Inflasi tahun 2010 - 2014**

Tahun	Bulan	Nasional	Pontianak	Tahun	Bulan	Nasional	Pontianak
2010	Januari	0.84	1.23	2013	Januari	1.03	0.01
	Februari	0.30	0.60		Februari	0.75	1.04
	Maret	-0.14	0.66		Maret	0.63	1.02
	April	0.15	0.11		April	-0.10	0.29
	Mei	0.29	-0.28		Mei	-0.03	1.40
	Juni	0.97	0.21		Juni	1.03	0.22
	Juli	1.57	2.89		Juli	3.29	3.36
	Agustus	0.76	0.85		Agustus	1.12	1.47
	September	0.44	0.95		September	-0.35	-0.75
	Oktober	0.06	-0.15		Oktober	0.09	0.73
	November	0.60	0.29		November	0.12	-0.85
	Desember	0.92	0.90		Desember	0.55	1.23
Tahunan	6.96	8.52	Tahunan	8.38	9.48		
2011	Januari	0.89	1.04	2014	Januari	1.07	0.04
	Februari	0.13	1.10		Februari	0.26	2.73
	Maret	-0.32	-0.71		Maret	0.08	-0.78
	April	-0.31	0.17		April	-0.02	0.08
	Mei	0.12	-0.58		Mei	0.16	0.72
	Juni	0.55	0.80		Juni	0.43	0.90
	Juli	0.67	0.62		Juli	0.93	1.49
	Agustus	0.93	1.78		Agustus	0.47	-0.03
	September	0.27	0.88		September	0.27	0.13
	Oktober	-0.12	-1.66		Oktober	0.47	-0.42
	November	0.34	0.26		November	1.50	1.41
	Desember	0.57	1.15		Desember	2.46	2.82
Tahunan	3.79	4.91	Tahunan	8.36	9.38		
2012	Januari	0.76	0.94				
	Februari	0.05	1.70				
	Maret	0.07	-0.44				
	April	0.21	0.39				
	Mei	0.07	0.93				
	Juni	0.62	0.13				
	Juli	0.70	1.43				
	Agustus	0.95	1.33				
	September	0.01	-0.43				
	Oktober	0.16	-1.55				
	November	0.07	0.96				
	Desember	0.54	1.08				
Tahunan	4.30	6.62					

Walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,52% pada tahun 2014 akan tetapi btingkat inflasi juga semakin tinggi pada tahun 2013 mencapai 9,48% dan pada tahun 2014 mencapai 9,38%. Hal ini akan berdampak pada meningkatkan harga barang khususnya bahan pokok dan juga berdampak turunnya daya beli masyarakat, dan disisi lain tidak diimbangi oleh tingkat penghasilan masyarakat yang cukup.

Beberapa Permasalahan Ekonomi :

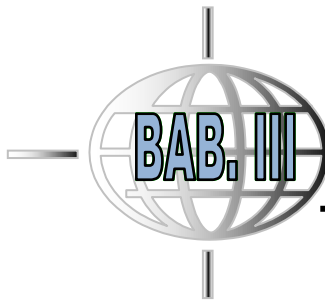
- Pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata;
- Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;
- Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah.
- Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi; Belum optimalnya kualitas pelayanan investasi;
- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal;

## **2.7. Infrastruktur dan Permukiman**

Dinamisnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Pontianak dituntut untuk dapat menghadirkan perubahan yang nyata dalam perkembangan Kota Pontianak, contohnya Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan daya dukung fisik, lingkungan, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni seperti :

- Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan,
- Pembangunan rumah tanpa izin seperti yang berada dibantaran sungai dan tanah negara.
- Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya system pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
  
- Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur

- Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal



## PROFIL KEMISKINAN DAERAH

### 3.1. KONSEP DAN DEFINISI KEMISKINAN

#### 3.1.1. Perspektif Kemiskinan

Konsep dan definisi kemiskinan merupakan titik tolak pembahasan yang penting, karena konsep kemiskinan melatarbelakangi pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kemiskinan dan pilihan indikator-indikator untuk memantau kondisi kemiskinan.

Pengertian dan definisi tentang kemiskinan sangat beragam sesuai evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Seorang ekonom akan mendefinisikan kemiskinan secara berbeda dengan ilmuwan lain; definisi seorang marxian akan berbeda dengan seorang weberian. Inilah fakta yang harus disadari sejak awal, bahwa definisi dari seorang teoretis mengandung paradigma atau ideologi tertentu sehingga tak ada kesempurnaan sejati, baik dalam hal konsep, pendekatan maupun modelnya. Namun demikian tidak berarti bahwa definisi, konsep dan model tersebut tidak ada gunanya, minimal menjadi sumber untuk memahami realitas dan bagaimana cara untuk menghadapi realitas kemiskinan.

Secara umum dapat kita kategorikan menjadi sepuluh pengertian yang meliputi:

- Kemiskinan dilihat dari hubungan dengan proses (alamiah vs ciptaan sosial atau ketersisihan)
- Kemiskinan sebagai gejala sosial (kultural vs struktural)
- kemiskinan ditandai oleh faktor ekonomis (kebutuhan dasar vs kebutuhan aktualisasi)
- kemiskinan dilihat dari bobot dan derajatnya (kronis, rentan dan sementara)
- Kemiskinan dipandang dari sudut penilai (subjektif vs objektif)
- Kemiskinan ditengarai sebagai gejala penilaian matematis (absolut vs relatif)
- Kemiskinan ditinjau dari geopolitik (keterisolasian vs keterbelakangan dan ketergantungan)
- Kemiskinan ditelaah dari aset (fenomena kehidupan vs hak dasar) Kemiskinan dalam perspektif ruang (lokal vs global)
- Kemiskinan secara individual (laki-laki vs perempuan; orang tua vs anak)

Dan mungkin lebih banyak lagi variannya bila kita karakteristikkan lebih rinci,



seperti kemiskinan berkaitan dengan kelembagaan, sejarah, dan nilai-nilai. Namun secara umum, kemiskinan biasa didefinisikan sebagai kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Definisi ini mengandung dua kata kunci, yaitu keterbatasan kemampuan dan hidup secara layak. Bentuk keterbatasan kemampuan sangat bervariasi, dan antara lain dapat berupa keterbatasan ketrampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi dan keterbatasan informasi. Sedangkan ukuran hidup secara layak akan sangat bervariasi tergantung pada norma dan kesepakatan sosial.

### **3.1.2. Pemahaman Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif.

Hall dan Midgley (2004:14), menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. John Friedman, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna (Friedmann, 1979: 101).

Pengertian kemiskinan memiliki dimensi meliputi ekonomi, sosial-budaya dan politik. Dimensi kemiskinan yang bersifat ekonomi memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dengan nilai uang meskipun harganya akan selalu berubah tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi.

Dimensi sosial dan budaya memandang kemiskinan sebagai pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan sebagainya. Dalam kategori ini, lapisan masyarakat miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan kemiskinan. Sedangkan dimensi politik melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidak

adanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka menyebabkan terhambatnya kelompok masyarakat memperjuangkan aspirasinya. Dimensi kemiskinan berimplikasi pada upaya untuk mendefinisikan kemiskinan, termasuk ukuran-ukuran yang digunakan. Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial 2 mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut :

“Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan *social*. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.”

*Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations* menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia. *Asian Development Bank – ADB (1999)* memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatan hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin.

Secara umum definisi-definisi tentang kemiskinan di atas menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan: “kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan”.

Berbagai pemikiran baru tentang kemiskinan yang memasukkan aspek ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan keterkucilan (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*) dan keamanan (*security*) muncul sebagai konsep yang banyak dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu juga dikembangkan pemahaman mengenai penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Ellis, 1998). Amartya Sen kemudian menekankan perlunya meningkatkan kemampuan individu yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan dalam masyarakat.

Belakangan juga dimasukkannya relasi gender dalam konsep kemiskinan. Akhirnya, pada 1990an konsep kemiskinan diperluas dengan munculnya gagasan mengenai kesejahteraan (*well-being*) dan ketertinggalan sosial (*social exclusion*). Oleh karenanya, untuk dapat memahami kemiskinan secara utuh diperlukan pemahaman mengenai seluruh dimensi kehidupan manusia. Sifat multidimensi dari kemiskinan inilah yang dicoba untuk ditangkap melalui berbagai macam konsep kemiskinan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pengertian kemiskinan telah melangkah ke arah hak asasi. GAPRI memandang kemiskinan sebagai sebuah pelanggaran hak asasi. Gagasan tersebut kemudian digunakan untuk mempengaruhi substansi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK, 2004), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

- **Kemiskinan Absolut, Relatif dan Struktural**

Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah itu merujuk pada *perbedaan sosial* (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah pada kemiskinan *absolut* ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan *angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan*, sementara pada kemiskinan *relatif*, kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan *perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk*. Kategori ini dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan konsumsi maupun kemiskinan keterbelakangan yang bersifat multidimensi.

Dalam kemiskinan absolut, standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan kebutuhan non-makanan tertentu; Tingkat pendidikan yang dianggap tertinggal ditetapkan berdasarkan kemampuan membaca/menulis (melek huruf) atau kelulusan dari sekolah dasar. Standar-standar ini tidak akan berubah meskipun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Standar kemiskinan absolute digunakan untuk menganalisis angka kemiskinan oleh dunia dengan menetapkan garis kemiskinan \$ 1 per orang per hari dan angka kemiskinan yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemiskinan relatif memandang kemiskinan berdasarkan kondisi riil tingkat kemakmuran masyarakat. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah; Keteringgalan pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.

**Garis Kemiskinan =**  $\frac{\text{Kontribusi Konsumsi 20\% Penduduk Pengeluaran Terendah}}{\text{Kontribusi Konsumsi 20\% Penduduk Pengeluaran Tertinggi}}$

Sstandar ini dapat berubah antar-waktu dan antar-tempat, sehingga seolah-olah kemiskinan akan selalu ada sepanjang waktu. Kemiskinan relatif dianggap sebagai alat penting untuk melihat isu ketimpangan yang sering mendapat sorotan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemiskinan absolut dapat dihapuskan, isu kemiskinan akan tetap disoroti jika standar hidup layak suatu masyarakat meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan.

- **Kemiskinan Objektif dan Subjektif**

Pendekatan objektif dan subjektif terhadap kemiskinan berkaitan erat dengan perkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris. Kemiskinan bersifat subjektif ketika standarnya ditekankan pada selera dan pilihan-pilihan seseorang atau sekelompok orang dalam menilai pentingnya barang-barang dan jasa bagi mereka. Sebagai pembanding adalah kemiskinan objektif yang melihat kemiskinan berdasarkan penilaian normatif secara umum tentang apa yang dianggap sebagai unsur-unsur kemiskinan dan apa yang dibutuhkan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi objektif ketika ditekankan pada kebutuhan untuk dapat memperbandingkan kondisi kemiskinan antar daerah, walaupun masyarakat di daerah-daerah tersebut mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Pendekatan ini banyak digunakan para ekonom, misalnya melalui pengukuran kebutuhan nutrisi (kalori) meskipun pilihan jenis-jenis makanan yang dianggap penting atau yang dinilai lebih berharga akan berbeda-beda antar individu atau antar kelompok masyarakat. Kemiskinan subjektif lebih menekankan pemahaman pada konsep kemiskinan dari sudut pandang masyarakat miskin. Perkembangan ini distimulasi ketakmampuan pendekatan objektif dalam menangkap fenomena kemiskinan

secara utuh. Pendekatan ini didukung oleh pengembangan analisis kemiskinan partisipatoris dimana kelompok miskin dilibatkan untuk menjawab dan menganalisis keadaannya sendiri, dan pada akhirnya untuk bersama-sama menentukan program penanggulangannya.

BPS menggunakan pendekatan objektif dengan menetapkan nilai uang untuk membeli makanan setara 2.100 dan satu set konsumsi non-makanan sebagai batasan garis kemiskinan. Untuk keperluan sensus, BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Penentuan kriterianya diukur melalui 14 indikator sebagai berikut:

- 1) Luas lantai < 8 m<sup>2</sup>;
- 2) Lantai rumah terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- 3) Dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
- 4) Tidak punya fasilitas buang air buang air besar atau bersama-sama dengan rumah lain;
- 5) Sumber penerangan rumah bukan listrik;
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) Hanya mengkonsumsi daging /susu/ayam satu kali dalam seminggu atau tidak pernah;
- 9) Hanya dapat membeli pakaian baru sebanyak satu kali dalam setahun atau tidak pernah;
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik pemerintah;
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah pertanian dengan luas tanah < 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan per bulan < Rp. 600.000,00;
- 13) Pendidikan kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD;
- 14) Tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual minimal Rp.500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Orang miskin dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan jumlah variabel yang terpenuhi :

1. Sangat miskin dari 14 variabel, 14 variabel terpenuhi;
2. Miskin dari 13 variabel, 11 variabel terpenuhi;
3. Hampir Miskin dari 10 variabel, 9 variabel terpenuhi;
4. Tidak Miskin dari 8 variabel, tidak ada yang terpenuhi;

▪ **Kemiskinan Sebagai Keterbelakangan Fisiologis dan Sosiologis**

Konsep kemiskinan sebagai keterbelakangan fisiologis menitikberatkan standar kemiskinan yang masih berbasis konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan konsumsi didasarkan pada kegagalan pemenuhan kebutuhan makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya (pakaian, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya). Konsep kemiskinan konsumsi melatarbelakangi munculnya kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, atau peningkatan produktivitas, serta kebijakan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang miskin, seperti subsidi harga barang kebutuhan pokok dan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan murah. Konsep kemiskinan yang mengacu pada kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar juga menyoroti tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Konsep ini cenderung mencetuskan upaya penyediaan pelayanan-pelayanan dasar yang murah dan terjangkau oleh penduduk miskin. Konsep ini beranjak dari pemikiran tentang ketimpangan struktural dan diskriminasi sebagai penyebabnya. Pemikiran ini dilandasi oleh kenyataan bahwa meskipun sumberdaya yang cukup besar telah disalurkan ke sektor-sektor yang didominasi masyarakat miskin, tetapi mereka tidak mendapat keuntungan dari sumberdaya tersebut karena adanya struktur yang menjadi penghalang. Penghalang utama berasal dari strukturkekuasaan dan tata pemerintahan, serta ketimpangan dan ketersisihan yang diciptakan melalui kebijakan ekonomi makro dan sistem distribusi. Konsep kemiskinan ini lebih dikenal sebagai konsep kemiskinan struktural yang cenderung mencetuskan perlunya perubahan-perubahan kebijakan dan struktur kekuasaan.

Konsep ini memandang sebagai kegagalan kapabilitas (*human capability approach*) menekankan peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Secara spesifik ini tidak hanya menyoroti kondisi keterbelakangan yang diderita masyarakat miskin, tetapi juga kurangnya peluang-peluang nyata akibat adanya hambatan sosial dan faktor-faktor individual. Dalam konsep ini pendapatan hanya merupakan salah satu komponen dari penguasaan sumber daya ekonomi. Komponen lainnya adalah penguasaan atas barang dan jasa yang

disediakan publik (pemerintah); akses terhadap sumber daya yang dimiliki atau dikelola komunal; dan penguasaan terhadap sumberdaya yang dapat disediakan melalui jaringan dukungan formal dan informal. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam menanggulangi kemiskinan, kebijakan harus diarahkan pada upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan masyarakat supaya tercipta peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Konsekuensi dari konsep ini mengarah pada upaya pemberdayaan, partisipasi dan penciptaan iklim yang kondusif akan menciptakan tantangan baru bagi strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satu tantangannya adalah belum adanya kesepakatan tentang bentuk pemberdayaan dan partisipasi yang ideal. Selain itu, isu-isu struktural seringkali dipandang mengaburkan permasalahan kemiskinan fisiologis yang ada. Oleh sebab itu, banyak pihak menyarankan untuk tidak mencampuradukkan kebijakan fisiologis dan kebijakan sosiologis dalam program pemberantasan kemiskinan.

- **Kemiskinan Sebagai Proses**

Syaifuddin (2007), membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut; dan, sebagai gejala relatif. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) struktural. Kemudian, bermula pada tahun 1990an, terjadi perkembangan baru dalam pendekatan terhadap kemiskinan, yakni memandang kemiskinan sebagai proses.

Pendekatan proses mengenai kemiskinan baru saja dikenal di Indonesia. Untuk sebagian besar, pendekatan yang digunakan di ruang ilmiah maupun praktis masih didominasi pendekatan kebudayaan dan struktural sebagaimana dibicarakan di atas. Kedudukan dan otoritas peneliti dan pemerintah dalam konteks praktis-dominan dalam pendekatan kebudayaan (lihat, Lewis 1961, 1966) dan structural (lihat, Valentine 1968) mengenai kemiskinan. Dengan kata lain, “orang miskin” dalam kedua model kemiskinan ini dilihat sebagai obyek, baik sebagai sasaran penelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan.

Dalam pendekatan proses, peneliti berupaya mengungkapkan kemiskinan menurut apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas empirik. Orang miskin diposisikan sebagai subyek yang berpikir dan bertindak, mengembangkan strategi-strategi dan kiat-kiat agar bertahan hidup.

Mengikuti cara berfikir proses tersebut, maka masalah penelitian ini adalah bahwa orang miskin, sebagaimana halnya orang yang tidak miskin, mengembangkan hubungan-hubungan sosial khusus di antara sesama orang miskin maupun orang-orang yang tidak miskin berdasarkan kompleks kepentingan satu sama lain, yakni mempertahankan hidup (dalam hal ini berarti memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasar). Asumsi adalah bahwa: *Pertama*, kompleks keterjalinan hubungan-hubungan sosial yang khas ini membangun suatu integrasi sosial orang-orang miskin dan tidak miskin sedemikian, sehingga batas-batas golongan miskin yang diasumsikan dalam pendekatan kebudayaan dan struktural di atas menjadi baur. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari hubungan-hubungan sosial yang khas tersebut, maka akumulasi totalitas hubungan sosial dan tindakan sosial yang terwujud berimplikasi mundurnya kondisi kehidupan perkotaan, karena hubungan-hubungan sosial yang tidak formal semakin penting, dan bahkan kadang-kadang lebih penting daripada aturan-aturan formal dalam menentukan arah tindakan.

❖ **Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan No. 12 Tahun 2012**

Definisi *miskin* menurut Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan No. 12 Tahun 2012 adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal. Sedangkan *kemiskinan* adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kriteria kemiskinan menurut Perda tahun 2012 No. 12 adalah sebagai berikut :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>;
- b. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
- c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lainnya;
- d. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- e. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai;
- f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu



- bakar/arang/minyak tanah;
- g. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
  - h. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
  - i. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
  - j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
  - k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Upah Minimum Kota;
  - l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
  - m. Tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai sesuai dengan nilai Rp.500.000,-seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya;
  - n. Memperkerjakan anak dibawah umur;
  - o. Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila memenuhi minimal 7 dari 15 kreteria sebagaimana tersebut diatas.

❖ **Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 146/HUK/2013**

Kreteria kemiskinan menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 146/HUK/2013 ada 2 :

1. Fakir miskin & orang tidak mampu yang teregister ;
  - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
  - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
  - d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
  - e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah,termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
  - g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau ksyu/semen/keramik

- dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia/ atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  - j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang; dan
  - k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung / air sungai / air hujan / lainnya.
2. Fakir miskin & orang tidak mampu yang belum teregister :
- a. Gelandangan
  - b. Pengemis
  - c. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil
  - d. Perempuan rawan sosial ekonomi
  - e. Korban tindak kekerasan
  - f. Pekerja migran bermasalah sosial
  - g. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
  - h. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial
  - i. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Masyarakat
  - j. Penderita Thalassaemia Mayor
  - k. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)

❖ **Kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011**

*Fakir Miskin* : Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian.

*Orang Tidak Mampu* : Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

### 3.1.3. Konsep dan Pengukuran Kemiskinan

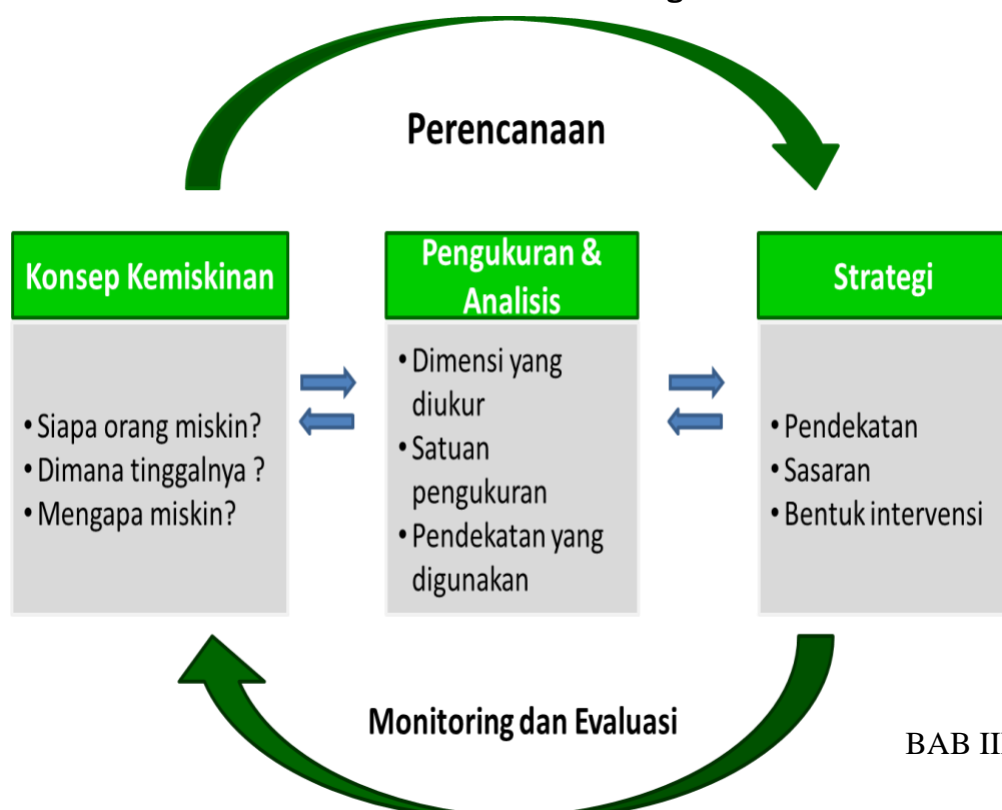
- **Ketimpangan (*Inequality*)**

Kemiskinan dan ketimpangan adalah konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di

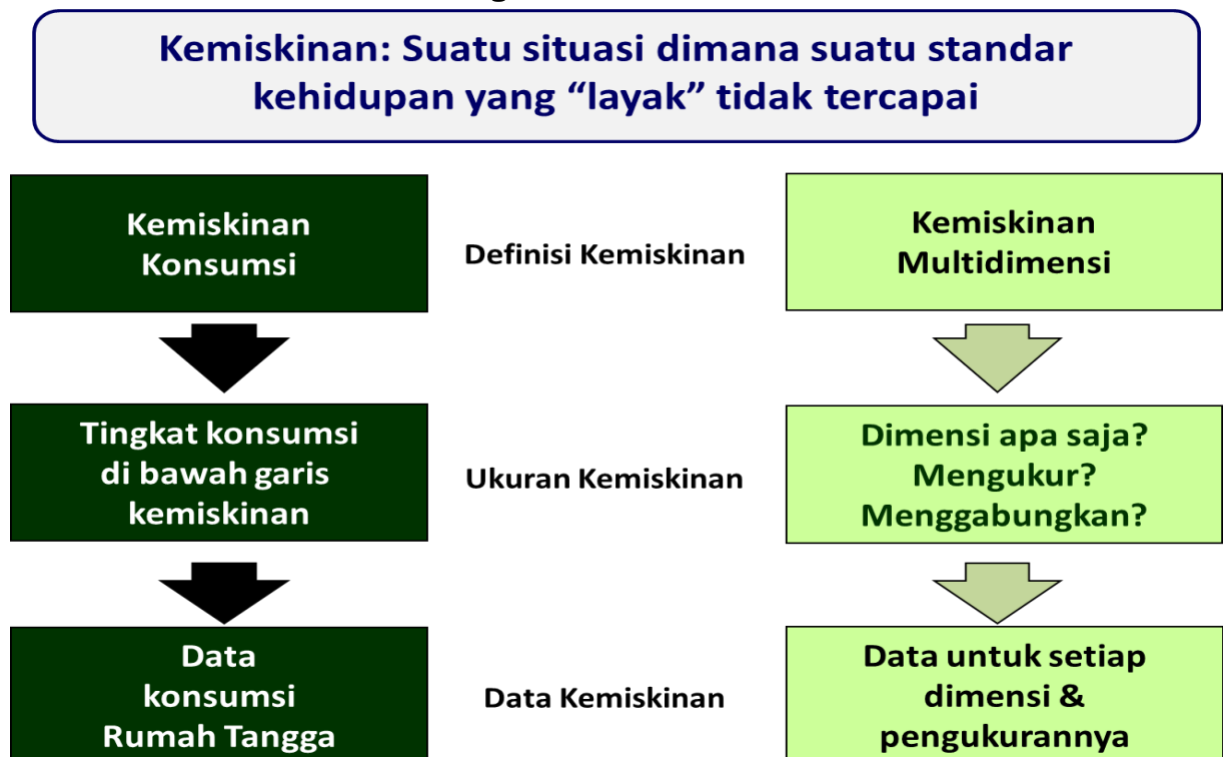
antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Penggabungan indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali diwujudkan dalam analisis dan menilai kemiskinan, misalnya berdasarkan kelompok, gender, wilayah, atau etnis. Penggabungan ini merupakan keniscayaan karena memang kemiskinan tidak berdiri sendiri. Mencermati ketimpangan pada gilirannya akan dapat memotret seberapa besar gap antara satu kelompok, wilayah, gender dengan kelompok lainnya. Hasil yang diperoleh dari analisis keduanya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. **Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Penghitungan kedalaman dan keparahan kemiskinan diperlukan karena ada beberapa program yang mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tetapi mengurangi kedalaman maupun keparahan kemiskinan. Sementara ukuran secara kualitatif ketika kaum miskin tidak lagi hidup seperti biasanya, misalnya terpaksa makan nasi aking, mendorong anaknya bekerja, dan lainnya. Penggabungan indikator kemiskinan dengan ukuran ketimpangan mempertajam dan memperkaya gambaran mengenai sebaran permasalahan kemiskinan, sekaligus perilaku kaum miskin itu sendiri.

**Gambar 3.1**  
**Perencanaan dan Monitoring**



**Gambar 3.2**  
**Bagan Kemiskinan**



- **Kerentanan (*Vulnerability*)**

Kemiskinan merupakan konsep yang selalu bergerak. Seseorang menjadi miskin sangat tergantung dari indikator yang ditetapkan, basis yang dimiliki dan kebijakan pemerintah. Secara ekonomis, kemiskinan memiliki garis yang dapat berubah kapan saja, dan kelompok masyarakat yang tingkat pengeluarannya berada di sekitar garis kemiskinan akan cenderung keluar-

masuk kategori miskin jika terjadi gejolak harga atau gejolak penghasilan. Kelompok ini ini biasanya disebut kemiskinan sementara (*transient*). Sementara masyarakat miskin yang lebih sering miskin dalam waktu yang lama dan mempunyai kecenderungan untuk dibawah garis tersebut disebut kemiskinan kronis. Adapun keluarga miskin yang sama sekali tidak pernah keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat lama disebut kemiskinan berkanjang (*persistently poor*). Keluar-masuknya kelompok sementara tersebut pada garis kemiskinan munculnya konsep kerentanan (*vulnerability*). Namun secara dominan kerentanan tersebut lebih didominasi faktor eksternal, terutama kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah misalnya menaikkan BBM jelas akan membuat kelompok sementara tersebut dapat menjadi miskin. Sementara yang sudah miskin akan bertambah menjadi miskin. Konsep kerentanan dilandasi bahwa guncangan ekonomi maupun non-ekonomi dapat memperparah permasalahan kemiskinan, misalnya krisis ekonomi. Kerentanan dapat diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam yang terjadi sesaat, seperti gunung meletus dan tsunami; gejolak alam yang bersifat musiman, seperti kekeringan, banjir atau datangnya ombak besar; gejolak ekonomi makro yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau naiknya hargaharga barang kebutuhan pokok; dan gangguan keamanan atau gejolak politik yang mengganggu kestabilan aktivitas kerja; serta kematian atau sakitnya anggota keluarga.

Kerentanan juga dapat disebabkan oleh faktor internal berupa kondisi kesehatan, pendidikan dan ketrampilan yang kurang memadai, ataupun perilaku dan kebiasaan yang cenderung mengakibatkan terjadinya kemiskinan seperti kebiasaan berjudi atau pola hidup yang terlalu konsumtif dan tidak adanya kebiasaan menabung. Namun, dominan hal tersebut disebabkan oleh pihak eksternal, terutama pemerintah.

Konsep kerentanan pada akhirnya harus dipahami oleh pemerintah, sehingga dalam pembuatan kebijakannya mendasarkan kondisi yang ada. Perhatian terhadap peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk guncangan mempengaruhi penyusunan kebijakan. Dalam kaitan dengan isu ketahanan pangan (*food security*), konsep kerentanan mengarahkan kebijakan ketahanan pangan agar tidak hanya memperhatikan masalah kekurangan gizi, tetapi juga pada ketersediaan pangan sepanjang musim atau peluang seseorang atau sekelompok orang untuk tidak mempunyai pangan yang mencukupi pada musim tertentu. Konsekuensi serupa juga dapat diaplikasikan pada isu-isu lainnya, seperti peluang putus sekolah, menderita penyakit atau tidak bekerja pada saat-saat tertentu.

Pemahaman tentang risiko dan kerentanan akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat rentan, dan membantu pemerintah menyusun kebijakan

yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan rendah dan mempunyai kerentanan yang tinggi akan cenderung mempertahankan tingkat kehidupan subsisten dengan tidak memanfaatkan peluang untuk melakukan kegiatan yang berorientasi pasar, yang cenderung lebih fluktuatif. Fenomena semacam ini seringkali membuat frustrasi pembuat kebijakan yang berupaya meningkatkan kegiatan ekonomi berupa peningkatan produksi yang berorientasi pasar. Dengan adanya pemahaman tentang persepsi masyarakat terhadap kerentanan, kebijakan peningkatan produksi akan menjadi lebih efektif dengan menanggulangi kerentanan endemis di kalangan masyarakat rentan. Fenomena semacam ini dapat lebih dipahami melalui analisis kualitatif.

Analisis kualitatif mampu menjawab variabel-variabel yang tidak mampu dijelaskan melalui analisis kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran yang representatif dan dapat digunakan untuk generalisasi karena ketepatannya dapat dihitung. Namun, ada variabel-variabel yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan tapi sulit dikuantifikasi (dengan menggunakan teknik-teknik statistik), misalnya: kultur/budaya, perilaku, identitas, persepsi, kepercayaan, nilai-nilai, *'trust and reciprocity'*. Kebijakan dan program untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan reproduktif perempuan misalnya, perlu memperhatikan hubungan jender dalam masyarakat dimana kebijakan dan program tersebut dilaksanakan. Jika dalam masyarakat tersebut suami (laki-laki secara umum) memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan baik dalam ranah domestik (rumah tangga) maupun dalam ranah publik maka para suami/bapak juga harus menjadi sasaran program tersebut. Dengan demikian penyuluhan tidak hanya dilakukan terhadap para istri/ibu tetapi juga harus dilakukan terhadap para suami/bapak sekalipun materinya bisa berbeda sesuai dengan strategi dan kebutuhan.

- **Ketersisihan (*Exclusion*)**

Konsep ketersisihan sosial mengacu pada berbagai norma dan proses yang menghalangi (tidak mengikutsertakan) seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara efektif dan sederajat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, kultural dan politik di masyarakat. Konsep ini pada awalnya tumbuh dari konteks *welfare state*. Di sini, ketersisihan sosial dikaitkan dengan kelompok yang tidak punya akses terhadap berbagai program perlindungan sosial (asuransi kesehatan, pensiun/ jaminan hari tua, subsidi pendidikan, asuransi kecelakaan kerja) dan pelayanan publik. Namun belakangan ini, konsep *social exclusion* sering digunakan secara lebih luas dengan mencakup juga ketersisihan dari berbagai institusi ekonomi, sosial dan politis. Oleh sebab itu, konsep ini berguna untuk memahami berbagai bentuk keterbatasan

(*deprivation*) yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap kelompok sosial tertentu.

Ketersingkirkan seseorang atau sekelompok orang atau setidaknya adanya perasaan bahwa seseorang atau sekelompok orang tidak diikutsertakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial menyebabkan terjadinya kondisi ketersisihan sosial. Ketersisihan dapat terjadi di sektor tenaga kerja, sistem pendidikan, dan berbagai macam pelayanan publik atau partisipasi politik. Bentuk dan alasan ketersisihan dapat dilatarbelakangi oleh faktor gender, umur, ras, agama, etnis, lokasi, pekerjaan, penyakit, atau hirarki sosial.

Hubungan antara kemiskinan dan ketersisihan sangat variatif tergantung bagaimana keduanya didefinisikan. Jika kemiskinan didefinisikan sebatas kemiskinan material atau keterbelakangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, maka ketersisihan berbeda dengan kemiskinan, meskipun ketersisihan dapat menjadi salah satu penyebab dan dampak yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Namun, jika kemiskinan didefinisikan sebagai kegagalan kapabilitas yang menekankan pada berbagai aspek kemampuan fisik, material, pengetahuan, dan sosial, maka ketersisihan merupakan salah satu unsur kemiskinan, karena ketersisihan mencerminkan keterbatasan kapabilitas untuk terlibat penuh dan memanfaatkan peluang yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pemahaman tentang fenomena ketersisihan sangat penting dalam analisis kemiskinan karena peranannya dalam memperlihatkan bagaimana relasi dan interaksi akan mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pengaruh relasi dan interaksi ini tidak akan mampu ditangkap dari analisis yang hanya melihat kondisi keterbelakangan materi atau pemenuhan kebutuhan dasar semata. Pemahaman tentang relasi dan interaksi yang banyak digali dari analisis kualitatif ini banyak dipromosikan sebagai masukan yang sangat berharga dalam penyusunan kebijakan agar mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang lebih banyak terkait dengan kemiskinan dari sudut pandang sosiologis.

- **Budaya Kemiskinan (*Poverty Culture*)**

Oscar Lewis, mengembangkan konsep 'budaya kemiskinan' pada tahun 1959. Ia adalah ahli antropologi, yang melakukan penelitian di komunitas *slum* di Meksiko. Konsep ini menjelaskan bahwa kelompok miskin cenderung mengembangkan 'budaya kemiskinan' untuk melindungi diri dari ideology akumulasi yang umumnya dianut oleh kelompok kelas menengah dan atas. Orang-orang yang terjerat kemiskinan dari generasi ke generasi tahu bahwa mereka hanya memiliki posisi pinggiran (*marginal*) dalam masyarakat yang individualistis dan terkotak-kotak dalam jenjang sosial. Kelompok miskin juga

tahu bahwa masyarakat luas tidak menawarkan prospek kepada mereka untuk menaikkan posisi sosialekonomi. Untuk bertahan hidup, kelompok miskin mengembangkan strategi tersendiri karena masyarakat luas cenderung mengabaikan mereka. Strategi ini berupa seperangkat nilai, norma, pola perilaku yang berbeda dengan pola yang diikuti secara luas. Dalam pandangan Lewis, sekali budaya kemiskinan berkembang maka budaya itu akan berulang dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Konsep budaya kemiskinan telah diperdebatkan secara panjang lebar selama beberapa dekade. Dalam pandangan Lewis, kultur kemiskinan bukanlah sesuatu yang telah ada secara intrinsik pada masyarakat miskin, melainkan suatu bentuk adaptasi yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu (yaitu kemiskinan yang parah dan lama). Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa adaptasi ini tampaknya bisa memecahkan masalah dalam jangka waktu pendek tapi justru merugikan dalam jangka waktu panjang. Ini dapat menyebabkan orang terjatuh ke kemiskinan. Saat adaptasi itu disosialisasikan pada generasi berikutnya, maka mereka mendapat transfer minus (yaitu belajar strategi bertahan hidup yang tidak bisa membantu keluar dari kemiskinan).

- **Jenis Kelamin (*Gender*)**

Konsep gender mengacu pada hal-hal yang lebih luas dan kompleks dari sekedar perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan). Konsep ini berusaha mengangkat berbagai *pembedaan* yang dikaitkan dengan bagaimana menjadi ‘lakilaki’ dan ‘perempuan’ baik di ranah publik maupun ranah domestik, dalam suatu konteks sosial, ekonomis, politis dan kultural tertentu. Pembedaan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk dilakukan dengan berbagai cara dan diterapkan oleh berbagai institusi sosial. Berbagai literatur kemiskinan berargumen bahwa perempuan cenderung lebih terpuruk dalam kemiskinan dibanding laki-laki. Dalam perdebatan ini muncul konsep ‘feminisasi kemiskinan’ (*feminization of poverty*) yang berisi berbagai pemikiran dimana perempuan lebih sering mengalami kemiskinan lebih parah dari pada oleh laki-laki.

- **Adaptasi dan Modal Sosial (*Social capital & adaptation*)**

Konsep adaptasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang menempatkan manusia sebagai pelaku berupaya mencapai tujuan-tujuannya atau kebutuhankebutuhannya, untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Sedang dalam proses adaptasi atau untuk mencapai tujuan dan kebutuhan secara individu atau kelompok, ia dapat memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber sosial, material, teknologi serta pengetahuan kebudayaan yang dimiliki. Cara-cara yang dipilih



biasanya mengadakan hubungan-hubungan sosial baik dengan pihak-pihak yang berada di dalam maupun di luar komunitas. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dikenal dengan modal sosial.

Putnam (1993:167) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan ('trust'), aturan-aturan ('norms') dan jaringan-jaringan kerja ('networks') yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putman bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga.

Menurut Tonkiss (2000) bahwa modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. Lebih jauh, Tonkiss mengatakan pula bahwa pada kenyataannya, jaringan sosial tidaklah begitu saja menciptakan modal fisik dan modal finansial yang belum pernah ada. Biasanya penduduk miskin memiliki pertalian-pertalian sosial yang kuat, namun ini terisolasi dari jaringan ekonomi dan sosial yang mendominasi (*mainstream*). Maka, dalam hal ini, "jaringan kemiskinan" tidaklah menunjuk kepada tiadanya atau lemahnya jaringan-jaringan sosial, melainkan karena menunjuk kepada sulitnya untuk mengakses peluang dan sumber daya melalui jaringan-jaringan yang ada.

- **Derajat Kemiskinan (*Poverty degree*)**

Pada saat tertentu kondisi kemiskinan seseorang dapat berubah dari 0° menjadi 180°. Situasi paling ringan disebut sebagai kemiskinan potensial (*potential poor*) atau hampir miskin (*near poor*). Sementara itu orang yang tengah mengalami kemiskinan ada dua macam: *pertama*, mereka mengalami kemiskinan untuk sementara waktu karena kondisi eksternal yang membawanya ke situasi seperti itu (kemiskinan sementara). *Kedua*, mereka mengalami dalam waktu yang lama dan sulit diubah ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (kemiskinan kronis). Kemiskinan potensial (*potential poor*), yaitu orang yang pendapatannya berada sedikit di garis kemiskinan dan tidak melakukan investasi yang memadai, sehingga sedikit saja goncangan eksternal membuat mereka kehilangan pekerjaan atau berkurang perolehan pendapatannya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang lebih buruk. Orang yang berada pada situasi pendapatan seperti ini disebut hamper miskin (*near poor*). Potensi menjadi miskin rentan terjadi pada mereka yang memiliki latar pendidikan rendah, ketrampilan kerja terbatas, atau kemampuan inovasi atau produksi yang juga terbatas. Potensi menjadi miskin bisa juga berasal dari factor-faktor eksternal,

seperti tempat tinggal yang rentan terhadap bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, badai tsunami, dan sebagainya). Tatanan sosial yang rusak sehingga rentan mengalami konflik horisontal juga dapat menjadi potensi untuk terjadinya kemiskinan yang lebih buruk.

Kebijakan politik dan ekonomi yang mengguncang keamanan sekaligus berpengaruh pada menurunnya atau bahkan hilangnya pekerjaan (PHK, bangkrut, menurunnya produksi dan pendapatan). Kebijakan perusahaan dalam hubungan kerja kontraktual yang tidak setara, bencana alam yang datangnya tak diduga-duga dan secara langsung menghilangkan pekerjaannya, konflik sosial politik, dan kondisi kesehatan manusia yang semakin menurun, di tengah tiadanya jaminan sosial yang memadai bagi keberlangsungan kehidupan seseorang/keluarga, menjadi faktor-faktor krusial yang membuat seseorang atau keluarga rentan terhadap kemiskinan.

Kerentanan kemiskinan mengancam rakyat miskin karena ketidakjelasan sistem dan kondisi yang tidak memihak kepada rakyat miskin. Tidak adanya jaminan sosial yang memadai atau adanya sistem kontrak kerja yang ditentukan sepihak oleh pemilik lapangan kerja/pemilik modal dimana pekerja tak memiliki posisi tawar setara di hadapan majikannya (atau dengan kata lain tetap berlangsung pola hubungan buruh majikan yang tidak setara sehingga setiap saat buruh terancam di-PHK. Krisis ekonomi yang berkepanjangan berakibat buruk pada ketersediaan lapangan kerja dan pada gilirannya akan menciptakan kerentanan penduduk untuk menjadi miskin.

Kemiskinan sementara (*transient poverty*), adalah kemiskinan yang terjadi dalam waktu relatif sementara. Kemiskinan ini dialami oleh orang (keluarga) yang sebelumnya tidak miskin, tetapi karena kondisi eksternal tertentu (perang, konflik horisonatal dalam masyarakat, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya), orang atau keluarga tersebut jatuh miskin. Mereka mungkin mempunyai latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang cukup memadai, atau memiliki etos kerja dan daya inovasi yang tinggi. Orang atau keluarga seperti ini dengan mudah dapat terbebas dari situasi miskin jika kondisi eksternal berubah ke arah yang lebih positif. Kemiskinan kronis (*chronic poverty*). Kemiskinan dapat berlangsung secara terus-menerus, atau lebih bersifat permanen. Di sini orang lahir dari keluarga miskin, hidup di masyarakat miskin, mungkin dengan kultur kemiskinan (fatalisme), atau tinggal di tempat yang tidak menguntungkan (tanah tandus, miskin sumber daya alam, terisolasi secara spasial), sehingga sedikit kesempatan tersedia baginya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan kronis dapat diperparah oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin atau daerah tertinggal, atau oleh sistem pasar yang tidak memberi ruang bagi mereka untuk masuk sebagai tenaga kerja atau untuk menjual produk-produk mereka karena

tidak bisa bersaing dengan produk-produk lain di pasar bebas.

- **Pengukuran Kemiskinan (*Poverty measurement*)**

Ukuran kemiskinan menjadi sangat penting. Selain untuk mengetahui tingkat kemiskinan, status kemiskinan suatu keluarga juga memiliki berbagai fungsi. *Pertama*, sebagai alat penargetan program-program penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, sebagai alat untuk mengukur dampak suatu program penanggulangan kemiskinan. Jenis data yang dibutuhkan untuk ketiga jenis tujuan pengukuran kemiskinan di atas dapat berbeda, meskipun seluruhnya membutuhkan data pada tingkat keluarga dan/atau lingkungan. Selain itu, data yang dikumpulkan juga dapat berbeda menurut jenis metode pengukuran yang dipilih. Jika ragam pandang di atas diterjemahkan ke dalam indikator dan instrumen, maka dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni model matematis-statistik yang lebih bersifat kuantitatif dan model analitis yang lebih bersifat kualitatif.

- 1) **Model Matematis-Statistik**

Awalnya kemiskinan hanya diukur dari aspek makanan atau konsumsi, dimana seseorang dikatakan miskin bila makanannya tidak memenuhi criteria minimum yang dibutuhkan. Jumlah pemenuhan kebutuhan pangan yang minimum ini disebut garis kemiskinan. Kemudian bukan sekadar makanan, melainkan pada keperluan hidup lainnya, yang kemudian pada tahun 70-an berkembang dengan pengukuran kebutuhan dasar yang terdiri dari makanan dan non makanan. Jadi kemiskinan dipandang sebagai persoalan konsumsi atau ekonomis semata. Sayogyo misalnya, pada pertengahan tahun 70-an menggunakan metode daya beli beras untuk menghitung kemiskinan berdasarkan dugaan pengukuran pendapatan. Konsumsi beras merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kekayaan rumah tangga. Perbedaan desa-kota dilakukan dengan mendorong garis kemiskinan ke atas sebesar 50%. Berdasarkan metode itu kemiskinan rumah tangga dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: i) sangat miskin, yaitu rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan di bawah nilai 240 kg beras untuk pedesaan dan 480 kg beras untuk perkotaan, ii) miskin, yaitu rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan di bawah nilai 320 kg beras untuk pedesaan dan 480 kg beras untuk perkotaan, iii) hampir miskin, yaitu rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan dengan nilai antara 320-480 kg beras untuk pedesaan dan 480-720 kg beras untuk perkotaan, iv) tidak miskin, yaitu rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan di atas nilai 480 kg beras untuk pedesaan dan 720 kg

beras untuk perkotaan.

Sementara Badan Pusat Statistik menggunakan metode objektif untuk mengukur kemiskinan dengan mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Garis kemiskinan BPS dibentuk oleh sejumlah rupiah untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kalori perkapita per hari ditambah dengan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Dalam menghitung garis kemiskinan, BPS menggunakan sumber data Modul Konsumsi Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis kemiskinan yang dihasilkan mencakup garis kemiskinan nasional, provinsi, perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan Kabupaten/Kota dikembangkan dari garis kemiskinan propinsi.

Sedangkan Bank Dunia (IBRD), merilis garis kemiskinan setara dengan US \$ 1 dan US \$ 2 berdasar PPP. Kemudian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan ukuran dalam program-program peningkatan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan kriteria yang dikembangkan BKKBN terdapat empat katogori keluarga, yaitu keluarga prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera 3 plus. Kategori keluarga pra-sejahtera atau kelompok miskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yang secara operasional tidak mampu memenuhi salah satu dari indicator sebagai berikut: (a) menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, (b) makan minimal dua kali sehari, (c) pakaian lebih dari satu pasang, (d) sebagain besar lantai rumah tidak dari tanah, dan (e) jika sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengukuran kemiskinan kemudian dikembangkan lebih maju. Bila sebelumnya hanya bertumpu pada garis kemiskinan, pengukuran lainnya menggunakan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan atau P1 dan P2. Tidak puas dengan pendekatan yang sudah ada, karena ternyata realitas kemiskinan masih lebih kompleks dari ukuran tersebut, UNDP, pada tahun 1990an, dengan mempertimbangkan gagasan yang berkembang tentang kemiskinan menciptakan model Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya mengukur standar pendapatan, harapan hidup dan melek huruf. Kemudian IPM disempurnakan dengan mengubah indikator IPM itu sendiri dan memasukkan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), dan Indeks Pembangunan Gender yang sampai saat ini digunakan sebagai standar untuk mengukur kemajuan tingkat kesejahteraan dalam bentuk peringkat, baik pemda maupun antar bangsa. IKM merupakan indeks komposit yang mengukur

keterbelakangan dalam tiga dimensi yaitu lamanya hidup yang memiliki indikator penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang, pengetahuan yang memiliki indikator ketertinggalan dalam pendidikan, dan standar hidup layak yang memiliki indikator keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Indikator pertama diukur dengan peluang populasi untuk tidak bertahan kurang dari 40 tahun, sedangkan indikator kedua adalah angka buta huruf dewasa atau penduduk usia 15 tahun ke atas. Adapun keterbatasan akses pelayanan dasar diukur dengan persentase penduduk tanpa akses air bersih, penduduk yang tidak memiliki akses ke sarana pedesaan dan persentase balita yang tergolong dalam status gizi rendah dan menengah.

## 2) Analisis Kualitatif

Pendekatan kualitatif dalam kajian kemiskinan adalah pendekatan untuk menggali pendapat masyarakat (subjektif), termasuk kelompok miskin, mengenai kemiskinan, aspek-aspek sosial dari perilaku dan pengalaman kelompok miskin, dan mengetahui secara mendalam gaya hidup komunitas dan pengalaman yang berarti pada kelompok tersebut. Pendekatan ini secara umum digunakan untuk mencari jawaban tentang *how*-bagaimana dan *why*-mengapa. Pendekatan yang sering digunakan para ahli sosial dan antropologi ini merupakan pendekatan aras mikro, yaitu pada wilayah terbatas, namun mendalam.

Analisis kualitatif sangat kaya dengan variabel indikator karena bertolak dari individual dan kelompok beserta lapisan-lapisan relasinya, misalnya dalam relasi antar individual, keluarga ataupun hubungan produksi. Sebagai sebuah system kehidupan, analisis ini setidaknya akan menyangkut struktur, fungsi dan formasi masyarakat dalam kaitannya dengan kuasa dan kontrol dalam keluarga atau rumah tangga, serta dalam dinamika harmoni atau konflik. Analisis ini biasanya mengedepankan citra lokal yang kuat dan bercorak spesifik pada komunitas tertentu.

Dalam analisis kualitatif ada beberapa teknik analisis yang dapat dilakukan, diantara, yaitu: i) pemeringkatan (ranking, scoring), yaitu penilaian berdasarkan nilai tertentu, misalnya peringkat kesejahteraan (*wealth ranking*) merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi dan melakukan pemilahan rumah tangga di suatu komunitas ke dalam jenjang-jenjang berdasar aset atau kekayaannya.

Dalam Kajian Kemiskinan Partisipatif, pemeringkatan ini adalah upaya untuk menggali kategori-kategori yang sesuai dengan pemahaman lokal.

Pemeringkatan misalnya besarnya kekayaan, tingkat kesejahteraan, prioritas, pilihan/ preferensi; ii) qualitative coding, yaitu prosedur pemilahan (klasifikasi) data atau informasi ke dalam suatu kode yang umumnya berupa tema/topik/isu/kategori tertentu. Sekumpulan informasi tersebut bisa berbentuk rekaman video observasi, rekaman wawancara, transkrip wawancara, gambar/foto, atau benda-benda lain yang bisa diinterpretasikan; iii) matriks hubungan (aktifitas, sumberdaya, akses, pengaruh, kontrol), yaitu beberapa kolom yang mencoba memotret hubungan antara satu bagian dengan bagian lain yang berhubungan dengan kaum miskin; iv) diagram hubungan, lebih banyak dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain. Perlu ditegaskan bahwa hubungan dalam diagram tidak selalu sebab akibat, tetapi terkadang bersama, timbal-balik.

#### 3.1.4. Indikator Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan dan kebijakan di Indonesia belum banyak menggunakan kajian yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan data dengan cakupan sampel yang memadai yang memuat informasi cukup komprehensif tentang kemiskinan dan faktor-faktor penentunya. Kompleksitas dinamika kemiskinan di negara dengan keragaman sosialbudaya dan ekonomi seperti Indonesia, di satu sisi, faktor-faktor sosial dan ekonomi yang terukur, seperti ukuran keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan, status pekerjaan, akses terhadap air bersih, sanitasi dan listrik, serta kualitas bangunan tempat tinggal memungkinkan untuk dihitung derajat hubungan kausalnya dengan kemiskinan, sebaliknya, faktor-faktor sosial-budaya seperti norma tradisional yang berlaku di suatu komunitas tentang kebersamaan dalam hidup senang dan susah (*shared poverty*), nilai ekonomi anak, modal sosial untuk kesejahteraan bersama sangat sulit diukur dampaknya secara kuantitatif terhadap perbedaan tingkat kemiskinan antar komunitas atau wilayah. Namun demikian, untuk kepentingan keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan perlu ditentukan indikator utama dan indikator pendukungnya. **Indikator utama** adalah indikator yang menggambarkan capaian (*outcome*) pembangunan. Umumnya, indikator ini mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program pembangunan.

**Indikator Pendukung** adalah Indikator yang mencerminkan faktor penyebab atau determinan dari capaian indikator utama disebut sebagai indikator pendukung. Artinya, indikator pendukung adalah indikator yang dapat diintervensi oleh program kebijakan tertentu untuk menghasilkan capaian berupa perbaikan pada indikator utama. Di setiap bidang, indikator pendukung harus dipilih sedemikian rupa sehingga mencerminkan kondisi daerah itu sendiri.

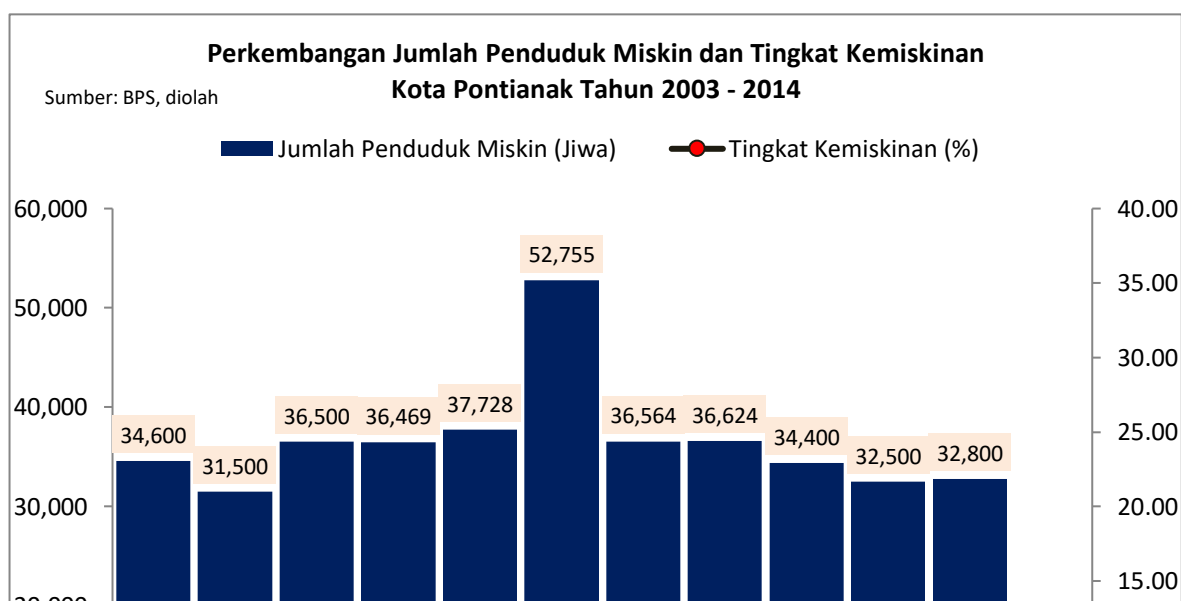
Tabel 3.1  
Indikator Penanggulangan Kemiskinan

Bidang	Indikator Utama
<b>Kemiskinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kemiskinan</li> <li>▪ Indeks kedalaman kemiskinan</li> <li>▪ Indeks keparahan kemiskinan</li> <li>▪ Tingkat pengangguran</li> </ul>
<b>Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka Kematian Bayi</li> <li>▪ Angka Kematian Balita</li> <li>▪ Angka kematian ibu melahirkan</li> <li>▪ Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih</li> <li>▪ Prevalensi balita kekurangan gizi</li> </ul>
<b>Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka partisipasi kasar</li> <li>▪ Angka partisipasi murni</li> <li>▪ Angka melek huruf</li> <li>▪ Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun</li> </ul>
<b>Infrastruktur Dasar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akses sanitasi layak</li> <li>▪ Akses air minum layak</li> <li>▪ Rasio elektrifikasi</li> </ul>
<b>Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat inflasi</li> <li>▪ Pertumbuhan ekonomi daerah</li> <li>▪ Ketahanan pangan</li> </ul>

### 3.2. KONDISI UMUM KEMISKINAN

#### 3.2.1 Jumlah Kemiskinan Antar Waktu dan Antar Wilayah

Grafik 3.2.1



Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2013 sebesar **32.800** jiwa atau 5,56%. Periode kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai sebesar **52.800** jiwa atau 9,29%. Perkembangan jumlah penduduk miskin lima tahun terakhir selanjutnya menunjukkan *trend* positif yakni terjadi penurunan namun relatif kecil, dari tahun 2009 sampai tahun 2013 hanya sebesar 3.780 jiwa dan penurunan persentasenya hanya 0,82%,

Sebaran jumlah penduduk miskin sangat ditentukan oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 untuk Provinsi Kalimantan Barat sebesar 355.700 jiwa terjadi kenaikan jumlah sebesar 51.600 jiwa dari pada tahun 2011 sehingga total jiwa miskin sebesar 407,300 Jiwa. Sedangkan untuk Kota Pontianak berjumlah sebesar 32.535 jiwa pada tahun 2012 dan bertambah sebesar 265 jiwa pada tahun 2013 sehingga total jiwa miskin sebesar 32.800 jiwa

**Tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 s/d 2014**

KOTA / KABUPATEN	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	%	Pddk Miskin x1.000	%	Pddk Miskin x1.000	%	Pddk Miskin x1.000	%	Pddk Miskin x1.000	%	Pddk Miskin x1.000	%	Pddk Miskin x1.000
01. Sambas	9,96	53,82	10,08	50,00	9,38	46.980	8,88	44,450	9,90	51,2	9,20	
02. Bengkayang	7,82	17,89	7,82	16,80	7,25	15.785	6,74	14,943	8,01	18,4	7,35	
03. Landak	15,48	55,83	14,06	46,50	13,13	43.691	12,41	41,331	14,18	49,5	13,03	
04. Pontianak	5,46	13,10	6,41	15,00	5,97	14.094	5,64	13,334	6,30	15,6	5,83	
05. Sanggau	4,62	19,86	5,02	20,50	4,67	19.262	4,4	18,254	4,71	20,4	4,35	
06. Ketapang	13,08	59,56	13,67	58,50	12,75	54.966	11,91	52,017	12,85	58,8	11,85	
07. Sintang	11,55	46,95	9,76	35,50	9,07	33.356	8,55	31,589	10,09	39,0	9,30	



08. Kapuas Hulu	9,93	24,09	11,39	25,30	10,61	23.772	9,95	22,509	11,11	26,4	10,25	
09. Sekadau	6,42	12,62	6,77	12,20	6,30	11.557	5,93	10,971	6,93	13,2	6,44	
10. Melawi	12,62	23,54	13,77	24,70	12,93	23.302	12,1	22,036	13,70	26,0	12,67	
11. Kayong Utara	12,43	12,50	11,69	11,20	10,91	10.523	10,16	9,931	10,87	11,1	9,75	
12. Kubu Raya	6,78	37,09	7,14	35,90	6,67	33.731	6,27	31,871	6,04	32,1	5,57	
13. Kota Pontianak	6,38	36,56	6,62	36,60	6,15	34.389	5,77	32,535	5,56	32,8	5,13	
14. Kota Singkawang	6,20	11,99	6,12	11,40	5,69	10.711	5,32	10,119	6,50	13,0	6,01	
<b>KAL BAR</b>	<b>9,05</b>	<b>425,39</b>	<b>9,30</b>	<b>400,10</b>	<b>8,48</b>	<b>376.120</b>	<b>7,96</b>	<b>355,700</b>	<b>8,74</b>	<b>407,3</b>	<b>8,07</b>	<b>381,92</b>

Sumber : BPS Kalimantan Barat

### 3.2.2 Garis Kemiskinan

Tabel 3.2.2

Kondisi dan Indikator Kemiskinan di Kota Pontianak Tahun 2003-2014

Tahun	Penduduk Miskin (000)	Prosentase (%)	Indeks Kedalaman (P1)	IndeksKeparahan (P2)	GarisKemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
2003	34,60	7,17	0,97	0,19	119.606
2004	31,50	6,47	0,83	0,16	160.881
2005	36,50	6,84	1,29	0,33	143.802
2006	36,50	7,15	1,05	0,30	158.130
2007	37,70	6,77	0,57	0,13	169.342
2008	52,80	9,29	1,94	0,64	193.984
2009	36,56	6,38	1,15	0,39	218.802
2010	36,60	6,62	1,26	0,33	242.772
2011	34,39	6,15	0,84	0,20	253.357
2012	32,53	5,77	0,66	0,14	310.707
2013	32,80	5,56	0,83	0,18	341.422
2014		5,13			

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan garis kemiskinan ini kemudian akan diukur berapa banyak penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar nilai tersebut. Perbandingan dalam persentase antara jumlah penduduk yang pengeluarannya berada dibawah GK terhadap jumlah keseluruhan penduduk disebut sebagai Tingkat Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2013 sebesar Rp./Kap/Bulan 341.422, dilihat dari perkembangan selama 10 tahun terakhir Garis Kemiskinan Kota Pontianak terus meningkat, dimana pada tahun 2003 hanya sebesar Rp./Kap/Bulan 119.606, atau meningkatnya sebesar 285%

### 3.2.3. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Wilayah di Kalbar

Jika dilihat lebih jauh kelevel kabupaten, maka akan diperoleh gambaran bahwa angka capaian prestasi Tingkat kemiskinan kecil oleh provinsi tidak diikuti capaian yang baik oleh semua kabupaten.

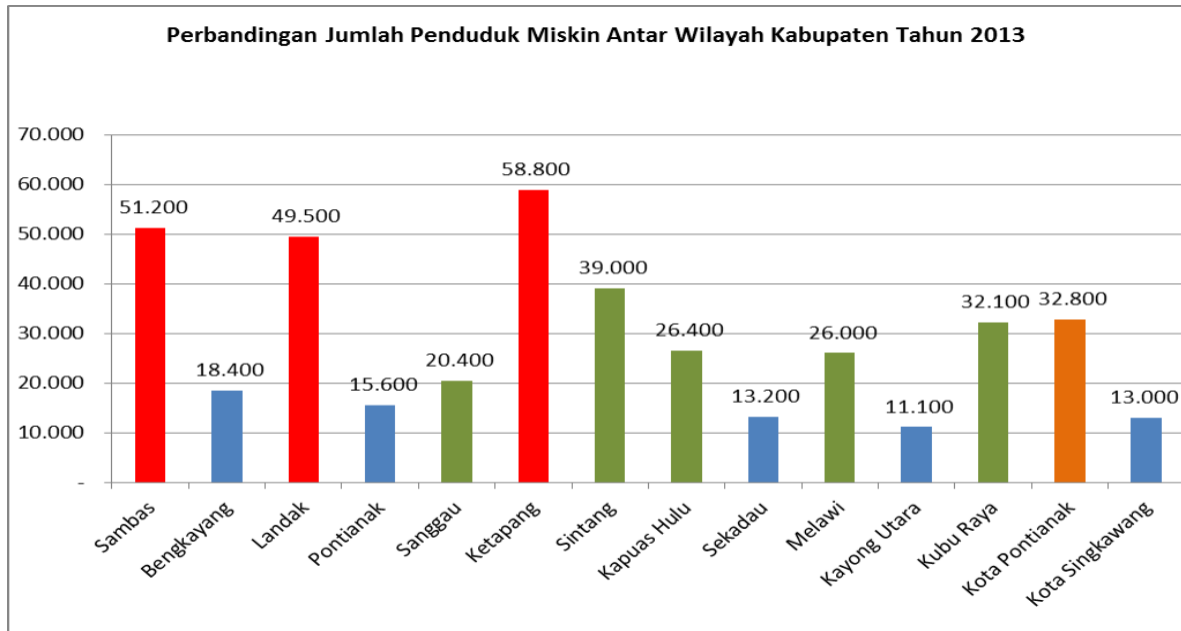
Data statistik terakhir pada tahun 2013 menunjukkan tingkat kemiskinan terendah dicapai oleh Kabupaten Sanggau dengan kisaran 4,71% dan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Landak dengan angka mencapai 14,18%. Angka ini cukup besar mengingat nilainya 3 kali lipat dari nilai pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah dan masih lebih besar dari tingkat kemiskinan Provinsi yaitu sebesar 8,74%, Untuk Kota Pontianak sebesar 5,56%

**Tabel 3.2.3 Tingkat Kemiskinan Kalimantan Barat Tahun 2008 s/d 2014**

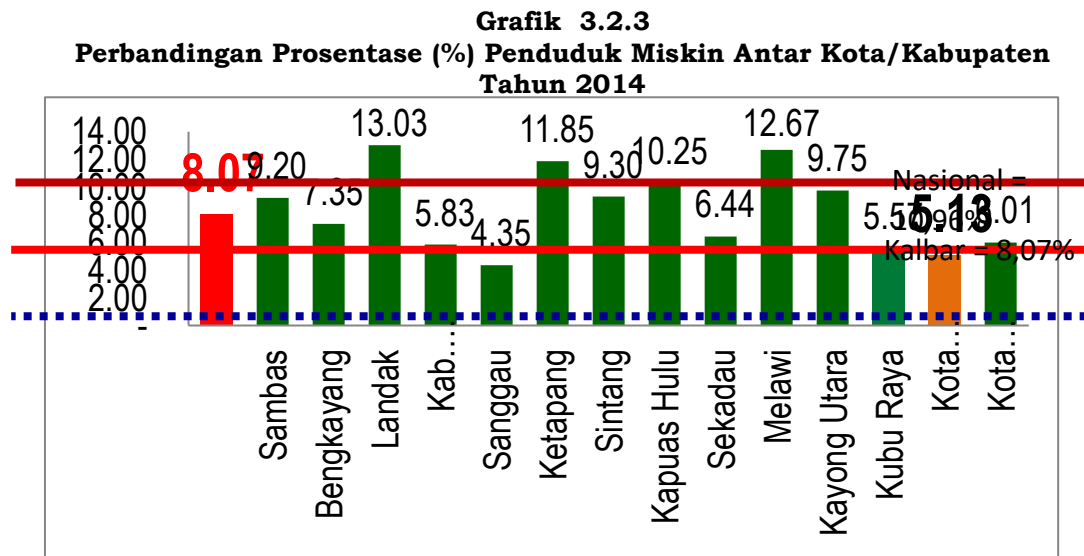
Kode	Provinsi	AngkaKemiskinan (%)							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Mar 2015
	<b>INDONESIA</b>	15,4	14,2	13,3	12,4	11,7	11,37	10,96	11,22
<b>6100</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	11,07	9,30	9,02	8,48	7,96	8,74	8,07	8,03
6101	Sambas	11.51	9.96	10.08	9,38	8,87	9,90	9,20	
6102	Bengkayang	9.41	7.82	7.82	7,25	6,74	8,01	7,35	
6103	Landak	18.65	15.48	14.06	13,1	12,4	14,18	13,03	
6104	Pontianak	7.81	5.46	6.41	5,97	5,64	6,30	5,83	
6105	Sanggau	6.25	4.62	5.02	4,67	4,4	4,71	4,35	
6106	Ketapang	15.21	13.08	13.67	12,8	11,9	12,85	11,85	
6107	Sintang	13.61	11.55	9.76	9,07	8,56	10,09	9,30	
6108	Kapuas Hulu	11.44	9.93	11.39	10,6	9,95	11,11	10,25	
6109	Sekadau	7.66	6.42	6.77	6,3	5,93	6,93	6,44	
6110	Melawi	14.80	12.62	13.77	12,9	12,1	13,70	12,67	
6111	Kayong Utara	14.50	12.43	11.69	10,9	10,2	10,87	9,75	
6112	Kubu Raya	---	6.78	7.14	6,67	6,27	6,04	5,57	
6171	Kota Pontianak	9.29	6.38	6.62	6,15	5,77	5,56	5,13	
6172	Kota Singkawang	7.89	6.20	6.12	5,69	5,32	6,50	6,01	

Sumber: Susenas (BPS Prov. Kalbar)

Grafik 3.2.2



Jumlah Penduduk miskin Tahun 2013 di Kota Pontianak sebesar 32.800 Jiwa, dan yang paling tinggi di kabupaten Ketapang hampir 2 kali lipat dari jumlah jiwa miskin di kota Pontianak yaitu sebesar 58.800 jiwa.



**3.2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Capaian indikator Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pontianak cenderung membaik akan tetapi P1 meningkat dari 0,66 tahun

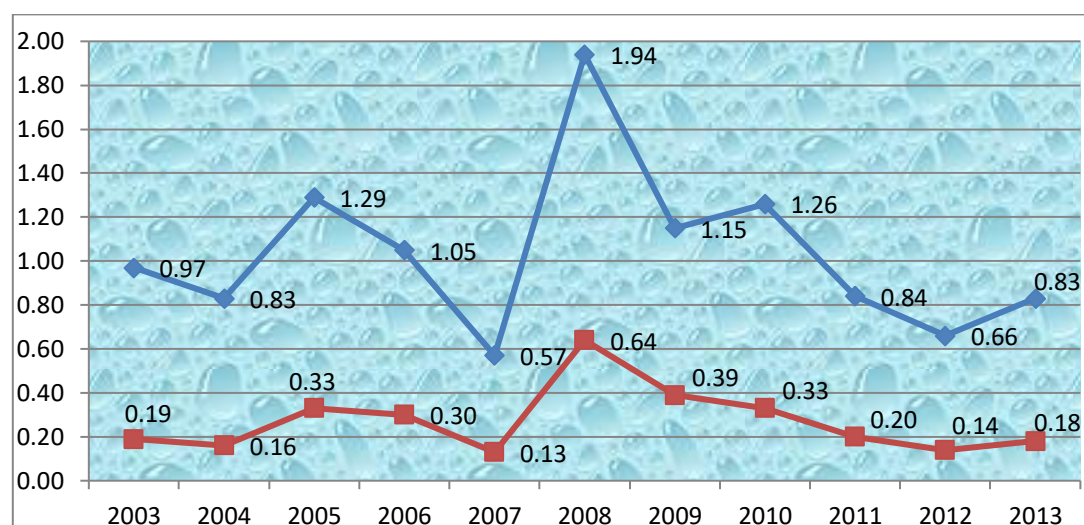
2012 menjadi 0,83 pada tahun 2013, demikian juga dengan P2 mengalami peningkatan dari 0,14 pada tahun 2012 menjadi 0,18 pada tahun 2013.

Sedangkan untuk capaian tingkat Propinsi ,P1 sebesar 1,05 tahun 2012 dan meningkat menjadi 1,19 pada tahun 2013, demikian juga P2 sebesar 0,21 tahun 2012 meningkat menjadi 0,28 pada tahun 2013.

Tabel 3.2.4  
Perubahan data kemiskinan Tahun 2012 dan 2013

NO	Uraian	2012	2013	Bertambah/ Berkurang
<b>A</b>	<b>Nasional (Status bulan September)</b>			
1	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	28.590.000	28.550.000	-40.000
2	Prosentase Penduduk Miskin (%)	11,66	11,37	-0,29
3	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	259.250	292.251	33.001
4	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) %	1,90	1,89	-0,01
5	Indek Keparahan Kemiskinan (P2) %	0,48	0,48	0,00
<b>B</b>	<b>Kal- Barat (Status bulan September)</b>			
1	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	365.100	407.300	<b>42.200</b>
2	Prosentase Penduduk Miskin (%)	7,96	8,74	<b>0,78</b>
3	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	239.162	270.306	31.144
4	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) %	1,24	1,30	<b>0,06</b>
5	Indek Keparahan Kemiskinan (P2) %	0,33	0,32	-0,01
<b>C</b>	<b>Kota Pontianak (Status bulan September)</b>			
1	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	33.400	32.800	-600
2	Prosentase Penduduk Miskin (%)	5,76	5,56	-0,2
3	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	306.017	341.422	35.405
4	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) %	0,69	0,83	<b>0,14</b>
5	Indek Keparahan Kemiskinan (P2) %	0,14	0,18	<b>0,04</b>

Grafik 3.2.4  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pontianak Tahun 2003 s/d 2013



Sumber BPS Kota Pontianak

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1) Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin

**3.2.5. Distribusi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Penduduk Miskin Hasil PPLS 2011**

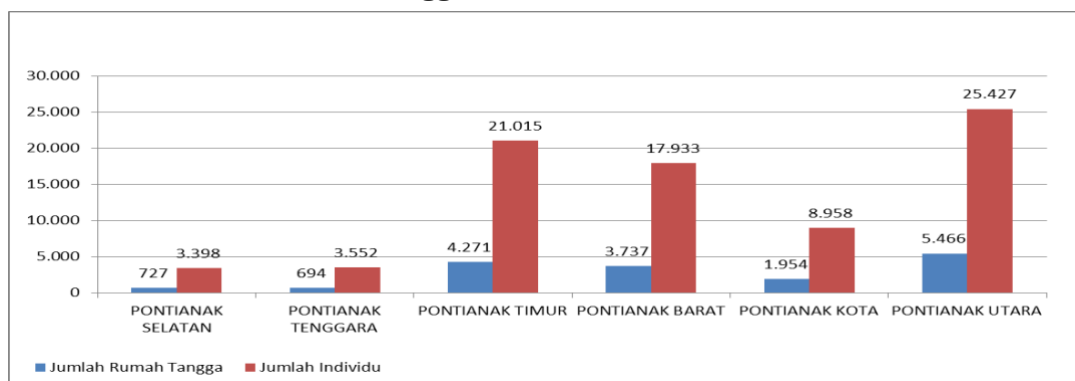
❖ **Jumlah Rumah Tangga Dan Individu Miskin**

Dari data PPLS tahun 2011 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pontianak Utara jumlah Rumah Tangga dan Individu terbesar yaitu 5.466 Rumah Tangga dan 25.247 Jiwa, sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan Pontianak Selatan yang berjumlah 727 Rumah Tangga dan 3.398 Jiwa

Untuk distribusi penduduk miskin ditingkat kelurahan yang terbesar di Kelurahan Sungai Beliung dengan 1.673 Rumah Tangga dan 8.341 Jiwa, Kemudian di Kelurahan Siantan Hulu dengan 1.630 Rumah Tangga dan 7.482 Jiwa, sedangkan Kelurahan dengan penduduk miskin yang terkecil berada di Kelurahan Akcaya dengan 89 Rumah Tangga dan 405 Jiwa

**Grafik 3.2.5**

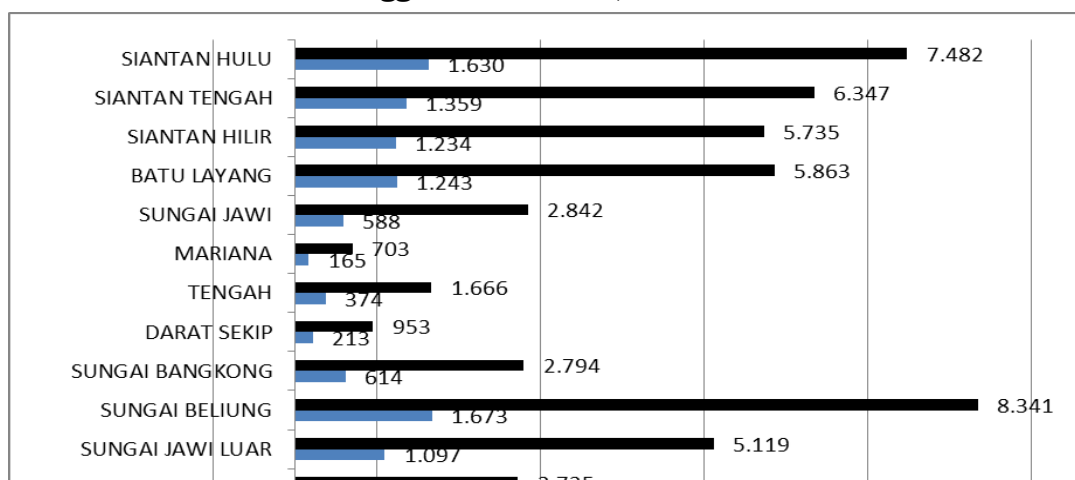
**Jumlah Rumah Tangga Dan Individu, Menurut Kecamatan**



Sumber : PPLS 2011

**Grafik 3.2.6**

**Jumlah Rumah Tangga Dan Individu, Menurut Kelurahan**



#### ❖ Distribusi Jumlah Individu Penduduk Miskin yang Tidak Bekerja di atas usia 15 tahun

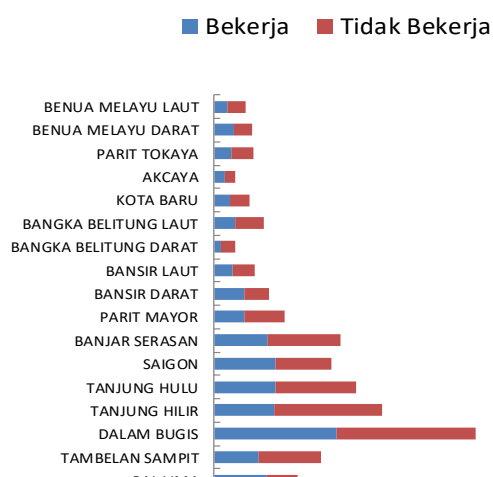
Dari data PPLS tahun 2011 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pontianak Utara merupakan paling banyak warga miskin yang tidak bekerja yaitu 23.513 Rumah Tangga, sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan Pontianak Selatan yang berjumlah 3.048 Jiwa

Untuk distribusi penduduk miskin ditingkat kelurahan yang terbesar di Kelurahan Sungai Beliang sebesar 7.912 Jiwa, Kemudian di Kelurahan Siantan Hulu dengan 6.958 Jiwa, sedangkan Kelurahan dengan penduduk miskin yang tidak bekerja terkecil berada di Kelurahan Akcaya dengan 344 Jiwa.

Tabel 3.2.5

JUMLAH INDIVIDU BEKERJA &amp; TIDAK BEKERJA USIA DIATAS 15 TAHUN

Kelurahan	Total Jumlah Individu usia diatas	
	Bekerja	Tidak Bekerja
BENUA MELAYU LAUT	479	626
BENUA MELAYU DARAT	668	644
PARIT TOKAYA	610	768
AKCAYA	382	344
KOTA BARU	557	666
BANGKA BELITUNG LAUT	753	965
BANGKA BELITUNG DARAT	244	506
BANSIR LAUT	658	745
BANSIR DARAT	1.061	870
PARIT MAYOR	1.067	1.408
BANJAR SERASAN	1.868	2.521
SAIGON	2.137	1.930
TANJUNG HULU	2.130	2.827
TANJUNG HILIR	2.085	3.779
DALAM BUGIS	4.268	4.862
TAMBELAN SAMPIT	1.567	2.161



mmaaa

❖ **Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga**

Dari data PPLS tahun 2011 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dapat dilihat bahwa jenis lapangan pekerjaan rumah tangga miskin yang terbanyak adalah dibidang bangunan/konstruksi sebanyak 4.912 rumah tangga, kemudian dibidang jasa sebanyak 3.062 rumah tangga dan dibidang perdagangan sebanyak 1.579 rumah tangga.

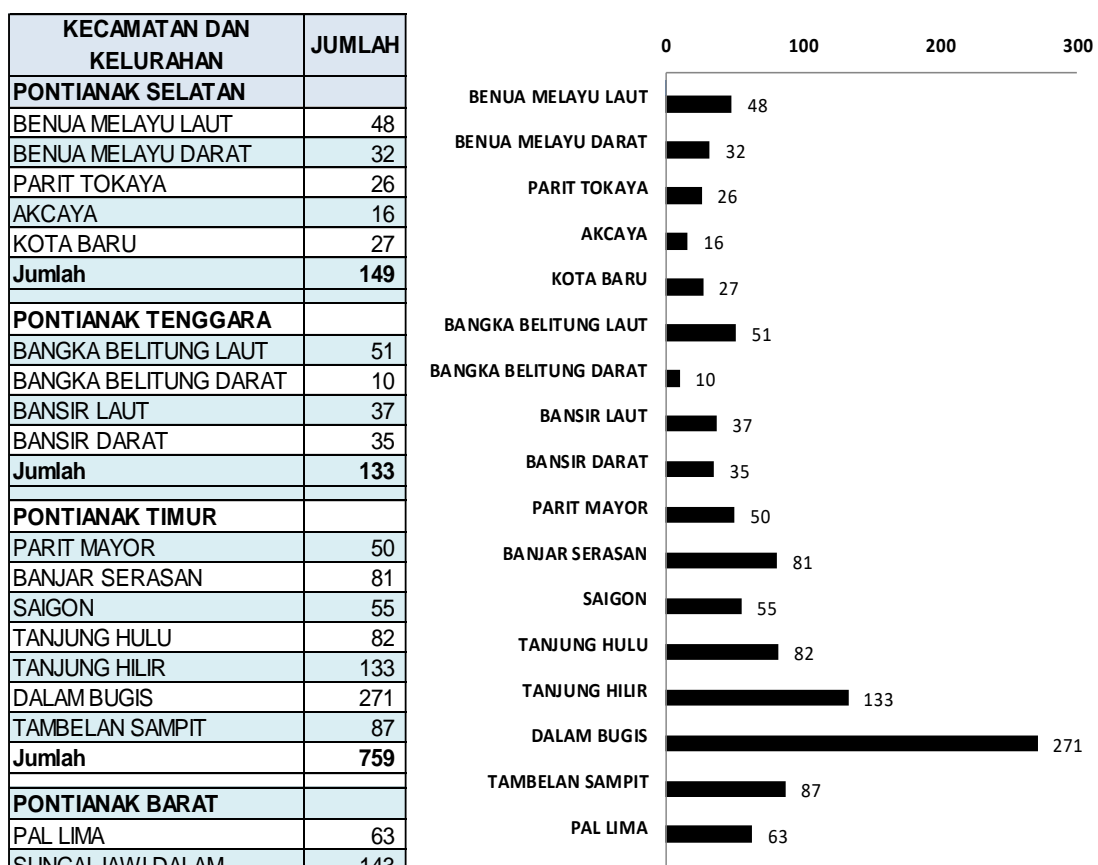
Tabel 3.2.6  
**Jumlah Kepala Rumah Tangga  
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga**

Kecamatan & Kelurahan	Pertanian	Hortikultura	Industri pengolahan	Bangunan / Konstruksi	Perdagangan	Transportasi dan pergudangan	Jasa
<b>PONTIANAK SELATAN</b>							
BENUA MELAYU LAUT	-	-	-	35	8	16	21
BENUA MELAYU DARAT	1	-	-	28	30	11	15
PARIT TOKAYA	13	-	1	82	7	4	13
AKCAYA	1	-	-	41	4	3	13
KOTA BARU	-	-	4	63	13	4	27
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>249</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>89</b>
<b>PONTIANAK TENGGARA</b>							
BANGKA BELITUNG LAUT	1	-	2	60	15	11	58
BANGKA BELITUNG DARAT	4	1	-	5	-	-	48
BANSIR LAUT	-	-	10	46	16	7	45
BANSIR DARAT	3	22	-	113	5	1	34
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>224</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>185</b>
<b>PONTIANAK TIMUR</b>							
PARIT MAYOR	5	-	13	118	19	34	44
BANJAR SERASAN	6	-	8	208	38	57	82
SAIGON	6	-	14	302	17	13	48
TANJUNG HULU	1	2	40	204	63	44	43
TANJUNG HILIR	1	1	4	282	52	107	93
DALAM BUGIS	4	-	68	166	149	220	220
TAMBELAN SAMPIT	2	-	7	147	54	38	84
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>154</b>	<b>1.427</b>	<b>392</b>	<b>513</b>	<b>614</b>
<b>PONTIANAK BARAT</b>							

❖ **Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan**

Dari data PPLS tahun 2011 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dapat dilihat bahwa kepala rumah tangga miskin perempuan yang terbanyak di kelurahan Sungai Beliang 280 rumah tangga, kemudian di kelurahan Dalam Bugis 271 rumah tangga dan yang paling sedikit di kelurahan Bangka Belitung Darat sebanyak 10 rumah tangga.

Tabel 3.2.7  
**Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Perempuan**



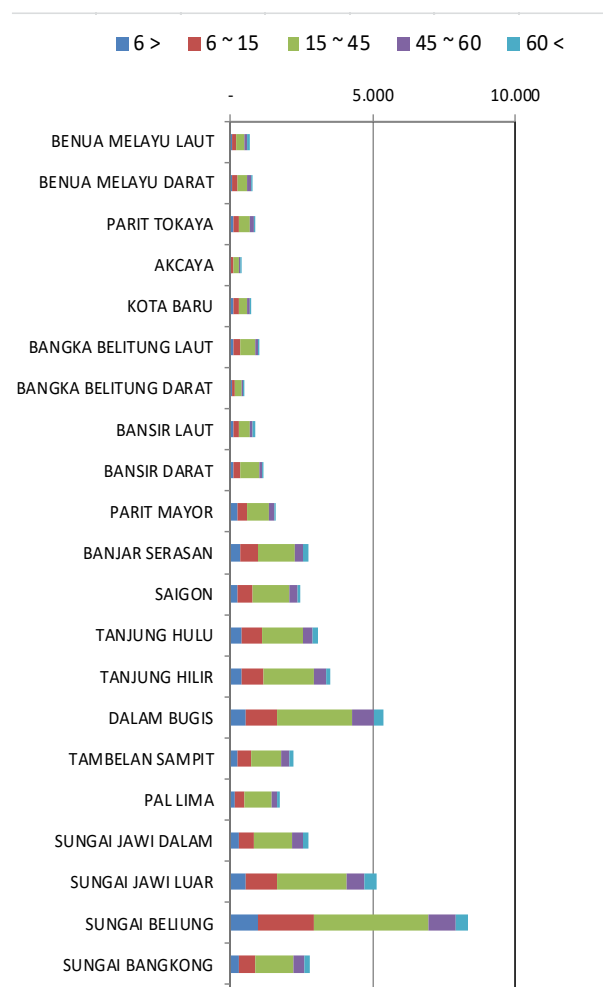


#### ❖ Jumlah Individu Miskin Berdasarkan Usia

Dari data PPLS tahun 2011 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin didominasi oleh usia produktif 15 sampai dengan 45 tahun, jumlah usia tersebut sekota Pontianak 38.994 jiwa atau 48,57% , kemudian pada urutan berikutnya pada usia remaja 5 sampai dengan 15 tahun sebesar 17.355 jiwa atau 21,62%.

**Tabel 3.2.8**  
**Jumlah Individu Miskin Berdasarkan Usia Kota Pontianak**

NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH INDIVIDU BERDASARKAN USIA (Tahun)					TOTAL
	6 >	6 ~ 15	15 ~ 45	45 ~ 60	60 <	
<b>PONTIANAK SELATAN</b>						
BENUA MELAYU LAUT	71	143	292	96	65	667
BENUA MELAYU DARAT	82	150	371	104	41	748
PARIT TOKAYA	106	206	380	110	60	862
AKCAYA	34	77	183	62	49	405
KOTA BARU	91	198	310	81	36	716
<b>Jumlah</b>	<b>384</b>	<b>774</b>	<b>1.536</b>	<b>453</b>	<b>251</b>	<b>3.398</b>
<b>PONTIANAK TENGGARA</b>						
BANGKA BELITUNG LAUT	121	227	508	123	61	1.040
BANGKA BELITUNG DARAT	61	109	234	55	15	474
BANSIR LAUT	99	175	417	107	60	858
BANSIR DARAT	127	235	664	109	45	1.180
<b>Jumlah</b>	<b>408</b>	<b>746</b>	<b>1.823</b>	<b>394</b>	<b>181</b>	<b>3.552</b>
<b>PONTIANAK TIMUR</b>						
PARIT MAYOR	234	359	766	165	80	1.604
BANJAR SERASAN	340	646	1.254	318	172	2.730
SAIGON	241	541	1.273	282	109	2.446
TANJUNG HULU	396	706	1.428	370	172	3.072
TANJUNG HILIR	378	805	1.768	391	185	3.527
DALAM BUGIS	534	1.082	2.653	751	378	5.398
TAMBELAN SAMPIT	234	483	1.071	305	145	2.238
<b>Jumlah</b>	<b>2.357</b>	<b>4.622</b>	<b>10.213</b>	<b>2.582</b>	<b>1.241</b>	<b>21.015</b>
<b>PONTIANAK BARAT</b>						
PAL LIMA	168	332	936	210	102	1.748
SUNGAI JAWI DALAM	279	561	1.313	379	193	2.725
SUNGAI JAWI LUAR	516	1.103	2.448	659	393	5.119
SUNGAI BELIUNG	984	1.952	4.012	972	421	8.341
<b>Jumlah</b>	<b>1.947</b>	<b>3.948</b>	<b>8.709</b>	<b>2.220</b>	<b>1.109</b>	<b>17.933</b>
<b>PONTIANAK KOTA</b>						
SUNGAI BANGKONG	298	593	1.245	273	106	2.704

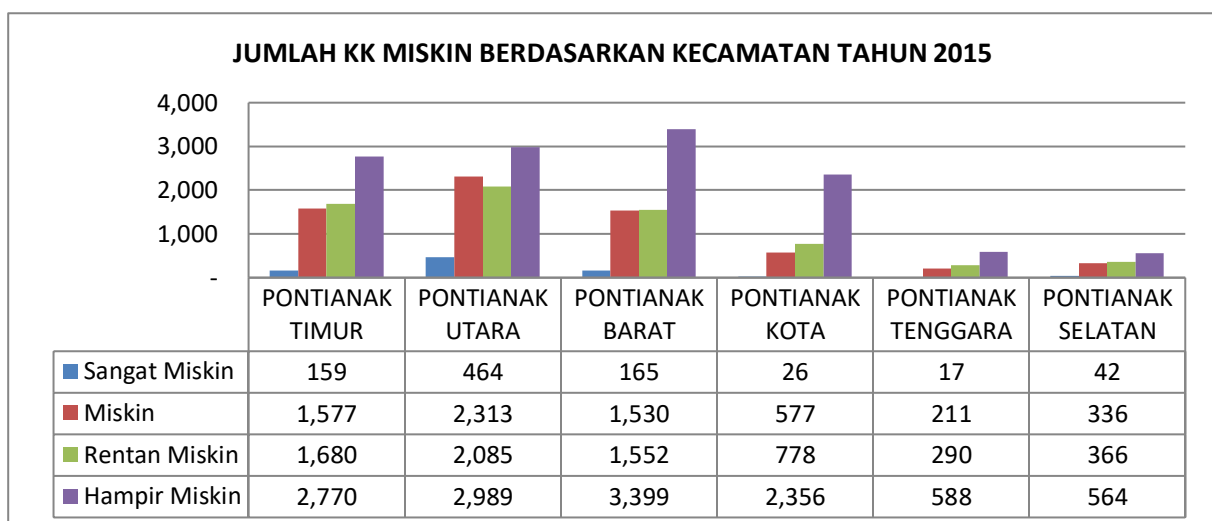


### 3.2.6. Distribusi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Penduduk Miskin Tahun 2015 hasil Verifikasi PPLS 2011

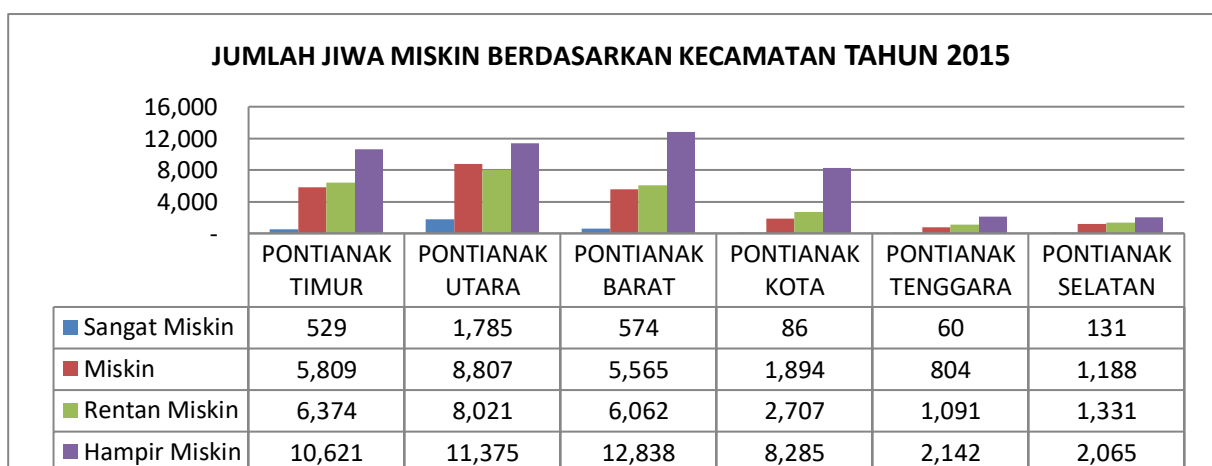
#### ❖ Jumlah KK dan Individu Miskin

Berdasarkan hasil validasi warga miskin data PPLS 2011 yang dilaksanakan pada tahun 2015 terlihat bahwa jumlah terbanyak untuk penduduk miskin di kecamatan Pontianak Utara dengan kategori sangat miskin 464 KK, Miskin 2.313 KK, Rentan Miskin 2.088 KK dan Hampir Miskin 2.989 KK, sedangkan yang terkecil berada dikecamatan Pontianak Tenggara

Grafik 3.2.1



Grafik 3.2.2



Dari Tabel Jumlah KK dan Jiwa Miskin Tahun 2015 dapat dilihat bahwa kelurahan yang paling besar Penduduk dengan kategori sangat miskin di Kelurahan Siantan Hilir sebesar 198 KK, untuk kategori miskin sebesar 668 KK di kelurahan Siantan Hulu, untuk kategori rentan miskin sebesar 706 KK di kelurahan Sungai Beliang dan untuk kategori hampir miskin sebesar 1.627 KK juga di kelurahan Sungai Beliang.

**Tabel 3.2.9**  
**Jumlah KK dan Jiwa Miskin Berdasarkan Kelurahan Tahun 2015**

NO	LOKASI	JUMLAH (KK)		JUMLAH DATA YANG TELAH DIINPUT									
				Sangat Miskin		Miskin		Rentan Miskin		Hampir Miskin		Tidak Miskin	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Saigon	906	3.469	2	2	97	411	115	469	575	2.259	117	328
2	Dalam Bugis	1.644	5.975	67	223	477	1.793	528	2.070	448	1.679	124	210
3	Parit Mayor	452	1.713	2	14	102	381	64	240	229	911	55	167
4	Tanjung Hilir	1.114	3.896	30	95	275	960	288	1.039	367	1.347	154	455
5	Tanjung Hulu	1.169	4.275	30	92	201	732	225	799	542	2.064	171	588
6	Tambelan Sampit	845	3.007	8	35	206	700	257	923	318	1.195	56	154
7	Banjar Serasan	985	3.607	20	68	219	832	203	834	291	1.166	252	707
	<b>PONTIANAK TIMUR</b>	<b>7.115</b>	<b>25.942</b>	<b>159</b>	<b>529</b>	<b>1.577</b>	<b>5.809</b>	<b>1.680</b>	<b>6.374</b>	<b>2.770</b>	<b>10.621</b>	<b>929</b>	<b>2.609</b>
1	Batulayang	2.051	7.679	92	350	582	2.202	555	2.057	780	2.990	42	80
2	Siantan Tengah	2.017	7.631	47	168	436	1.722	580	2.179	873	3.378	81	184
3	Siantan Hilir	1.751	6.526	198	795	627	2.409	422	1.633	416	1.519	88	170
4	Siantan Hulu	2.548	9.277	127	472	668	2.474	528	2.152	920	3.488	305	691
	<b>PONTIANAK UTARA</b>	<b>8.367</b>	<b>31.113</b>	<b>464</b>	<b>1.785</b>	<b>2.313</b>	<b>8.807</b>	<b>2.085</b>	<b>8.021</b>	<b>2.989</b>	<b>11.375</b>	<b>516</b>	<b>1.125</b>
1	Sungai Jawi Dalam	1.133	4.013	10	27	305	999	233	832	539	2.074	46	81
2	Sungai Beliang	3.254	12.113	64	224	607	2.290	706	2.805	1.627	6.284	250	510
3	Sungai Jawi Luar	2.266	7.950	83	299	436	1.503	508	1.993	1.073	3.837	166	318
4	Pal Lima	545	2.087	8	24	182	773	105	432	160	643	90	215
	<b>PONTIANAK BARAT</b>	<b>7.198</b>	<b>26.163</b>	<b>165</b>	<b>574</b>	<b>1.530</b>	<b>5.565</b>	<b>1.552</b>	<b>6.062</b>	<b>3.399</b>	<b>12.838</b>	<b>552</b>	<b>1.124</b>
1	Darat Sekip	428	1.431	2	11	38	123	88	301	267	932	33	64
2	Mariana	582	2.023	2	8	39	132	66	241	415	1.506	60	136
3	Sungai Bangkong	1.423	4.767	15	42	204	629	255	911	783	2.795	166	390
4	Sungai Jawi	1.241	4.162	4	14	271	933	324	1.092	605	2.050	37	73
5	Tengah	516	1.670	3	11	25	77	45	162	286	1.002	157	418
	<b>PONTIANAK KOTA</b>	<b>4.190</b>	<b>14.053</b>	<b>26</b>	<b>86</b>	<b>577</b>	<b>1.894</b>	<b>778</b>	<b>2.707</b>	<b>2.356</b>	<b>8.285</b>	<b>453</b>	<b>1.081</b>
1	Bangka Belitung Laut	411	1.322	4	7	61	223	93	310	203	689	50	93
2	Bangka Belitung	136	500	4	13	52	212	27	107	48	160	5	8
3	Bansir Laut	386	1.371	2	8	65	237	115	432	178	650	26	44
4	Bansir Darat	275	1.096	7	32	33	132	55	242	159	643	21	47
	<b>PONTIANAK TENGGARA</b>	<b>1.208</b>	<b>4.289</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>211</b>	<b>804</b>	<b>290</b>	<b>1.091</b>	<b>588</b>	<b>2.142</b>	<b>102</b>	<b>192</b>
1	Parit Tokaya	245	985	9	31	79	312	71	290	84	344	2	8
2	Benua Melayu Darat	107	520	-	-	8	41	16	79	83	400	-	-
3	Benua Melayu Laut	354	1.167	6	16	43	141	92	299	181	620	32	91
4	Akcaya	170	494	1	4	25	76	40	140	89	253	15	21
5	Kota Baru	511	1.754	26	80	181	618	147	523	127	448	30	85
	<b>PONTIANAK SELATAN</b>	<b>1.387</b>	<b>4.920</b>	<b>42</b>	<b>131</b>	<b>336</b>	<b>1.188</b>	<b>366</b>	<b>1.331</b>	<b>564</b>	<b>2.065</b>	<b>79</b>	<b>205</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29.465</b>	<b>106.480</b>	<b>873</b>	<b>3.165</b>	<b>6.544</b>	<b>24.067</b>	<b>6.751</b>	<b>25.586</b>	<b>12.666</b>	<b>47.326</b>	<b>2.631</b>	<b>6.336</b>
	<b>Prosentase</b>				<b>2,97%</b>		<b>22,60%</b>		<b>24,03%</b>		<b>44,45%</b>		<b>5,95%</b>

### 3.2.7. Pertumbuhan Ekonomi

Pada masa lalu, pembangunan lebih diorientasikan pada usaha pemerintah untuk mengejar dan mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara menambah jumlah investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi "Trickle Down Effects" atau efek tetesan. Kesejahteraan diasumsikan akan menetes sampai ke semua level sosial ekonomi masyarakat.

**Tabel 3.2.19**  
**Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2004 – 2014**

	Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Q2 2015
Nasional %	%							6,38	6,17	6,03	5,58	5,02	4,65
Kalbar %	%						4,79	5,35	5,97	5,81	6,08	5,26	4,01
Pontianak %	%						5,36	5,38	5,89	6,06	6,92	6,52	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Namun pendekatan yang hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi ternyata memiliki dampak yang kurang baik. Peningkatan pendapatan nasional tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Yang terjadi kemudian adalah pendapatan terdistribusi secara tidak merata, sehingga meskipun secara nasional perhitungan pendapatan lebih tinggi, mayoritas rumah tangga tetap berada pada keadaan sosial ekonomi yang buruk. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2013 sebesar 6,92% dan turun kembali pada tahun 2014 menjadi 6,52%

### 3.2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang

ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

**Tabel 3.2.11**  
**Nilai Indeks Komponen IPM 1996 – 2013 Kota Pontianak**

Tahun	Indeks Harapan Hidup	Indeks Pendidikan	Indeks Paritas Daya Beli	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1996				64,4
1999				64,7
2002				67,6
2004				69,1
2005				69,5
2006				71,0
2007				71,6
2008				72,1
2009	67,04	94,08	56,11	72,41
2010	67,22	94,97	56,69	72,96
2011	67,40	95,02	57,87	73,43
2012	67,58	95,73	59,32	74,21
2013				74,64

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2014

IPM Kota Pontianak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan untuk tahun 2013 capaian IPM Kota Pontianak sebesar 74,64%

Untuk IPM antar wilayah di Kalimantan Barat Kota Pontianak menduduki posisi tertinggi, sedangkan IPM yang paling rendah di Kabupaten Bengkayang sebesar 69,40%

**Tabel 3.2.12**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi kalbar dan Kabupaten/Kota, 2005 s/d 2013**

Kab/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sambas	61,90	62,10	63,00	63,70	64,40	64,90	65,80	66,20	66,80
Bengkayang	64,60	65,70	66,30	66,80	67,20	67,60	68,00	68,50	69,40
Landak	64,20	66,10	66,40	66,70	67,30	67,60	68,20	69,00	69,60
Pontianak	66,90	67,20	67,40	67,90	68,50	68,80	69,10	69,40	70,10
Sanggau	66,20	67,00	67,60	67,90	68,20	68,60	69,00	69,50	70,30
Ketapang	65,20	65,40	66,00	66,80	67,50	67,90	68,60	69,10	69,70
Sintang	65,10	65,70	66,90	67,40	68,00	68,30	68,80	69,10	69,80
Kapuas Hulu	68,20	68,70	69,30	69,40	69,90	70,00	70,40	70,50	71,00
Sekadau	64,50	65,30	65,80	66,10	66,70	67,00	67,50	68,50	69,00



### 3.2.9. Bidang Ketenagakerjaan

Dalam menganalisa bidang ketenaga-kerjaan, maka digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk melihat tingkat penggunaan tenaga kerja. Jika TPT kurang dari 4 persen berarti tingkat pengangguran suatu daerah masih dianggap normal.

Jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak angka sebesar 5,35% tahun 2012 dan meningkat 6,12% tahun 2013. Sedangkan yang terkecil di Kabupaten Sanggau sebesar 0,78% dan terbesar di Kabupaten Kubu Raya sebesar 9,26%.

Tabel 3.2.13  
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kalimantan Barat Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kabupaten Sambas	3,89	6,09	4,53	2,99	3,11	3,03
Kabupaten Bengkayang	4,71	4,02	3,21	3,32	3,30	2,30
Kabupaten Landak	4,03	4,38	4,61	3,18	4,80	3,24
Kabupaten Pontianak	9,07*)	9,75	7,80	3,35	4,67	5,66
Kabupaten Sanggau	2,81	3,30	3,62	3,27	1,39	0,78
Kabupaten Ketapang	4,29	5,15	3,90	3,70	1,95	4,70
Kabupaten Sintang	3,59	3,12	2,35	3,38	2,05	2,24
Kabupaten Kapuas Hulu	2,27	1,67	2,25	2,50	1,58	2,09
Kabupaten Sekadau	2,74	3,14	2,31	2,93	0,60	1,44
Kabupaten Melawi	1,96	1,82	1,30	3,08	2,90	3,99
Kabupaten Kayong Utara	8,53	5,82	4,29	2,56	6,96	4,66
Kabupaten Kubu Raya	-	7,20	6,20	4,52	6,06	9,26
<b>Kota Pontianak</b>	<b>10,21</b>	<b>9,38</b>	<b>7,79</b>	<b>7,26</b>	<b>5,35</b>	<b>6,12</b>
Kota Singkawang	10,09	9,71	8,05	5,34	5,75	4,59
KALIMANTAN BARAT	5,41	5,44	4,62	3,88	3,48	4,03

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
NASIONAL	8,39	7,87	7,14	6,56	6,14	6,29

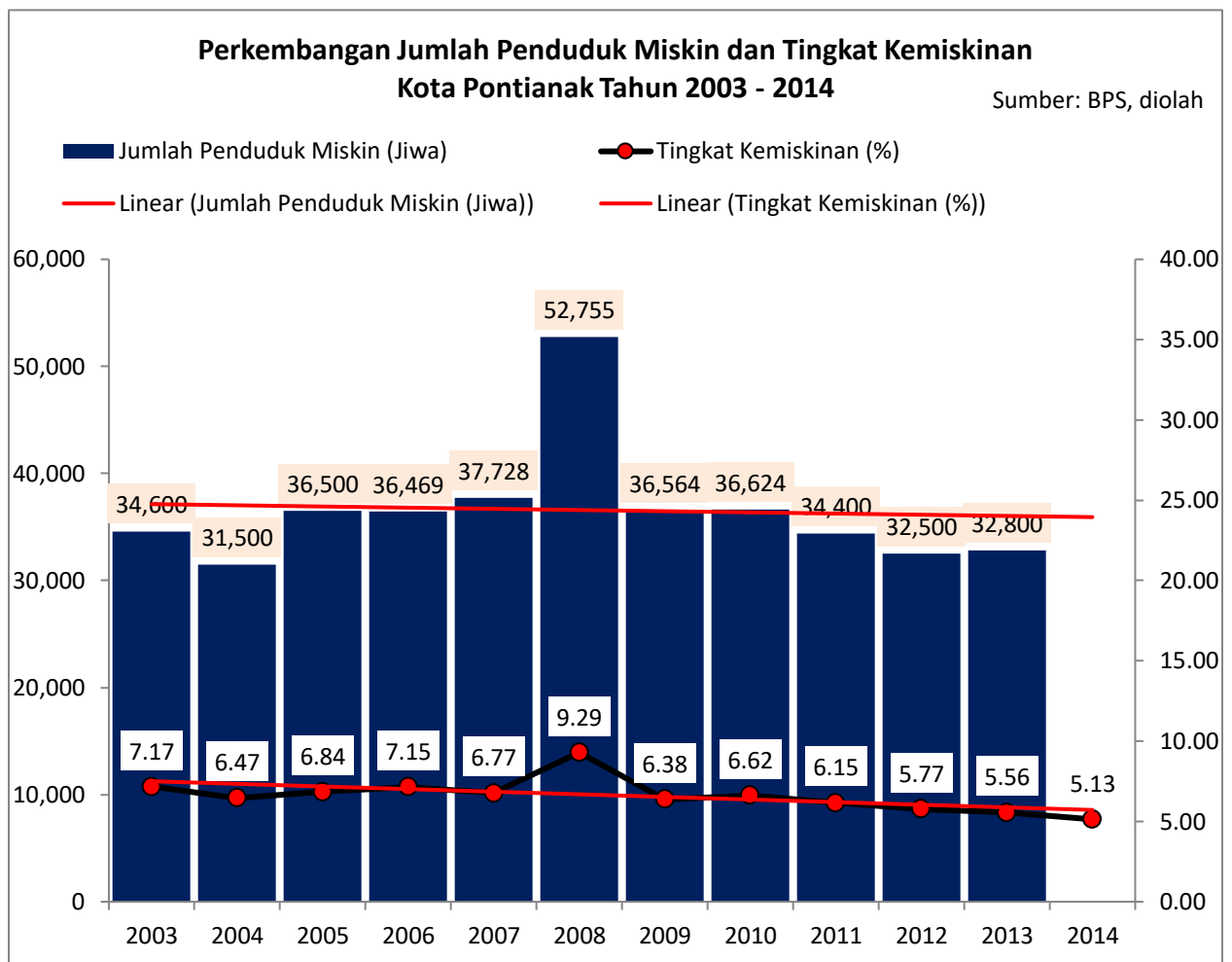
## BAB. IV

## ANALISIS INDIKATOR KEMISKINAN

## 4.1 Bidang Kemiskinan

- **Persentase Penduduk Miskin (P0)**

Grafik 4.1.1

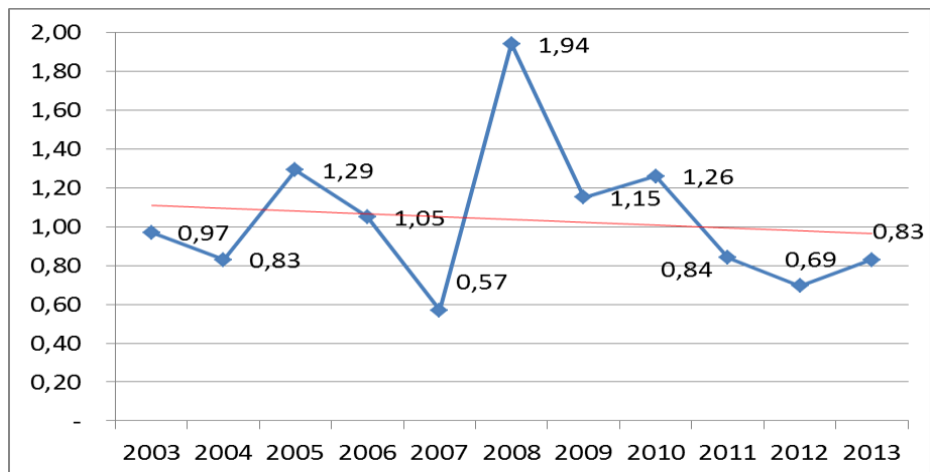


Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2013 sebesar **32.800** jiwa atau 5,56%. Periode kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai sebesar **52.800** jiwa atau 9,29%. Perkembangan jumlah penduduk miskin lima tahun terakhir selanjutnya menunjukkan *trend* positif yakni terjadi penurunan namun relatif kecil, dari tahun 2009 sampai tahun 2013 hanya sebesar 3.780 jiwa dan penurunan prosentasenya hanya 0,82%. Untuk tahun 2014 prosentase kemiskinan sebesar 5,13%

- **Persentase Kedalaman Kemiskinan (P1)**



**Grafik 4.1.2**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Pontianak Tahun 2003 s/d 2013**

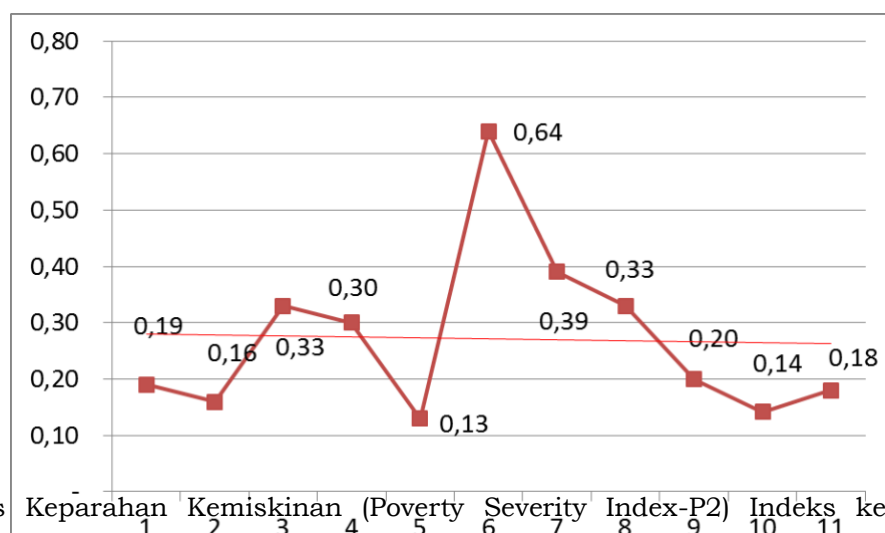


Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak menunjukkan trend menurun, angka tertinggi 1,94 pada tahun 2008, turun kembali menjadi 0,69 pada tahun 2012 dan terjadi kenaikan kembali menjadi 0,83 pada tahun 2013.

- Persentase Keparahan Kemiskinan (P2)**

**Grafik 4.1.3**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pontianak Tahun 2003 s/d 2013**



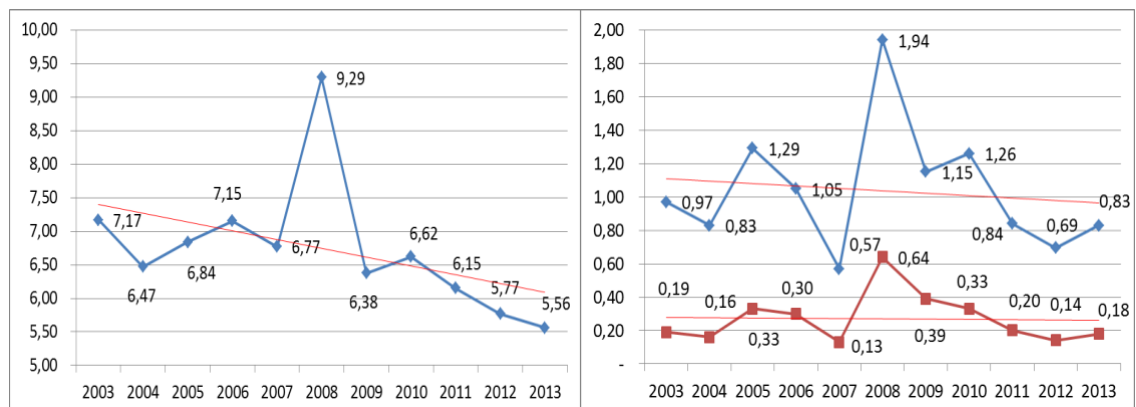
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak menunjukkan trend menurun, angka tertinggi 0,64 pada tahun 2008, turun kembali menjadi 0,14 pada tahun 2012 dan terjadi kenaikan kembali menjadi 0,18 pada tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin masih kecil

• **Keterkaitan Antar Indikator**

**Grafik 4.1.4**  
**Keterkaitan Antar Indikator Utama dengan Indikator Pendukung**

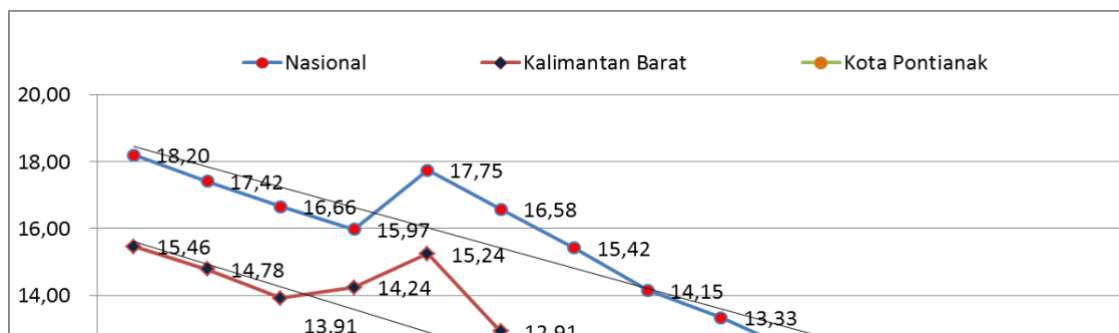


Kecenderungan pergerakan angka kemiskinan (P0) secara perlahan menurun namun tidak diimbangi dengan trend P1 dan P2 yang bergerak semakin mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Pontianak mampu menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun namun jarak kedalaman penduduk miskin dari garis kemiskinan mulai meningkat setiap tahun dan kesenjangan antara penduduk miskin juga mulai mengalami kenaikan.

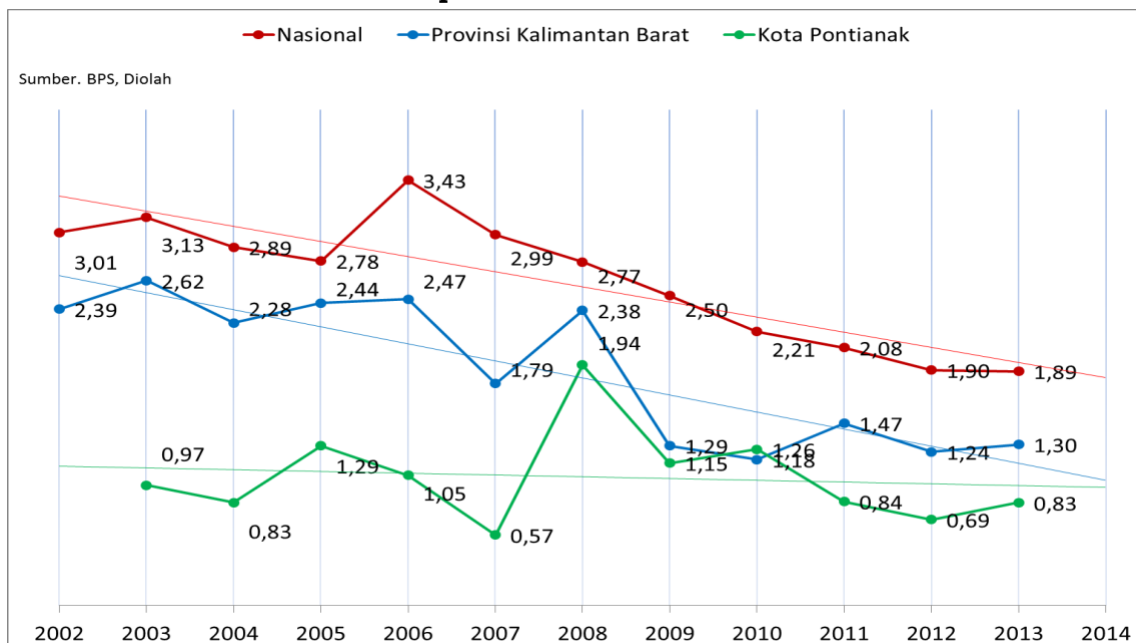
• **Relevansi Tingkat Kemiskinan**

Dari grafik Relevansi Tingkat Kemiskinan dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan kota Pontianak relevan dengan penurunan angka kemiskinan di Provinsi dan Nasional, walaupun semakin tahun capaiannya melambat. Sedangkan angka kemiskinan kota pontianak jauh lebih rendah dari Provinsi, maupun Nasional

**Grafik 4.1.5**  
**Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) P0**  
**Kota Pontianak Terhadap Provisi & Nasional Tahun 2002 - 2015**

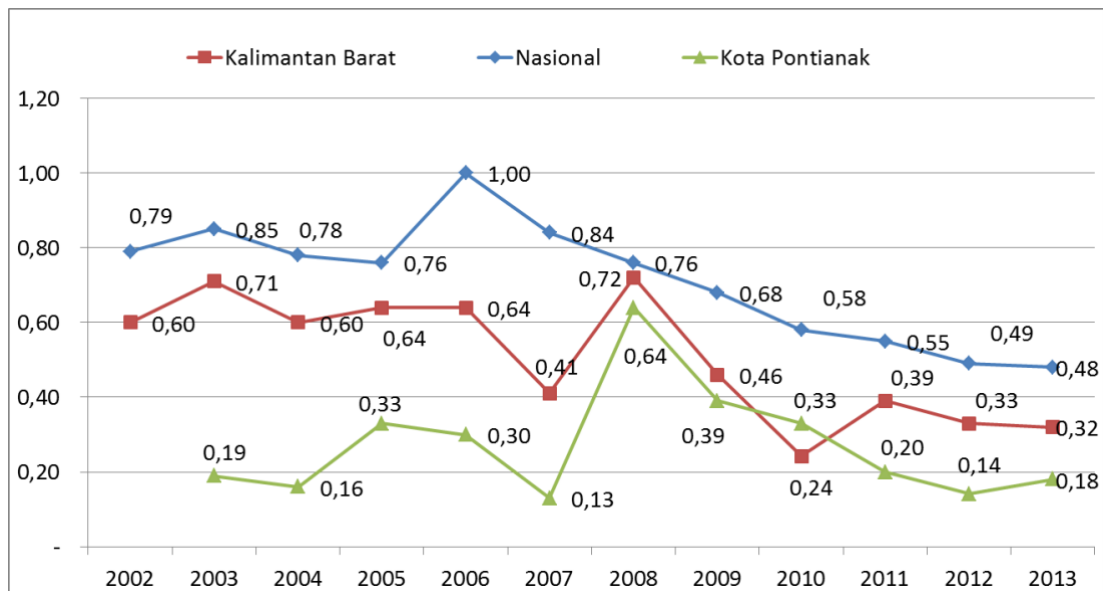


**Grafik 4.1.6**  
**Relevansi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (%) P1**  
**Kota Pontianak Terhadap Provinsi & Nasional Tahun 2002 - 2013**



Dari grafik P1 dapat dilihat bahwa Relevansi kedalaman kemiskinan kota Pontianak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 tidak relevan, setelah tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 kondisi P1 Relevan dengan Provinsi dan Nasional. sedangkan untuk efektifitasnya menunjukkan tren yang mendatar, dimana terjadi penurunan walaupun semakin tahun capaiannya melambat.

**Grafik 4.1.7**  
**Relevansi Tingkat Keparahan Kemiskinan (%) P2**  
**Kota Pontianak Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2013**

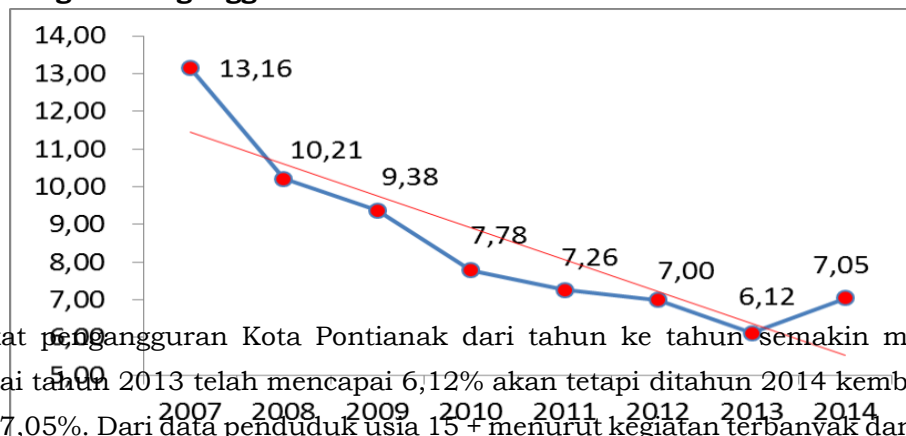


Dari grafik P2 dapat dilihat bahwa Relevansi kedalaman kemiskinan kota Pontianak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 tidak relevan, setelah tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 kondisi P1 Relevan dengan Provinsi dan Nasional. sedangkan untuk efektifitasnya menunjukkan tren yang mendatar, dimana terjadi penurunan walaupun semakin tahun capaiannya melambat.

• **Tingkat Pengangguran Terbuka**

**Grafik 4.1.8**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2007-2014**



Tingkat pengangguran Kota Pontianak dari tahun ke tahun semakin menurun sampai tahun 2013 telah mencapai 6,12% akan tetapi ditahun 2014 kembali naik pada 7,05%. Dari data penduduk usia 15 + menurut kegiatan terbanyak dan utama tahun 2011 sampai dengan 2014 terlihat bahwa jumlah pengangguran di Kota Pontianak mengalami kenaikan dimana pada tahun 2013 berjumlah 15.313 orang menjadi 18.514 orang pada tahun 2014.

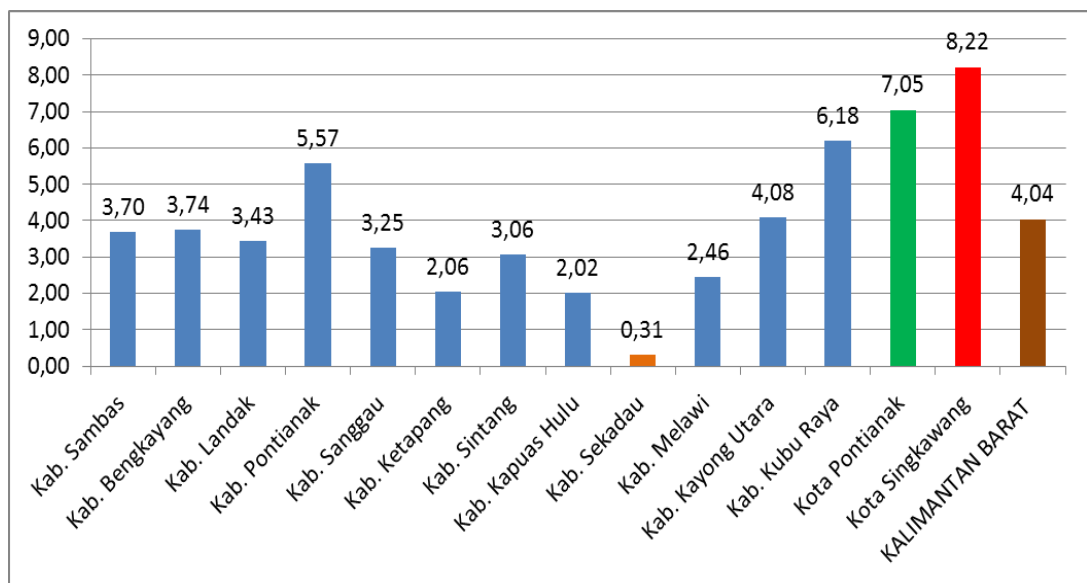
**Tabel 4.1.1**  
**Penduduk usia 15 + Menurut Kegiatan Terbanyak Dan Utama Tahun 2011 ~ 2014**

Angkatan Kerja	2011	2012	2013	2014
Bekerja	232.118	231.801	234.840	244.236
Pengangguran	18.183	13.106	15.313	18.514
Jumlah	250.301	244.907	250.153	262.750
Bukan Angkatan Kerja	141.577	147.139	159.606	179.105

- **Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka**

Grafik 4.1.9

Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Wilayah Tahun 2014



Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak (7,05%) masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian provinsi (4,04%). Dalam konstelasi regional, capaian ini juga masih tergolong tinggi setelah Kota Singkawang (8,22%)

- **Capaian Indikator-Indikator Bidang Kemiskinan**

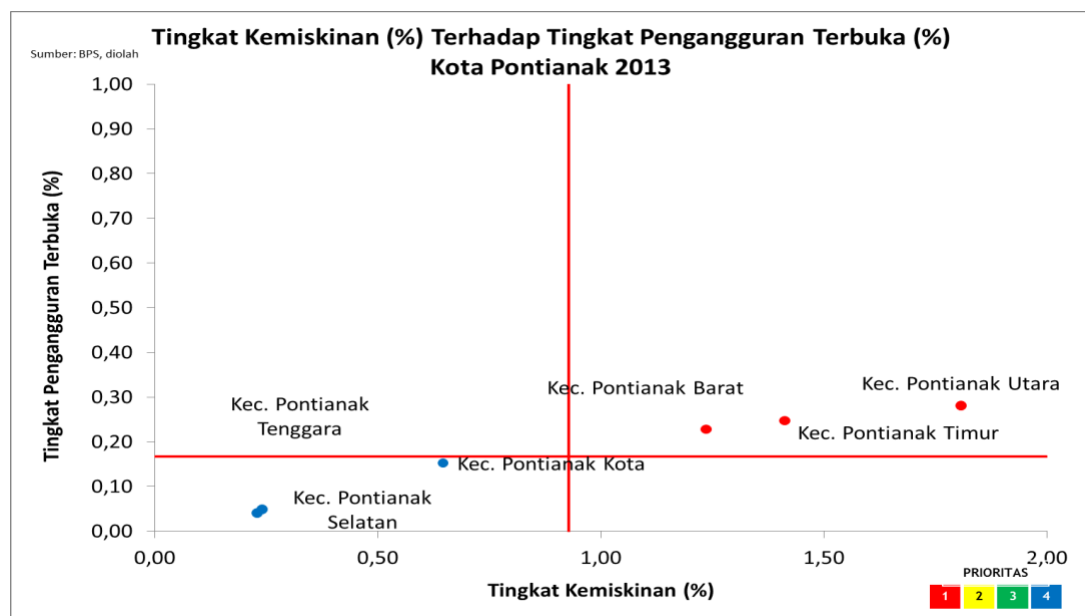
Berbagai analisa yang dilakukan terhadap indikator-indikator pada bidang kemiskinan merupakan capaian yang mencerminkan kondisi kemiskinan di Kota Pontianak. Angka capaian pada tahun terakhir pendataan disandingkan dengan capaian provinsi Kalimantan Barat dan capaian Nasional untuk mengetahui relevansinya dalam kontribusi pengurangan angka kemiskinan secara nasional. Secara umum, capaian indikator-indikator di bidang kemiskinan cukup baik, ditandai dengan lebih kecil angka kemiskinan di Kota Pontianak, kecuali angka pengangguran terbuka lebih besar dari capaian Provinsi maupun Nasional.

**Tabel 4.1.2**  
**Capaian Indikator Bidang Kemiskinan Kota Pontianak, Provinsi & Nasional**  
**Tahun 2014**

INDIKATOR	CAPAIAN KOTA PONTIANAK		CAPAIAN PROVINSI		CAPAIAN NASIONAL	
	CAPAIAN TAHUN 2013 & 2014					
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Tingkat Kemiskinan (%)	5,56	5,13	8,74	8,07	11,37	10,96
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83		1,3	1,261	1,89	1,75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,18		0,31	0,348	0,48	0,44
Tingkat Pengangguran (%)	6,12	7,05	4,03	4,04	6,25	5,94

▪ **Prioritas Wilayah Intervensi Tingkat Pengangguran**

**Grafik 4.1.10**



Wilayah intervensi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang menganggur diprioritaskan pada Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat. Kecamatan-kecamatan tersebut selain angka kemiskinannya tinggi tingkat pengangguran terbukanya juga tinggi.

#### 4.2 Bidang Kesehatan

Dalam menyusun analisis dibidang kesehatan, ditetapkan beberapa indikator yang ditujukan untuk memberikan gambaran umum melalui indikator utama, serta indikator pendukung untuk membantu mengarahkan kepada permasalahan yang lebih detail. Definisi dari indikator-indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

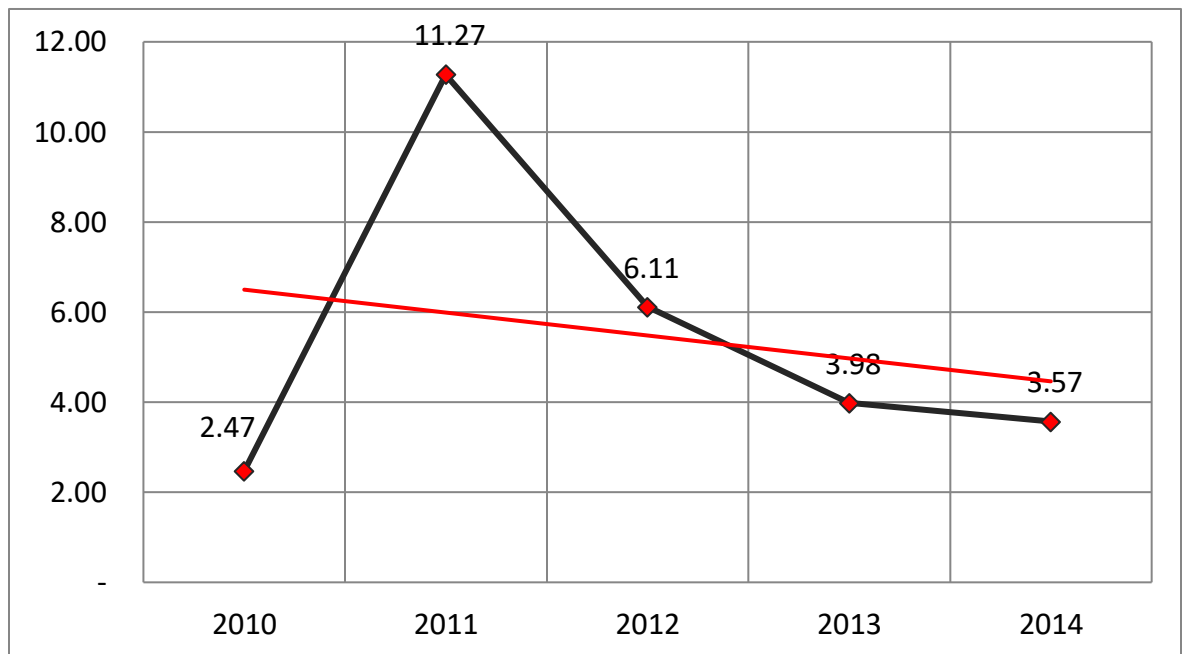
- Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup)
- Angka kematian Balita (AKABA) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).
- Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
- Prevalensi balita kekurangan gizi (berat badan rendah) adalah persentase balita yang menderita kekurangan gizi, diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur sesuai standar WHO.
- Penduduk dengan keluhan kesehatan (%) adalah Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Penduduk dengan Pengobatan Sendiri adalah Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, biasanya dinyatakan dalam persen.
- Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan adalah Persentase balita (0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi nakes (tenaga kesehatan/medis) dan non-nakes (tenaga non-medis). Yang termasuk nakes antara lain, dokter, bidan, mantri kesehatan dll. Non-nakes diantaranya tradisional, dukun bayi, paraji, dll.
- Angka Morbiditas/kesakitan ibu adalah jumlah ibu yang menderita gangguan fungsi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kehamilannya atau persalinannya.

#### **A. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi Kota Pontianak masih kurang menggembirakan, dimana kasus tertinggi pada tahun 2011 sebesar 116 atau 11,27 per 1000 kelahiran

kasus dan semakin menurun berjalannya waktu, sampai tahun 2014 sebanyak 41 kasus atau 3,57 per 1000 kelahiran, hal ini beridikasi baik dilihat dari efektifitas kecendrungan angka kematian bayi menurun. Beberapa kasus disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko tinggi pada kehamilan dan belum semua ibu hamil dengan resiko tinggi terdata oleh tenaga kesehatan, selain faktor lain seperti akibat gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

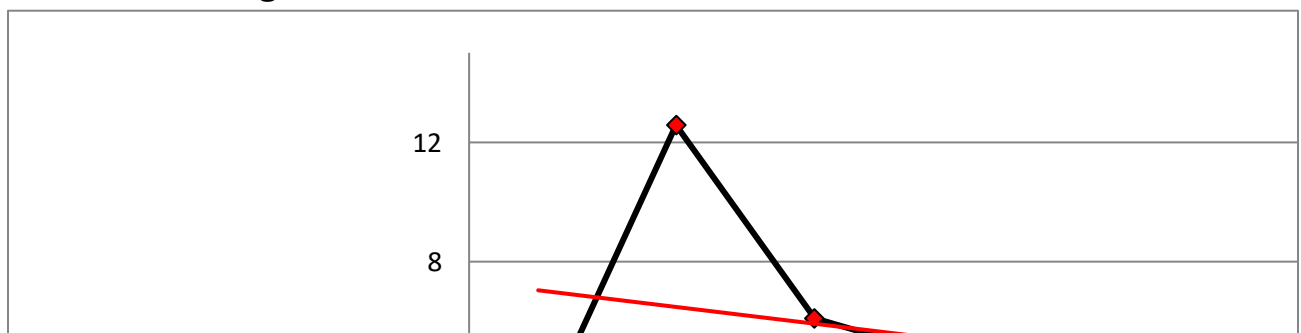
**Grafik 4.2.1**  
**Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Pontianak 2010 - 2014**



**B. Angka Kematian Balita**

Data Angka Kematian Balita Kota Pontianak per 1000 kelahiran, angka tertinggi pada tahun 2011 sebesar 12,58 dan menurun menjadi 3,66 pada tahun 2014, dan semakin turun tahun 2015 sebesar 2,35 hal menunjuk kinerja yang baik telah terjadi penurunan selama 2 tahun terakhir, akan tetapi dilihat dari efektifitas kecendrungan angka kematian balita menurun. Faktor penyebab kematian antara lain karena pasien datang terlambat ketempat pelayanan kesehatan, kemungkinan kurang upaya deteksi dini kasus atau lemahnya manajemen penanganan kasus eklampsia Pendarahan, Gagal jantung, Diabetes Mellitus, Steven Jhonson, Emboli air ketuban dll

**Grafik 4.2.2**  
**Angka Kematian Balita Kota Pontianak Tahun 2010 - 2015**

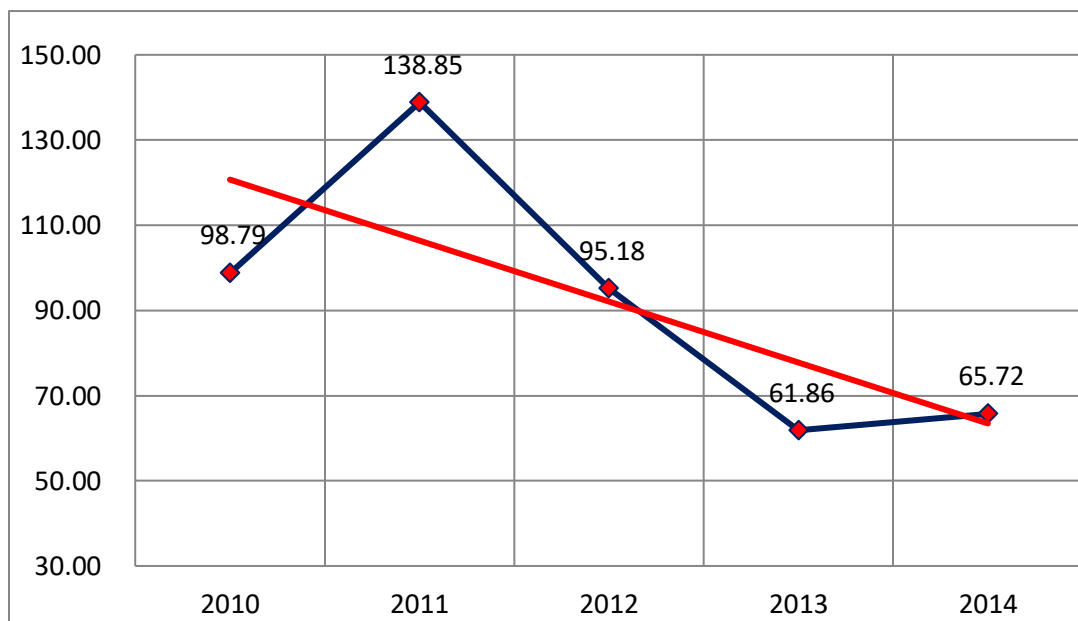




### C. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Data Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Jumlah kasus kematian ibu mengalami peningkatan dari tahun 2010-2011 dengan tertinggi 138,85 dan dari tahun 2011-2014 mengalami penurunan sampai 65,72, hal ini berarti kinerja SKPD terkait cukup baik, dilihat dari efektifitas kecenderungan angka kematian ibu melahirkan juga menurun. penyebab kematian ibu antara lain oleh Pendarahan, Eklamsi, Gagal jantung, Diabetes Mellitus, Emboli air ketuban dll.

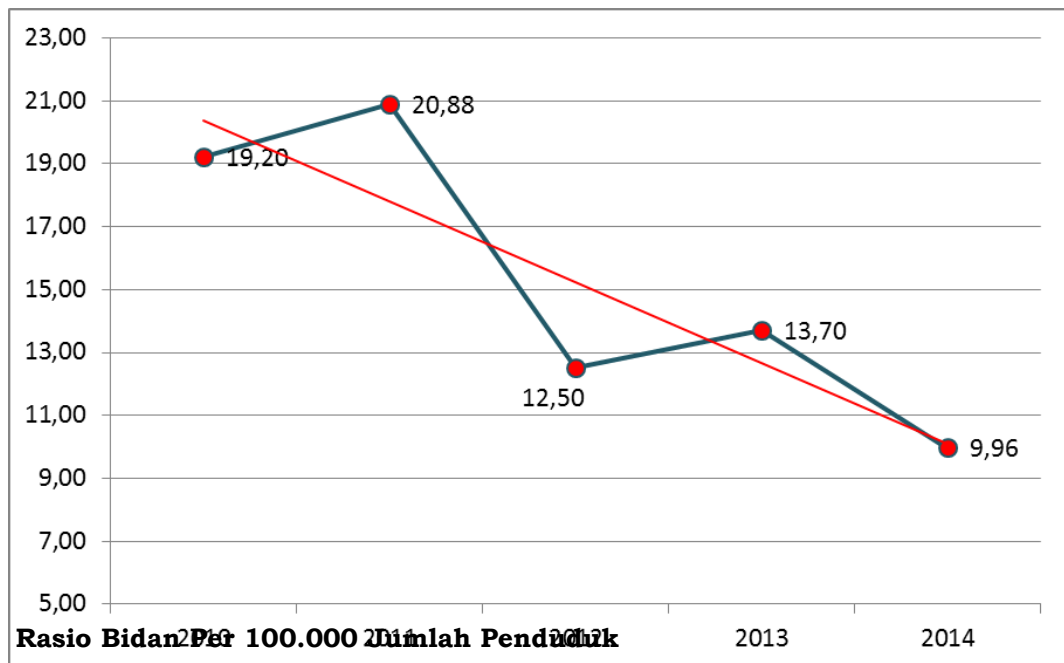
**Grafik 4.2.3**  
**Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2002 - 2015**



### E. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)

Untuk Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) di Kota Pontianak cenderung menurun yang tertinggi pada tahun 2011 dengan angka 20,88% dan terendah tahun 2014 sebesar 9,96%, dari grafik kecenderungan terlihat garis menurun tajam hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik terhadap permasalahan Balita Kekurangan Gizi.

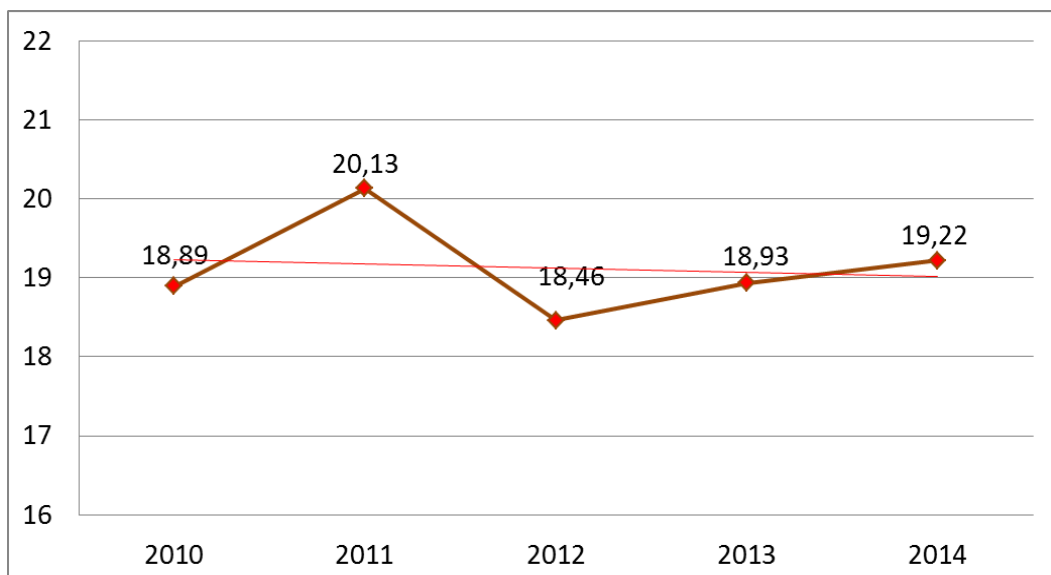
**Grafik 4.2.4**  
**Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) 2010 - 2014**



### F. Rasio Bidan Per 100.000 Jumlah Penduduk

Untuk Rasio bidan per 100.000 penduduk tertinggi pada tahun 2011 dengan angka 20,13 dan turun kembali menjadi 18,46 pada tahun 2012 untuk tahun 2014 naik kembali menjadi 19,22. Untuk capaian 3 tahun terakhir rasio bidan mengalami kenaikan, akan tetapi untuk efektifitasnya dapat dilihat kecenderungan menurun

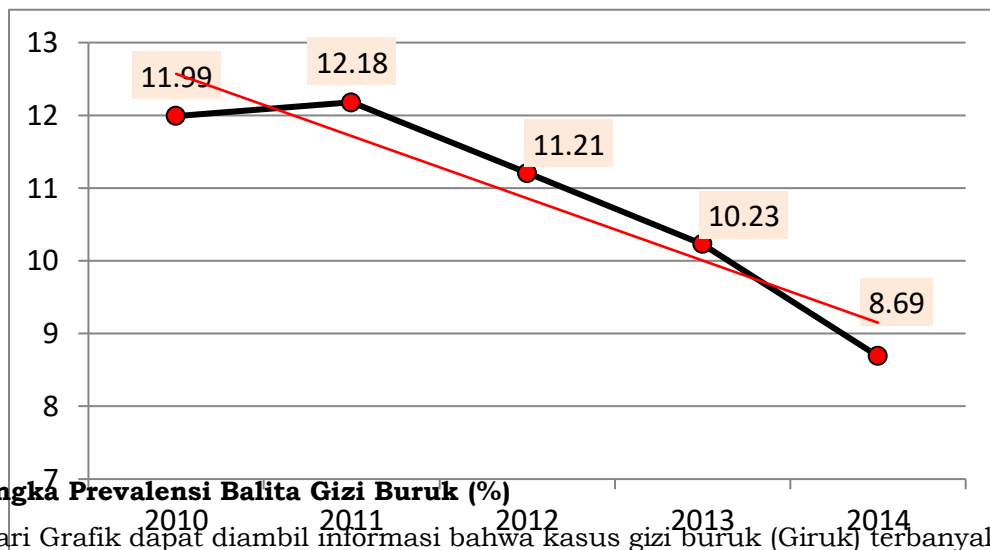
**Grafik. 4.2.5**  
**Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 - 2014**



**G. Rasio Dokter Per 100.000 Jumlah Penduduk**

Rasio Dokter per 100.000 jumlah penduduk Kota Pontianak tertinggi tahun 2011 dimana 12,81 orang dokter berbanding 100.000 orang, untuk periode 3 tahun terakhir rasio dokter terus menurun hal ini berarti jumlah dokter masih kurang, dilihat dari efektifitasnya kecenderungannya semakin menurun

**Grafik 4.2.6**  
**Rasio Dokter Terhadap 100.000 Jumlah Penduduk Tahun 2010 - 2014**

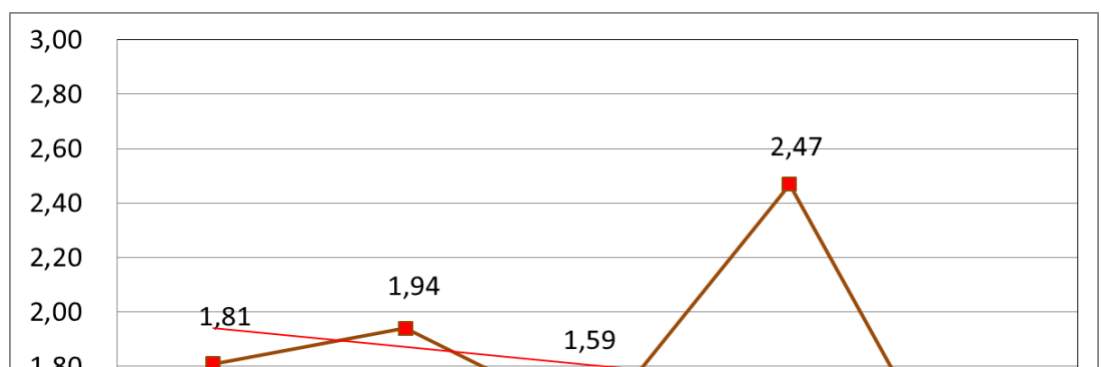


**H. Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)**

Dari Grafik dapat diambil informasi bahwa kasus gizi buruk (Giruk) terbanyak selama 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2013 (2,47 %) sementara kasus gizi buruk paling sedikit terjadi pada Tahun 2014 (1,2 %).

Kasus gizi buruk untuk tahun 2009 paling banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Perumnas II sebanyak 7 kasus sedangkan pada tahun 2010 terjadi di wilayah kerja Puskesmas Siantan tengah dan Kampung Dalam masing-masing 6 kasus. Pada tahun 2011 kasus gizi buruk tertinggi terjadi di wilayah kerja puskesmas Kampung Dalam sebanyak 8 kasus. Apabila diamati menurut kecamatan, kasus gizi buruk paling banyak terjadi di Kecamatan Pontianak Utara yaitu pada tahun 2009 sebanyak 15 kasus, pada Tahun 2010 sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2011 sebanyak 19 kasus berada Kecamatan Pontianak Timur, dilihat dari grafik kecenderungan menunjukkan arah semakin menurun hal ini berarti menunjukkan kinerja positif.

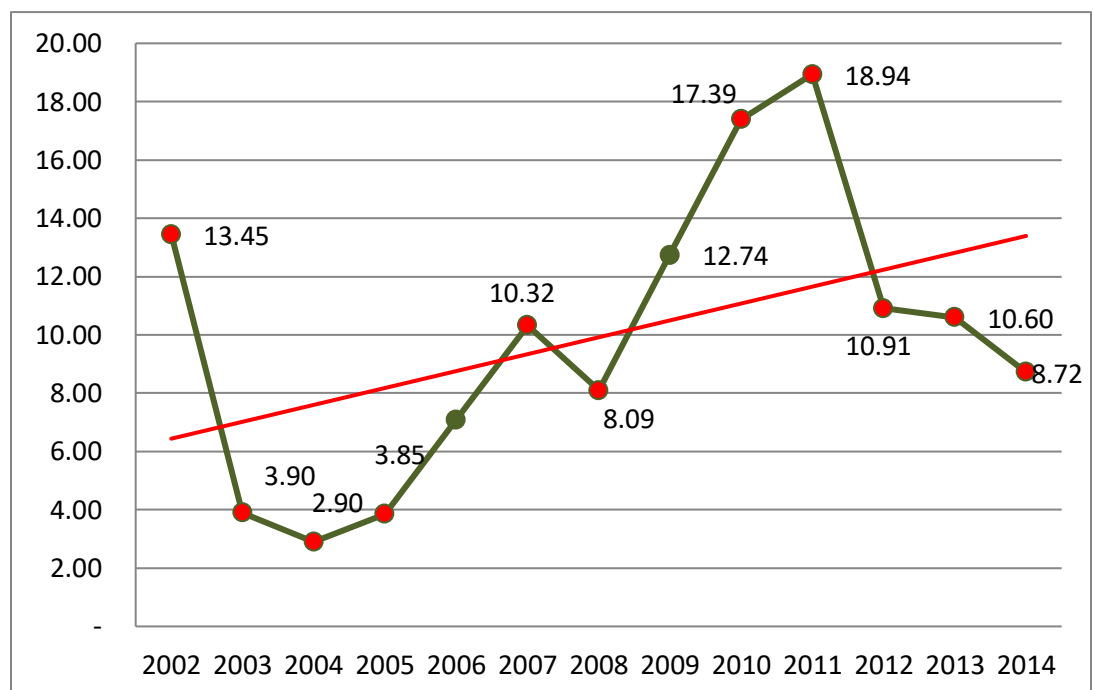
**Grafik 4.2.7**  
**Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 2010 - 2014**



### I. Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)

Angka Prevalensi Balita Gizi Kurang angka tertinggi pada tahun 18,94% dan terus menurun sampai tahun 2004 sebesar 8,72%, dari efektifitas terlihat bahwa Prevalensi Balita Gizi Kurang memiliki kecenderungan untuk meningkat.

**Grafik 4.2.8**  
**Angka Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Tahun 2002-2014**

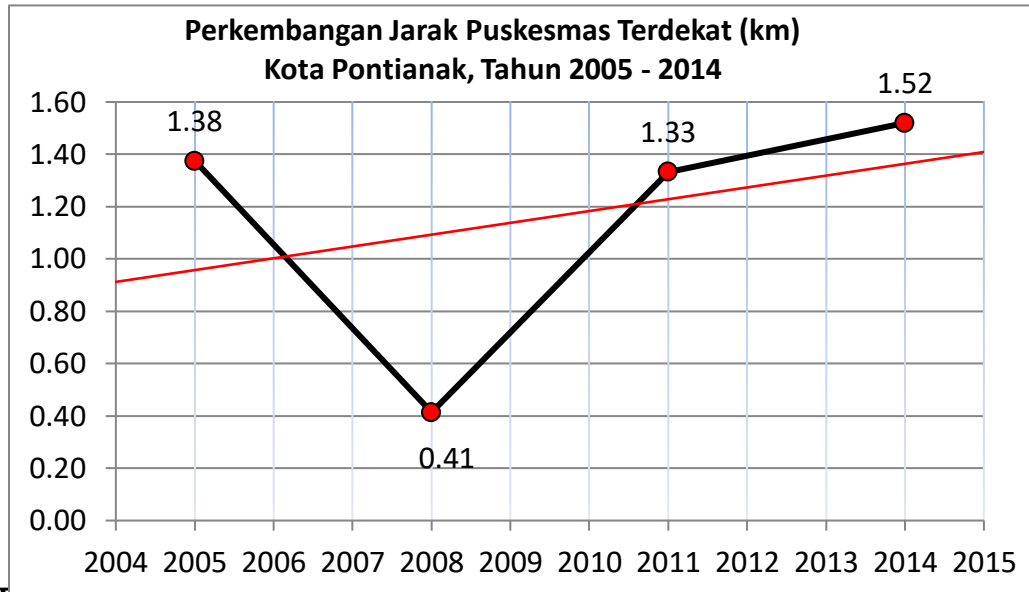


### J. Jarak Puskesmas Terdekat (Km)

Untuk jarak puskesmas terdekat Kota Pontianak sudah sangat mendukung untuk diakses oleh masyarakat, karena letak puskesmas yang sudah tersebar

diseluruh kecamatan, sehingga jarak rata-rata berkisar 1,52 Km, Untuk tren garis kecendrungan naik berarti negatif, artinya semakin jauh jarak terhadap Puskesmas.

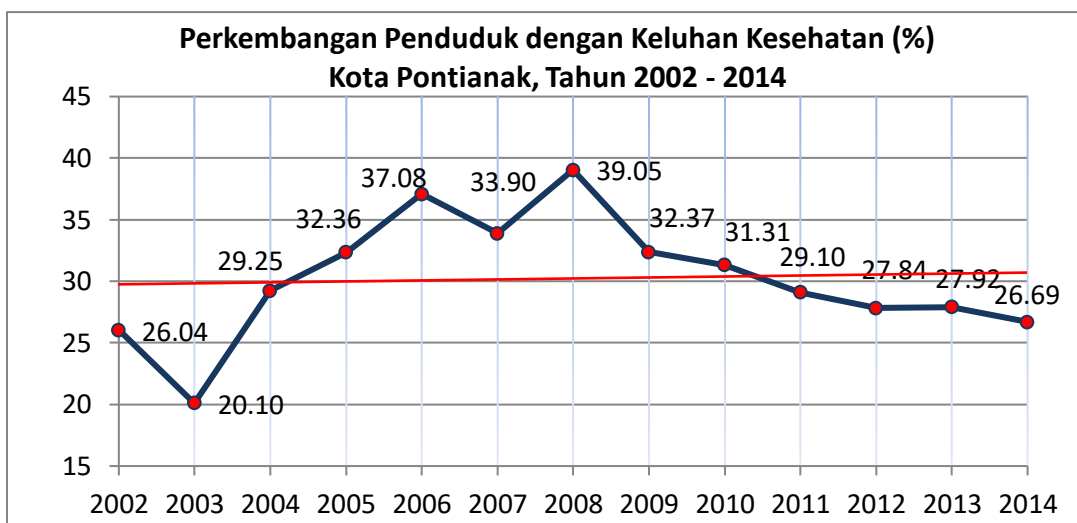
Grafik 4.2.9



**K. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)**

Perkembangan Data Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) tahun 2002-2014, angka tertinggi 39,05% tahun 2008 dan terus menurun menjadi 27,84% pada tahun 2014, hal ini berarti bahwa kinerja SKPD cukup baik, akan tetapi dilihat dari garis tren kecendrungan masih naik dengan kemiringan yang landai, hal ini berarti berpotensi untuk angka tersebut bertambah

Grafik 4.2.10

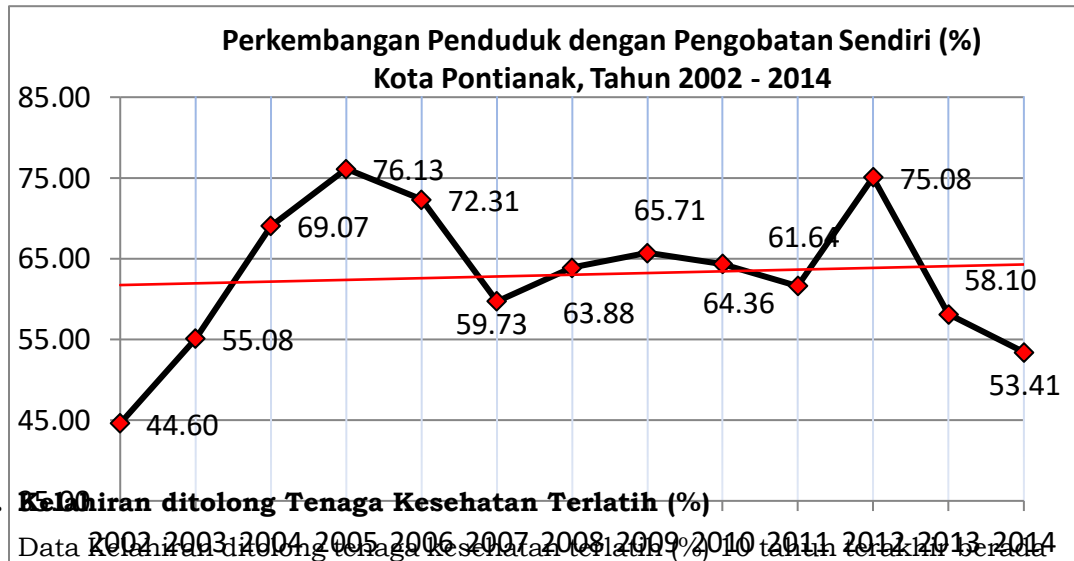


**L. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)**

Data Penduduk dengan Pengobatan Sendiri tahun 2002-2014 untuk Kota Pontianak fluktuatif, dimana yang tertinggi tahun 2004 sebesar 76,13% dan

tahun 2012 sebesar 75,08% dan kembali menurun sampai 53,41% tahun 2014, dilihat dari garis tren kecenderungan masih naik dengan kemiringan yang landai, hal ini berarti berpotensi untuk angka tersebut bertambah

**Grafik 4.2.11**

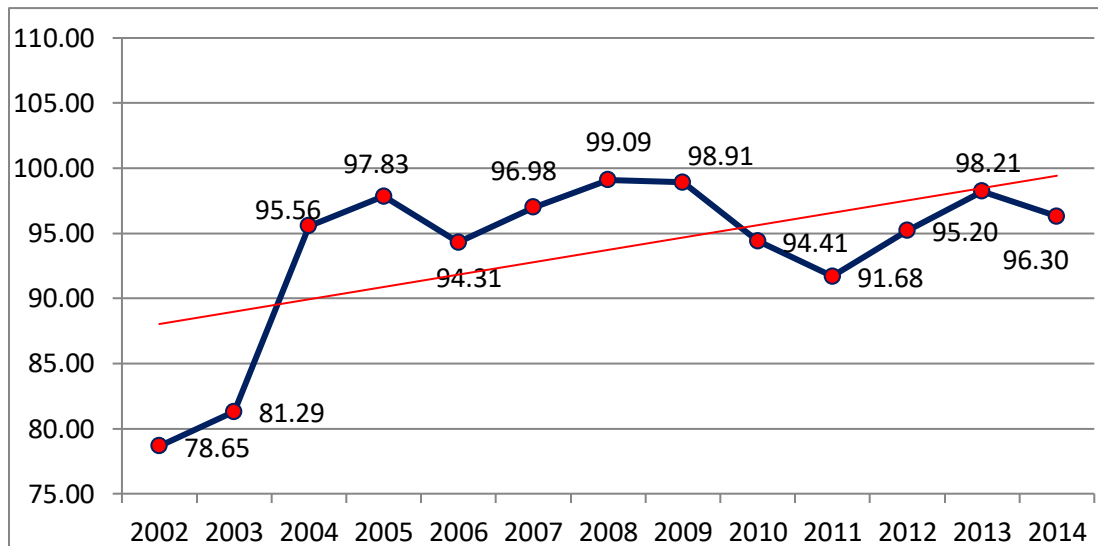


**M. Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)**

Data kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) 10 tahun terakhir berada diatas 90% keatas, tahun 2011 mencapai 91,68%, akan tetapi kembali membaik sampai 98,21 % pada tahun 2013, dan turun kembali menjadi 96,30 tahun 2014, dari garis kecenderungan terlihat naik hal ini berarti bahwa kinerja mempunyai nilai positif.

**Grafik 4.2.12**

**Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Tahun 2002-2014**

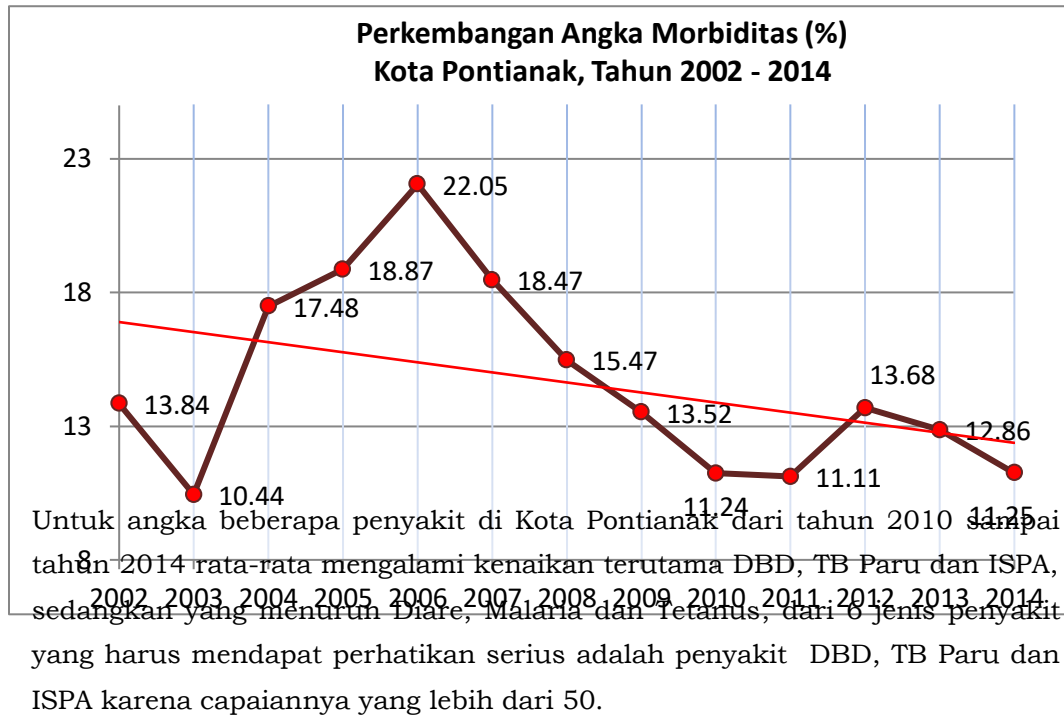


**N. Angka Morbiditas (%)**

Perkembangan data Morbitas (%) tahun 2002-2014 cenderung membaik dimana tahun 2006 mencapai 22,05% dan terus menurun sampai 11,25%

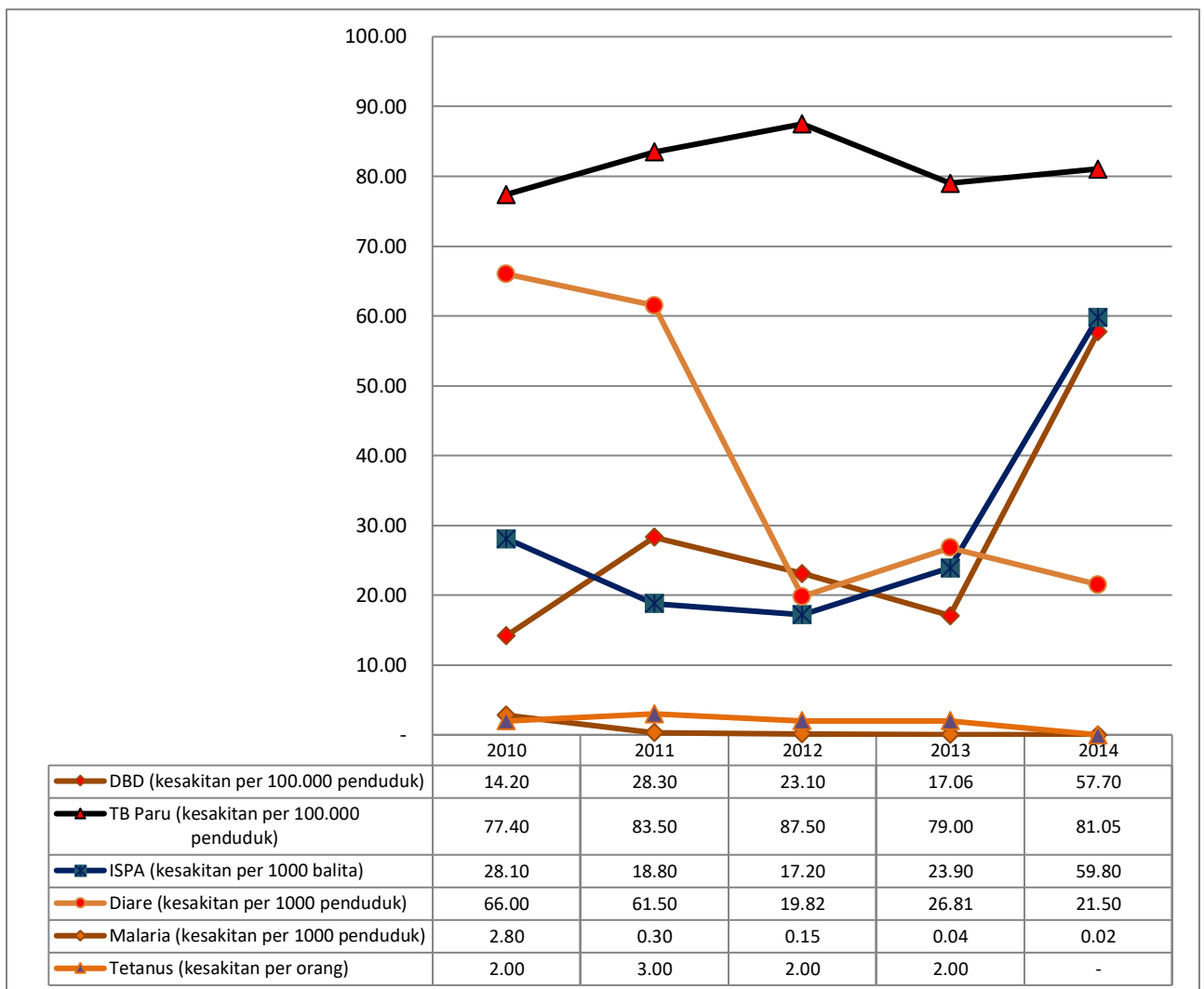
pada tahun 2014. dari garis kecenderungan terlihat menurun tajam hal ini berarti bahwa kinerja baik dan efektif.

Grafik 4.2.13



Grafik 4.2.14

Perkembangan beberapa jenis penyakit Tahun 2010-2014



### M. Capaian Indikator-Indikator Bidang Kesehatan

Secara umum, capaian bidang kesehatan sudah baik. Sebagian besar capaian indikator menunjukkan trend positif sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesehatan berjalan cukup efektif. Namun, jika capaian tersebut diperhadapkan dengan capaian provinsi maka ada indikator angkanya masih tinggi.

**Tabel 4.2.1**  
**Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kota Pontianak, Provinsi & Nasional**  
**Tahun 2014**

Indikator Kesehatan	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Nasional
<b>Indikator Utama</b>			
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	41		
Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	3,66		
Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	7		
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	9,96%		
<b>Indikator Pendukung</b>			
Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)	19,22	50,8	54,2
Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	8,69	13,6	16,8
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,2%	10,3%	5,7%
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	8,72%	16,2%	13,9%
Jarak Puskesmas Terdekat (km)	1,52 Km	20,58 Km	8,97 Km
Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)	<b>26,96%</b>	26,53%	29,22%
Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)	53,41%	62,99%	61,05%
Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	96,3%	69,09%	84,30%
Angka Morbiditas (%)	11,25%	13,14%	14,01%

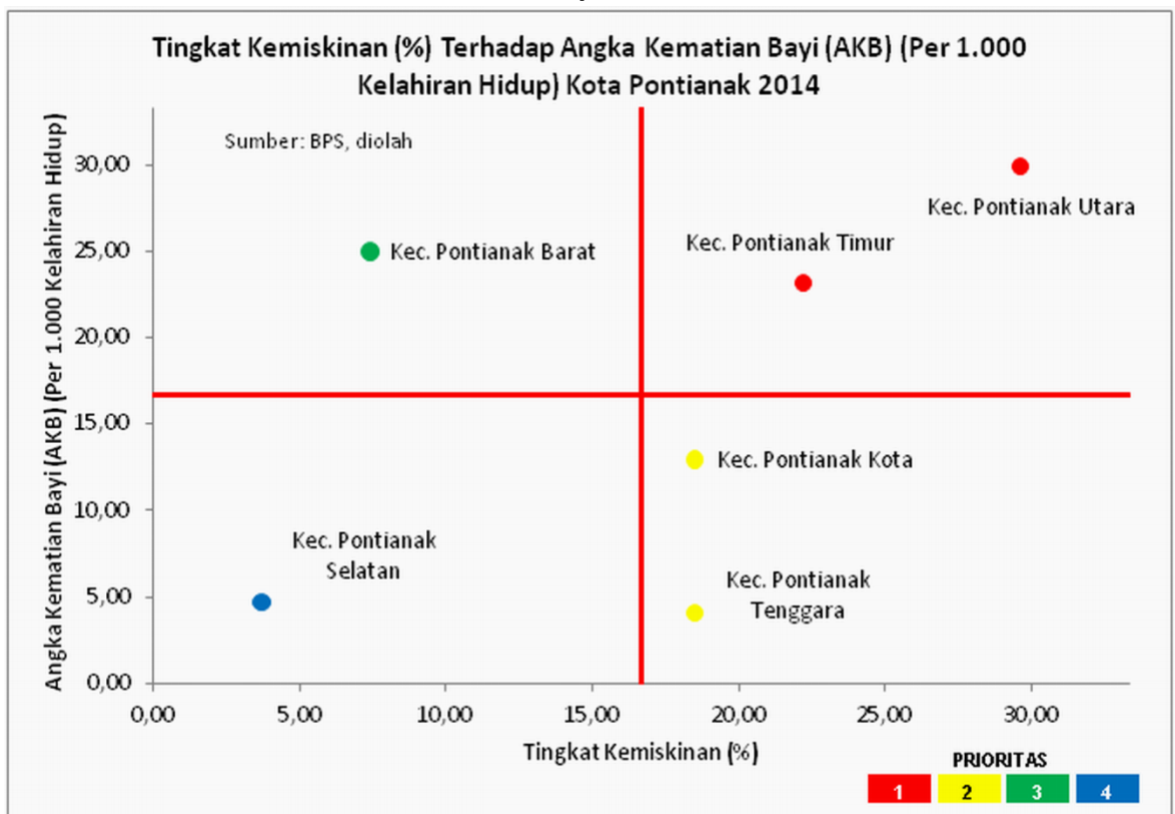
Indikator-indikator dengan warna merah meskipun trend-nya positif namun menunjukkan bahwa capaian angkanya masih lebih tinggi daripada capaian Provinsi persentasi penduduk dengan keluhan kesehatan, sedangkan beberapa indikator tidak bisa dibandingkan karena tidak ada provinsi dan Nasional



• **Prioritas Wilayah Intervensi**

Untuk penanganan wilayah prioritas tingkat kemiskinan terhadap angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dapat dilihat pada grafik di bawah ini, wilayah prioritas 1 berada di kecamatan Pontianak Utara dan Timur, wilayah prioritas 2 di kecamatan Pontianak Kota dan Tenggara, prioritas 3 di kecamatan Pontianak Barat dan prioritas 4 di kecamatan Pontianak Selatan.

**Grafik 4.2.15**  
**Prioritas Wilayah Intervensi**



### 4.3. Bidang Pendidikan

Dalam mengukur capaian bidang pendidikan, dipilih beberapa indikator. Definisi dari indikator tersebut adalah:

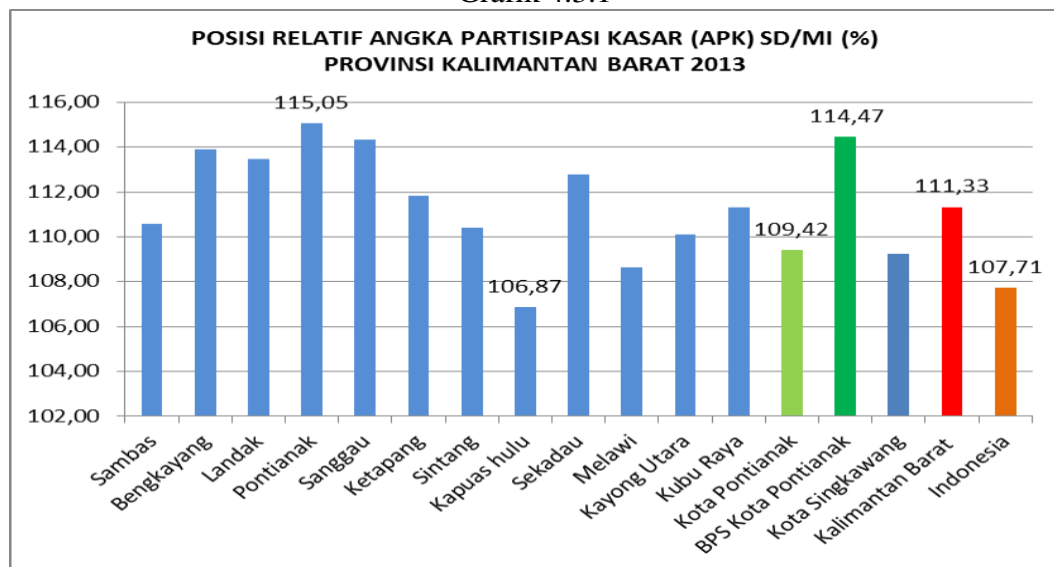
- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
- Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Perbandingan jumlah siswa/penduduk kelompok usia yang bersekolah ditingkat pendidikan (h) pada Tahun (t) dengan Jumlah penduduk kelompok usia. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikannya itu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun.

#### A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

##### APK SD (%)

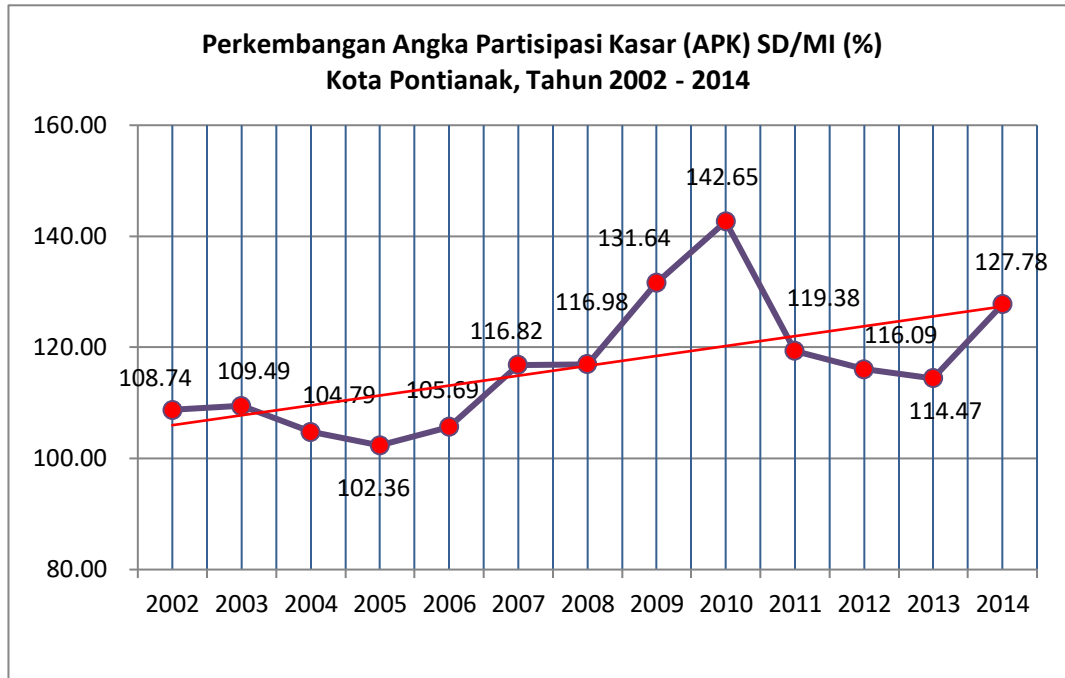
Rasio APK SD Tahun 2013 pada angka Nasional sebesar 107,71%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 111,33%. Untuk kota Pontianak versi BPS Kalimantan Barat sebesar 109,42 dan versi BPS Kota Pontianak 114,47%.

Grafik 4.3.1



Untuk perkembangan antar waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kota Pontianak tertinggi sampai Tahun 2010 sebesar 142,65%, dan kembali menurun menjadi 127,78% pada tahun 2014. Dari grafik (APK) SD/MI menunjukkan trend positif dimana garis kecenderungannya naik.

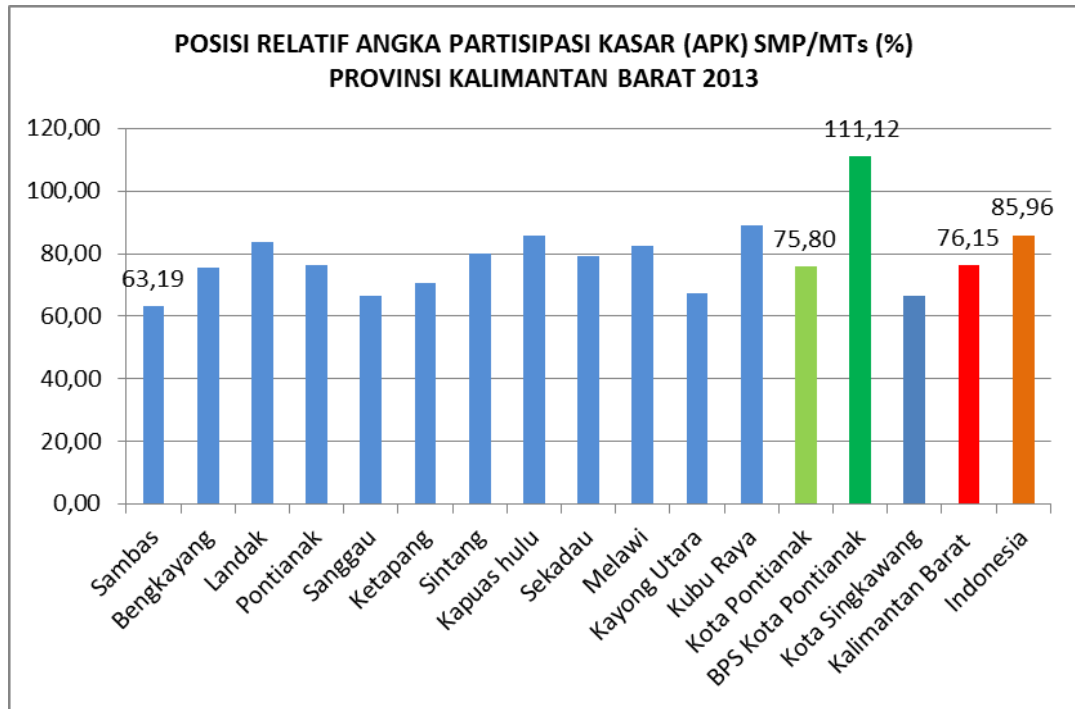
Grafik 4.3.2



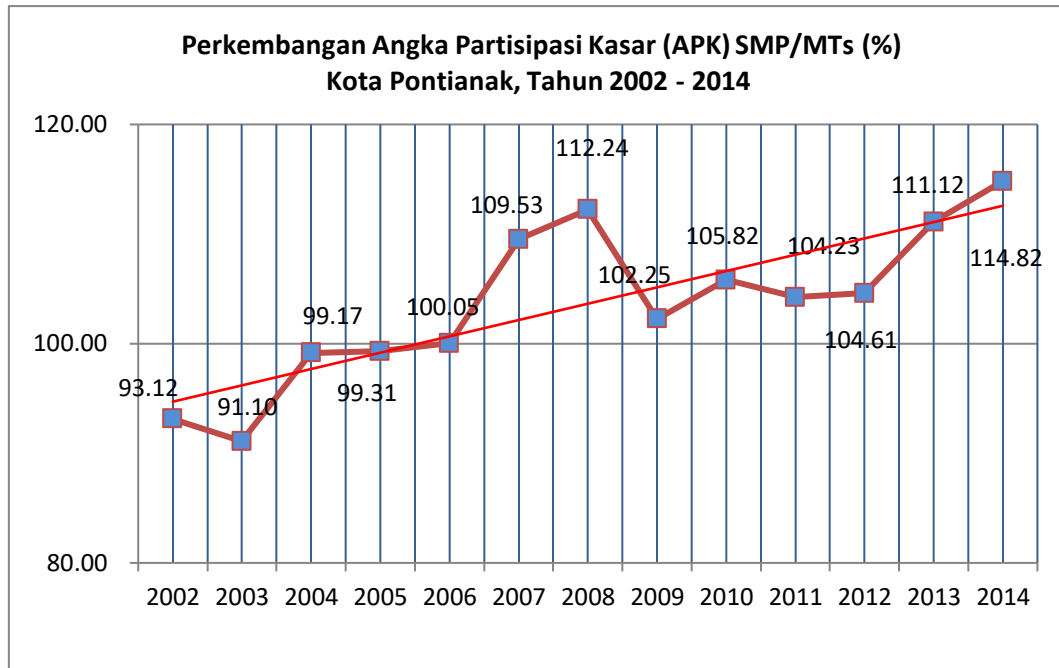
**APK SMP/MTS (%)**

Rasio APK SMP Tahun 2013 pada Angka Nasional sebesar 85,96%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 75,15%. Untuk kota Pontianak versi BPS Kalimantan Barat sebesar 75,80% dan versi BPS Kota Pontianak 111,12%

Grafik 4.3.3



Grafik 4.3.4

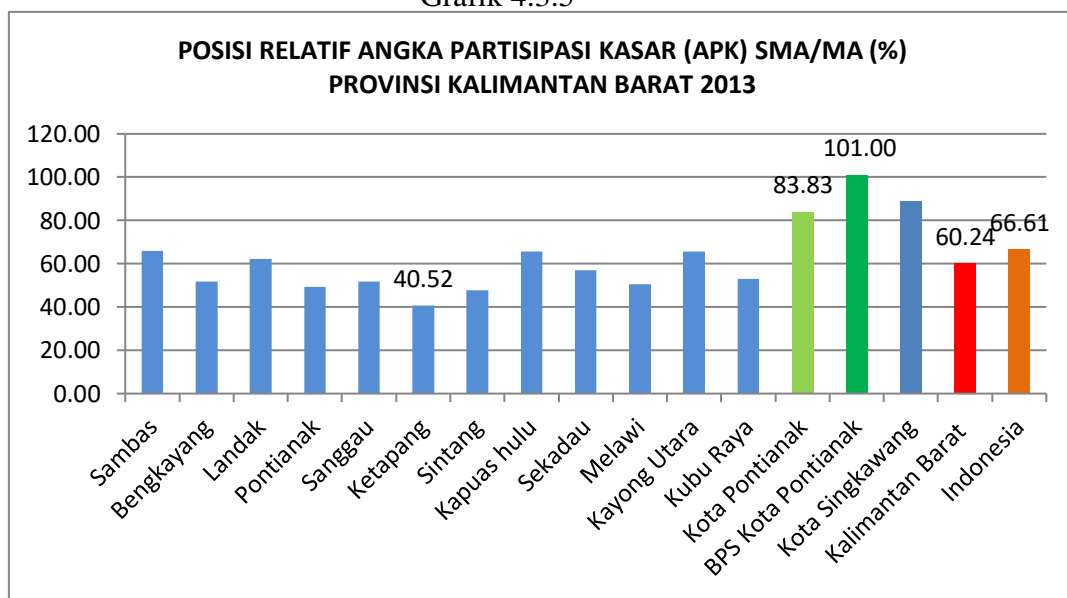


perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kota Pontianak tertinggi sampai Tahun 2008 sebesar 112,24%, dan angka tersebut turun naik menjadi 114,82% pada tahun 2014. Dari grafik (APK) SMP/MTs menunjukkan trend positif dimana garis kecenderungannya naik.

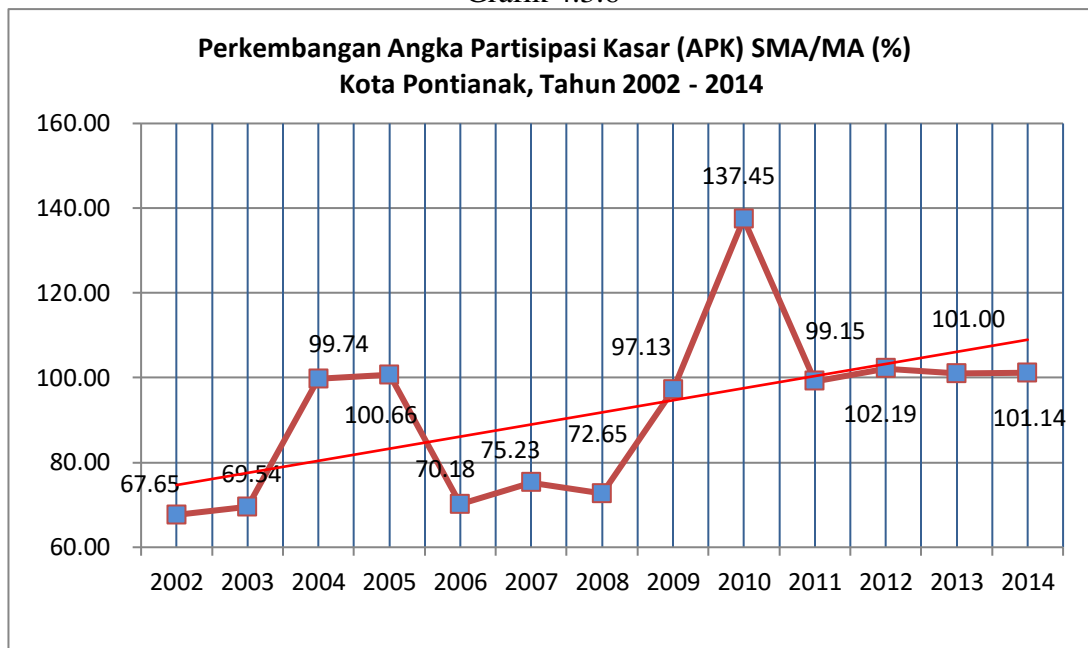
**APK SMA/MA (%)**

Rasio APK SMA/MA Tahun 2013 pada Angka Nasional sebesar 66,61%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 60,24%. Untuk kota Pontianak versi BPS Kalimantan Barat sebesar 83,83% dan versi BPS Kota Pontianak 101,00%

Grafik 4.3.5



Grafik 4.3.6



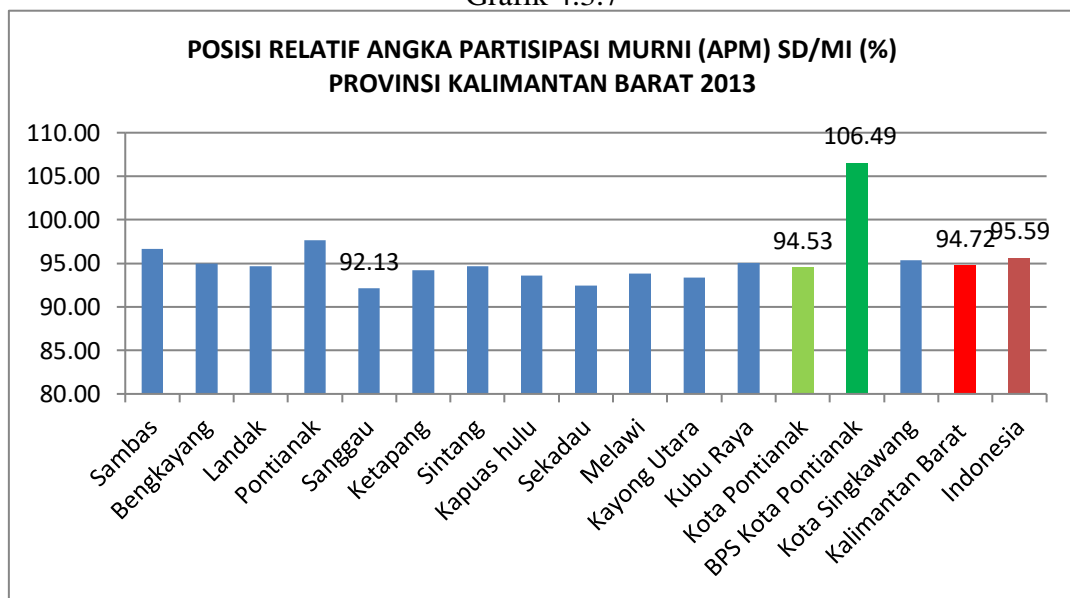
perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kota Pontianak tertinggi sampai Tahun 2010 sebesar 137,45%, dan menurun kembali menjadi 101,14% pada tahun 2014. Dari grafik (APK) SMA/MA menunjukkan trend positif dimana garis kecenderungannya naik.

**B. Angka Partisipasi Murni (APM)**

**APM SD/MI (%)**

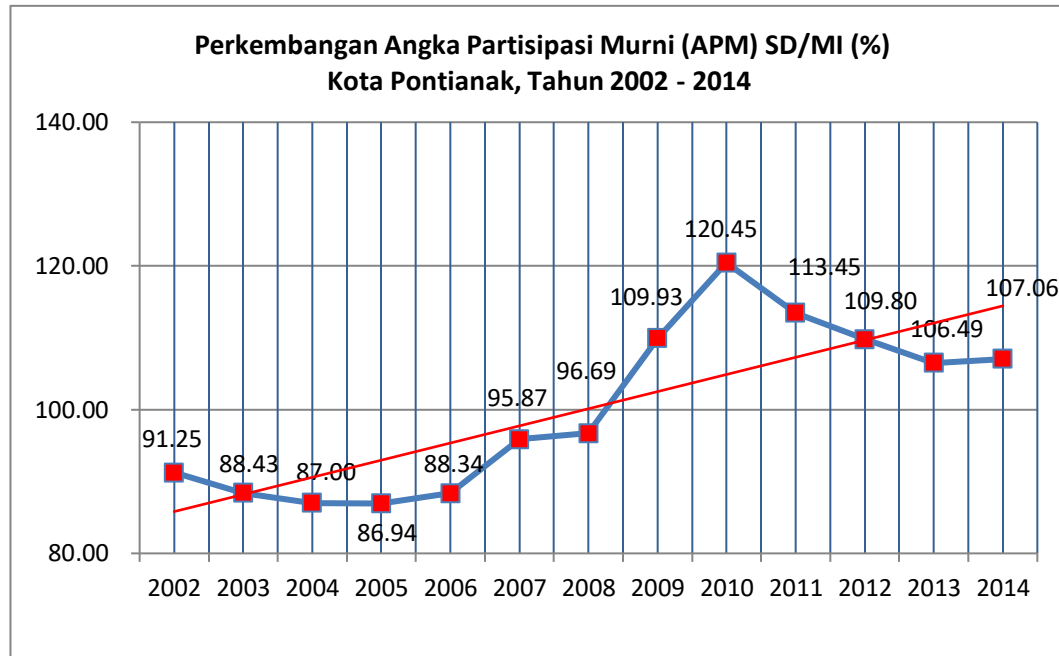
Rasio APM SD/MI Tahun 2013 pada Angka Nasional sebesar 95,59%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 94,74%. Untuk kota Pontianak versi BPS Kalimantan Barat sebesar 94,53% dan versi BPS Kota Pontianak 106,49%.

Grafik 4.3.7



Untuk perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kota Pontianak tertinggi sampai Tahun 2010 sebesar 120,45%, dan kembali menurun menjadi 107,06% pada tahun 2014. Dari grafik kecenderungan memperlihatkan trend positif hal ini berarti efektifitas dari (APM) SD/MI berjalan dengan baik.

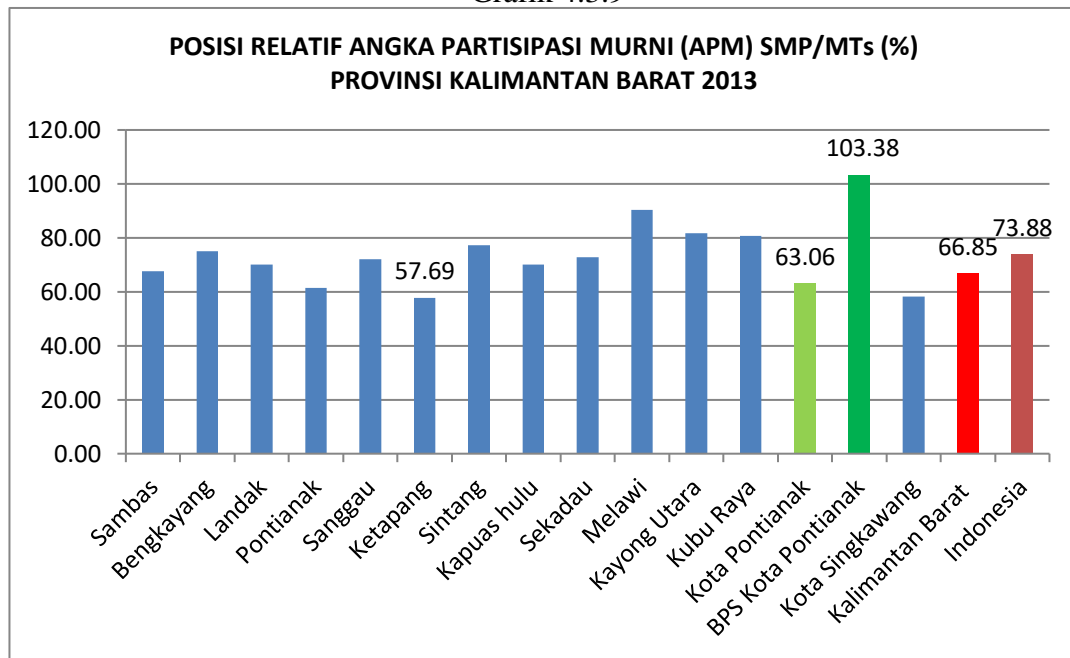
Grafik 4.3.8



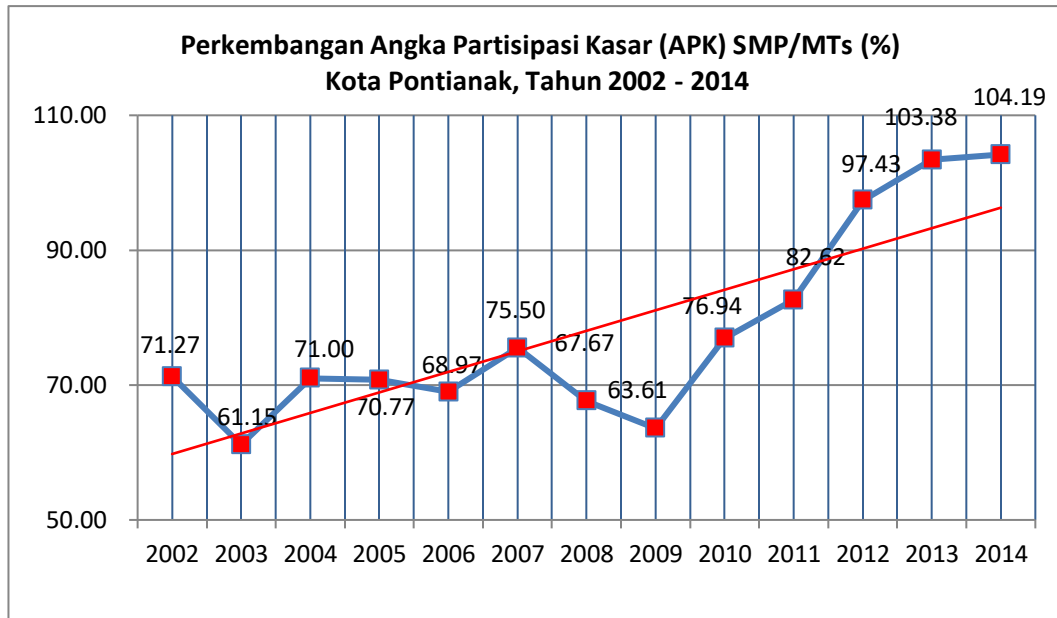
**APM SMP/MTS (%)**

Rasio APM SMP/MTs Tahun 2013 pada Angka Nasional sebesar 73,88%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 66,85%. Untuk kota Pontianak versi BPS Kalimantan Barat sebesar 63,06% dan versi BPS Kota Pontianak 103,38%.

Grafik 4.3.9



Grafik 4.3.10

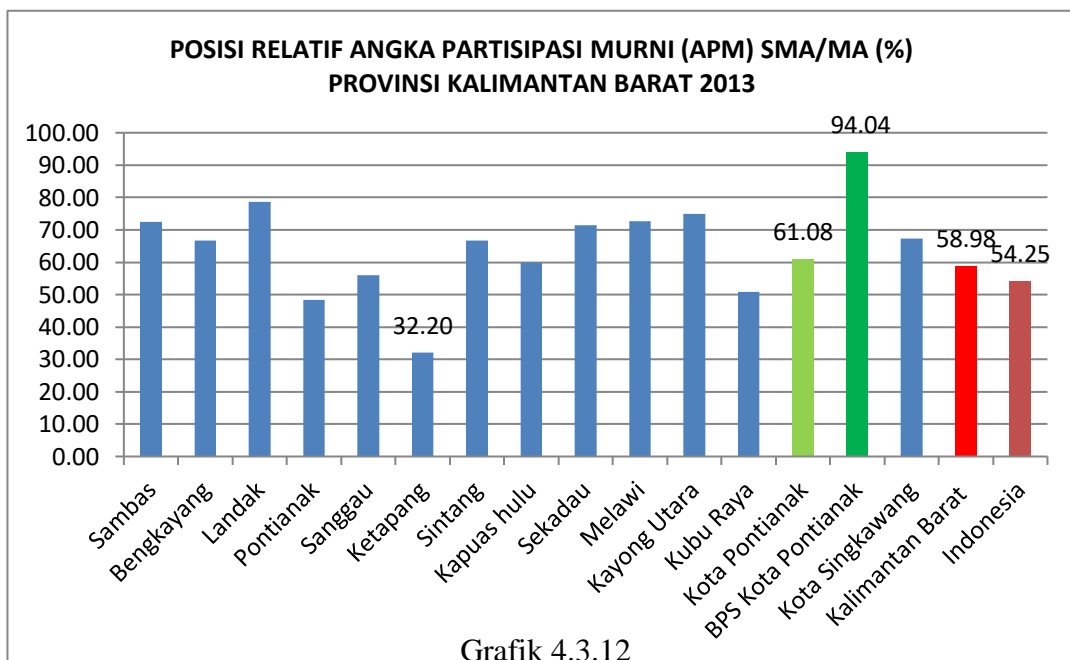


perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Pontianak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan tertinggi sampai Tahun 2014 sebesar 104,19%. Dari efektifitas menunjukan trend positif dimana garis kecendrungan yang naik, hal ini berarti kinerja untuk (APM) SMP/MTs berjalan dengan baik

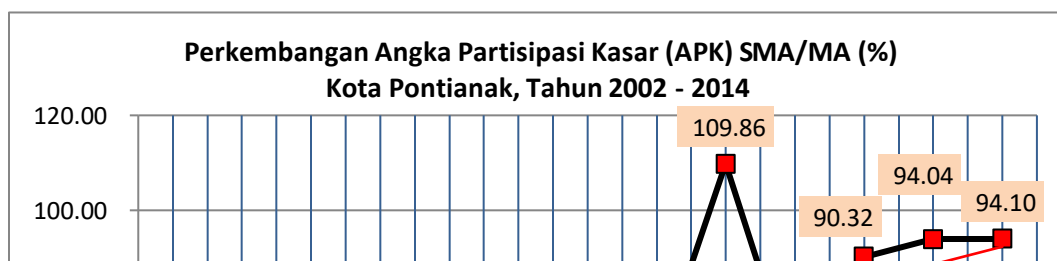
**APM SMA/MA (%)**

Rasio APM SMA/MA Tahun 2013 pada Angka Nasional sebesar 54,25%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 58,98%. Untuk kota Pontianak versi BPS Kalimantan Barat sebesar 61,08% dan versi BPS Kota Pontianak 94,04%.

Grafik 4.3.11



Grafik 4.3.12



perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Pontianak tertinggi sampai Tahun 2010 sebesar 109,86%, dan kembali menurun menjadi 64,86% pada tahun 2011, dan kembali naik menjadi 94,10% tahun 2014. Dari efektifitas menunjukkan trend positif dimana garis kecenderungan yang naik, hal ini berarti kinerja untuk (APM) SMA/MA berjalan dengan baik

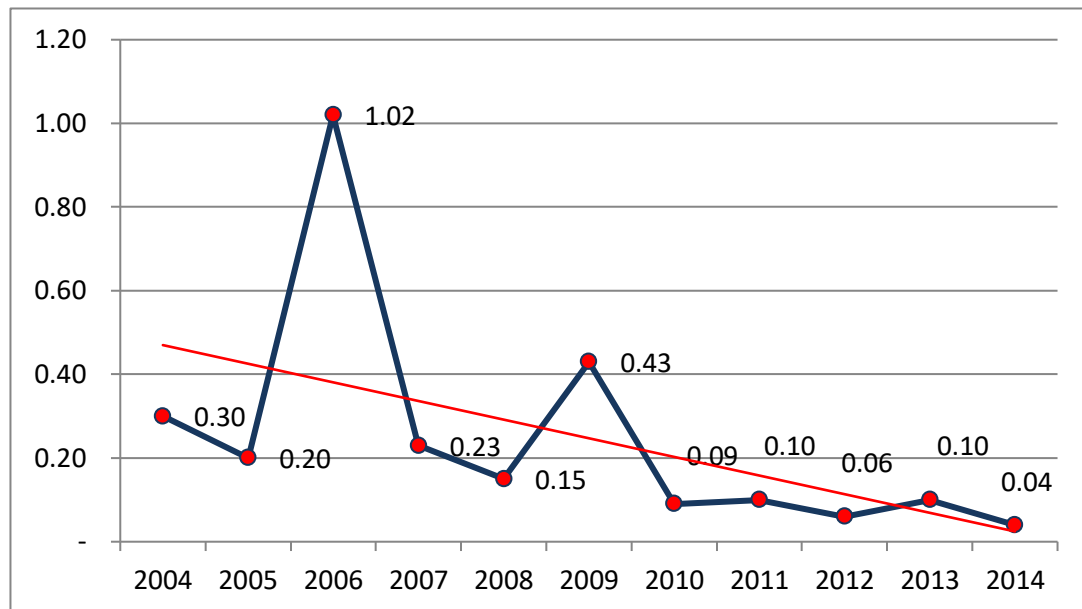
### **C. Angka Putus Sekolah**

- **Angka Putus Sekolah SD/MI (%)**

Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun di kota Pontianak pada posisi tahun terakhir sebesar 0,04% tahun 2014. Angka ini masih relatif kecil, namun jika dilihat dari trend antar waktu pernah mencapai 1,02% pada tahun 2006 dan terus mengalami penurunan. Dari grafik terjadi kecenderungan bergerak turun sehingga semakin sedikit penduduk miskin yang putus sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun.

Grafik 4.3.13  
**Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Tahun 2004-2014**



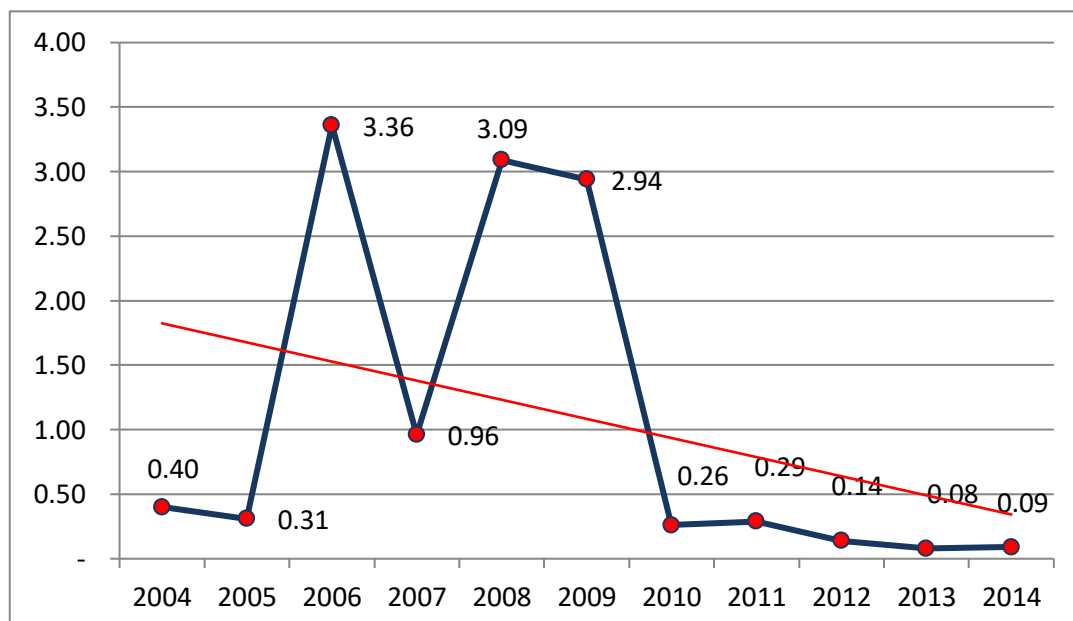


- **Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)**

Angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun di kota Pontianak pada posisi tahun terakhir sebesar 0,09% tahun 2014. Angka ini masih relatif kecil, namun jika dilihat dari trend antar waktu pernah mencapai 3,36% pada tahun 2006 dan terus mengalami penurunan. Dari grafik terjadi kecenderungan bergerak turun sehingga semakin sedikit penduduk miskin yang putus sekolah pada kelompok usia 13-15 tahun, hal ini menunjukkan kinerja yang baik.

Grafik 4.3.14

**Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Tahun 2004-2014**

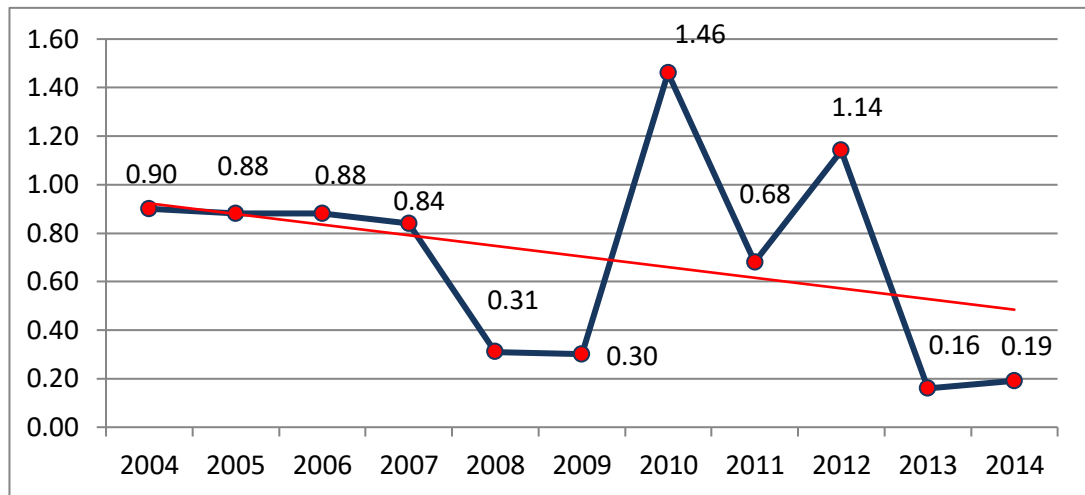


- **Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)**

Angka putus sekolah penduduk miskin usia 16-18 tahun antar waktu cenderung positif menurun. Angka tertinggi terjadi tahun 2010 sebesar 1,26%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2011 dan 2013 dengan angka terendah mencapai 0,19%. Kecenderungan penurunan ini perlu dijaga trend-nya sehingga mencapai titik terendah sesuai target penurunan.

Grafik 4.3.15

**Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) Tahun 2004-2014**

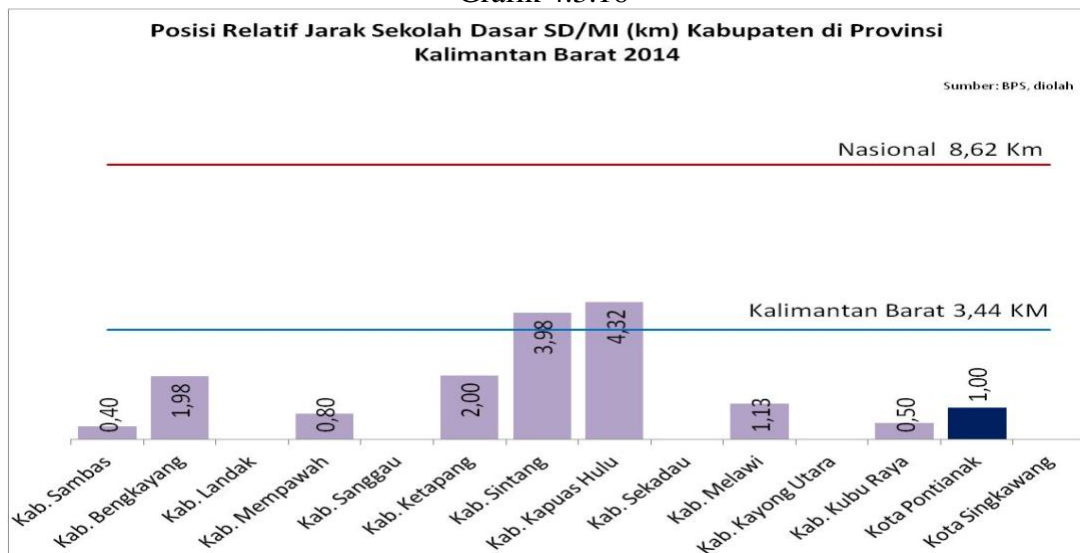


**D. Jarak Fasilitas Pendidikan Terdekat**

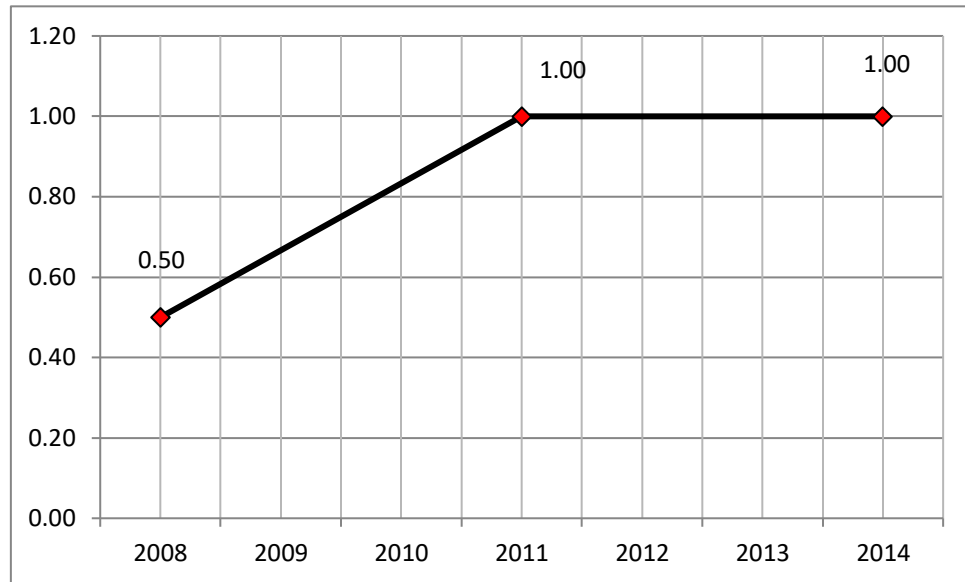
**Jarak SD/MI (Km)**

Rata-rata Jarak Sekolah Dasar (SD) ditingkat Provinsi Kalimantan Barat cukup baik yakni diangka 3.44 Km, jika dibandingkan dengan jarak SD/MI Secara Nasional yaitu 8,62 Km. Menurut standar pelayanan minimal, jarak maksimal ketersediaan fasilitas pendidikan ini adalah 3 km. Sedangkan Jarak SD/MI untuk Kota Pontianak 1 Km

Grafik 4.3.16



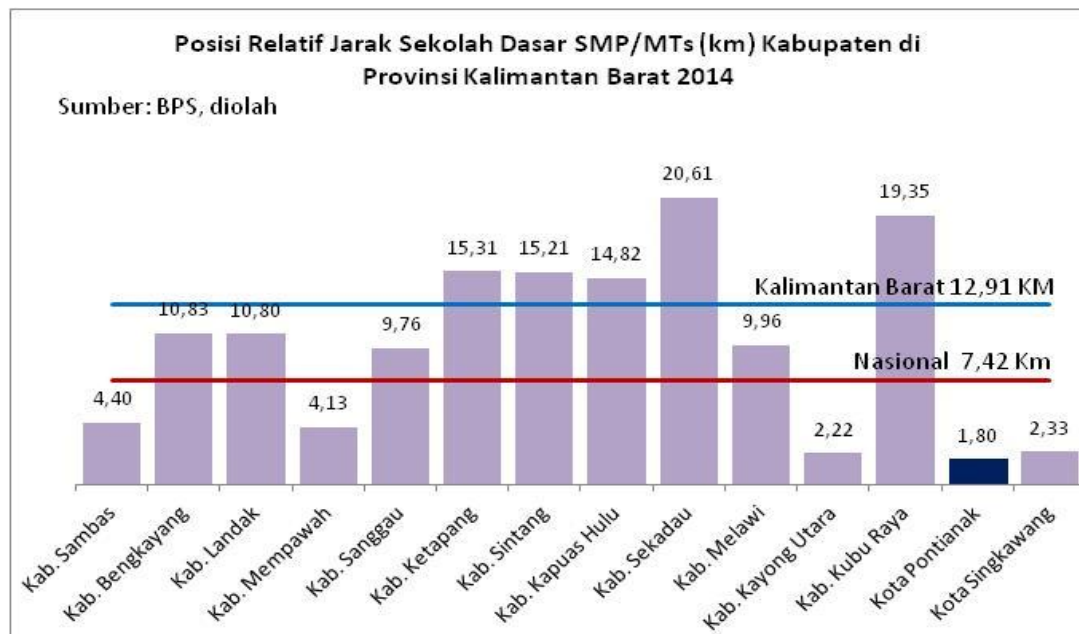
Grafik 4.3.17  
**Perkembangan Jarak Sekolah SD/MI (Km) Tahun 2008-2014**



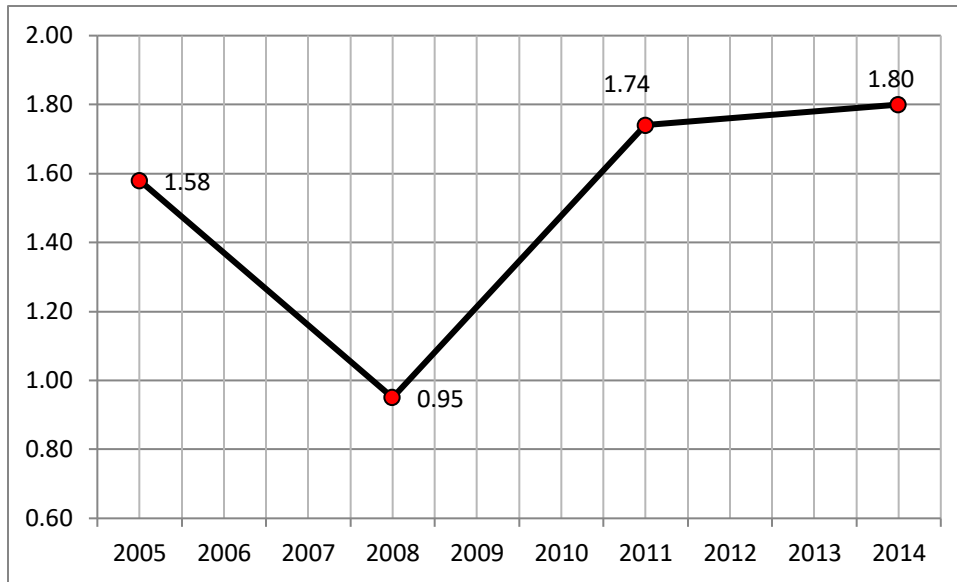
**Jarak SMP/MTs (Km)**

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang cukup luas sehingga menyulitkan pembangunan infrastuktur pendidikan. Hal ini diperlihatkan dengan capaian yang pada indikator jarak SMP di Kalimantan Barat yang masih menempatkannya diangka 12,91 Km dan jauh berada dibawah nasional sebesar 7.42%. jarak maksimal ketersediaan fasilitas pendidikan setingkat SMP ini adalah 6 km yang berarti jarak di Kalimantan Barat belum memenuhi standar yang ada. Untuk ditingkat Kota, posisi capaian Kota Pontianak baik diantara kabupaten kota lainnya yaitu 1,8 Km.

Grafik 4.3.18



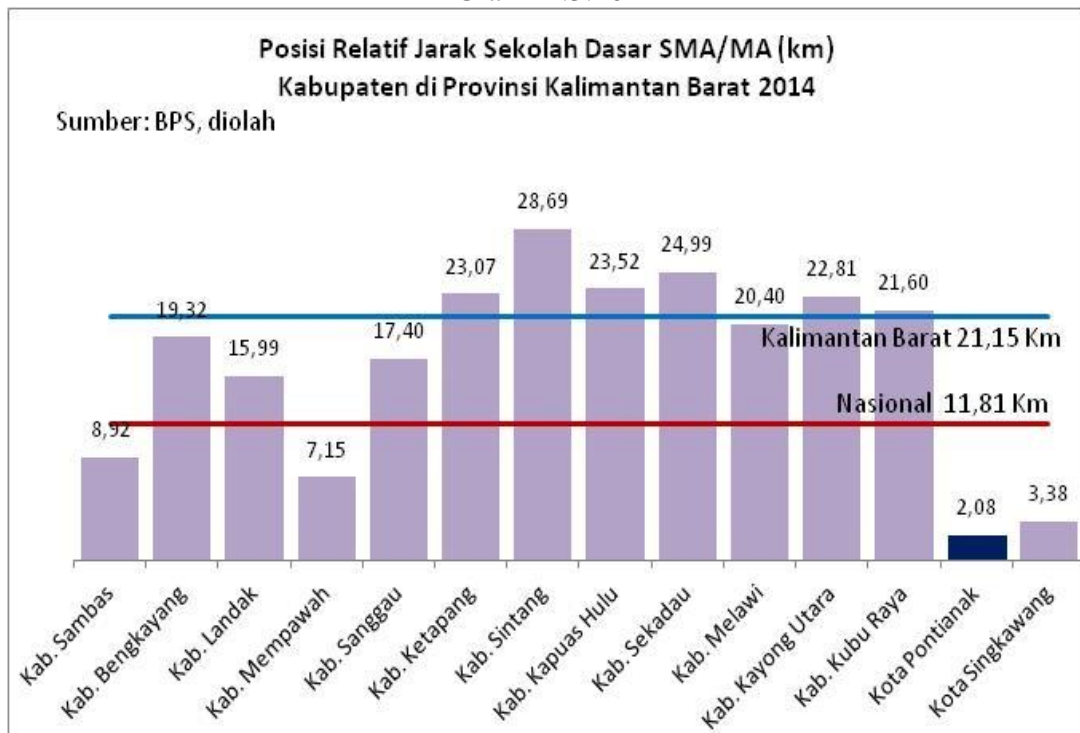
Grafik 4.3.19  
Perkembangan Jarak Sekolah SMP/MTs (Km) Tahun 2005-2014



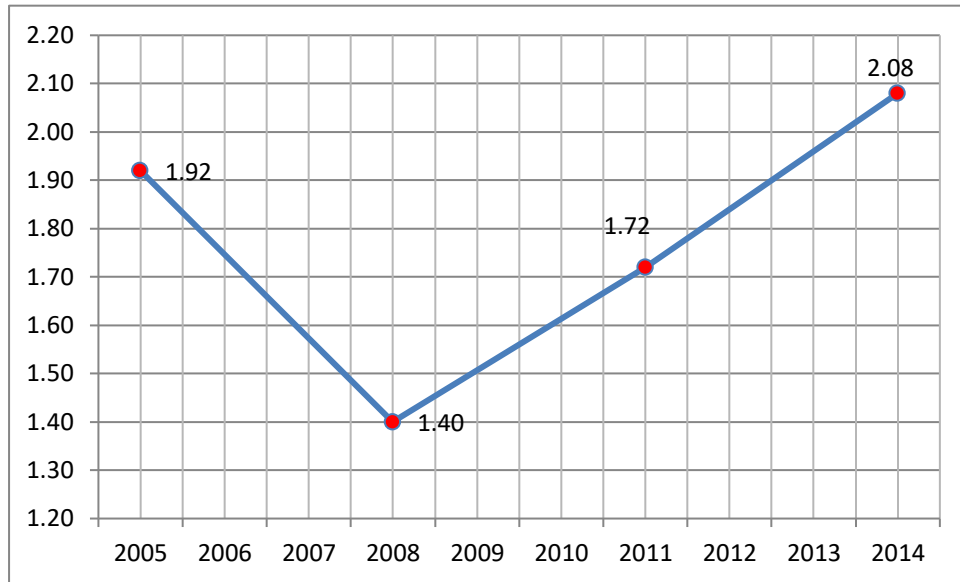
**Jarak SMA/MA (Km)**

Jarak SMA/MA pada tahun 2014 capaian Kalimantan Barat sebesar 21.15 (Km) dan masih di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 11.81 Km, Sedangkan Kota Pontianak relatif jauh lebih baik yaitu sebesar 2,08 Km.

Grafik 4.3.20



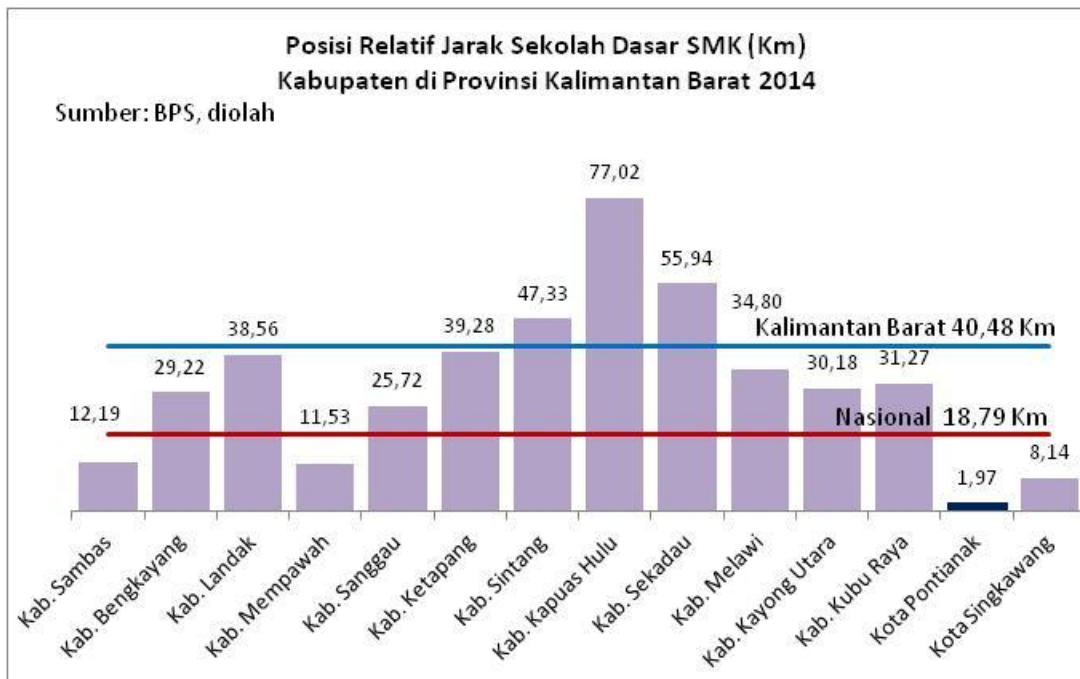
Grafik 4.3.21  
**Perkembangan Jarak Sekolah SMA/MA (Km) Tahun 2005-2014**



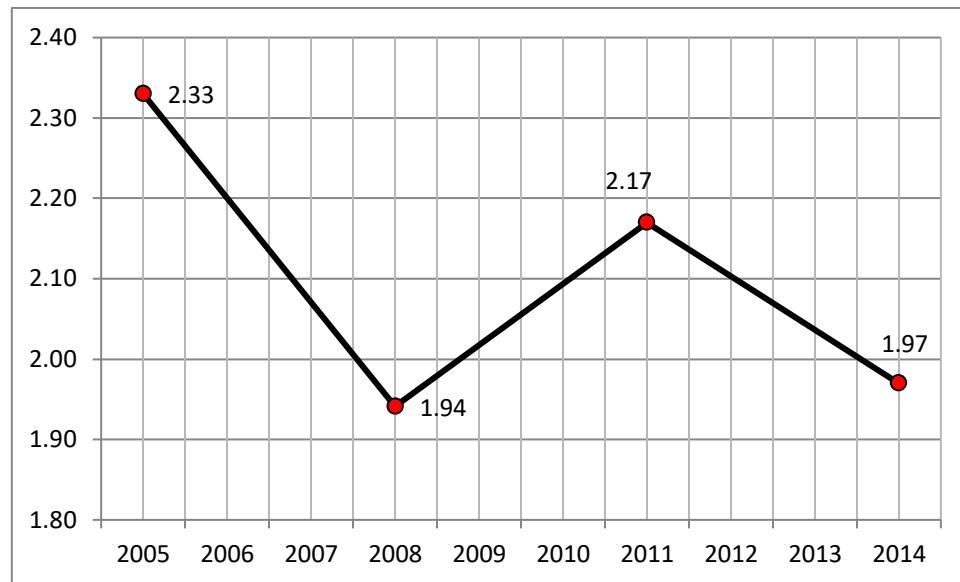
**Jarak SMK (Km)**

Jarak SMK Ditingkat Provinsi, tahun 2014 untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah 40,48 Km dan masih di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 18.79 Km. Untuk Kota Pontianak relatif jauh lebih baik yaitu sebesar 1,97 Km.

Grafik 4.3.22



Grafik 4.3.23  
Perkembangan Jarak Sekolah SMK (%) Tahun 2005-2014

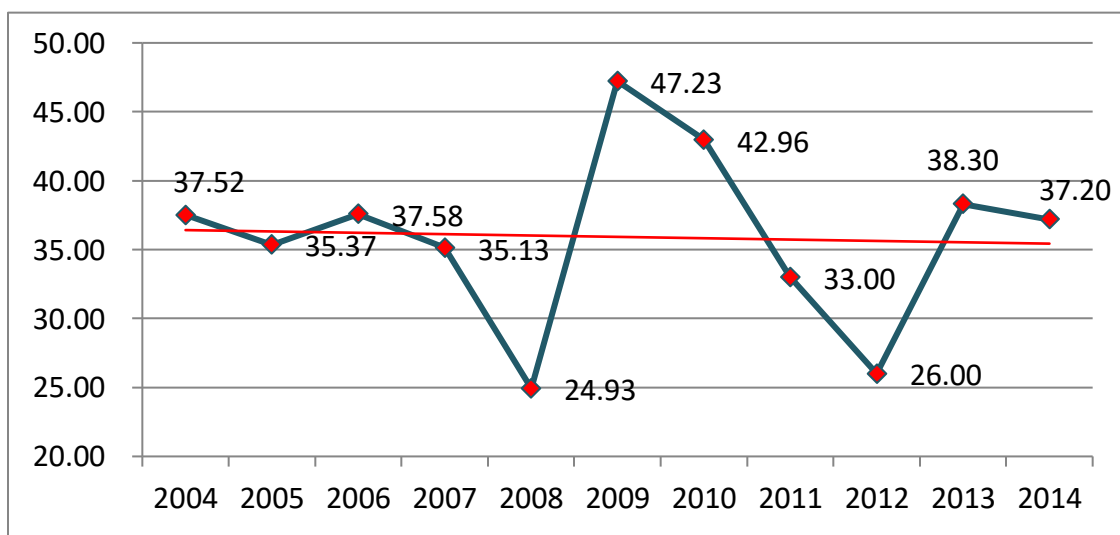


#### D. Rasio Siswa/Kelas

##### Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa)

Perkembangan rasio siswa per kelas SD/MI dari tahun 2004 sampai tahun 2014 menunjukkan angka berfluktuasi yang terendah pada tahun 2008 sebesar 24,93 siswa per kelas dan yang paling tinggi pada tahun 2009 sebesar 47,23 siswa per kelas. Merujuk kepada Undang-undang pendidikan, standar ideal rasio siswa per kelas sebesar 32, pada tahun 2013 terjadi peningkatan 38,30 dan turun kembali pada tahun 2014 menjadi 37,20, dilihat dari grafik tren cenderung menurun, hal ini merupakan hal yang positif.

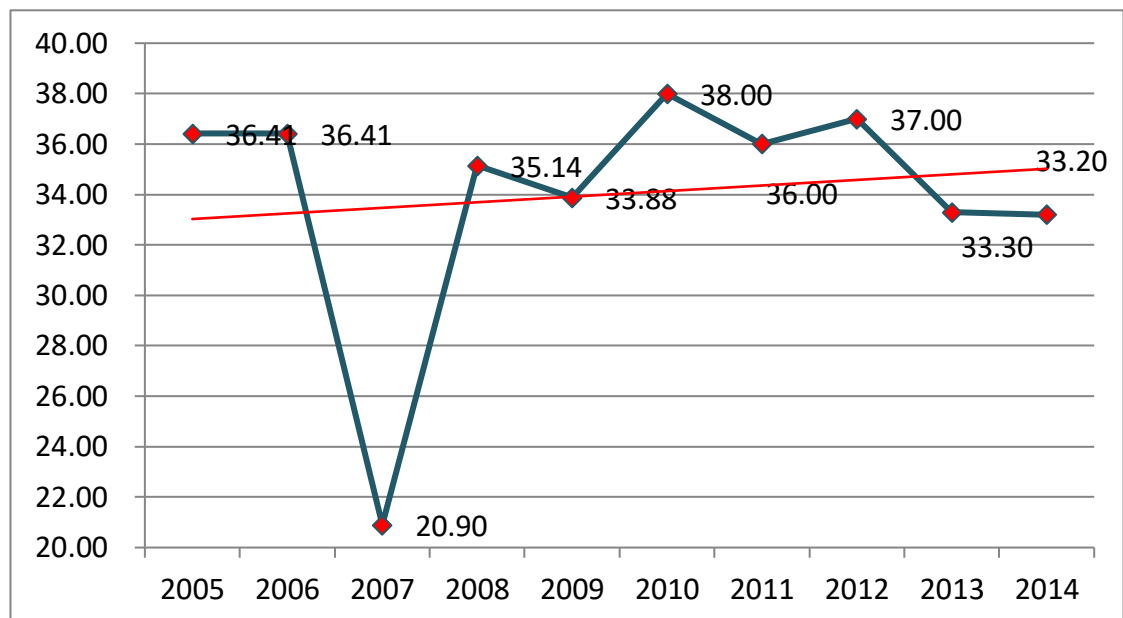
Grafik 4.3.24  
Rasio Siswa/Kelas SD/MI Tahun 2004 - 2014



### Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa)

Rasio siswa per kelas SMP/MTs dari tahun 2005 sampai tahun 2013 menunjukkan trend negatif naik, dimana pada tahun 2009 sebesar 20,90 siswa per kelas kemudian meningkat tajam menjadi 35,14 siswa per kelas pada tahun 2008, dan tertinggi 38 siswa per kelas pada tahun 2010 dan pada tahun 2014 33,20 siswa per kelas Angka tersebut agak lebih tinggi dari rasio standar.

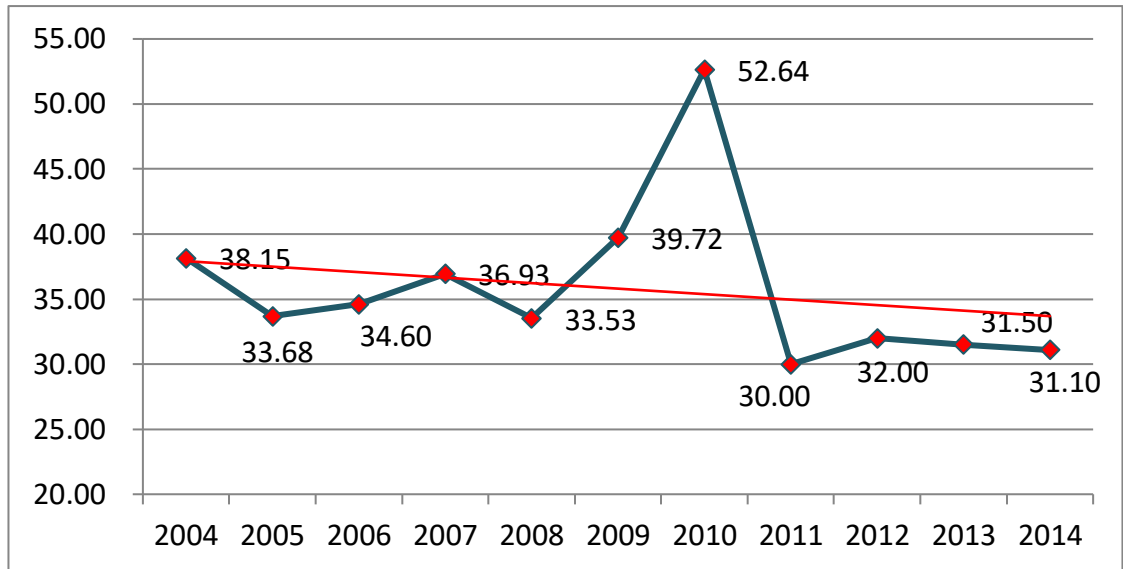
Grafik 4.3.25  
Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) 2005 - 2014



### Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa)

Pada periode tahun 2004 sampai dengan 2013, perkembangan rasio siswa per kelas SMA/SMK/MA menurun positif secara signifikan dari angka 38,15 menjadi 31,00 siswa per kelas, yang tertinggi pada tahun 2010 sebesar 52,64 siswa per kelas, dimana sebagian kelas harus diisi oleh siswa yang masuk pagi dan sore. Pada tahun 2014 sebesar 31,10 siswa per kelas, jumlah ini sudah mendekati angka yang ideal

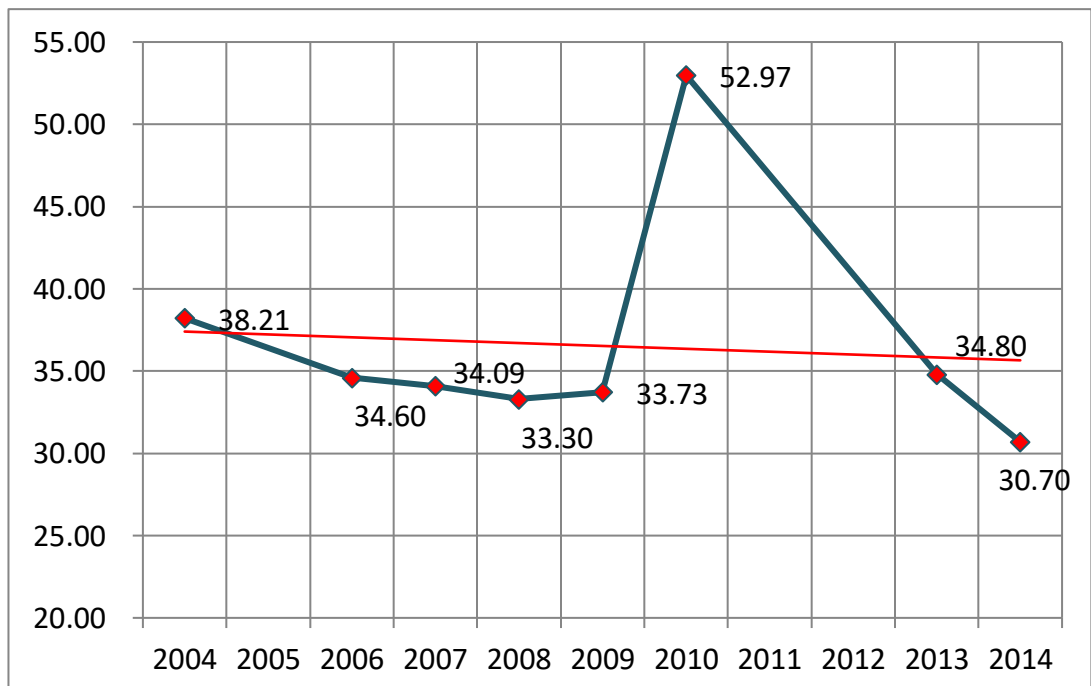
Grafik 4.3.26  
**Rasio Siswa/Kelas SMA/MA Tahun 2004 - 2014**



**Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa)**

Pada periode tahun 2004 sampai dengan 2014, perkembangan rasio siswa per kelas SMK menurun positif secara signifikan dari angka 52,97 tahun 2010 menjadi 34,80 siswa per kelas tahun 2013, tinggi angka rasio tersebut karena sebagian kelas harus diisi oleh siswa yang masuk pagi dan sore. Pada tahun 2014 sebesar 30,70 siswa per kelas, jumlah ini sudah mendekati angka yang ideal

Grafik 4.3.27  
**Rasio Siswa/Kelas SMK Tahun 2004 - 2014**



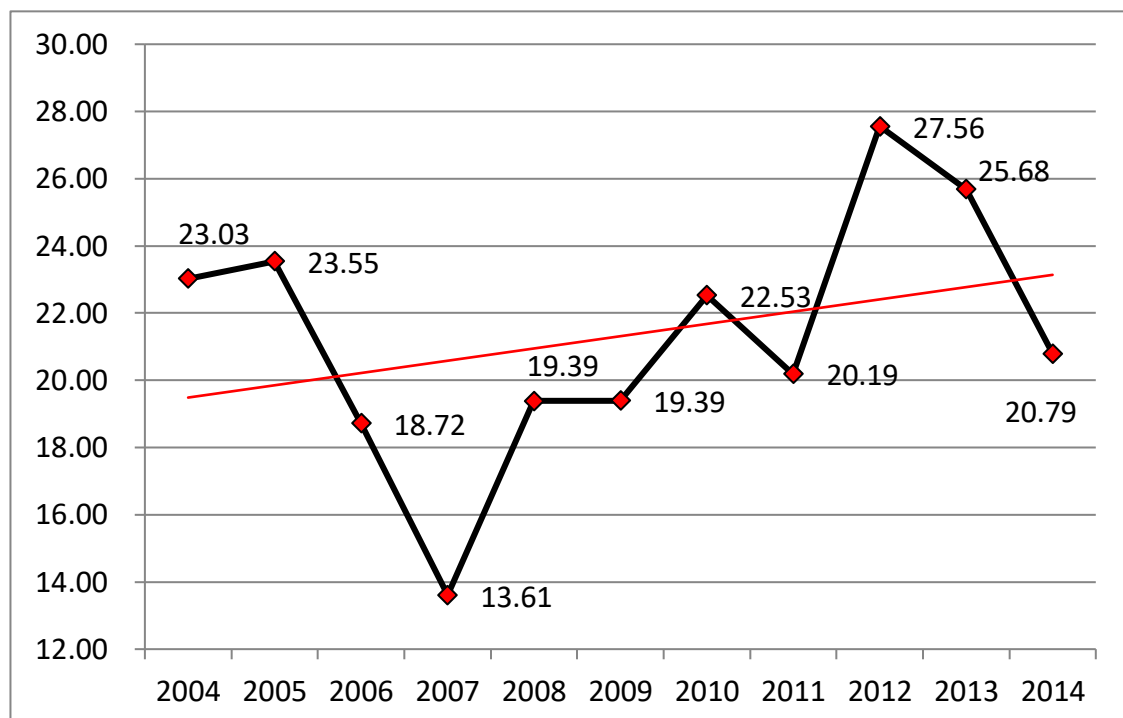
**E. Rasio Siswa/Guru**



### Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa)

Perkembangan rasio siswa per guru pada tingkat SD/MI periode tahun 2004 sampai tahun 2014 menunjukkan tren naik yang berarti negatif artinya, semakin banyak jumlah siswa yang ditangani oleh seorang guru, maka tidak mudah dalam penanganan proses belajar mengajar di kelas. Nilai terendah pada tahun 2007 sebesar 13,61 menjadi 25,68 siswa per guru pada tahun 2013, dan turun kembali menjadi 20,79 tahun 2014.

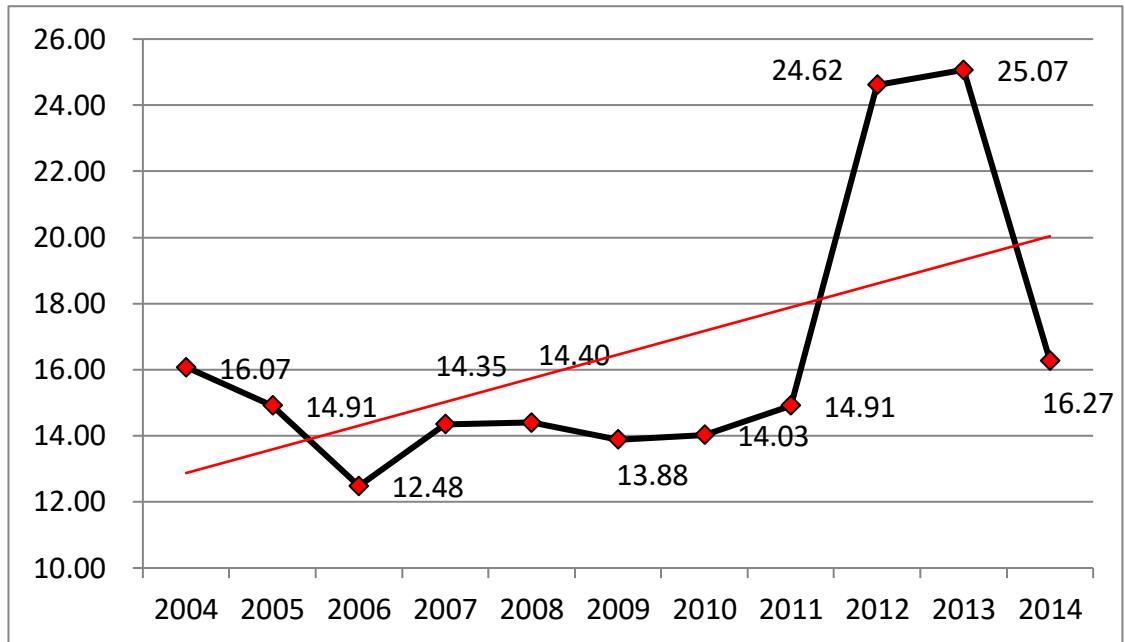
Grafik 4.3.28  
Rasio Siswa/Guru SD/MI Tahun 2004 - 2014



### Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa)

Rasio siswa per guru SMP/MTs periode 2004 – 2013 mengalami kenaikan tajam dari tahun 2006 sebesar 12,48 menjadi 25,07 siswa per guru pada tahun 2013. Namun setelah itu turun pada 16,27 siswa per guru pada tahun 2014. Meskipun tren yang terjadi naik namun angkanya masih relatif kecil.

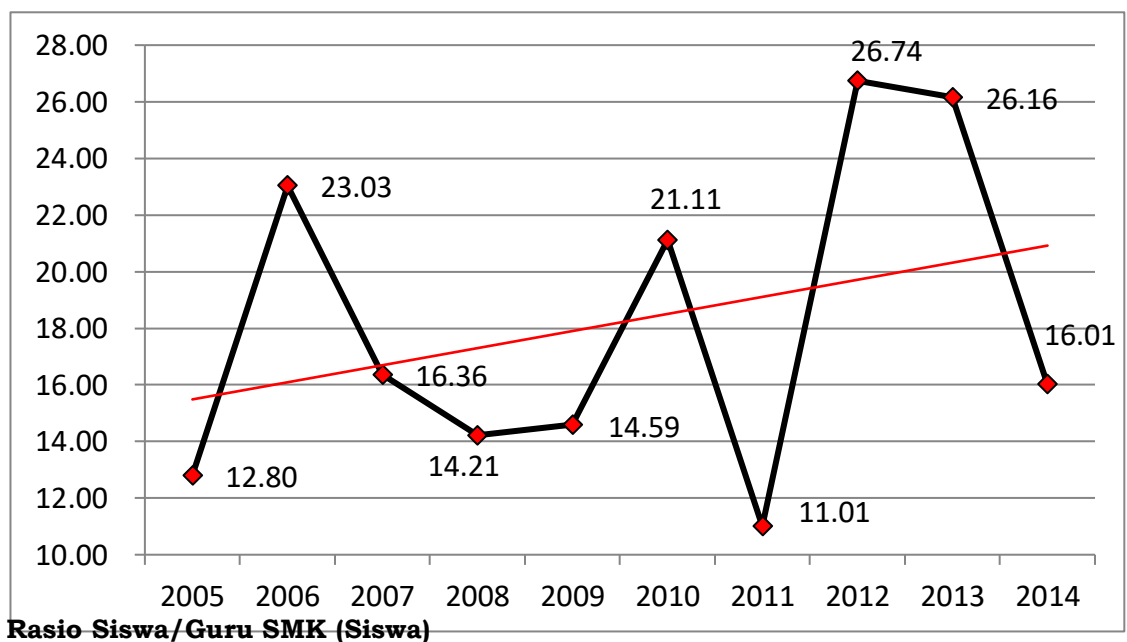
Grafik 4.3.29  
Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Tahun 2004-2014



**Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa)**

Perkembangan rasio siswa per guru pada tingkat SMA/MA tahun 2005 sampai tahun 2014 menunjukkan fluktuatif yang terendah pada tahun 2011 dengan nilai 11,01 siswa per guru dan yang tertinggi 26,74 pada tahun 2012, kemudian turun kembali pada 16,01 pada tahun 2014, secara keseluruhan garis kecendrungan menunjukkan trend naik artinya akan semakin banyak siswa yang akan ditangani oleh 1 orang guru.

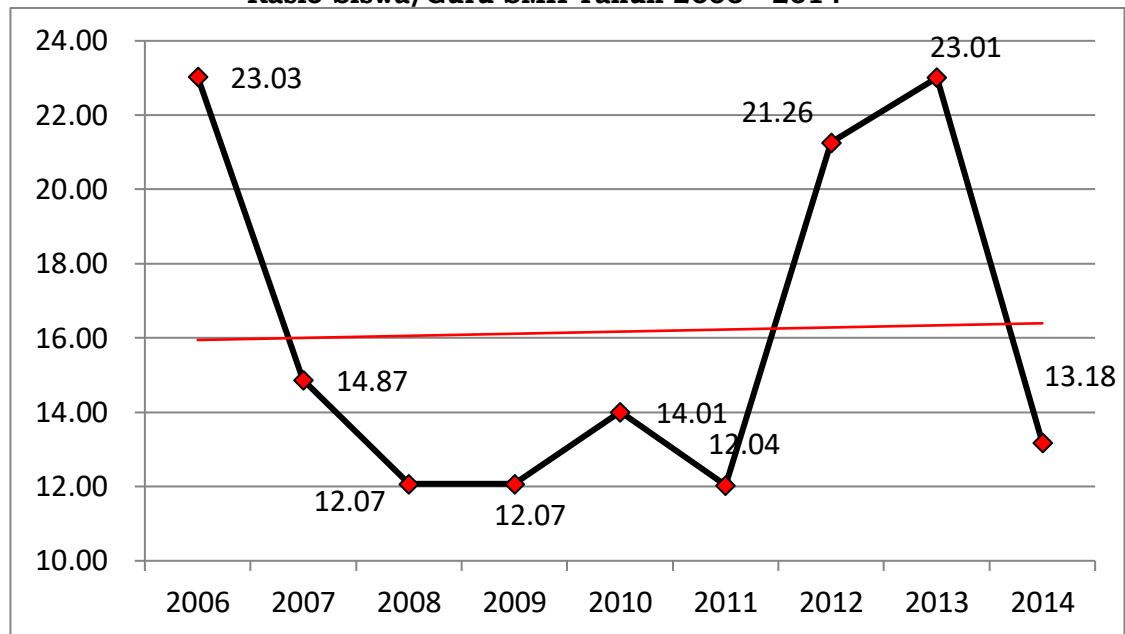
Grafik 4.3.30  
**Rasio Siswa/Guru SMA/MA Tahun 2005 - 2014**



**Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa)**

Perkembangan rasio siswa per guru pada tingkat SMK tahun 2006 sampai tahun 2014 menunjukkan fluktuatif yang terendah pada tahun 2011 dengan nilai 12,04 siswa per guru dan yang tertinggi 23,01 pada tahun 2013, kemudian turun kembali pada 13,18 pada tahun 2014, secara keseluruhan garis kecendrungan menunjukkan trend naik dengan kemiringan yang tidak tajam.

Grafik 4.3.31  
Rasio Siswa/Guru SMK Tahun 2006 - 2014

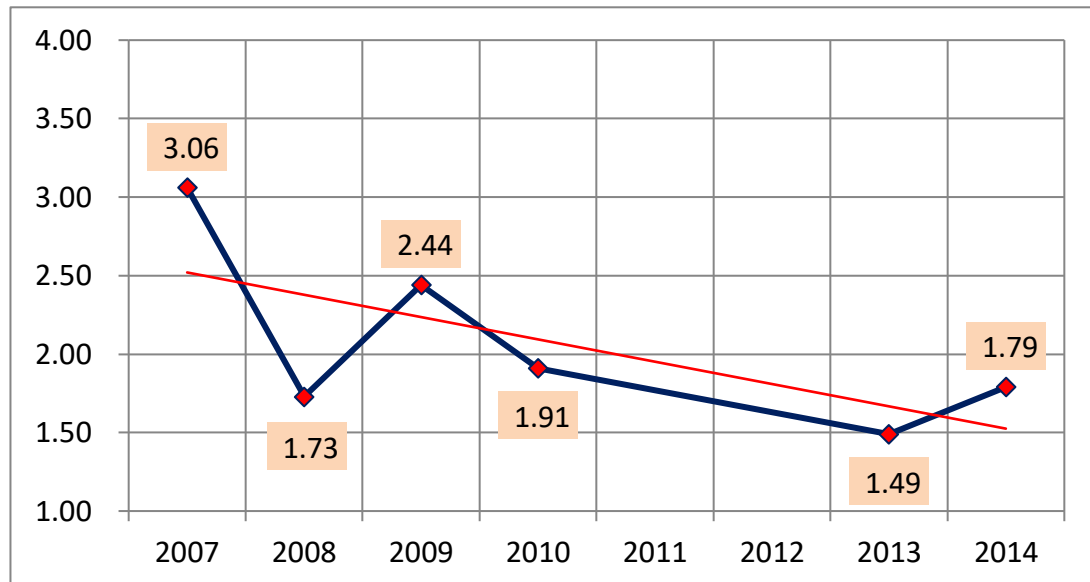


#### F. Rasio Guru/Kelas

##### Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru)

Perkembangan rasio guru per kelas pada tingkat SD/MI periode tahun 2007 sampai tahun 2014 menunjukkan tren turun yang berarti positif artinya, semakin sedikit jumlah kelas yang ditangani oleh seorang guru, sehingga memudahkan dalam penanganan proses belajar mengajar di kelas. Nilai tertinggi pada tahun 2007 sebesar 3,06 dan nilai terendah pada tahun 2013 sebesar 1,49 guru per kelas pada tahun 2014 naik kembali menjadi 1,79.

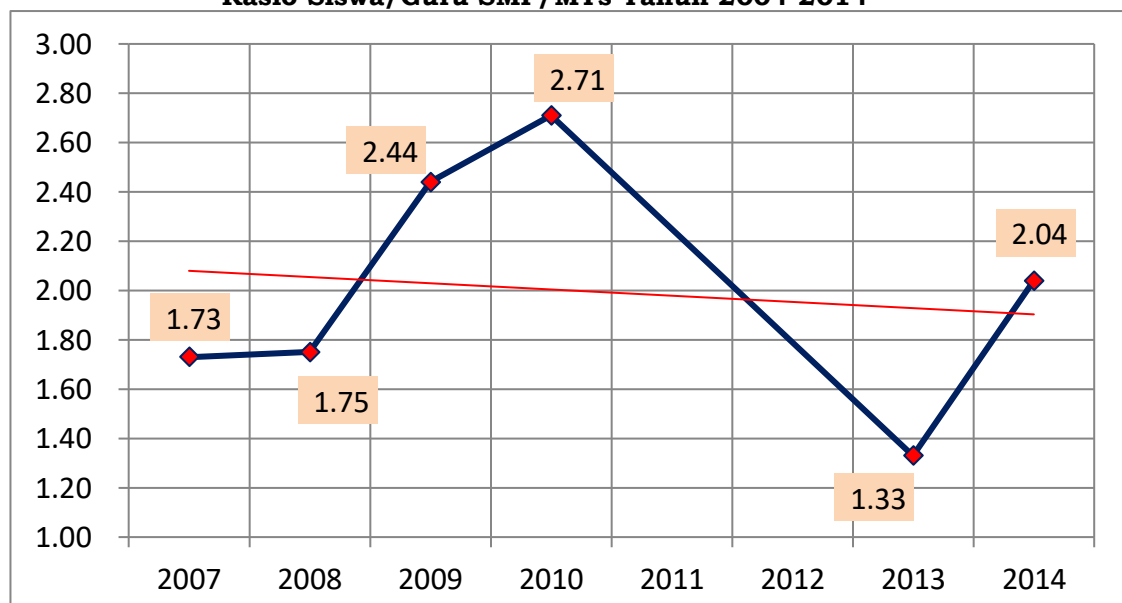
Grafik 4.3.32  
Rasio Guru/Kelas SD/MI Tahun 2007 - 2014



#### Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru)

Rasio Guru per kelas SMP/MTs periode 2007 – 2014 mengalami kenaikan tajam dari tahun 2007 sebesar 1,73 menjadi 2,71 guru/kelas pada tahun 2010. Namun setelah itu turun pada 1,33 siswa per guru pada tahun 2013 dan naik kembali menjadi 2,04 pada tahun 2014. Tren yang terjadi kecenderungannya turun namun angkanya masih relatif kecil.

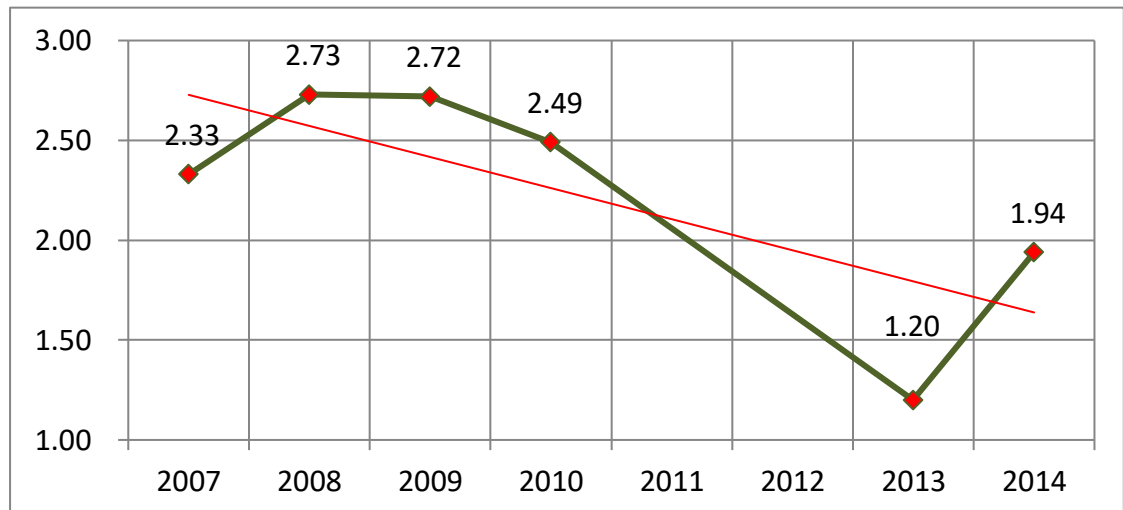
Grafik 4.3.33  
Rasio Siswa/Guru SMP/MTs Tahun 2004-2014



#### Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru)

Perkembangan rasio guru per kelas pada tingkat SMA/MA tahun 2007 sampai tahun 2014 menunjukkan terjadi penurunan jumlah guru terhadap kelas yang terendah pada tahun 2013 dengan nilai 1,20 guru per kelas dan yang tertinggi 2,73 pada tahun 2008, Pada tahun 2014 menjadi 1,94, secara keseluruhan garis kecenderungan menunjukkan trend turun artinya akan semakin sedikit guru yang menangani satu kelas.

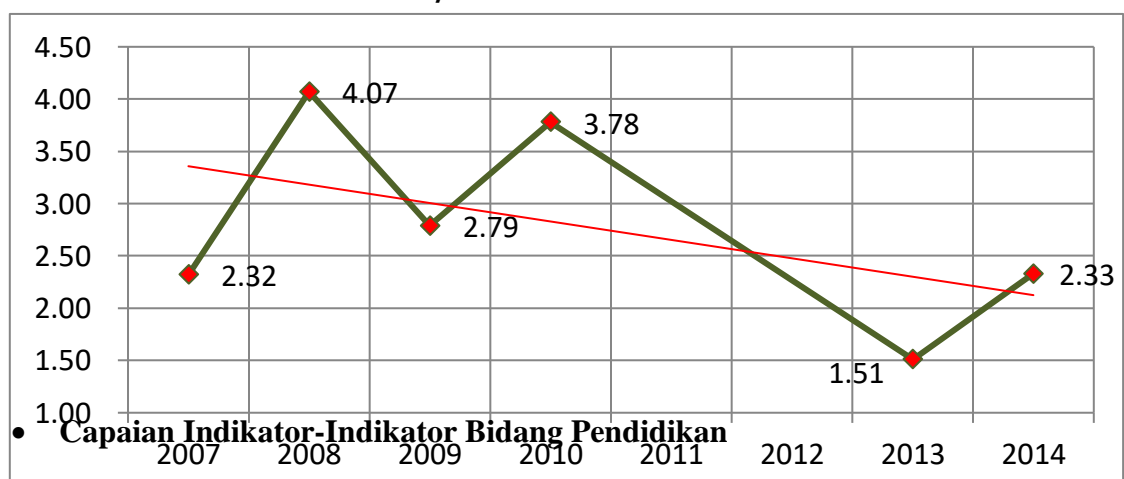
Grafik 4.3.34  
Rasio Guru/Kelas SMA/MA Tahun 2007 - 2014



#### Rasio Guru/Kelas SMK (Guru)

Perkembangan rasio guru per kelas pada tingkat SMK tahun 2007 sampai tahun 2014 menunjukkan fluktuatif yang terendah pada tahun 2013 dengan nilai 1,51 guru per kelas dan yang tertinggi 4,07 pada tahun 2008, dan pada tahun 2014 sebesar 2,33 guru per kelas, secara keseluruhan garis kecenderungan menunjukkan trend turun artinya akan semakin sedikit guru yang menangani satu kelas.

Grafik 4.3.35  
Rasio Siswa/Guru SMK Tahun 2007 - 2014



• Capaian Indikator-Indikator Bidang Pendidikan

Berbagai analisa yang dilakukan terhadap indikator-indikator pada bidang pendidikan tersebut diatas merupakan capaian yang mencerminkan kondisi kemiskinan di Kota Pontianak dilihat dari determinan pendidikan pada tahun terakhir pendataan. Angka capaian tersebut diperhadapkan dengan capaian provinsi Kalimantan Barat dan capaian Nasional untuk mengetahui relevansinya dalam kontribusi pengurangan angka kemiskinan. Secara umum, capaian bidang pendidikan cukup baik, ditandai dengan telah tercapainya beberapa indikator. Ditambah beberapa indikator justeru menunjukkan trend positif sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan meskipun penurunan tersebut melambat pada tahun-tahun terakhir. Masih ada indikator yang menunjukkan angka capaian dibawah nasional dan masih di atas angka Provinsi yaitu angka buta huruf untuk penduduk usia +45 tahun.

Tabel 4.3.1

**Capaian Indikator Bidang pendidikan, Kota Pontianak, Provinsi & Nasional**

INDIKATOR	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	CAPAIAN KOTA PONTIANAK
	TAHUN 2014		
Indikator Utama			
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	108,87	113,75	127,78
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	88,63	80,15	114,82
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	74,26	65,72	101,14
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	96,45	95,75	107,06
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	77,53	64,23	104,19
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	59,35	50,06	94,10
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)	0,21	0,44	0,06
Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)	4,89	7,61	0,05
Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%)	28,93	32,67	0,16
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)	4,88	7,70	4,66
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44 (%)	1,24	2,06	0,29
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ (%)	12,25	21,18	15,58
Indikator Pendukung			
Jarak Fasilitas Pendidikan Terdekat			
Jarak Sekolah Dasar (SD/MI) (km)	8,62	3,44	1,00
Jarak Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) (km)	7,42	12,91	1,80
Jarak Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) (km)	11,81	21,15	2,08
Jarak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (km)	18,79	40,48	1,97
Rasio Siswa/Kelas			
Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa)			37,20
Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa)			33,20

INDIKATOR	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	CAPAIAN KOTA PONTIANAK
	TAHUN 2014		
Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa)			<b>31,10</b>
Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa)			<b>30,70</b>
Rasio Guru/Kelas			
Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru)			<b>1,79</b>
Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru)			<b>2,04</b>
Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru)			<b>1,94</b>
Rasio Guru/Kelas SMK (Guru)			<b>2,33</b>
Rasio Siswa/Guru			
Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa)	<b>15,40</b>	<b>17,98</b>	<b>20,79</b>
Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa)	<b>16,30</b>	<b>17,35</b>	<b>16,27</b>
Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa)	<b>15,40</b>	<b>13,00</b>	<b>16,01</b>
Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa)	<b>22,53</b>	<b>17,93</b>	<b>13,18</b>

#### 4.4. Bidang Infrastruktur Dasar

Pengukuran capaian penyediaan hak atas pelayanan infrastuktur dasar dilihat dari kualitas capaian beberapa indikator utama infrastruktur. Indikator-indikator tersebut secara periodic diukur oleh BPS baik melalui Survey social ekonomi nasional (SUSENAS) maupun berdasarkan pendataan Potensi Desa (Podes). Definisi indikator-indikator tersebut adalah:

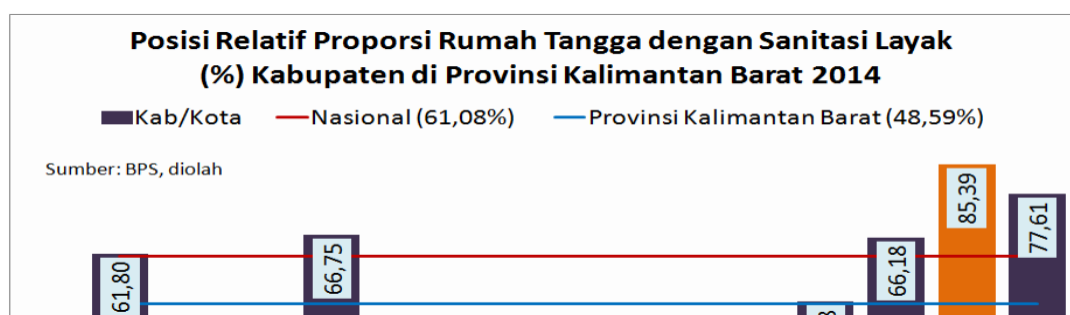
- Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (%) adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Penjelasan indikator Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tangki septik.
- Proporsi rumah tangga menggunakan air bersih (%) adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan jumlah rumah tangga.
- Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) adalah persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik (PLN + Bukan PLN) dengan jumlah rumah tangga. Akses listrik rumah tangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah.

##### 4.4.1 Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu

###### A. Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%)

Berdasarkan posisi relatif Pada tahun 2014, ketersediaan sanitasi rumah tangga ditingkat Provinsi Kalimantan Barat belum baik karena berada di bawah capaian nasional. Tingkat akses sanitasi rumah tangga adalah sebesar 48,59% sedangkan capaian nasional telah 61,08%, sedangkan untuk capaian Kota Pontianak sebesar 85,39%

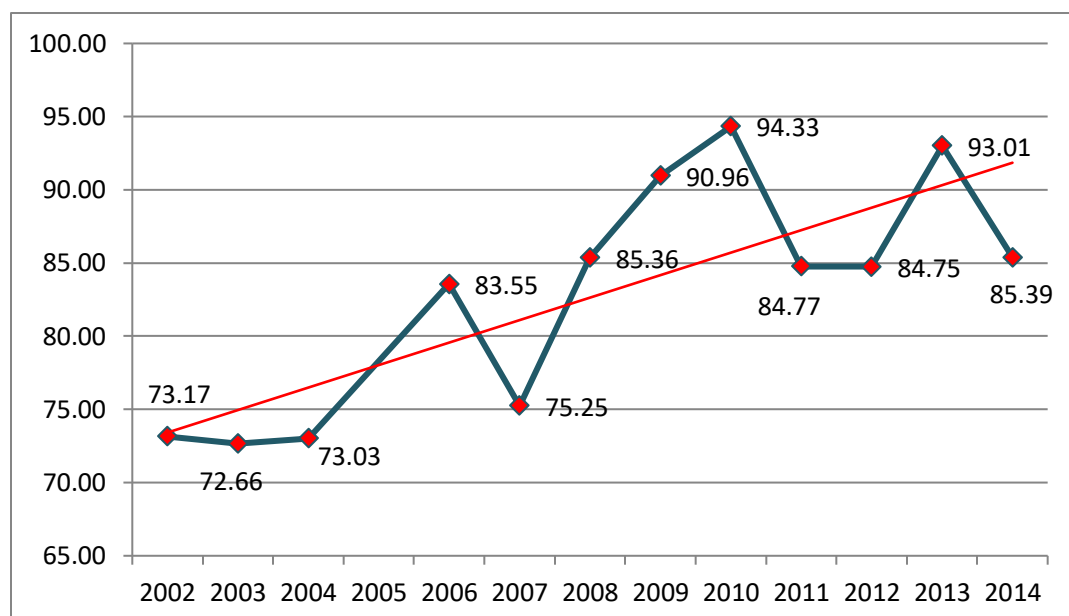
Grafik 4.4.1





Jika dilihat perkembangan data rumah tangga dengan sanitasi layak, sejak 2002 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan, akan tetapi dari tahun 2010-2014 memang terjadi penurunan yang cukup berarti dari angka 94.33% ke angka 85.39%. Penurunan ini menggambarkan bahwa semakin banyak rumah baru yang dibangun tanpa menyiapkan fasilitas sanitasi rumah tangga yang layak.

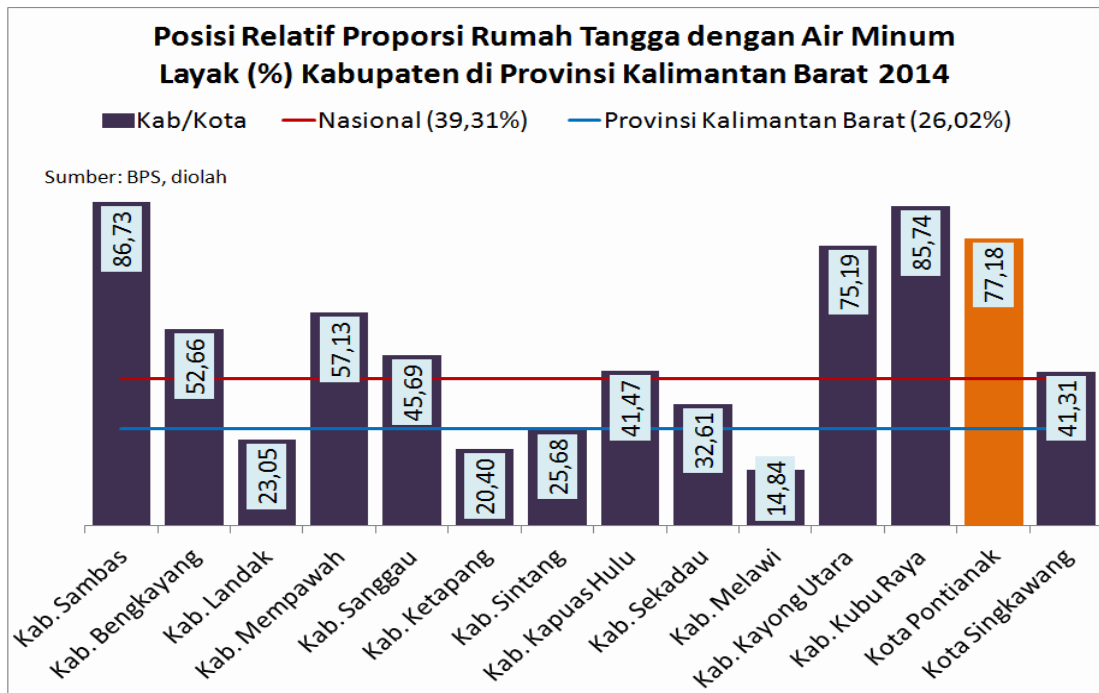
Grafik 4.4.2  
**Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)  
Tahun 2002 - 2014**



**B. Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Bersih Layak (%)**

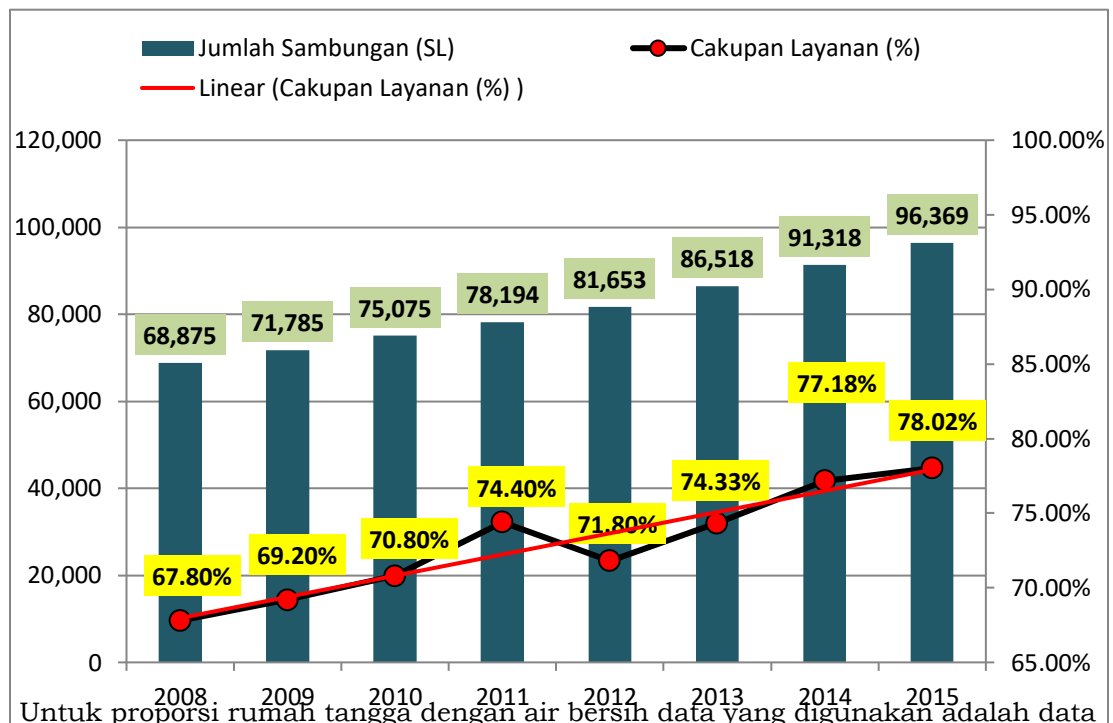
Posisi relatif Proporsi rumah tangga dengan fasilitas air bersih (%) ditingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 sebesar 26,02% lebih rendah dari angka Nasional sebesar 39,31%. Sedangkan untuk kota Pontianak capaiannya hanya sebesar 77,18%, sedangkan untuk capaian 2015 78,02%

Grafik 4.4.3



Grafik 4.4.4

**Perkembangan Cakupan Pelayanan PDAM Kota Pontianak, Tahun 2008 - 2015**



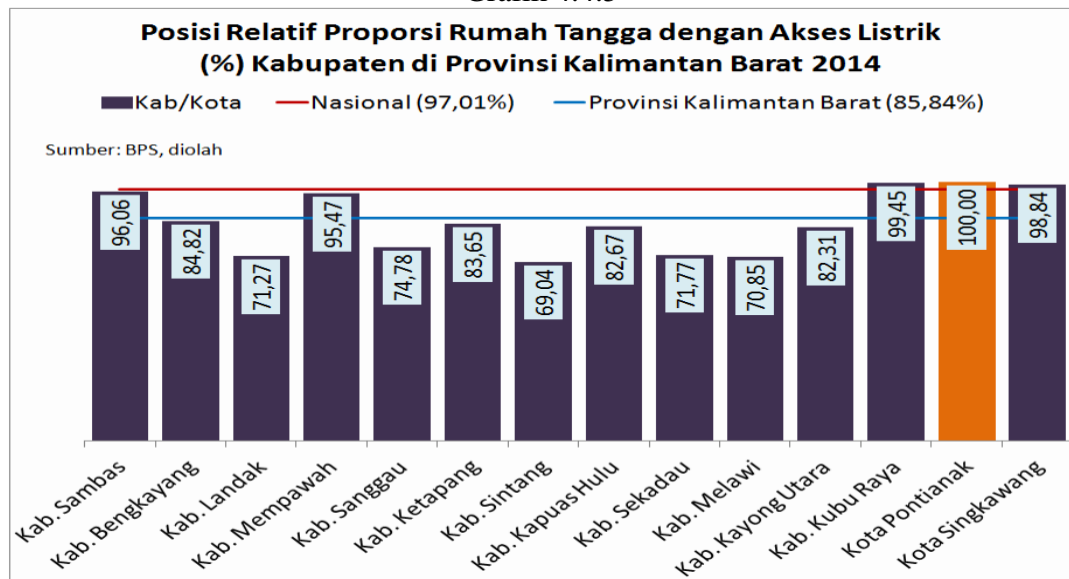
Untuk proporsi rumah tangga dengan air bersih data yang digunakan adalah data cakupan layanan sambungan PDAM tahun 2008-2015, Pertumbuhan dari waktu

ke waktu terus mengalami peningkatan, sampai tahun 2015 capaian sambungan PDAM telah 78,02%. Dari grafik kecenderungan juga jelas terlihat bahwa kinerja PDAM sudah efektif.

**C. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)**

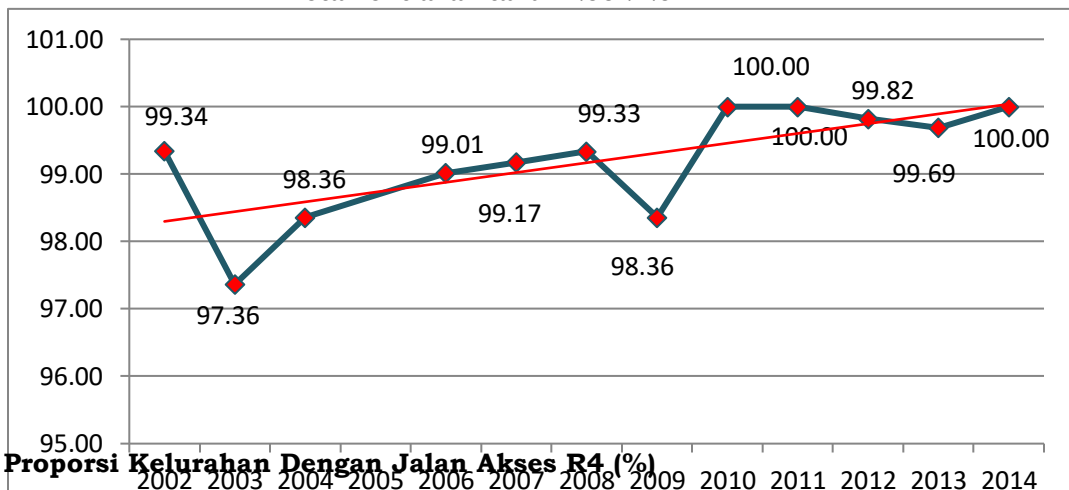
Berbeda dengan akses sanitasi layak dan air bersih, data akses listrik antar kabupaten/kota se-Kalimantan Barat tahun 2014 terlihat pada grafik berikut. Akses listrik Kota Pontianak sebesar 100% masih merupakan daerah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain, sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Barat sebesar 85,84%, sedangkan capaian nasional 97,01%. Jika dilihat dari perkembangan tahun 2002-2014 kota pontianak telah mencapai 100% sejak tahun 2010, dan tren grafik kecenderungannya naik positif.

Grafik 4.4.5



Grafik 4.4.6

**Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kota Pontianak tahun 2002-2014**

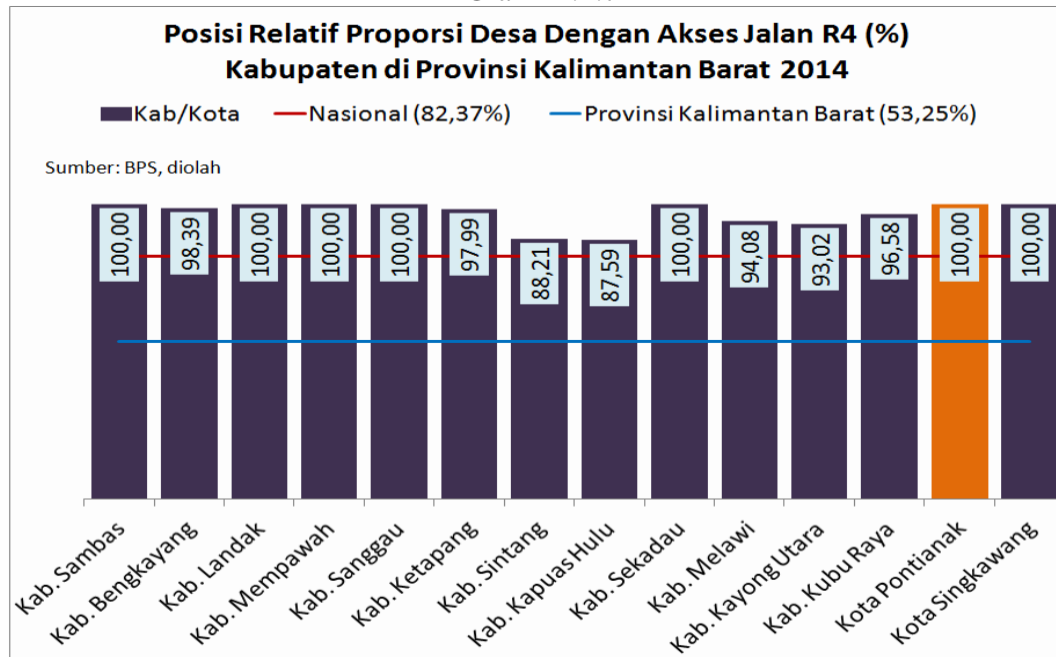


**D. Proporsi Kelurahan Dengan Jalan Akses R4 (%)**

Posisi relatif proporsi kelurahan yang memiliki akses jalan roda empat (R4) pada tahun 2014 lebih tinggi dari capaian Nasional yang baru 82,37% dan capaian

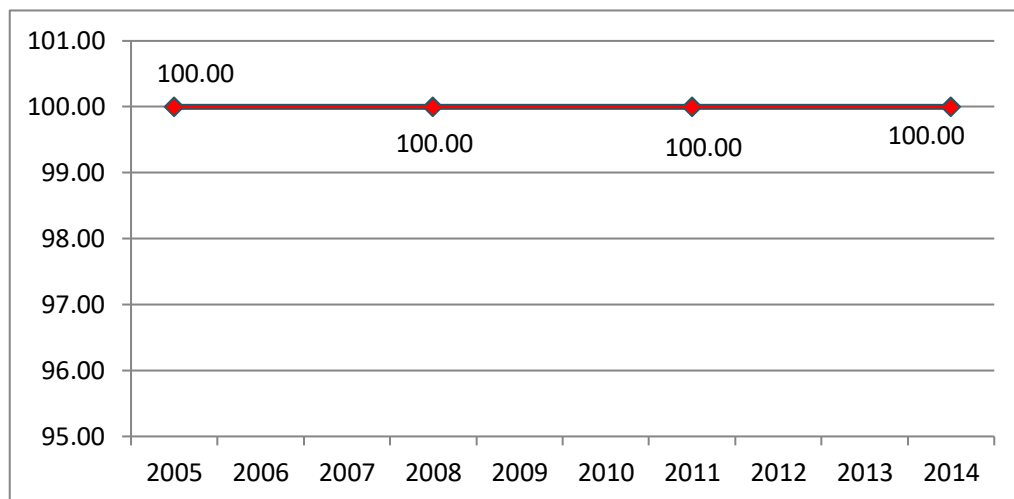
Provinsi Kalimantan Barat sebesar 53,25%, sedangkan untuk Kota Pontianak 100%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi jalan di semua kelurahan Kota Pontianak tidak ada yang terisolasi dan dapat dilalui kendaraan beroda empat.

Grafik 4.4.7



Grafik 4.4.8

Posisi Relatif Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014



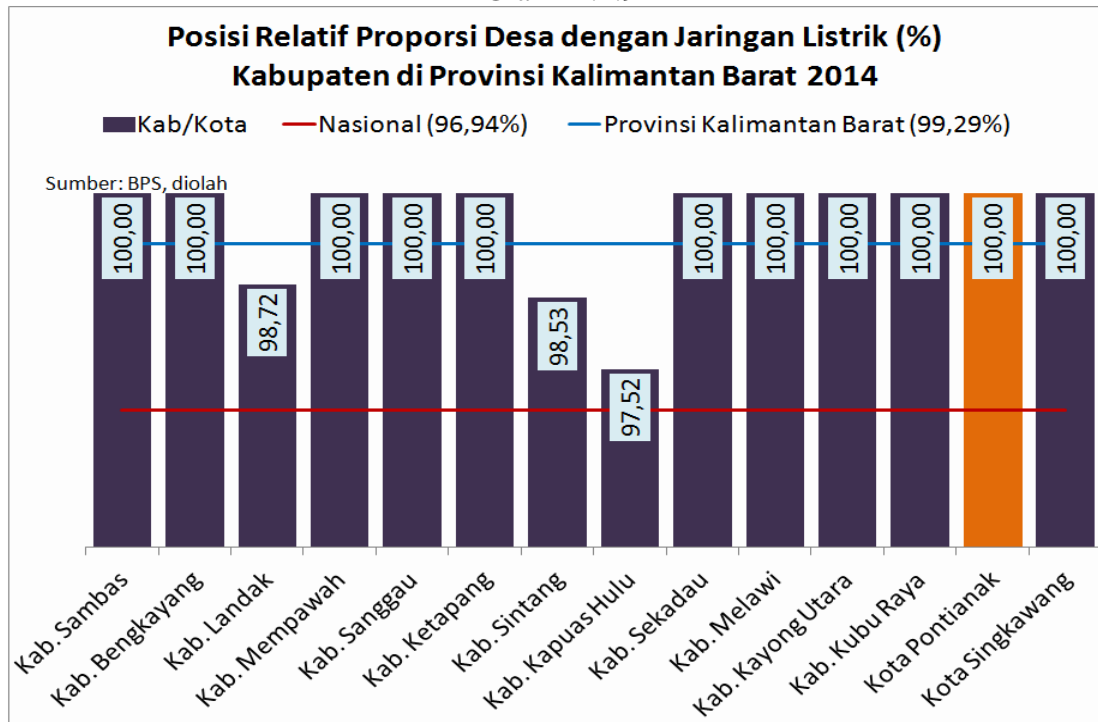
Dilihat dari perkembangan data nampak bahwa pembangunan akses jalan R4 telah 100% sejak tahun 2005

**E. Proporsi Desa/Kelurahan Dengan Jaringan Listrik (%)**

Dari grafik posisi relatif Desa/Kelurahan dengan jaringan listrik (%) tahun 2014, diperoleh informasi bahwa seluruh desa di Provinsi Kalimantan Barat telah

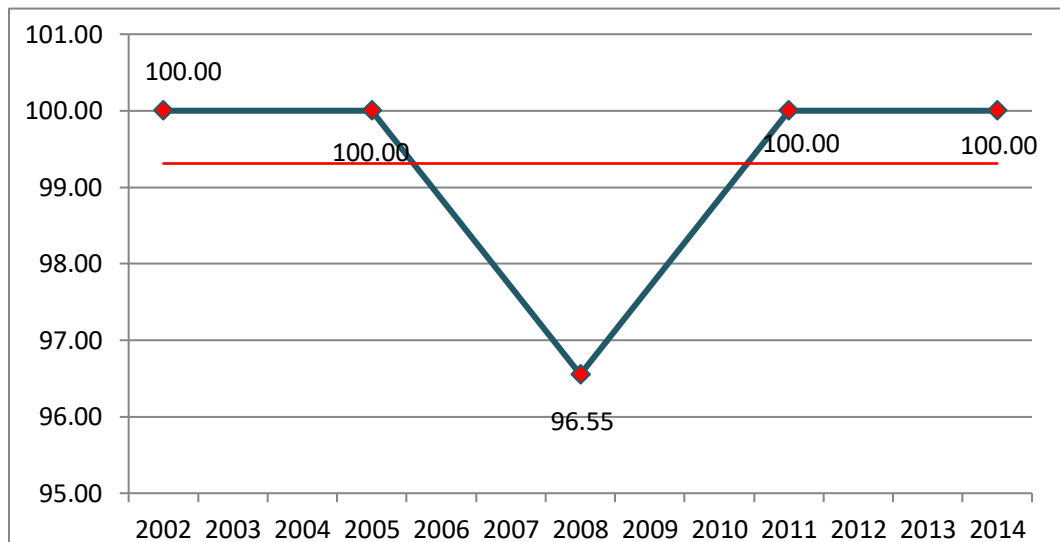
memiliki akses listrik. Capaian indikator proporsi desa dengan jaringan listrik pada tahun tersebut menempatkan Kota Pontianak pada angka maksimal yang mungkin dicapai yakni 100%.

Grafik 4.4.9



Grafik 4.4.10

Posisi Relatif Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat 2014

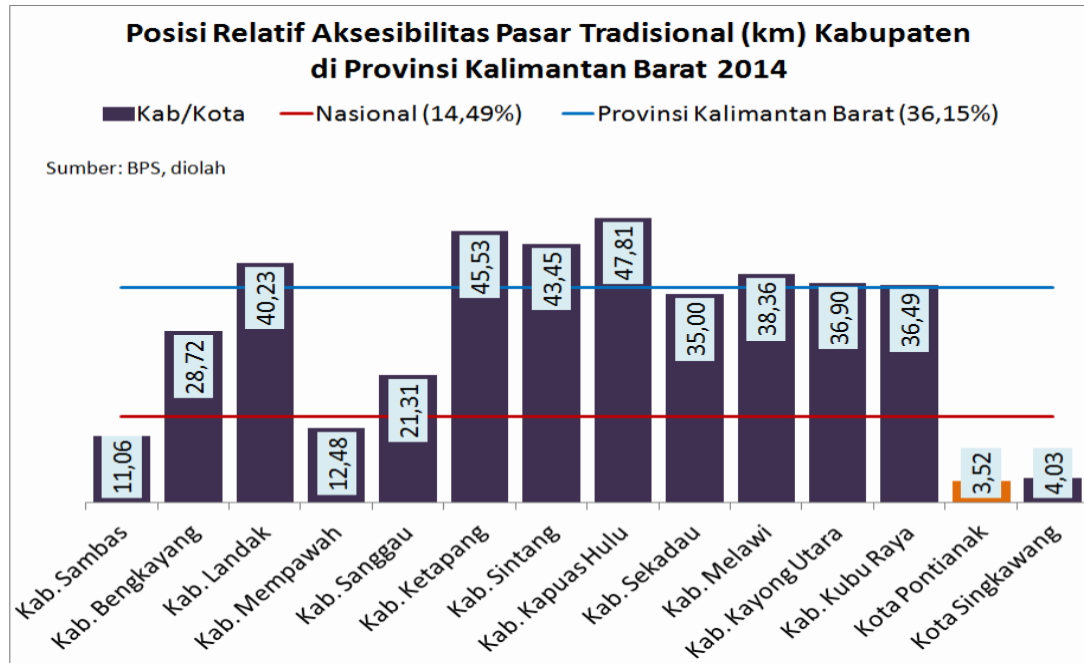


Akses jaringan listrik yang sudah mencapai 100% merupakan capaian yang sejak 2002 sudah terpenuhi dengan maksimal, akan tetapi pernah turun dengan angka 96,55% pada tahun 2008, dan kembali 100% pada tahun 2011.

**F. Aksesibilitas Pasar Tradisional (Km)**

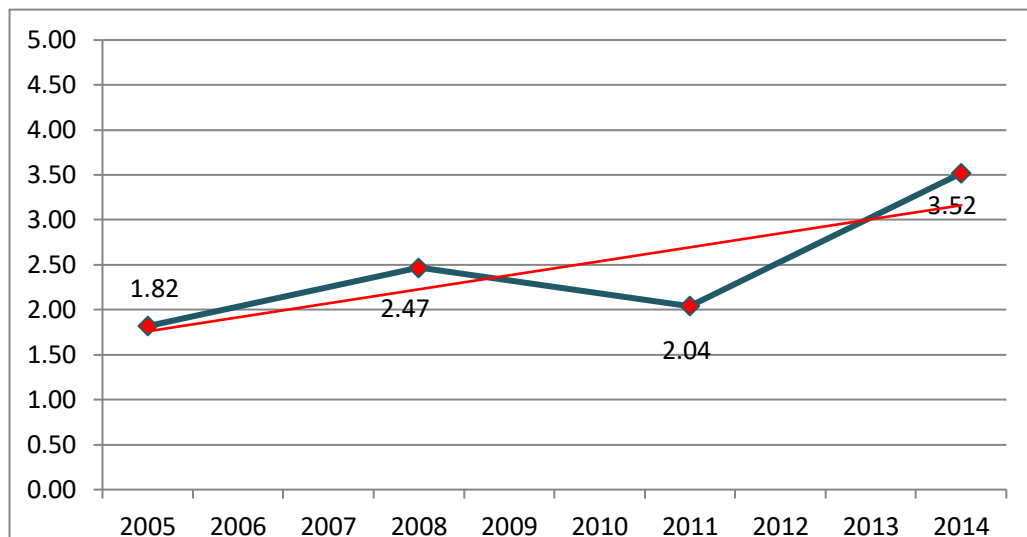
Dari Posisi relatif Aksesibilitas Pasar Tradisional tahun 2014, diperoleh data bahwa akses terhadap pasar tradisional di Provinsi Kalimantan Barat relatif masih lebih jauh yaitu 36,15 Km, dibandingkan dengan jarak rata-rata nasional yakni sebesar 14.49 km. Sedangkan Jarak Pasar di Kota Pontianak merupakan yang terdekat yaitu sejauh 3,52 Km.

Grafik 4.4.11



Grafik 4.4.12

Perkembangan Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kota Pontianak 2014



Kecenderungan penambahan jarak akses terhadap pasar tradisional Kota Pontianak tahun 2005 sampai dengan 2008. Semenjak 2008 – 2011, terjadi penurunan jarak akses pasar tradisional. Hal ini menunjukkan semakin dekat jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mengakses layanan pasar tradisional, yaitu 2,04 Km, dan taun 2014 jarak harus ditempuh 3,52 Km.

- **Capaian Indikator-Indikator Bidang Infrastruktur Dasar**

Enam indikator pada bidang infrastruktur dasar mempunyai capaian yang baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi maupun Nasional, bahkan 3 indikator diantaranya sudah mencapai 100%

**Tabel 4.4.1**  
**Capaian Indikator Bidang Infrastruktur Dasar Kota Pontianak, Provinsi & Nasional**

INDIKATOR	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	CAPAIAN KOTA PONTIANAK
	TAHUN 2014		
Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%)	61,08	48,59	85,39
Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%)	39,31	49,46	54,45
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)	97,01	85,84	100
Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)	82,37	53,25	100
Proporsi Desa Dengan Jaringan Listrik (%)	96,94	99,29	100
Aksesibilitas Pasar Tradisional (Km)	14,49	36,15	3,52

#### 4.5. Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi

Dalam menganalisis perkembangan indikator sektor ketahanan pangan, digunakan 4 indikator utama dengan definisi sebagai berikut:

- Perkembangan harga beras (%) adalah besarnya persentase (%) perubahan harga beras terhadap harga tetap suatu tahun tertentu.
- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Utama adalah besarnya perubahan harga beberapa bahan kebutuhan pokok utama dari waktu ke waktu. Ada 9 komoditi utama yang didata oleh dinas Ketahanan Pangan yang akan diolah dan ditampilkan pada analisis berikut.
- Tingkat Inflasi (%) adalah persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikena dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.
- Pertumbuhan ekonomi (%) adalah persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu.

##### 4.5.1 Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu

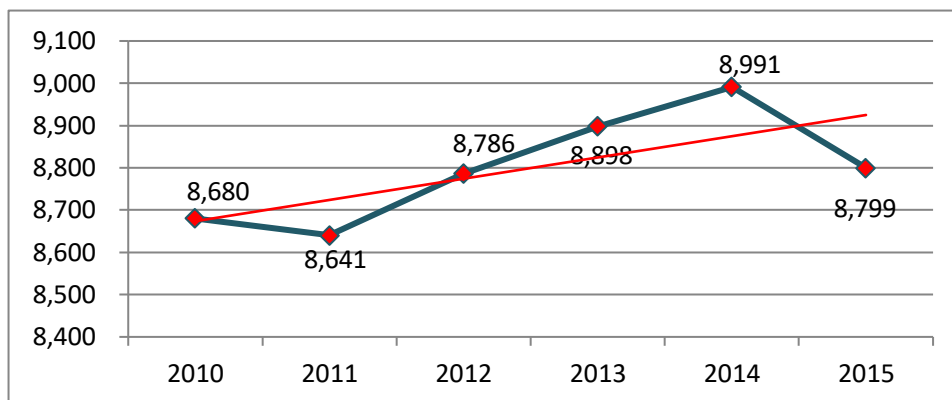
**A. Perkembangan Harga Lokal Beras (Rp.)**

Dengan menetapkan tahun dasar penghitungan harga pada tahun 2008, maka perkembangan harga beras pada tahun berikutnya terhadap harga pada tahun dasar diperlihatkan sesuai gambar dibawah ini. Data perkembangan harga beras untuk tingkat nasional dan Provinsi tidak tersedia, oleh karenanya tidak memungkinkan untuk melakukan analisis antar wilayah.

Dengan data perkembangan harga beras lokal ditingkat kota yang tersedia, dalam kurun 6 tahun ini, terjadi kenaikan harga beras sebesar 3,89% dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.991,-

Dari grafik terlihat kecendrungan harga beras lokal naik.

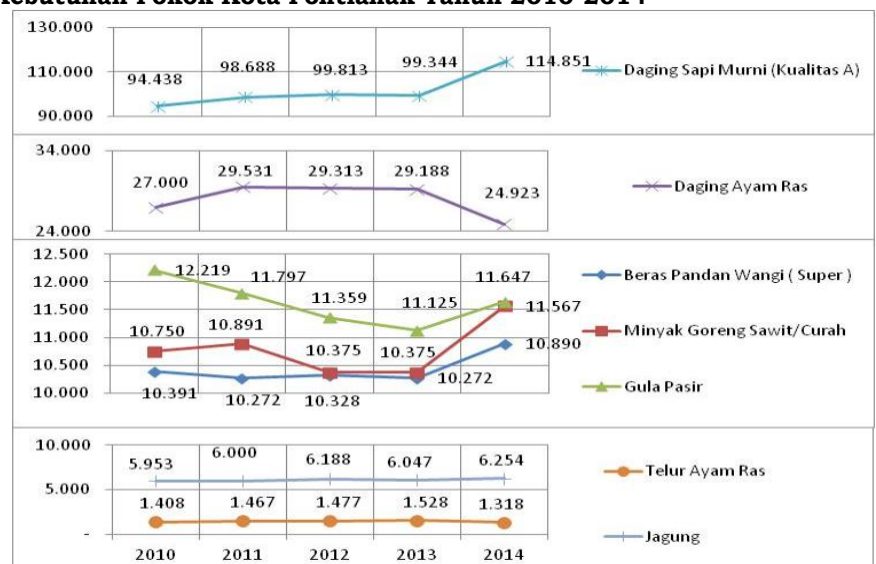
Grafik 4.5.1  
**Perkembangan Harga Beras Lokal Tahun 2010-2015 Kota Pontianak**



**B. Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (%)**

Perkembangan harga kebutuhan pokok utama dari tahun 2010 ke 2014 terlihat pada grafik dibawah ini. Pada tahun terakhir, kenaikan harga terjadi hampir disemua komoditi kecuali harga daging ayam ras dan telur. Kenaikan harga terbesar terjadi pada daging sapi 13,5% dan diikuti oleh minyak sawit 10,31% dan beras pandan wangi 5,67%.

Grafik 4.5.2  
**Perkembangan Kebutuhan Pokok Kota Pontianak Tahun 2010-2014**





NO	JENIS BARANG	SATUAN	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
1	Beras Pandan Wangi ( Super )	Rp/Kg	10.391	10.272	-1,16%	10.328	0,54%	10.272	-0,55%	10.890	5,67%
2	Minyak Goreng Sawit/Curah	Rp/liter	10.750	10.891	1,29%	10.375	-4,97%	10.375	0,00%	11.567	10,31%
3	Gula Pasir	Rp/Kg	12.219	11.797	-3,58%	11.359	-3,85%	11.125	-2,11%	11.647	4,48%
4	Daging Ayam Ras	Rp/Kg	27.000	29.531	8,57%	29.313	-0,75%	29.188	-0,43%	24.923	-17,11%
5	Daging Sapi Murni (Kualitas A)	Rp/Kg	94.438	98.688	4,31%	99.813	1,13%	99.344	-0,47%	114.851	13,50%
6	Telur Ayam Ras	Rp/Butir	1.408	1.467	4,05%	1.477	0,63%	1.528	3,37%	1.318	-15,98%
7	Jagung	Kg	5.953	6.000	0,78%	6.188	3,03%	6.047	-2,33%	6.254	3,30%

### C. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Kinerja perekonomian Kota Pontianak secara sektoral pada Tahun 2014 tumbuh sebesar 6,52 persen dan ditandai dengan peningkatan pada setiap sektornya, meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,4 poin dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,92 persen. Semua sektor ekonomi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan-komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,27 persen, diikuti oleh sektor Bangunan 7,66 persen, sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 6,96,48 persen, sektor keuangan-persewaan-jasa perusahaan 6,06 persen sektor jasa-jasa 3,57 persen, sektor Listrik dan air bersih 5,8 persen, sektor Pertanian sebesar 4,83 persen dan sektor industri pengolahan 3,03 persen.

Peningkatan penerimaan pajak restoran dan hotel Tahun 2014 menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan pendapatan daerah yaitu sebesar 24,81 persen terhadap total penerimaan pajak daerah serta kecenderungan kenaikan rata-rata tingkat hunian hotel berbintang maupun non bintang semakin memperkuat sektor PHR pada perekonomian Kota Pontianak. Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir, dari tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, ekonomi Kota Pontianak rata-rata tumbuh sebesar 6,15 persen per tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 6,92 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,38 persen.

Selama periode 2010 – 2014 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi diatas rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pontianak adalah Sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,93 persen, Tahun 2014 sektor ini mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 9,27 persen. Sektor ini tumbuh lebih tinggi dari sektor lainnya, sebagai konsekuensi tumbuhnya sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan utamanya dalam penggunaan moda transportasi arus distribusi barang dan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, serta peningkatan volume bongkar muat pada pelabuhan Kota Pontianak cenderung berpengaruh positif pada sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 4.5.1

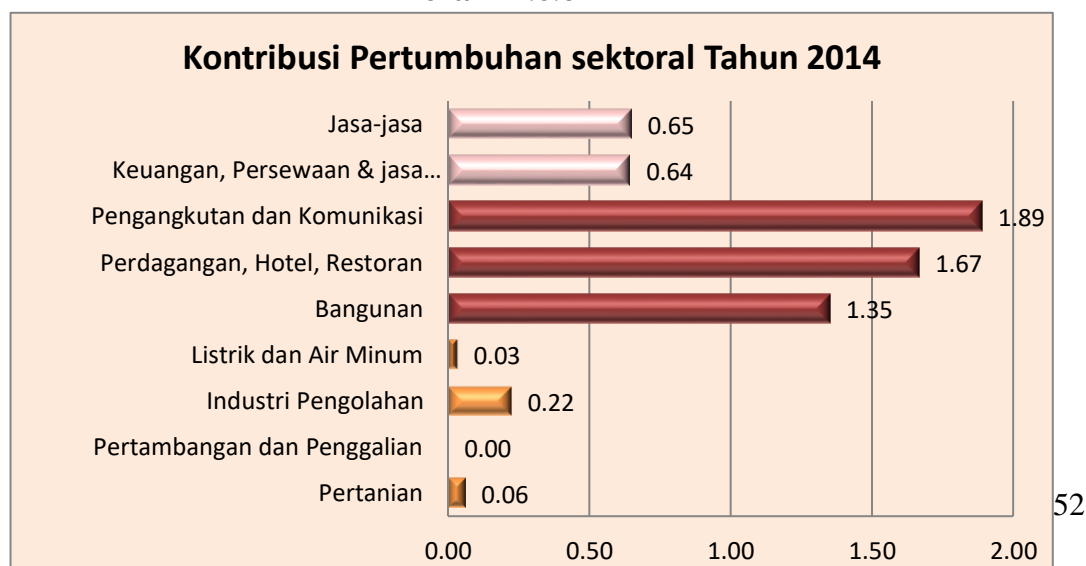
## Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2009-2014

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian	5,09	3,44	5,22	3,83	4,90	4,83
2. Pertambangan & Penggalan	-	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	3,61	2,34	2,50	2,71	3,06	3,03
4. Listrik dan Air Bersih	6,41	4,28	4,36	4,50	7,83	5,88
5. Bangunan	10,79	5,27	5,81	6,46	7,65	7,66
6. Perdag, Hotel & Restoran	4,40	6,24	7,24	6,66	8,13	6,96
7. Pengangkutan & Kom	6,28	9,11	9,04	9,19	8,03	9,27
8. Keu. Persewaan, & Jasa Persh	4,30	5,55	5,64	6,03	6,91	6,06
9. Jasa Jasa	2,51	2,42	2,93	3,34	5,18	3,57
<b>PDRB</b>	<b>5,36</b>	<b>5,38</b>	<b>5,89</b>	<b>6,06</b>	<b>6,92</b>	<b>6,52</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014

Kinerja sektor Pengangkutan dan Komunikasi menjadi pendorong utama perekonomian Kota Pontianak dimana kontribusi sektor tersebut dalam pertumbuhan mencapai 1,89 persen dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sebesar 6,52 persen. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,67 persen, serta sektor Bangunan memberikan kontribusi pada pertumbuhan sebesar 1,35 persen, Ketiga sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,91 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sedangkan sektor lainnya rata-rata memberikan andil antara 0,003 hingga 0,65 persen, dengan total kontribusi sebesar 1,61 persen dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

Grafik 4.5.3



Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014

Tahun 2014 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak yang dihitung atas dasar nilai tambah bruto harga berlaku mencapai 21,17 Trilyun Rupiah meningkat sebesar 3,08 Trilyun Rupiah dari Tahun 2013, empat sektor dominan yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Pontianak adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor Bangunan, serta sektor Jasa-jasa keempat sektor tersebut memberikan kontribusi nilai tambah bruto sebesar 17,48 Trilyun Rupiah atau sebesar 82,86 persen terhadap total PDRB kota Pontianak.

Kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terus mengalami peningkatan selama tahun 2010 hingga tahun 2014, dengan kontribusi nilai tambah bruto rata-rata diatas 4,25 Trilyun Rupiah pertahun, serta dengan pertumbuhan rata-rata diatas 7,04 persen, kontribusi sektor ini terhadap PDRB terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 24,51 persen dan semakin menguat pada Tahun 2014 menjadi 26,96 persen, tercatat nilai tambah bruto sektor ini mencapai sebesar 5,70 Trilyun Rupiah.

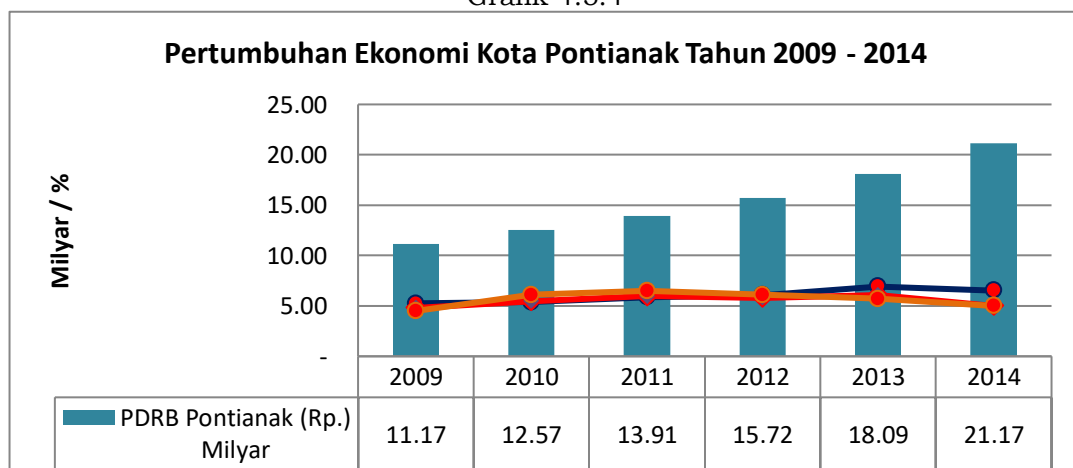
**Tabel 4.5.2**

Nilai PDRB Kota Pontianak Tahun 2009-2014 Atas Dasar Harga Berlaku ( Juta Rp)						
Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1. Pertanian	173.190,60	183.532,62	201.827,19	226.668,41	256.971,70	299.247,58
2. Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	928.042,68	970.210,03	1.018.686,09	1.102.506,96	1.232.515,76	1.436.352,07
4. Listrik dan Air Bersih	62.148,03	65.692,50	70.173,47	76.340,86	86.843,68	101.578,43
5. Bangunan	2.098.743,43	2.455.471,44	2.718.010,13	3.113.355,55	3.612.923,98	4.248.520,76
6. Perdag, Hotel & Restoran	2.618.791,70	3.080.804,65	3.541.953,16	4.099.401,92	4.862.804,02	5.707.196,11
7. Pengangkutan & Kom	2.001.903,32	2.276.931,47	2.554.660,61	2.903.983,00	3.313.661,19	3.874.413,13
8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh	1.093.283,78	1.183.848,59	1.283.783,64	1.417.487,33	1.588.803,21	1.852.436,46
9. Jasa Jasa	2.198.512,69	2.351.375,47	2.524.187,90	2.783.346,71	3.131.553,42	3.650.575,94
PDRB	11.174.616,23	12.567.866,77	13.913.282,19	15.723.090,73	18.086.076,95	21.170.320,48

Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2014

Dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2009-2014 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan dari 6,92% menjadi 6,52%, hal ini juga terjadi dilevel nasional maupun dilevel provinsi

Grafik 4.5.4

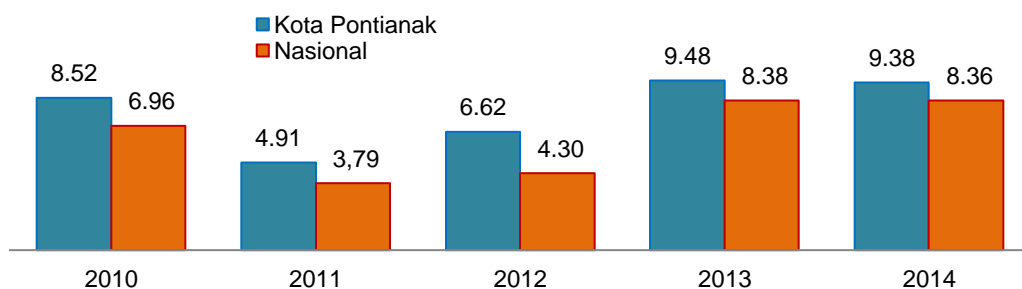


#### D. Tingkat Inflasi (%)

Selama lima tahun terakhir inflasi tahunan Kota Pontianak selalu berada di atas inflasi nasional. Data terakhir inflasi Kota Pontianak tahun 2014 mencapai 9.38%, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 8.36%. Meskipun demikian tekanan inflasi Kota Pontianak bulan Desember 2014 tersebut masih lebih rendah jika dibanding dengan tekanan inflasi bulan Desember 2013 yakni mencapai 9.48% yang juga meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM subsidi pada akhir Juli 2013.

Grafik 4.5.5

#### Perkembangan Inflasi Kota Pontianak dan Nasional

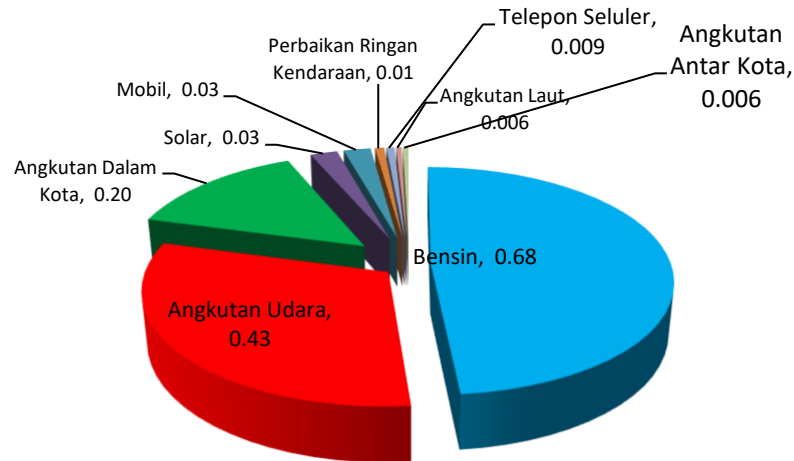


Sumber: BPS Kota Pontianak, Tahun 2014

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan inflasi cukup signifikan di Kota Pontianak adalah pada kelompok Transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mencapai 7.61% lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional sebesar 5.55% . Andil inflasi angkutan udara mencapai 0,43% , diikuti angkutan dalam kota sebesar 0.2% .

Grafik 4.5.6

#### Prosentase jenis-jenis inflasi



- Komoditas bensin dan solar di Kota Pontianak mengalami peningkatan harga cukup signifikan, masing-masing sebesar 14.68% dan 17.79% (mtm). Berdasarkan angka inflasi pada kedua komoditas tersebut, dampak langsung dari kenaikan BBM terhadap inflasi bulan Desember tercatat mencapai 0.71% .
- Sementara itu Angkutan Udara juga memberikan pengaruh terhadap inflasi Kota Pontianak Bulan Desember 2014 pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan. Kenaikan tarif angkutan udara tersebut seiring dengan berlangsungnya perayaan Natal dan Tahun Baru.

#### E. Analisis Location Quotient

*Location Quotient* (LQ) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial atau basis dalam perekonomian di suatu daerah. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam di daerah sehingga pembangunan daerah otonomi diharapkan dapat tercapai, maka perlu adanya sektor-sektor yang menjadi tumpuan daerah. Sektor tersebut disamping mampu dikembangkan juga akan memberikan dampak terhadap perkembangan sektor lainnya (*linkage effect*) serta sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan diharapkan pula menjadi pemasok pendapatan daerah dengan diekspor ke luar daerahnya.

**Tabel 4.5.3**

## Location Quotient Kota Pontianak Tahun 2013

Lapangan Usaha	Peranan Atas Harga Konstan Kota PTK	Peranan Atas Harga Konstan Prov Kalbar	LQ
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	1.26	23.09	0.05
2. Pertambangan & Penggalian	0.00	2.01	0.00
3. Industri Pengolahan	7.40	16.27	0.45
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0.57	0.46	1.25
5. Bangunan	17.64	11.48	1.54
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	23.95	23.03	1.04
7. Pengangkutan & Komunikasi	20.39	7.36	2.77
8. Keuangan, Persewaan & jasa Persh	10.64	4.86	2.19
9. Jasa Jasa	18.16	11.44	1.59
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.00</b>

Sumber: BPS Kota Pontianak

Berdasarkan indeks Location Quotient (LQ) Kota Pontianak terhadap Kalimantan Barat pada tahun 2013, sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang mempunyai keunggulan untuk dikembangkan. Selain itu sektor Keuangan, persewaan juga juga punya peranan yang cukup besar untuk lebih dikembangkan. Sedangkan sektor lainnya yang mampu bersaing dan berpeluang untuk terus dikembangkan adalah sektor bangunan, sektor jasa-jasa, sektor listrik dan air minum serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

#### F. Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita daerah.

Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah Prima cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah Potensial (*high income but low growth*), daerah berkembang (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

**Tabel 4.5.4**  
Klassen Tipologi Kecamatan, 2013

	Tumbuh Cepat	Tumbuh Lambat
PDRB Per Kapita Besar	<b>PRIMA</b>	<b>POTENSIAL</b>
	KEC. PONTIANAK SELATAN KEC. PONTIANAK KOTA	
PDRB Per Kapita Kecil	<b>BERKEMBANG</b>	<b>RELATIF TERTINGGAL</b>
	KEC. PONTIANAK BARAT	KEC. PONTIANAK TENGGARA KEC. PONTANAK TIMUR KEC. PONTIANAK UTARA

Sumber: BPS Kota Pontianak

Dengan adanya perbandingan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita Kota Pontianak maka dapat digambarkan bahwa setiap kecamatan dapat dikelompokkan pada beberapa kategori antara lain:

- a. Kecamatan yang masuk dalam kategori daerah Prima cepat-tumbuh (*high growth and high income*), adalah Kecamatan Pontianak Kota, dan Kecamatan Pontianak Selatan dengan Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dari Kota Pontianak. ini dapat diartikan bahwa masyarakat di kecamatan ini relatif paling sejahtera dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada di kuadran lainnya
- b. Terdapat tiga Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah berkembang (*high growth but low income*), yaitu; Kecamatan Pontianak Barat dengan kondisi mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Kota Pontianak namun dari sisi nilai PDRB perkapita masih berada dibawah Kota Pontianak karena relatif jumlah penduduk kecamatan ini lebih besar dari kecamatan lainnya.
- c. Kecamatan yang dikategorikan sebagai Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Utara dengan kondisi baik pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang berada dibawah Kota Pontianak, dapat diartikan bahwa masyarakat di tiga Kecamatan Pontianak tersebut dalam relatif kondisi tingkat kesehjahteraannya yang berada dibawah kecamatan lainnya.

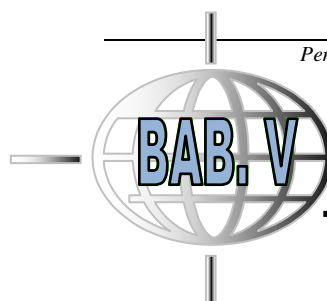
- **Capaian Indikator-Indikator Bidang Ekonomi**

Dari dua indikator pada bidang ekonomi hanya satu indikator yang mempunyai capaian yang baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi maupun Nasional yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan indikator tingkat Inflasi kota pontianak lebih tinggi dari capaian Nasional

**Tabel 4.5.5**

**Capaian Indikator Bidang Ekonomi Kota Pontianak, Provinsi & Nasional**

INDIKATOR	CAPAIAN NASIONAL	CAPAIAN PROVINSI	CAPAIAN KOTA PONTIANAK
	TAHUN 2014		
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,01	5,26	6,52
Tingkat Inflasi (%)	8,36		<b>9,38</b>



## ANALISIS PENGANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tinjauan anggaran belanja penanggulangan kemiskinan merupakan analisis terhadap alokasi dan manajemen anggaran belanja publik dalam bidang atau sektor yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Kebersesuaian alokasi anggaran akan memastikan terselenggaranya program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Angka yang digunakan adalah angka realisasi anggaran.

### 5.1. Komposisi Anggaran Belanja

Komposisi penerimaan daerah menunjukkan proporsi sumber-sumber penerimaan daerah yang akan dimanfaatkan bagi pembiayaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2014**

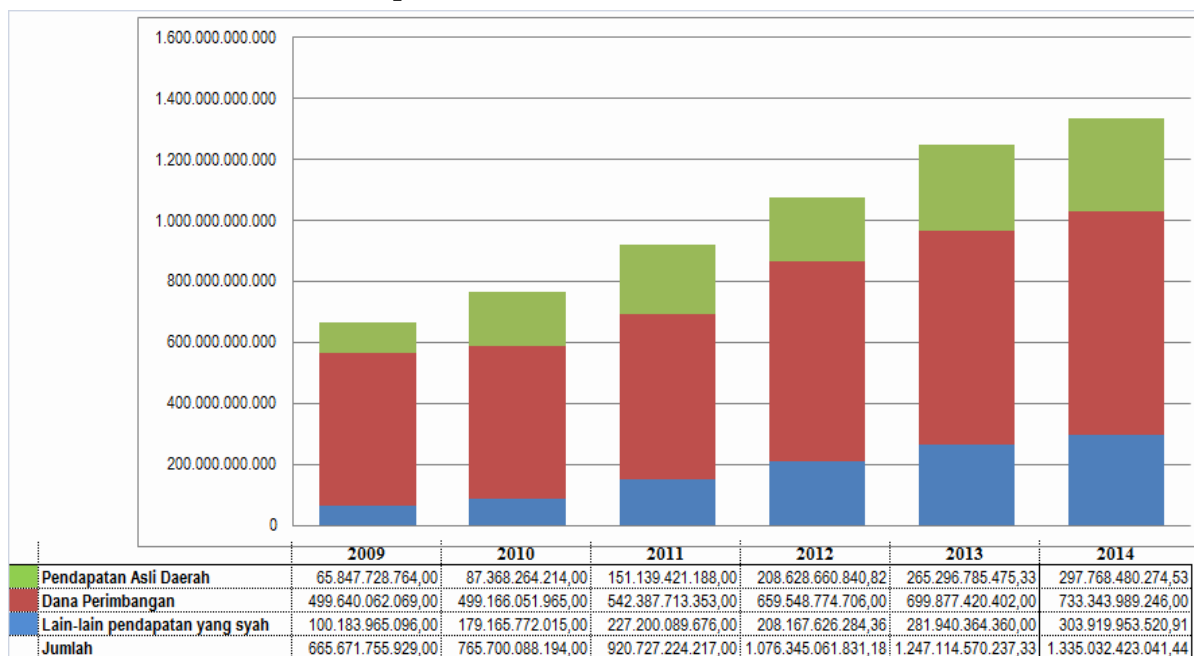
No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Pendapatan Daerah	665.671.755.929,00	765.700.088.194,00	920.727.224.217,00	1.076.345.061.831,18	1.247.114.570.237,33	1.336.032.423.041,44
I.1.	Pendapatan Asli Daerah	65.847.728.764,00	87.368.264.214,00	151.139.421.188,00	208.628.660.840,82	265.296.785.475,33	298.768.480.274,53
1.	Pajak Daerah	43.504.173.896,00	58.769.561.681,00	117.806.409.735,00	162.782.492.225,00	179.831.919.776,00	203.165.655.899,00
2.	Retribusi Daerah	16.031.048.850,00	18.305.299.499,00	23.940.468.459,00	26.992.841.239,50	53.250.705.939,63	49.752.244.887,37
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1.848.725.555,00	1.899.421.499,00	2.056.428.426,00	2.246.318.191,49	8.553.670.659,30	3.699.624.280,16
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.463.780.463,00	8.393.981.535,00	7.336.114.568,00	16.607.009.184,83	23.660.489.100,40	42.150.955.208,00
	Share PAD	9,89	11,41	16,42	19,38	21,27	22,36
I.2.	Dana Perimbangan	499.640.062.069,00	499.166.051.965,00	542.387.713.353,00	659.548.774.706,00	699.877.420.402,00	733.343.989.246,00
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	53.107.314.069,00	65.605.747.965,00	54.489.449.353,00	65.165.688.706,00	44.967.046.402,00	48.909.434.246,00
2.	Dana Alokasi Umum	404.239.748.000,00	408.180.404.000,00	453.729.364.000,00	549.629.456.000,00	626.879.054.000,00	670.090.725.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	42.293.000.000,00	25.379.900.000,00	34.168.900.000,00	44.753.630.000,00	28.031.320.000,00	14.343.830.000,00
	Share perimbangan	75,06	65,19	58,91	61,28	56,12	54,89
I.3.	Lain-lain pendapatan yang syah	100.183.965.096,00	179.165.772.015,00	227.200.089.676,00	208.167.626.284,36	281.940.364.360,00	303.919.953.520,91
1.	Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dana Bagi hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	53.388.204.696,00	62.017.019.683,00	87.044.264.396,00	112.996.263.284,36	119.653.577.360,00	125.156.807.880,00
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.295.760.400,00	106.898.752.332,00	128.565.075.280,00	85.150.713.000,00	149.154.587.000,00	156.384.411.000,00
5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi / Pemerintah Daerah lainnya	14.500.000.000,00	10.250.000.000,00	11.590.750.000,00	10.020.650.000,00	13.132.200.000,00	22.378.734.640,91
	Share Lain lain pendapatan	15,05	23,40	24,68	19,34	22,61	22,75

Sumber/Source: BPKAD Kota Pontianak

### Grafik 5.1



### Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2014



Dari data komposisi penerimaan daerah di atas, terlihat bahwa pendapatan daerah yang paling besar masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat ke daerah (Dana Perimbangan) yaitu sebesar 54,93% pada tahun 2014. Demikian juga dengan PAD terjadi kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu, yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 terjadi peningkatan Rp. 63,7 M, sedangkan kenaikan tahun 2014 Rp. 32,4 M. Untuk jumlah total tahun 2014 sudah 1,33 T, dengan jumlah ini maka sangat dimungkinkan untuk mendorong porsi pembiayaan yang lebih besar terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

Dari anggaran yang tersedia, pemerintah Kota Pontianak mengalokasikan dana berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan, maka APBD dari tahun ke tahun dialokasikan dengan komposisi sebagai berikut:

## 5.2. Komposisi Belanja Daerah

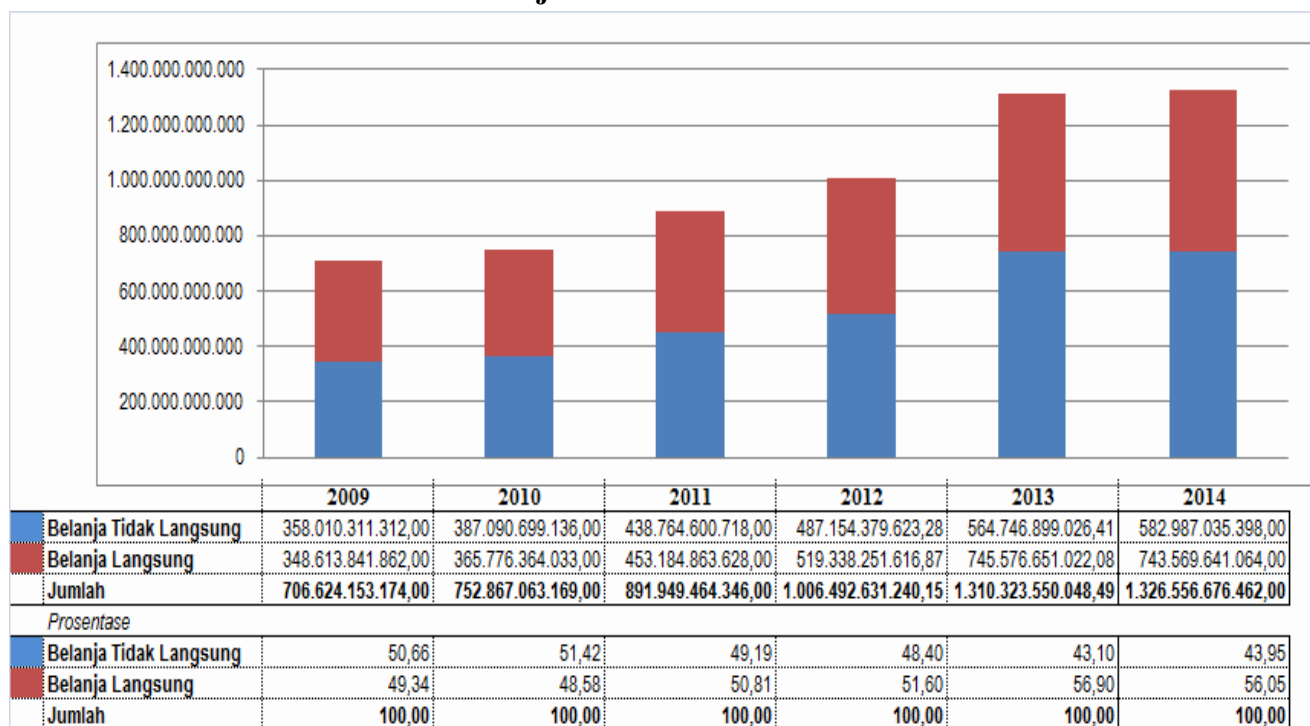
Berikut tabel yang menunjukkan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak dari tahun 2009 – 2014 :

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2009 – 2014**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>II.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>706.624.153.174,00</b>	<b>752.867.063.169,00</b>	<b>891.949.464.346,00</b>	<b>1.006.492.631.240,15</b>	<b>1.310.323.550.048,49</b>	<b>1.326.556.676.462,00</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>358.010.311.312,00</b>	<b>387.090.699.136,00</b>	<b>438.764.600.718,00</b>	<b>487.154.379.623,28</b>	<b>564.746.899.026,41</b>	<b>582.987.035.398,00</b>
1.	BELANJA PEGAWAI	339.876.224.850,00	369.484.064.137,00	405.215.114.920,00	465.197.307.303,00	529.714.440.868,00	566.857.424.727,00
2.	BELANJA BUNGA	449.643.012,00	377.692.245,00	305.741.478,00	234.480.650,28	161.839.944,41	89.889.177,00
3.	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	0,00
4.	BELANJA HIBAH	9.810.000.000,00	8.603.348.800,00	19.316.893.750,00	15.076.450.000,00	30.317.103.660,00	12.692.280.000,00
5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.399.535.700,00	8.398.996.000,00	12.665.442.600,00	5.383.360.850,00	3.357.689.085,00	2.317.700.000,00
6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROPINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	1.028.013.750,00
7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	-	-	109.750.000,00	1.090.975.000,00	1.159.725.000,00	-
8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	474.907.750	226.597.954,00	1.151.657.970,00	171.805.820,00	36.100.469,00	1.727.744,00
	Share BTL	50,66	51,42	49,19	48,40	43,10	43,95
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>348.613.841.862,00</b>	<b>365.776.364.033,00</b>	<b>453.184.863.628,00</b>	<b>519.338.251.616,87</b>	<b>745.576.651.022,08</b>	<b>743.569.641.064,00</b>
1.	BELANJA PEGAWAI	47.781.846.500,00	51.432.838.320,00	54.686.217.294,00	50.808.245.760,00	81.340.352.434,00	74.522.185.980,00
2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.857.593.358,00	116.523.768.220,00	160.409.045.378,00	166.095.190.525,00	212.935.703.139,00	247.523.692.315,00
3.	BELANJA MODAL	185.974.402.004,00	197.819.757.493,00	238.089.600.956,00	302.434.815.331,87	451.300.595.449,08	421.523.762.769,00
	Share BT	49,34	48,58	50,81	51,60	56,90	56,05

Sumber : Berbagai SKPD, diolah

**Grafik 5.2**  
**Realisasi Belanja Kota Pontianak Tahun 2009 – 2014**



Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kota Pontianak selama kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2009–2014 cenderung

meningkat. Apabila diamati dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung dalam enam tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan terus menurun. Sebaliknya porsi belanja langsung semakin meningkat di sisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang dianut Pemerintah Kota Pontianak adalah mengedepankan urusan-urusan yang berkenaan dengan masyarakat langsung. Artinya program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebenarnya apabila ditelisik jauh lebih dalam, di dalam belanja tidak langsung juga terdapat porsi belanja yang juga langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat seperti belanja hibah dan bantuan sosial yang obyeknya langsung kepada masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penganggaran pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak telah pro public .

**Tabel 5.3**  
**Rekapitulasi Target Belanja Langsung SKPD**  
**Tahun anggaran 2009-2014**

No	SKPD	Tahun						%
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sekretariat Daerah	42,446,617,975.00	44,411,973,200.00	43,934,243,212.00	28,741,525,015.00	31,715,360,327.00	33,261,789,058	-12.13
2	Sekretariat DPRD	16,589,925,050.00	18,567,237,400.00	21,276,610,707.00	25,709,214,100.00	19,911,289,100.00	21,818,311,950	13.61
3	Inspektorat	2,054,843,400.00	2,182,800,000.00	2,241,394,000.00	3,328,399,500.00	4,715,028,000.00	4,398,955,200	36.32
4	Badan Kepegawaian Daerah	7,028,933,600.00	6,800,000,000.00	7,434,200,000.00	7,525,690,750.00	7,537,973,950.00	6,396,513,600	-4.71
5	Bappeda	3,906,807,448.00	3,646,896,000.00	3,819,889,600.00	5,236,219,050.00	6,691,527,650.00	7,671,681,370	32.52
6	Badan Lingkungan Hidup	2,821,931,517.00	2,472,600,000.00	2,539,515,444.00	3,353,798,500.00	4,159,060,600.00	4,640,424,300	24.37
7	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	1,125,462,500.00	1,117,220,000.00	1,732,715,500.00	1,831,860,000.00	2,435,276,000.00	2,351,018,325	35.25
8	Badan Penanggulangan Bencana	-	1,318,780,000.00	1,403,480,000.00	1,826,475,000.00	3,667,770,000.00	3,984,959,000	100.00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana/Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana	3,113,906,618.00	2,774,100,000.00	2,693,809,922.00	4,425,738,480.00	4,911,989,900.00	5,616,621,400	28.67
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	21,136,200,036.00	21,005,922,036.00	19,182,898,285	100.00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	5,370,530,500.00	4,557,360,000.00	4,360,373,000.00	4,705,027,500.00	5,575,207,500.00	4,447,982,500	-9.40
12	Dinas Pendidikan	63,954,866,222.00	69,468,634,500.00	104,888,269,071.00	29,007,504,415.00	109,196,811,200.00	115,245,199,829	28.62
13	Dinas Kesehatan	19,673,902,594.00	25,277,367,449.96	54,423,359,729.00	72,637,994,403.00	53,211,687,958.00	58,523,363,943	49.68
14	Dinas Pekerjaan Umum	6,254,114,000.00	147,860,128,000.00	170,324,536,500.00	65,556,506,000.00	173,980,412,000.00	263,200,519,000	95.36
15	Dinas Tata Ruang dan Perumahan	1,724,109,100.00	1,925,600,000.00	1,838,530,464.00	35,501,181,500.00	78,256,603,613.00	97,520,673,886	96.53
16	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6,912,400,400.00	4,882,157,916.00	4,753,873,626.00	6,700,656,226.00	7,502,809,000.00	9,065,543,090	13.48
17	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	16,920,329,426.00	17,882,641,000.00	18,547,603,102.00	27,299,158,647.00	25,513,798,510.00	30,924,783,510	29.27
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,774,722,874.00	2,744,785,000.00	5,563,181,119.24	3,475,757,500.00	4,113,667,000.00	2,987,280,500	3.69
19	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2,706,127,369.00	2,712,000,000.00	2,229,197,000.00	2,825,824,000.00	3,946,000,000.00	5,022,355,000	29.97
20	Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	2,220,334,357.00	2,094,580,000.00	3,005,840,000.00	4,044,748,000.00	69,647,763,000.00	11,468,967,650	67.56
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,872,163,069.00	2,140,950,000.00	2,414,991,361.00	3,846,021,200.00	3,560,708,300.00	3,406,022,350	8.50

No	SKPD	Tahun						%
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	3,206,192,000.00	4,943,080,000.00	5,321,070,000.00	3,845,806,125.00	4,138,890,000.00	16.808.466.750	67.96
23	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan	16,034,973,900.00	5,831,560,000.00	5,830,572,162.00	9,377,677,100.00	8,368,044,000.00	10.348.438.900	-21.55
24	Dinas Pendapatan Daerah	3,849,012,675.00	3,849,780,000.00	6,173,773,837.00	4,819,682,000.00	4,842,682,500.00	4.746.211.250	10.44
25	Kantor Ketahanan Pangan	1,188,874,100.00	1,157,680,000.00	943,929,200.00	1,477,139,000.00	1,616,550,000.00	1.682.948.350	17.20
26	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1,242,919,600.00	1,210,800,000.00	1,094,283,900.00	3,074,690,000.00	2,026,257,000.00	4.217.269.000	54.47
27	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	1,999,292,700.00	1,112,000,000.00	902,532,450.00	817,610,000.00	1,223,750,000.00	1.126.633.000	-27.92
28	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak	-	-	-	21,038,264,675.00	29,032,755,250.00	49.286.634.725	100.00
29	Pontianak Barat	2,750,754,300.00	2,027,600,000.00	1,825,346,400.00	1,875,266,000.00	2,008,837,500.00	2.516.808.500	-4.44
30	Pontianak Timur	2,124,701,001.00	1,735,902,000.00	1,467,266,950.00	1,765,744,000.00	2,085,595,000.00	2.243.318.900	2.72
31	Pontianak Selatan	2,616,820,474.00	1,832,979,700.00	1,592,655,300.00	1,974,065,500.00	5,542,443,800.00	2.428.318.250	-3.74
32	Pontianak Utara	3,106,831,334.00	2,128,200,000.00	2,488,554,000.00	1,982,627,500.00	2,195,515,000.00	2.480.636.000	-11.21
33	Pontianak Kota	2,937,924,597.00	1,853,112,950.00	1,709,694,745.00	1,869,335,500.00	2,134,780,750.00	2.276.963.900	-12.67
34	Pontianak Tenggara	2,657,567,056.00	1,678,960,000.00	1,472,747,000.00	1,635,674,500.00	1,745,603,525.00	2.115.282.000	-11.36
35	Pelaksana Harian Badan Narkoba	1,605,890,000.00	1,017,121,000.00	1,061,964,850.00	-	-	-	-100.00
36	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	1,507,103,310.00	1,617,100,000.00	1,596,900,998.28	-	-	1.126.725.000	-14.44
37	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	-	360,878,200.00	-	-	-	-	#DIV/0!
	Total	257,300,885,066.00	397,194,564,315.96	492,906,905,149.52	14,269,081,722.00	708,218,369,969.00	814,540,518,271	51.99

Sumber : BPKAD Kota Pontianak

**Tabel 5.4**  
**Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung SKPD**  
**Tahun anggaran 2009-2014**

No	SKPD	Tahun						%
		2009	2010	2011	2012	2013*)	2014	
1	Sekretariat Daerah	29.857.852.755.50	33.665.479.787.27	33.085.997.121.00	23.290.572.154.00	27.256.127.008.00	28.406.084.143	-2.49
2	Sekretariat DPRD	14.139.927.600.00	16.351.565.493.00	19.543.861.134.00	22.634.626.977.00	22.077.945.793.00	17.450.122.354	10.48
3	Inspektorat	1.639.949.958.00	1.969.196.676.00	2.020.455.414.00	2.481.410.723.00	3.606.353.286.00	3.074.345.935	30.43
4	Badan Kepegawaian Daerah	6.356.960.700.00	6.140.033.750.00	6.197.621.125.00	6.418.476.801.00	4.374.126.389.00	4.599.407.968	-16.04
5	Bappeda	3.616.702.936.00	3.391.747.794.00	2.677.298.890.00	4.314.400.443.00	5.498.709.873.00	6.447.521.190	28.13
6	Badan Lingkungan Hidup	2.710.514.861.00	2.371.403.033.00	2.309.807.253.00	3.117.836.546.00	3.916.020.171.00	3.826.031.823	17.07
7	Badan Pelayan Perizinan Terpadu	965.573.752.00	1.056.606.138.00	1.214.906.478.00	1.345.534.863.00	2.259.789.821.00	2.176.852.160	38.55
8	Badan Penanggulangan Bencana	0	856.564.270.00	1.048.573.995.00	1.256.844.550.00		3.660.637.859	100.00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana/Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana	2.373.684.573.00	2.313.680.205.00	2.455.616.583.00	3.808.799.162.00	3.384.157.464.00	5.203.703.926	37.35
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	10.065.826.184.00	13.811.827.428.00	13.802.996.549	100.00
11	Satuan Polisi Pamong Paraja	4.541.994.816.00	4.251.816.097.00	4.098.199.051.00	4.201.015.432.00	495.198.462.00	3.900.995.741	-7.59
12	Dinas Pendidikan	58.955.794.578.00	63.658.183.759.00	95.785.317.039.00	393.429.502.742.00	108.869.885.104.00	103.327.918.426	27.34
13	Dinas Kesehatan	18.863.504.005.99	23.976.429.011.00	52.987.360.230.00	67.910.650.221.00	50.111.263.709.00	50.856.755.718	45.89
14	Dinas Pekerjaan Umum	5.823.026.048.00	145.064.243.811.00	167.040.855.518.00	159.880.248.121.00	233.175.700.552.00	256.951.816.864	95.57
15	Dinas Tata Ruang dan Perumahan	1.501.171.560.00	1.548.636.755.00	1.522.958.882.00	33.545.450.169.88	82.390.992.570.46	92.745.652.308	96.81
16	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	6.448.465.262.00	4.412.765.252.00	4.089.693.423.00	5.989.586.430.00	13.155.567.780.00	7.340.613.679	6.47
17	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	14.963.572.229.00	17.474.160.527.50	17.089.588.616.00	25.680.572.281.00	25.916.232.513.00	29.688.970.769	32.98
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.251.988.756.00	2.499.004.020.00	3.881.868.884.00	2.993.513.066.00	2.778.790.422.00	2.759.532.501	10.13
19	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2.515.653.158.00	2.186.865.353.00	2.167.481.422.00	2.627.004.325.00	3.944.122.941.00	4.642.008.618	29.71
20	Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1.621.886.995.00	1.575.650.093.00	2.448.354.713.00	3.364.682.172.00	72.351.982.239.00	4.841.608.973	49.81

No	SKPD	Tahun						%
		2009	2010	2011	2012	2013*)	2014	
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.679.402.778,00	2.006.409.097,00	2.209.829.099,00	3.519.349.821,00	5.268.769.499,00	3.284.737.604	10,15
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.132.447.258,00	4.888.349.116,00	4.565.217.714,00	3.446.967.300,00	3.676.187.816,00	14.410.521.014	64,29
23	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan	15.529.145.202,00	5.406.677.464,00	5.563.248.668,26	8.595.800.425,99	8.306.397.079,07	10.008.434.300	-21,62
24	Dinas Pendapatan Daerah	2.950.361.902,00	3.157.365.141,00	5.068.336.354,00	3.678.225.642,00	3.593.503.559,00	4.199.958.959	17,48
25	Kantor Ketahanan Pangan	1.101.131.070,00	1.098.668.115,00	790.984.837,00	1.378.576.898,00	1.540.852.293,00	1.598.276.456	18,42
26	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.206.665.246,00	1.028.523.255,00	1.024.274.185,00	2.853.372.282,00	1.780.037.680,00	3.973.681.367	53,41
27	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.737.399.642,00	857.993.661,00	758.777.409,00	739.118.842,00	988.203.616,00	892.344.912	-32,13
28	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak	0	0	0	17.251.706.766,00	25.550.029.428,00	47.365.321.582	100,00
29	Pontianak Barat	2.355.825.094,00	1.818.658.014,00	1.691.711.564,00	1.752.358.868,00	2.029.032.816,00	2.476.586.296	2,50
30	Pontianak Timur	1.799.397.057,00	1.464.841.327,00	1.378.507.772,00	1.514.537.045,00	1.211.774.504,00	2.127.195.906	8,35
31	Pontianak Selatan	2.239.610.730,00	1.687.975.900,00	1.483.531.984,00	1.844.760.904,00	1.364.820.819,00	2.262.688.813	0,51
32	Pontianak Utara	2.739.265.027,00	1.827.348.733,00	1.607.104.547,00	1.846.723.366,00	1.882.968.824,00	2.413.498.495	-6,32
33	Pontianak Kota	2.640.763.714,00	1.722.226.240,00	1.614.476.928,00	1.762.015.037,00	2.232.305.496,00	2.204.049.300	-9,01
34	Pontianak Tenggara	2.177.306.282,00	1.351.758.066,00	1.284.364.732,00	1.397.673.588,00	999.749.635,00	2.044.827.126	-3,14
35	Pelaksana Harian Badan Narkoba	1.445.157.064,00	897.457.277,00	826.957.150,00	0	0	1.096.350.000	-100,00
36	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	1.348.347.262,00	1.466.723.102,00	1.204.267.536,00	0	1.235.931.400	0	-10,31
37	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0	331.357.700,00	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total	224.230.449.871,49	365.776.364.032,77	452.737.406.250,26	829.937.740.147,87	741.035.357.989,53	746.062.049.634,00	53,78

Sumber : BPKAD Kota Pontianak

**Tabel 5.5**  
**Komposisi Belanja Langsung SKPD**  
**Tahun Anggaran 2009-2014**

No	SKPD	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sekretariat Daerah	13,32%	9,20%	7,31%	2,81%	17,77%	3,81%
2	Sekretariat DPRD	6,31%	4,47%	4,32%	2,73%	5,71%	2,34%
3	Inspektorat	0,73%	0,54%	0,45%	0,30%	0,63%	0,41%
4	Badan Kepegawaian Daerah	2,84%	1,68%	1,37%	0,77%	1,21%	0,62%
5	Bappeda	1,61%	0,93%	0,59%	0,52%	0,52%	0,86%
6	Badan Lingkungan Hidup	1,21%	0,65%	0,51%	0,38%	0,31%	0,51%
7	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0,43%	0,29%	0,27%	0,16%	0,25%	0,29%
8	Badan Penanggulangan Bencana	0,00%	0,23%	0,23%	0,15%	0,32%	0,49%
9	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana/Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana	1,06%	0,63%	0,54%	0,46%	1,08%	0,70%
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	3,33%	1,85%
11	Satuan Polisi Pamong Praja	2,03%	1,16%	0,91%	0,51%	0,75%	0,52%
12	Dinas Pendidikan	26,29%	17,40%	21,16%	47,40%	10,76%	13,85%
13	Dinas Kesehatan	8,41%	6,55%	11,70%	8,18%	10,82%	6,82%
14	Dinas Pekerjaan Umum	2,60%	39,66%	36,90%	19,26%	31,17%	34,44%
15	Dinas Tata Ruang dan Perumahan	0,67%	0,42%	0,34%	4,04%	1,33%	12,43%
16	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2,88%	1,21%	0,90%	0,72%	0,97%	0,98%
17	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	6,67%	4,78%	3,77%	3,09%	5,36%	3,98%
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,00%	0,68%	0,86%	0,36%	0,29%	0,37%
19	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	1,12%	0,60%	0,48%	0,32%	0,24%	0,62%

No	SKPD	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
20	Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	0.72%	0.43%	0.54%	0.41%	0.37%	0.65%
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.19%	0.55%	0.49%	0.42%	0.50%	0.44%
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.40%	1.34%	1.01%	0.42%	0.42%	1.93%
23	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan	6.93%	1.48%	1.23%	1.04%	0.26%	1.34%
24	Dinas Pendapatan Daerah	1.32%	0.86%	1.12%	0.44%	0.28%	0.56%
25	Kantor Ketahanan Pangan	0.49%	0.30%	0.17%	0.17%	0.18%	0.21%
26	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	0.54%	0.28%	0.23%	0.34%	0.19%	0.53%
27	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	0.77%	0.23%	0.17%	0.09%	0.27%	0.12 %
28	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak	0.00%	0.00%	0.00%	2.08%	0.69%	6.35 %
29	Pontianak Barat	1.05%	0.50%	0.37%	0.21%	0.36%	0.33%
30	Pontianak Timur	0.80%	0.40%	0.30%	0.18%	0.41%	0.29 %
31	Pontianak Selatan	1.00%	0.46%	0.33%	0.22%	1.63%	0.30 %
32	Pontianak Utara	1.22%	0.50%	0.35%	0.22%	0.57%	0.32 %
33	Pontianak Kota	1.18%	0.47%	0.36%	0.21%	0.72%	0.30 %
34	Pontianak Tenggara	0.97%	0.37%	0.28%	0.17%	0.31%	0.27 %
35	Pelaksana Harian Badan Narkoba	0.64%	0.25%	0.18%	0.00%	0.00%	-
36	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	0.60%	0.40%	0.27%	0.00%	0.00%	0.15 %
37	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	-
	Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %

Sumber : Bappeda Kota Pontianak

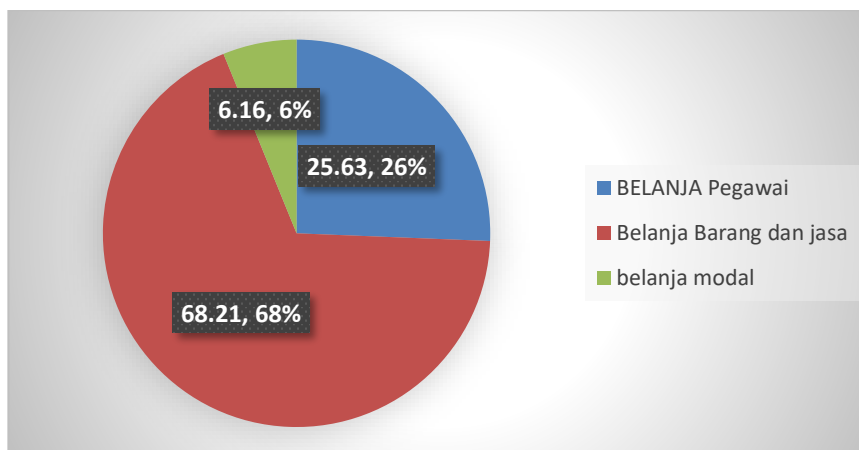
### 5.3 Analisis Anggaran Belanja Sektoral

5.3.1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, analisis komposisi belanja diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2014 menggunakan 68.21% anggarannya untuk belanja barang dan jasa, 25.63% belanja pegawai dan 6.16% sebagai belanja Modal.

Tabel 5.6  
Komposisi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

5.2	Belanja Langsung	5.136.575.000	100
5.2.1	Belanja Pegawai	1.316.690.000	25.63
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.503.635.000	68.21
5.2.3	Belanja Modal	316.250.000	6.16

Grafik 5.3  
Komposisi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



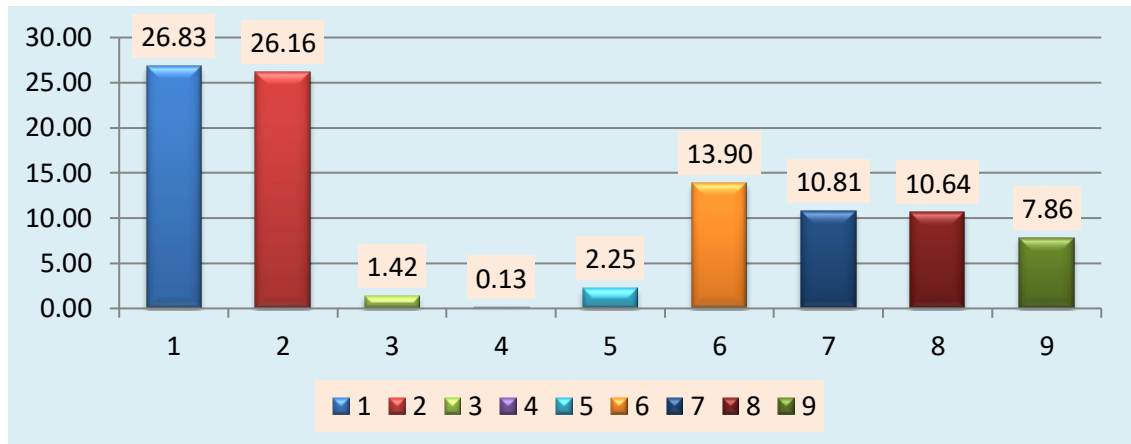
### Menurut Jenis Program Yang Dibiayai

Pada tahun 2014, realisasi belanja terbanyak dari instansi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah diprogram Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 26,83%, diikuti oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 26,16% dan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 13,90%

Tabel 5.7  
Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menurut Program

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	607.071.265	26.83
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	591.718.819	26.16
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32.200.000	1.42
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.850.000	0.13
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.000.000	2.25
6	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	314.555.000	13.90
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	244.437.100	10.81
8	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	240.676.100	10.64
9	Perlindungan Dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan	177.743.916	7.86

Grafik 5.4  
Komposisi Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Menurut Program



### 5.3.2 Bidang Kesehatan

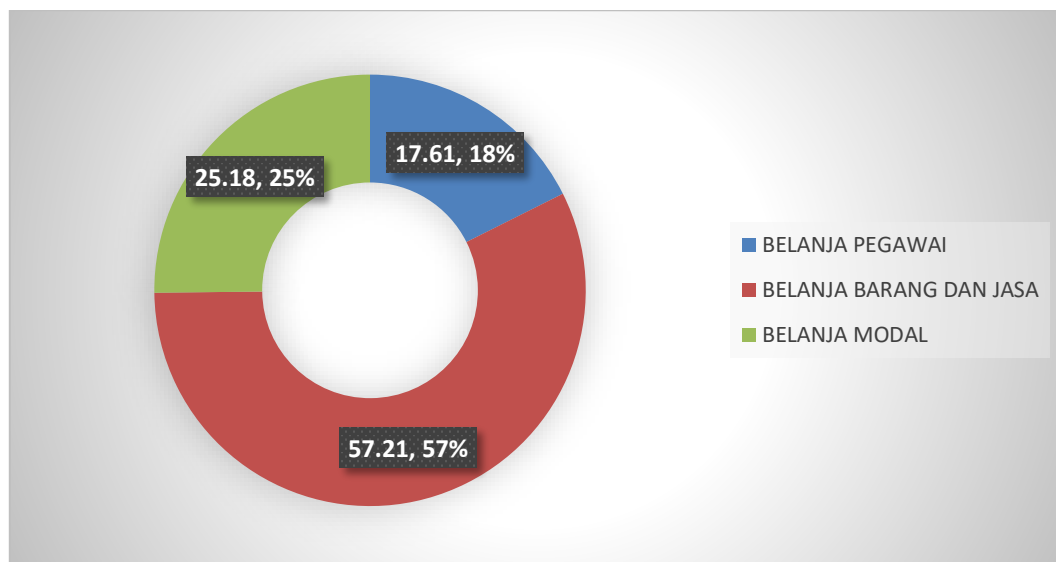
Jika dilihat dari komposisi belanja, maka komposisi belanja anggaran yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2014, Dinas kesehatan yang paling besar digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya sebesar Rp. 31.435.188.362,66 atau 57.21%. Proporsi belanja pegawai sebesar 17.61% dan belanja modal 25.18% dari keseluruhan anggaran yang digunakan.

Tabel 5.8  
Komposisi Belanja Dinas Kesehatan

5.2	Belanja Langsung	54.947.478.521,26	100
5.2.1	Belanja Pegawai	9.676.836.400	17.61
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.435.188.362,66	57.21
5.2.3	Belanja Modal	13.835.453.758,60	25.18

Grafik 5.5  
Komposisi Belanja Dinas Kesehatan





### Menurut Jenis Program Yang Dibiayai

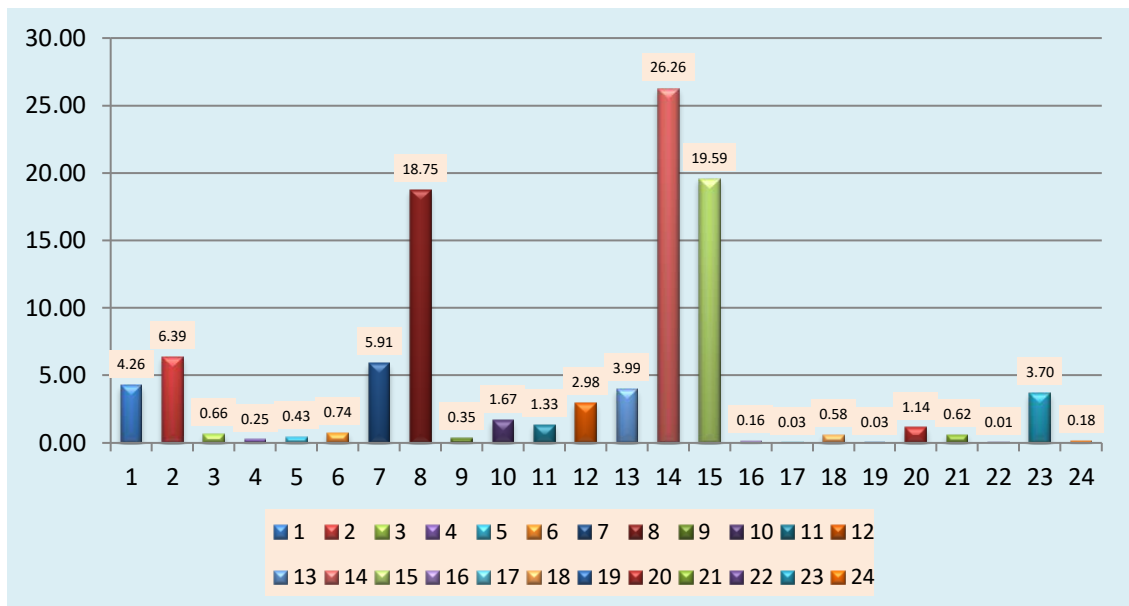
Pada tahun 2014, realisasi belanja terbanyak dari instansi Dinas Kesehatan adalah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya sebesar 26,26%, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebesar 19.59% dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 18,75%

Tabel 5.9  
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan menurut Program

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.173.300.897,00	4.26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.262.145.288	6.39
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	338.261.000	0.66
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	129.980.600	0.25
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	218.804.600	0.43
6	Program Pelayanan Prima	377.349.950,00	0.74
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.012.637.803	5.91
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.562.975.733	18.75
9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	179.484.900	0.35
10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	850.634.000	1.67
11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	678.050.750	1.33
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.519.897.350	2.98
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.034.710.450	3.99
14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	13.395.488.350	26.26
15	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	9.993.186.997	19.59
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	81.084.300	0.16
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	15.675.000	0.03
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	298.091.800	0.58
19	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	14.797.500	0.03
20	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV-AIDS	582.707.000	1.14
21	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tidak menular	313.935.150	0.62
22	Pelayanan kontrasepsi	3.850.000	0.01
23	Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1.887.022.201	3.70

24	Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	89.275.000	0.18
----	---------------------------------------	------------	------

Grafik 5.6  
Komposisi Belanja Dinas Kesehatan Menurut Program



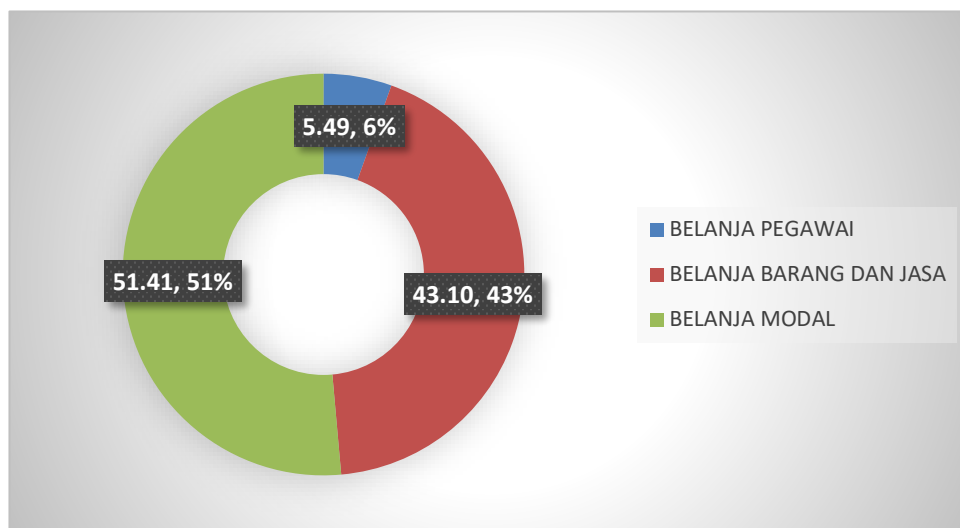
### 5.3.3. Bidang Pendidikan

Jika dilihat dari komposisi belanja, maka komposisi belanja anggaran yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2014, Dinas Pendidikan yang paling besar digunakan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 60.753.896.943 atau 51.49%. Proporsi belanja pegawai sebesar 5.50% dan belanja barang dan jasa sebesar 43.01% dari keseluruhan anggaran yang digunakan.

Tabel 5.10  
Komposisi Belanja Dinas Pendidikan

5.2	Belanja Langsung	118.173.836.028	100
5.2.1	Belanja Pegawai	6.492.586.500	5.50
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.927.352.585	43.01
5.2.3	Belanja Modal	60.753.896.943	51.49

Grafik 5.7  
Komposisi Belanja Dinas Pendidikan



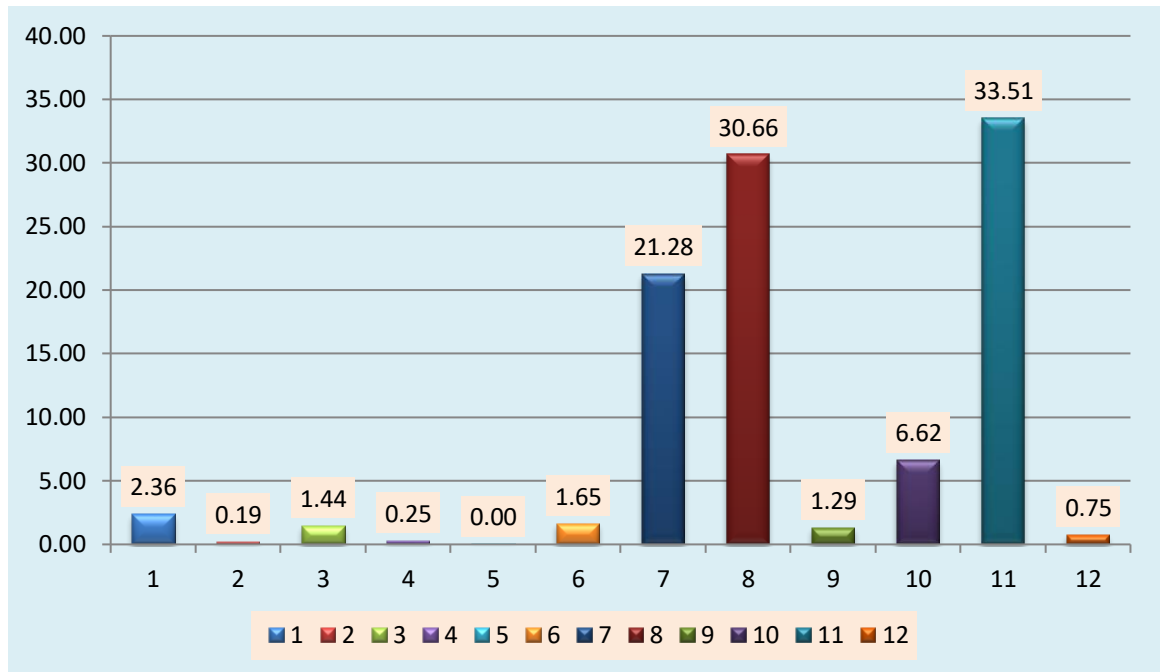
### Menurut Jenis Program Yang Dibiayai

Pada tahun 2014, realiasi belanja terbanyak dari instansi Dinas Pendidikan adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar 33.51%, Program Pendidikan Menengah 30.66% dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun 21,28%

Tabel 5.11  
Realisasi Belanja Dinas Pendidikan menurut Program

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.438.962.726	2.36
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199.772.000	0.19
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.488.944.500	1.44
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur	256.646.100	0.25
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (ABT)	4.950.000	0.00
6	Program Pendidikan Anak usia Dini	1.701.671.250	1.65
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	22.011.334.590	21.28
8	Program Pendidikan Menengah	31.709.476.572	30.66
9	Program Pendidikan Non Formal	1.338.266.885	1.29
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.842.094.475	6.62
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	34.653.106.455	33.51
12	Program Pemeliharaan fasilitas Pendidikan	780.394.049	0.75
	<b>JUMLAH</b>	<b>103,425,619,602</b>	<b>100</b>

Grafik 5.8  
Komposisi Belanja Dinas Pendidikan Menurut Program



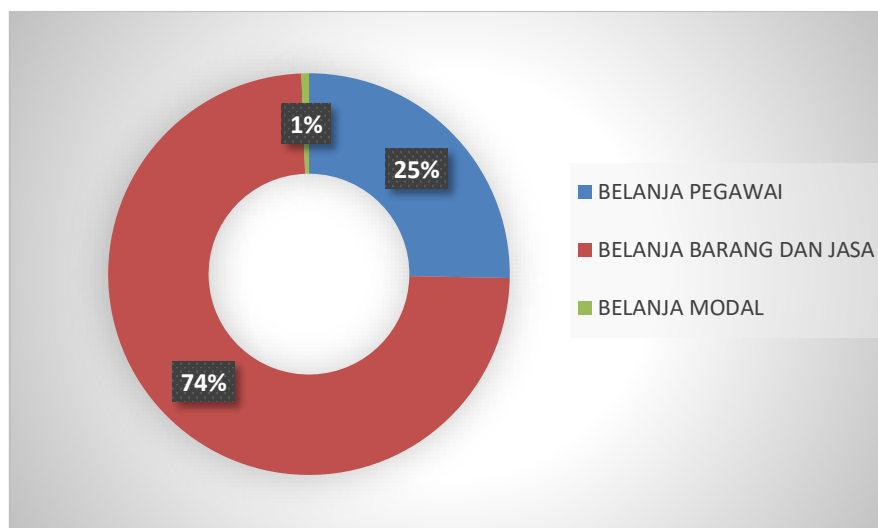
**5.3.4. Bidang Pemberdayaan**

Jika dilihat dari komposisi belanja, maka komposisi belanja anggaran yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2014, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana yang paling besar digunakan untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 3.094.428.900 atau 74%. Proporsi belanja pegawai sebesar 25% dan belanja modal 1% dari keseluruhan anggaran yang digunakan.

Tabel 5.12  
Komposisi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana

5.2	Belanja Langsung	4.176.955.400	100
5.2.1	Belanja Pegawai	1.057.214.000	25
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.094.428.900	74
5.2.3	Belanja Modal	25.312.500	1

Grafik 5.9  
Komposisi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana



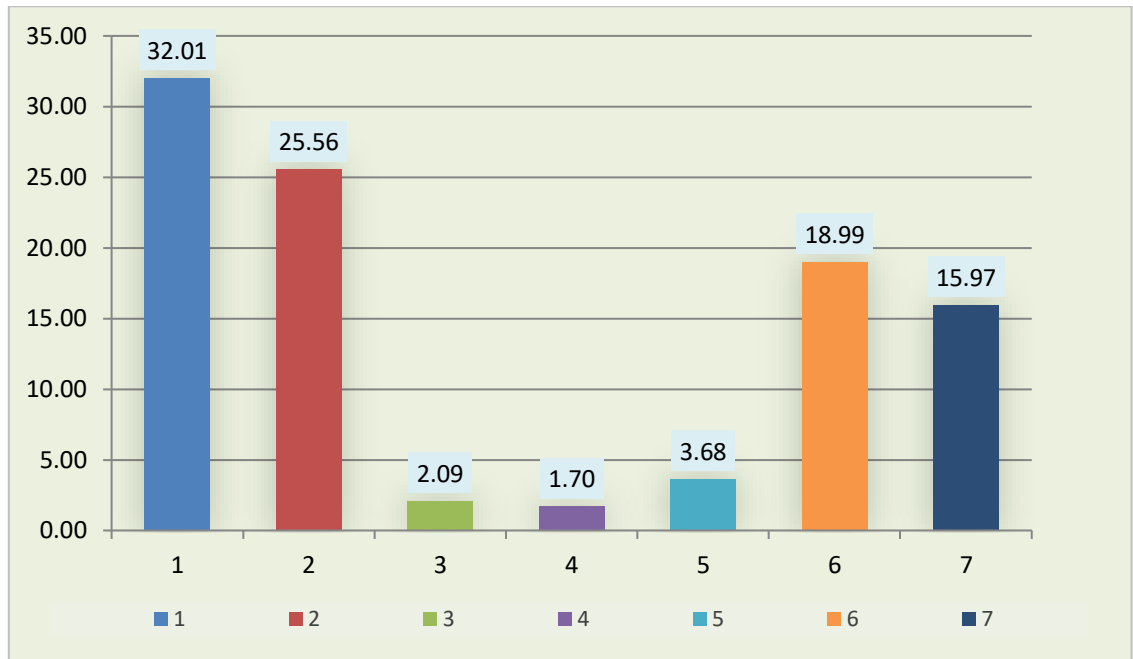
### Menurut Jenis Program Yang Dibiayai

Pada tahun 2014, realisasi belanja terbanyak dari instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana adalah Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 32.01%, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 25.56% dan Peningkatan peduli perempuan dan anak 18.99%

Tabel 5.13  
Realisasi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana menurut Program

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	441,667,844	32.01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	352,665,772	25.56
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28,835,000	2.09
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23,501,000	1.70
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50,725,000	3.68
6	Peningkatan Peduli Perempuan dan Anak	262,073,310.00	18.99
7	Program Perlindungan Anak dan Perempuan	220,406,900.00	15.97

Grafik 5.10  
Komposisi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana Menurut Program



**5.4 Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan**

Analisis efektivitas anggaran terhadap capaian penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melihat sejauhmana perubahan anggaran belanja berimplikasi pada perubahan capaian penanggulangan kemiskinan dalam indikator yang ditinjau.

**5.4.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan**

Pada bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan, perubahan anggaran dari tahun 2005-2008 belanja fungsi sosial terlihat tidak berdampak langsung pada 2 indikator yakni tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Akan tetapi berpengaruh terhadap penurunan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini bisa dipahami, karena berbagai bentuk alokasi anggaran fungsi sosial lebih ditujukan pada program kemiskinan kluster 1 & kluster 2. Setelah tahun 2008-2014 terjadi relevansi yang baik terhadap kenaikan anggaran yang dialokasikan.

Tabel 5.14  
Tabel Relevansi Biaya terhadap Perkembangan Tingkat Kemiskinan

No	Uraian	Tahun												
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		

1	Dinas Sosial Tenaga Kerja & Pemberdayaan	2.309.862.500	774.515.000	1.954.969.000	2.684.920.846	3.553.686.760						
2	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja						2.515.653.158	2.186.865.353	2.167.481.422	2.167.481.422	3.946.000.000	5.136.575.000
3	Kantor Pemberdayaan Masyarakat						1.348.347.262	1.466.723.102	1.204.267.536	-	-	-
4	BPPKB/ BPMPKB						2.373.684.573	2.313.680.205	2.455.616.583	3.808.799.162	4.911.989.900	4.176.955.400
	<b>Total</b>	<b>2.309.862.500</b>	<b>774.515.000</b>	<b>1.954.969.000</b>	<b>2.684.920.846</b>	<b>3.553.686.760</b>	<b>6.237.684.993</b>	<b>5.967.268.660</b>	<b>5.827.365.541</b>	<b>5.976.280.584</b>	<b>8.857.989.900</b>	<b>9.313.530.400</b>
a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,47	6,84	7,15	6,77	9,29	6,38	6,62	6,15	5,77	5,57	5,13
b	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	31.500	36.500	36.469	37.700	52.800	36.560	36.600	34.390	32.530	32.800	
c	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				13,16	10,21	9,38	7,78	7,26	7,00	6,12	7,05
d	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)	0,83	1,29	1,05	0,57	1,94	1,15	1,26	0,84	0,69	0,83	
e	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks)	0,16	0,33	0,30	0,13	0,64	0,39	0,33	0,20	0,14	0,18	

Grafik 5.11  
Relevansi Biaya terhadap Perkembangan Tingkat Kemiskinan



5.4.2 Bidang Kesehatan

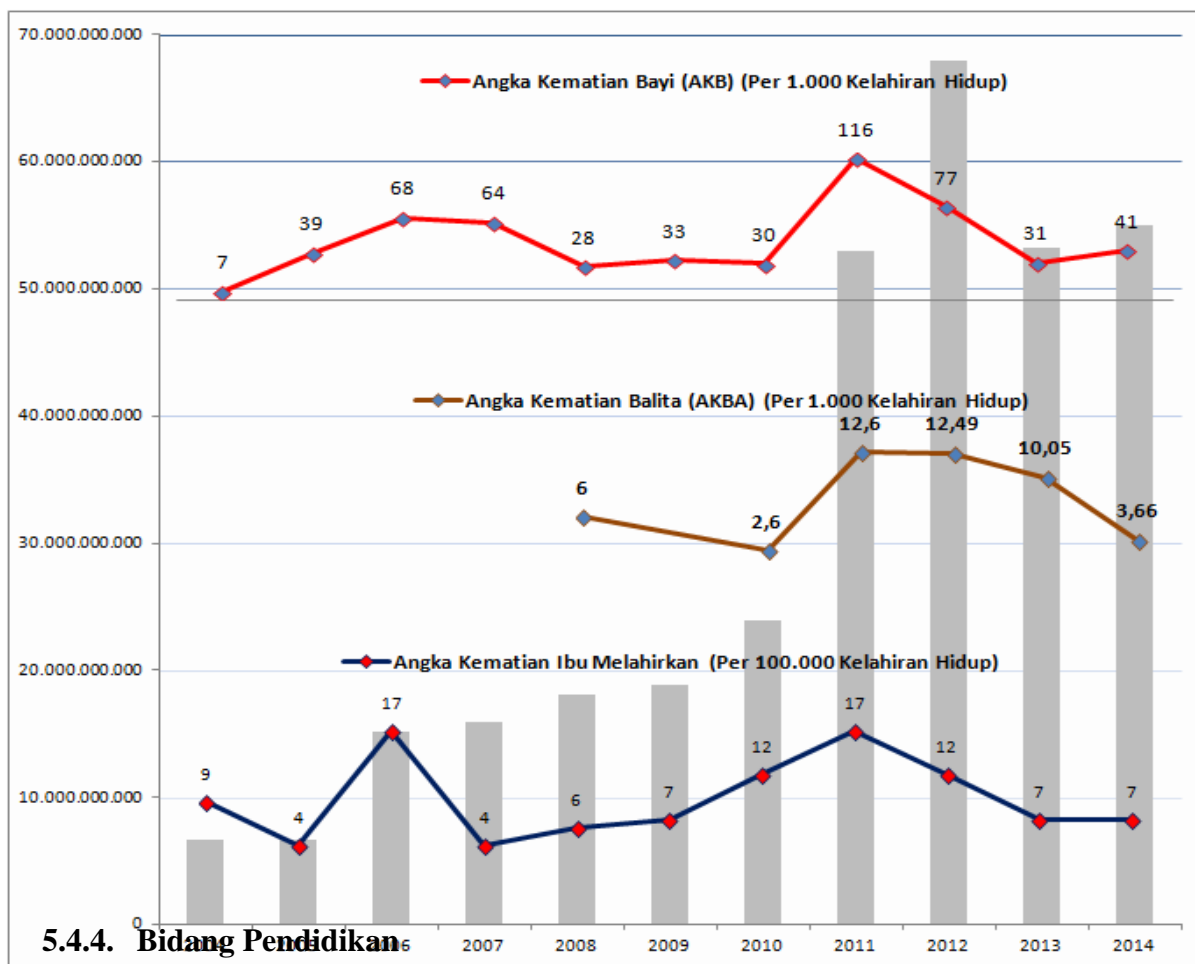
Pada bidang kesehatan, perubahan alokasi anggaran kesehatan secara umum terlihat berpengaruh pada capaian indikator kesehatan. Pada periode 2004-2011,

terjadi peningkatan anggaran kesehatan yang tidak begitu berdampak pada perbaikan capaian beberapa indikator kesehatan pada masa itu, kemudian dari tahun 2011-2014 terjadi relevansi dengan kenaikan anggaran.

Tabel 5.15  
Tabel Relevansi Biaya terhadap Bidang Kesehatan

No	Uraian	Tahun										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Dinas Kesehatan	6.622.891.693	6.615.575.090	15.202.444.000	15.911.961.927	18.053.387.240	18.863.504.006	23.976.429.011	52.987.360.230	67.910.650.221	53.211.687.958	54.947.478.521,26
a	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	7	39	68	64	28	33	30	116	77	31	41
b	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)					6	#N/A	2,6	12,6	12,49	10,05	3,66
c	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	9	4	17	4	6	7	12	17	12	7	7

Grafik 5.12  
Relevansi Biaya terhadap Bidang Kesehatan



5.4.4. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan, alokasi anggaran dari waktu ke waktu terus meningkat. Kewajiban dari undang-undang untuk mengalokasikan minimal 20% anggaran

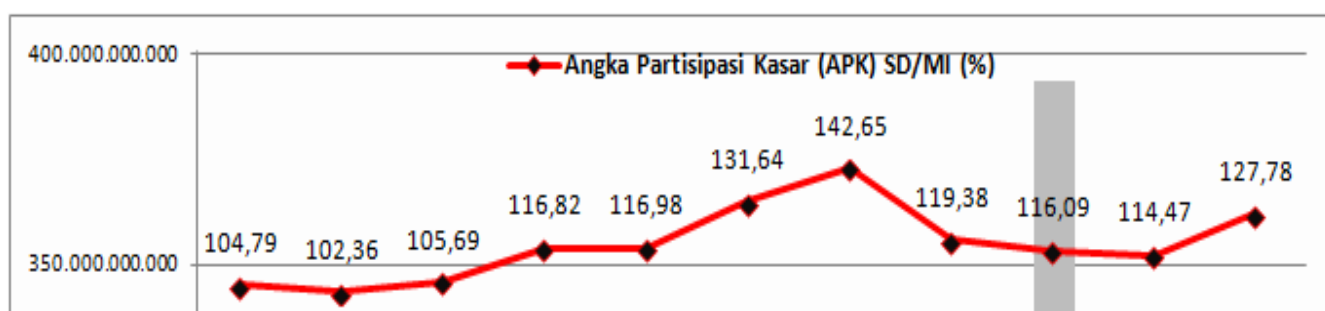


belanja mendorong pemerintah daerah untuk berlomba-lomba memperbaiki alokasi anggaran pendidikan. Di Kota Pontianak, kenaikan anggaran bidang pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan kinerja indikator secara umum. Misalnya pada indikator Angka Partisipasi Kasar, kenaikan anggaran terlihat berkorelasi hanya pada capaian ditingkat APK SMA/MA. Sementara itu APK pada jenjang yang lainnya tidak bergerak naik bahkan cenderung turun.

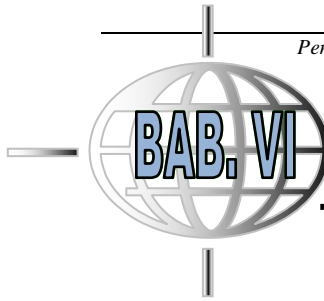
Tabel 5.16  
Tabel Relevansi Biaya terhadap Bidang Pendidikan

No	Uraian	Tahun										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Dinas Pendidikan	3.733.403.000	8.415.345.000	31.626.249.940	38.300.035.083	55.851.111.150	58.955.794.578	63.658.183.759	95.785.317.039	393.429.502.742	109.196.811.532	118.173.836.028
a	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	104,79	102,36	105,69	116,82	116,98	131,64	142,65	119,38	116,09	114,47	127,78
b	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	99,17	99,31	100,05	109,53	112,24	102,25	105,82	104,23	104,61	111,12	114,82
c	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	99,74	100,66	70,18	75,23	72,65	97,13	137,45	99,15	102,19	101,00	101,14
d	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	87,00	86,94	88,34	95,87	96,69	109,93	120,45	113,45	109,80	106,49	107,06
e	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	71,00	70,77	68,97	75,50	67,67	63,61	76,94	82,62	97,43	103,38	104,19
f	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	70,00	65,97	47,61	51,03	50,41	67,39	109,86	64,86	90,32	94,04	94,10

Grafik 5.13  
Tabel Relevansi Biaya terhadap Bidang Pendidikan







## TARGET DAN PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### 6.1 PEMETAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil kumulatif dari seluruh proses pembangunan, dengan kata lain, setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, baik kontribusi yang secara langsung dialokasikan kepada penduduk miskin sebagai bentuk afirmasi terhadap kemiskinan seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah tidak layak huni, ataupun secara tidak langsung seperti investasi sektor swasta dan lain-lain. Pemetaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk melihat program-program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya afirmatif yang telah dan sedang dijalankan di daerah baik program nasional maupun daerah. Program penanggulangan kemiskinan yang afirmatif adalah program-program yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk miskin secara individu, keluarga, maupun rumah tangga, sasaran melalui komunitasnya maupun melalui penghidupannya. Seperti disebutkan diawal bahwa pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran individu, keluarga dan rumah tangga miskin dikelompokkan sebagai program klaster 1, yaitu program perlindungan sosial. Program-program yang sasarannya komunitas dengan model pemberdayaan dikelompokkan sebagai klaster 2, yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). klaster 3, yaitu program yang sasarannya sumber penghidupan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMK), seperti sektor sektor informal yang menjadi sumber penghasilan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi terbawah, kegiatannya berupa peningkatan kapasitas usaha dan peningkatan aksesibilitas terhadap modal dan jaringan usaha bagi UMK dan klaster 4, yaitu Program-program pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur dasar. Program-program ini bisa merupakan program intervensi pusat yang anggarannya bersumber dari APBN dan program daerah yang bersumber dari APBD

**Tabel 6.1**  
**Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1**

PKH	PROGRAM NASIONAL
-----	------------------

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sasaran	RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)					
Jumlah Bantuan (Rp)	1.536.500.000	2.855.200.000	2.072.975.000	3.934.977.500	5.034.907.500	922.818.750
Jumlah Penerima Manfaat (RTS)	2.023	1.995	1.937	3.162	3.025	2.998
Lembaga Pelaksana	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak					
<b>RASKIN</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sasaran	RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)					
Jumlah Bantuan (Kg/Bln)		510.630	2.838.511	2.748.780	2.748.780	2.748.780
Jumlah Penerima Manfaat (RTS)		18.228	18.228	15.271	15.271	15.271
Lembaga Pelaksana	Perekonomian & Pembangunan Setda Kota Pontianak					
<b>JAMKESMAS</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sasaran	Orang Miskin (2014 = BPJS / Indonesia Sehat)					
Jamkesko Umum (Orang)			29.000	24.166		
Jamkesko Anak Sekolah (Orang)			22.570	7.291		
Jamkesmas (Orang)			94.582	86.751	86.751	86.751
Jumlah			146.152	118.208	86.751	86.751
Lembaga Pelaksana	Dinas Kesehatan Kota Pontianak					
<b>BSM</b>	<b>BANTUAN SISWA MISKIN (2015 = Indonesia Pintar)</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sasaran	Murid Miskin					
Jumlah Bantuan (Rp)				6.773.290.000	4.672.450.000	5.008.050.000
Jumlah Penerima Manfaat (RTS)				15.910	9.300	3.156 (kps) + 7.973 (non kps)
Lembaga Pelaksana	Dinas Pendidikan Kota Pontianak					

**Tabel 6.2**  
**Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster 2**

PNPM MANDIRI PERKOTAAN	PROGRAM NASIONAL						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sasaran	KK Miskin						
Jumlah Bantuan APBN (Rp)	4.423.142.000	2.660.000.000	3.535.000.000	5.540.000.000	2.110.000.000	2.790.000.000	930.000.000
Jumlah Bantuan APBD (Rp)	3.031.210.250	2.000.000.000	2.000.000.000	2.439.774.000		310.000.000	310.000.000
Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	410	191	248	241	96	121	98
Jumlah Penerima Manfaat (KK Miskin)	8.124	3.712	3.996	3.912	2.049	3.138	1.617
Lembaga Pelaksana	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak						

**Tabel 6.3**  
**Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh SKPD**

No	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2013				2014				2015			
		APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan
1	Penyuluhan Administrasi Kependudukan	167.340.000		2.384	Orang	139.610.000		3/3000	Media /Buku	147.060.000		3/2.750	Media/ Peserta
2	Pelayanan Perekaman e-KTP dan Kipem secara Mobile	77.490.000		4.256	Orang	98.950.000		2.748	Orang				Orang
3	Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran	51.175.000		829	Lembar	50.550.000		1.439	Lembar	144.910.000			Lembar
<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>													
1	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	163.230.000		450	orang	163.230.000		240	orang				
2	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	77.075.000		40	orang	77.075.000		40	orang				
3	Fasilitas Bina Lingkungan Kepemudaan					98.950.000		50	orang	98.950.000		50	orang
<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM</b>													
1	Pembinaan dan Pelatihan IKM / IRT	793.000.000		600	orang	408.220.000		305	Orang	293.554.650		240	Orang
	Pembinaan dan Evaluasi IKM / IRT	73.760.000		75	orang								
	Fasilitasi Operasi pasar murah dan Pengawasan SNI dan HAKI produk IKM	79.352.000		60	Orang	88.940.000		120	Orang				
3	Fasilitasi/pemasyarakatan dan pengawasan SNI dan HAKI	40.308.000		15.814	orang								
4	Motivasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan RAT koperasi	259.114.100		780	Kopresai	75.000.000		150	Kopresai				
	Penyuluhan/sosialisasi/Pelatihan / Monitoring dan Evaluasi Koperasi					201.300.000		654	Kopresai				
5	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM dan calon wirausaha	447.117.650		300	orang	487.838.700				382.748.850		200	Orang
	Pelatihan Kewirausahaan bagi siswa SMK dan SMA					30.000.000		100	Orang	50.000.000		100	Orang
6	Pengembangan sarana/prasarana UKM di 6 Kec	1.072.694.600		551	orang	790.603.550		300	Orang	654.880.500		300	Orang
	Sosialisasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan									52.201.000		100	Orang
7	Rapat Kerja Fasilitasi Pembiayaan Bagi UKM dalam Rangka Sinkronisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan Lembaga Pembiayaan	60.000.000		80	orang								
8	Pemeliharaan sarana prasarana di Pasar Tradisional (7 pasar)	127.094.450		7	Pasar								
9	Fasilitasi Operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan					20.115.450		15.271	Orang	33.573.150		15.277	Orang
10	Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUKM									80.000.000		30	Orang
11	Pelatihan P-IRT									35.000.000		30	Orang
	Pengujian Sampel									13.663.300		60	Orang
	Perluasan Penerapan HAKI									22.361.000		15	Orang
	Sertifikasi Halal									54.840.150		26	Orang
12	Pelatihan dan Implementasi Teknis Design									129.177.000		40	Orang

No	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	2013				2014				2015			
		APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan
1.	Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kecamatan	10.000.000		584	Kotak	33.588.000		194	Kotak	51.140.000		8.564	ok,ob,kotak
2.	Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Seluruh Kelurahan di Kec. Pontianak Selatan	100.000.000		20	paket	100.000.000		18.023	paket				
3.	Penyusunan Database Kecamatan	6.000.000		92/25	Lembar /Keg	6.000.000		87/05	Lembar /Keg	7.225.000		100/05	Lembar /Keg
4.	Penyusunan Database Seluruh Kelurahan di Kec.	55.120.000		2.518	orang	60.000.000		4.509	orang	58.825.000		11.071/5	Orang/Keg

No	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	2013				2014				2015			
		APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan
1	Pengembangan Usaha dan Pemasaran Pengolahan Hasil	167.915.000		213	unit								
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian /Perkebunan	439.285.000		15	Paket	372.470.000		9	Paket				
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	310.585.000		300	Paket	391.000.000		7	Kec				
	Penyediaan rami, pancing, umi, pancing					187.150.000		7	Paket				

No	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	2013				2014				2015			
		APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Penerima Manfaat	Satuan
1	Kesejahteraan Sosial Anak												
	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)		45.000.000	30	Orang		15.000.000	15	Orang				
	Remaja						15.000.000	15	Orang				
	ASODK Berat		374.400.000	104	Orang		312.000.000	104	Orang		374.400.000	104	Orang
	ASLUT		268.800.000	112	Orang		224.000.000	112	Orang		268.800.000	112	Orang
	Rumah Tidak Layak Huni						1.000.000.000	100	Rumah				
	Sarling						100.000.000	2	Lokasi				
2	Fakir Miskin KAT & PMKS												
	Keterampilan Waria					54.890.000		30	Orang				
	Usaha Ekonomi Rendah (UER)					215.270.000		10	Orang				

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, klaster-klaster program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Pontianak untuk mengurangi angka kemiskinan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Hasil yang diperoleh pada tahun 2010 s/d 2015 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah : (1) realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tiap tahunnya mencapai hampir 3.000 penerima manfaat orang miskin (2).



- Subsidi Raskin Pada Tahun 2015 sebanyak 2.748.780 Kg kepada 15.271 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin, (3) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 86.751 Jiwa pada tahun 2015, dan (3) penyediaan anggaran Bantuan Siswa Miskin (BSM) dialokasikan sebesar Rp. 5.008.050.000 milyar pada tahun 2015 untuk menunjang penyelesaian masalah pendidikan.
2. Sejalan dengan itu, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan berlokasi di 29 kelurahan di 6 Kecamatan, Pada tahun 2015 Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri Perkotaan terserap sebesar Rp. 930.000.000 untuk kegiatan fisik sebanyak 63 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan 1.256 KK Miskin, dan kegiatan sosial sumber dana APBD sebesar Rp. 310.000.000,- dengan 361 KK Miskin penerima manfaat.
  3. Untuk Program Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh 10 SKPD dan 1 Kecamatan dengan berbagai program baik yang dilaksanakan untuk masyarakat umum maupun yang khusus untuk Warga Miskin, dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan APBN, untuk dana APBN juga termasuk dalam program nasional pada klaster 1 dan 2. Pada tahun 2015 Jumlah total dana yang telah dimanfaatkan untuk masyarakat sebesar 10,81 Milyar dari APBD dan 12,28 Milyar dari APBN. Jangkauan penerima manfaat yang terbesar terdapat pada program BPJS Kesehatan yang mencapai 86.751 jiwa pada tahun 2014 dan 2015.

## **6.2. METODE PENDEKATAN ANALISIS**

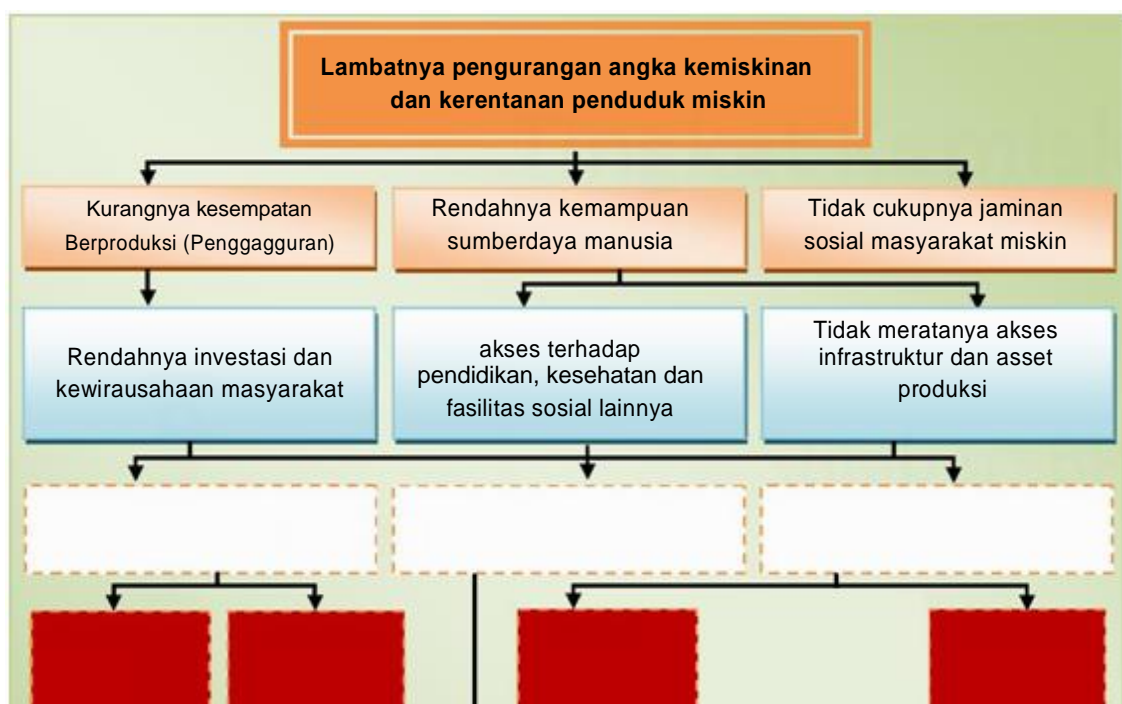
Cara pendekatan yang digunakan untuk mengetahui masalah pokok penanggulangan kemiskinan menggunakan metode pohon masalah atau yang lebih dikenal dengan 'Tree Analysis'. Banyak istilah yang digunakan untuk pengertian analisis pohon masalah. Miller (2004) dalam Scarvada (2004) menggunakan istilah issues trees. Lebih lanjut, Miller menyatakan issues trees merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja proyek. Silverman (1994) menggunakan istilah tree diagram dan menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat. Naskah kebijakan ini menggunakan

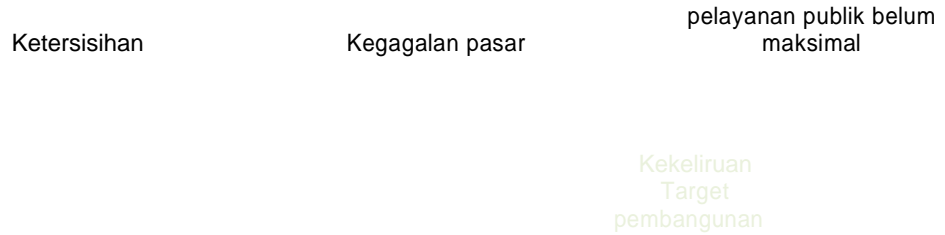
istilah pohon masalah yang merupakan bagian dari analisis pohon. Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat.

### 6.3. MASALAH POKOK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Masalah pokok penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak adalah lambatnya pengurangan angka kemiskinan dan kerentanan penduduk miskin. Hal itu ditandai oleh kurangnya kesempatan berproduksi, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, dan tidak cukupnya jaminan sosial untuk masyarakat miskin. Kurangnya kesempatan berproduksi disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi dan kewirausahaan masyarakat, sedangkan rendahnya kemampuan sumber daya manusia disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya serta tidak meratanya akses terhadap infrastruktur dan asset produksi seperti, tanah, dan lain-lain. Kesemuanya itu disebabkan oleh adanya ketersisihan, dan kegagalan pasar. Ketersisihan ditandai dengan adanya ketersisihan secara ekonomi dan sosial. Sedangkan kegagalan pasar sebagai akibat dari nilai barang ekspor jauh lebih rendah daripada nilai barang impor, minimnya jumlah pelaku wirausaha, distorsi harga akibat dari sistem distribusi yang tidak efektif dan tidak efisien, dan pola konsumsi masyarakat yang tidak tepat. Pelayanan publik yang belum maksimal disebabkan karena adanya keterbatasan sumberdaya dan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah.

Gambar 6.1  
Masalah Pokok Penanggulangan Kemiskinan



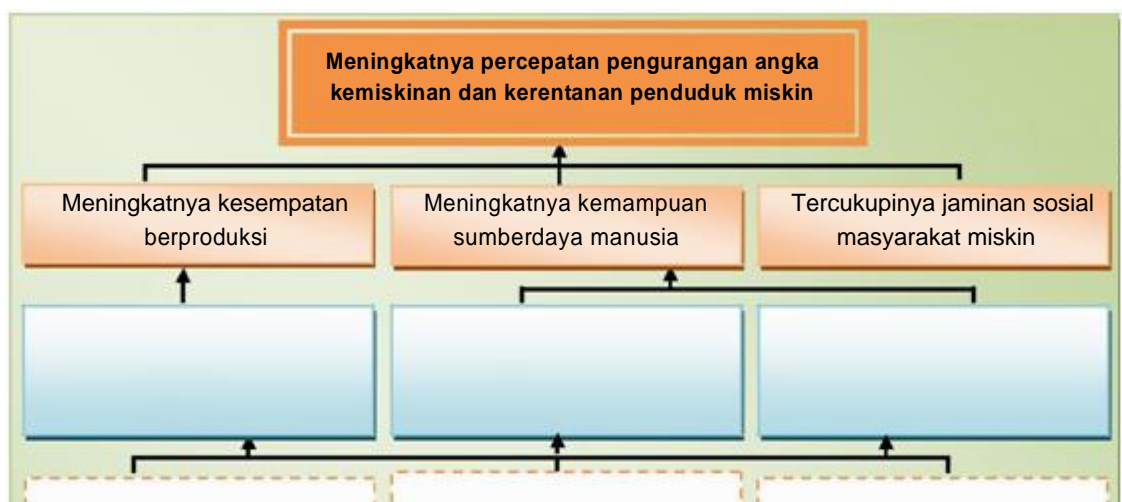


**6.4. SASARAN DAN STRATEGI UTAMA**

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan perumusan masalah pokok diatas adalah:

- 1) Tersedianya pangan yang bermutu dan terjangkau, serta meningkatnya status gizi masyarakat, terutama ibu, bayi dan anak balita.
- 2) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi status sosial.
- 3) Meningkatnya nilai barang ekspor dan tersedianya barang-barang substitusi impor.
- 4) Meningkatnya jumlah pelaku wirausaha agar tercipta lapangan kerja dan kesempatan berusaha tanpa diskriminasi status sosial.
- 5) Meningkatnya efektifitas sistem distribusi agar tercipta kestabilan harga.
- 6) Terciptanya pola konsumsi masyarakat yang baik dan efisien.
- 7) Meningkatnya ketersediaan kuantitas dan kualitas sumberdaya.
- 8) Memaksimalkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik.

Gambar 6.2  
Sasaran Penanggulangan Kemiskinan



Meningkatnya investasi dan kewirausahaan masyarakat	Meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya	Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur dasar dan aset produksi
Menurunnya Ketersisihan	Berkurangnya Kegagalan Pasar	Meningkatnya pelayanan publik
		Berkurangnya kekeliruan target pembangunan

Strategi utama dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

**(1) Penyediaan dan Perbaikan infrastruktur dasar**

Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

**(2) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat**

Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik

yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

### (3) Peningkatan kapasitas

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

### (4) Perlindungan sosial

Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/ penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

### (5) Penataan kemitraan & Kolaborasi

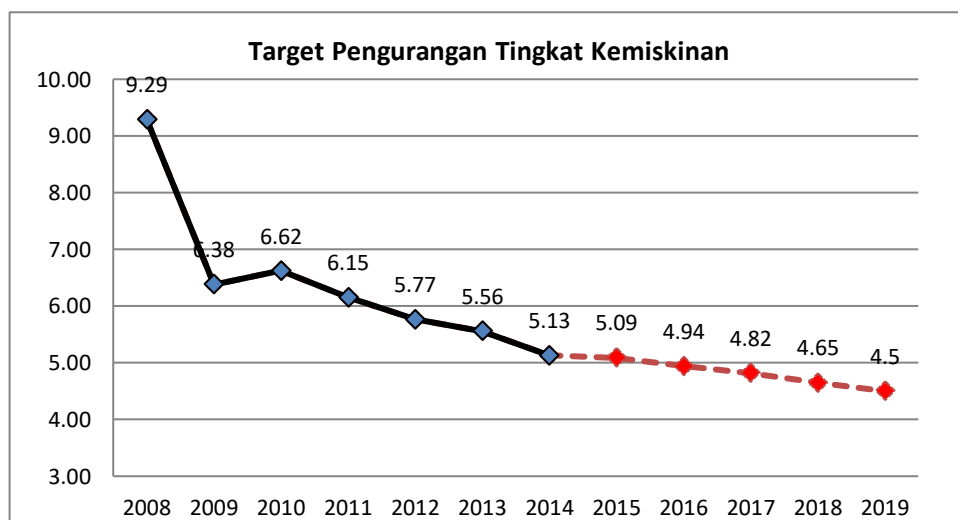
Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan dengan berbagai *stakeholders* agar terlibat dalam penanggulangan kemiskinan guna mendukung pelaksanaan keempat pendekatan di atas.

## 6.5. TUJUAN DAN TARGET PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN

Tujuan penetapan strategi-strategi tersebut adalah untuk mempercepat pencapaian target pengurangan angka kemiskinan melalui pengefektifan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penganggaran yang mengutamakan penanggulangan kemiskinan atau *pro poor budgeting*.

Target pengurangan tingkat kemiskinan sesuai RPJMD 4,5% pada tahun 2019. Jika angkanya ditetapkan dengan skenario optimis mengambil *starting point* dimulai pada tahun 2015 dengan angka kemiskinan sebesar 5,09%, maka sampai dengan tahun 2019 target pengurangannya secara akumulasi sebesar 0,59% yang harus dicapai dalam jangka waktu 4 tahun, sehingga pada tahun 2019 tingkat kemiskinan menjadi sebesar 4,5%. Jika 0,59% target pengurangan tersebut dibagi rata per tahun maka setiap tahun harus mencapai target penurunan sebesar 0,147%.

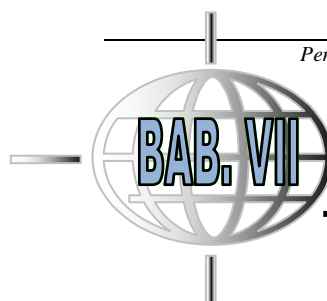
Grafik 6.1



Target pengurangan tersebut dapat dicapai dengan menetapkan target masing-masing indikator kemiskinan dengan menentukan prioritas intervensi dan prioritas wilayah sebagai berikut:

Tabel 6.4  
Target dan Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan

Bidang	No.	Indikator	2013	2014	Target 2019	PRIORITAS WILAYAH
Indikator Kemiskinan dan Ketenagakerjaan		Indikator Utama				
	1	Tingkat Kemiskinan (P0) (%)	5,56	5,13	4,50	
	2	Garis Kemiskinan (Rp)	341.422			
		Indikator Pendukung				
	3	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	32.800			
	4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) (P1)	0,83			
Indikator Kesehatan	5	Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) (P2)	0,18			
	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,12	7,02	3,49	
		Indikator Utama				
	1	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	31,00	41,00	10,00	
	2	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	10,05	3,66	14,00	
	3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	7	7,00	60,90	
	4	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	13,7	9,96	<15	
		Indikator Pendukung				
	1	Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)	18,93	19,22		
	2	Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	10,23	8,69		
	3	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	2,47	1,20		
	4	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	10,6	8,72		
	5	Jarak Puskesmas Terdekat (km)		1,52		
6	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)	27,92	26,69			
7	Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)	58,1	53,41			
8	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	98,21	96,30	98,00		
9	Angka Morbiditas (%)	12,86	11,25			
		Indikator Utama				
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	114,47	127,78	117,36	
	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	111,12	114,82	113,93	
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	101,00	101,14	103,55	
	4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	106,49	107,06	109,18	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	103,38	104,19	105,99		



## ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

### 7.1 SKENARIO DAN FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJP Kota Pontianak, maka disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya akan jabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD). Skenario ini akan harus digunakan sebagai acuan dalam merancang focus dari berbagai program dan kegiatan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang di dalam RPJM ini.

Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing misi serta kebutuhan pendanaan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Adapun skenario tahunan dari RPJM Kota Pontianak 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Skenario dan Fokus Pembangunan Pembangunan Tahunan Periode 2015-2019

RKPD Tahun I 2015	RKPD Tahun II 2016	RKPD Tahun III 2017	RKPD Tahun IV 2018	RKPD Tahun V 2019
<b>Skenario:</b> Menyiapkan/meletakkan pondasi dasar pembangunan yang kokoh	<b>Skenario:</b> Membangun di atas fondasi dasar kokoh yang telah diletakkan	<b>Skenario:</b> Mendayagunakan dan memperkuat yang telah dibangun	<b>Skenario:</b> Memperkuat dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi	<b>Skenario:</b> Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi
<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meletakkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing,</li> <li>Mereduksi kemiskinan,</li> <li>Menurunkan kekumuhan</li> <li>Meningkatkan infrastruktur kota (khususnya drainase, dan pembangunan <i>inner ringroad</i>),</li> <li>Merintis sistem sanitasi perkotaan</li> <li>Memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sector perdagangan, jasa dan pariwisata</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun dan memantapkan dasar SDM berkualitas dan berdaya saing;</li> <li>Mereduksi kemiskinan,</li> <li>Mereduksi pengangguran</li> <li>Mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat;</li> <li>Menurunkan kekumuhan</li> <li>Pemerataan infrastruktur perkotaan,</li> <li>Meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan <i>inner ringroad</i>) dan membangun jalan-jalan baru;</li> <li>Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan,</li> <li>Merintis sistem transportasi publik</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendayagunakan dan menguatkan SDM berkualitas dan berdaya saing</li> <li>Mereduksi kemiskinan,</li> <li>Mereduksi pengangguran</li> <li>Pemerataan pembangunan fisik dan perekonomian</li> <li>Memantapkan, infrastruktur perkotaan</li> <li>Meningkatkan kualitas kenyamanan kota</li> <li>Menurunkan kekumuhan dengan pendekatan pembangunan lingkungan permukiman</li> <li>Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> <li>Memajukan sistem transportasi publik</li> <li>Meningkatkan akses keterhubungan antar wilayah utara dan selatan</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendayagunakan dan memantapkan SDM berkualitas dan berdaya saing</li> <li>Kesehatan berkualitas terjamin untuk seluruh warga</li> <li>Pendidikan berkualitas bagi seluruh warga</li> <li>Kemiskinan berkurang</li> <li>Penyerapan nagkatan kerja tinggi</li> <li>Akselerasi pertumbuhan ekonomi</li> <li>Pemerataan kualitas infrastruktur perkotaan</li> <li>Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> <li>Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah</li> <li>Memajukan sistem transportasi</li> <li>Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota</li> </ul>	<b>Fokus Pembangunan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendayagunakan dan mengoptimalkan SDM berkualitas dan berdaya saing,</li> <li>Kemiskinan berkurang dengan signifikan</li> <li>Penyerapan nagkatan kerja tinggi</li> <li>Pertumbuhan ekonomi mantap</li> <li>Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan</li> <li>Memperkuat sistem sanitasi perkotaan</li> <li>Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah</li> <li>Memajukan sistem transportasi</li> <li>Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota</li> </ul>

### 7.2. ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN ARAH PEMBANGUNAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan tersebut karena telah mengantisipasi fenomena yang berkembang ditengah masyarakat.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Gambar 7.1  
Dimensi Kebijakan



Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Selain identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan - permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Gambar 7.2  
Alur Isu Strategis





Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi ketimpangan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Mengatasi ketimpangan yang terjadi tersebutlah disusun perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Isu strategis merupakan (kondisi) yang dianggap paling prioritas (penting, mendesak, mendasar) untuk segera ditangani. Prioritas tersebut merupakan hasil dari seluruh analisis atas permasalahan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan. Satu isu strategis dapat memua bidang. Isu-isu strategis tersebut menjadi arah atau tujuan yang akan dicapai oleh beberapa program secara bersama. Isu strategis terpilih atas banyak isu yang dihasilkan dari hasil analisis kemiskinan dan determinan kemiskinan pada setiap bidang, hasil evaluasi anggaran, serta kajiulang kebijakan dan kelembagaan yang kemudian dianalisis melalui metode pendekatan pohon masalah

Berdasarkan hasil analisis kemiskinan dan masalah pokok penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan maka dapat disusun isu- isu strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis**, melalui peningkatan derajat kesehatan

masyarakat, pengembangan pendidikan karakter yang bermutu bagi masyarakat yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi pengetahuan agama, keluhuran nilai-nilai budaya bangsa serta keharmonisan hubungan antar masyarakat.

2. **Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik**, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik, secara langsung maupun tidak langsung. Dan peningkatan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Serta penerapan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
3. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah, melalui pemenuhan** kebutuhan akan prasarana dasar perkotaan seperti prasarana jalan dan jembatan (untuk mengatasi kemacetan, dan pemerataan pertumbuhan serta perkembangan antar wilayah), prasarana drainase (untuk mengatasi/meminimalisir dampak dari banjir/genangan), prasarana air bersih, pengentasan kawasan kumuh, penyediaan fasilitas umum dan utilitas perkotaan yang ideal, peningkatan sanitasi kota, peningkatan kualitas jalan lingkungan, peningkatan kinerja transportasi dan perhubungan serta untuk meningkatkan prasarana perdagangan/pasar yang ada dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak.
4. **Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni**; melalui pembangunan fisik kota Pontianak yang tertata baik, rapi, Indah, bersih dan dilandasi dengan konsep pembangunan keberlanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup dan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga mendapatkan rasa nyaman, aman, dan memiliki tempat tinggal yang layak huni dengan didukung fasilitas perkotaan yang ideal.
5. **Pemerataan, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**; melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan lebih merata antar wilayah kota, peningkatan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, memberikan pelayanan perijinan usaha yang

jasas, terukur dan cepat, memberikan insentif bagi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, peningkatan pembinaan usaha kecil dan menengah serta membuka akses pemasaran produk-produk unggulan dan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pentahapan pembangunan sebagaimana tertuang di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi tersebut sebagaimana dijabarkan dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 7.2  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019

<b>VISI:</b>			
<i>“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”</i>			
<b>MISI 1 :</b>			
<i>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama	Memfasilitasi, melakukan pembinaan, mejalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama
2 Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Menjalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI
			Mngembangkan event dan promosi kebudayaan dan sarana prasarana kesenian untuk mendorong seni budaya dan ekonomi kreatif
		Melestarikan, megembangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan
		Mempertahankan dan mengembangkan nilai- nilai khasanah seni budaya Kota Pontianak	Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian tempat, benda dan bangunan cagar budaya
3 Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender
	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera	Menjadikan kota Pontianak Layak Anak Membentuk keluarga berkualitas melalui keluarga

4	Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan	Meningkatkan pemberdayaan potensi kepemudaan	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	Meningkatkan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
5	Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs, dan SMA/SMK/MA	Peningkatan akreditasi sekolah dan Penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System)
				Pelaksanaan Pemetaan Sekolah
			Mengurangi angka anak-anak keluarga miskin yang putus sekolah SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA	Meningkatkan motivasi dalam pembelajaran bagi siswa di sekolah
				Penyelenggaraan penyeteraan bagi masyarakat pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA dan Pemberian bantuan Operasional bagi sekolah pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA
			Penataan penempatan guru dan peningkatan manajemen pendidikan	
		Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	Meningkat mutu tenaga pendidik	Melaksanakan kegiatan penyeteraan pendidikan
		Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	Meningkatkan mutu pendidikan PAUDNI	Optimalisasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan PAUDNI
	Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus		
	Meningkatnya wawasan masy. melalui penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi serta budaya minat baca	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan,	Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien	
			Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan	
			Pemasaryakatan iptek melalui media belajar sambil bermain	
	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip	
6	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit	Pelayanan rumah sakit yang berfokus kepada kepuasan pelanggan
			Meningkatkan kesedaran hidup bersih dan sehat	kampanye hidup bersih dan sehat bagi masyarakat
			Meningkatkan efisensi/ mutu layanan rumah sakit	Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar
			Pemenuhan standar pelayanan rumah sakit	Pningkatan mutu dan manajemen rumah sakit
			Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit	Mengadakan sarana dan prasarana memenuhi satandar yang ditentukan
	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terutama dokter spesialis dan paramedis	

		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi	Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan bayi
			Meningkatkan kesehatan balita dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
			Peningkatan gizi masyarakat	Penanganan dan pencegahan gizi buruk
			Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
7	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat	Pengembangan lingkungan yang sehat dan perilaku sehat
8	Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Memperluas pembinaan, kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Memperluas cakupan promosi, penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat
9	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat
10	Memastikan terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta ( <i>Universal Coverage</i> )	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan
11	Menurunkan permasalahan sosial masyarakat	menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatkan upaya pemberdayaan PMKS dan masyarakat dalam kepedulian sosial	Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
				Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
				Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
			Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beras miskin	Peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penerima program raskin

**Misi 2 :**

*Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur	Peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi	Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS
			Menciptakan sistem tata kelola dan informasi kepegawain yang andal
		Perbaikan dan efisiensi tata laksana,	Optimalisasi Sistem Pengukuran kinerja kelembagaan

	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	proses kerja, kelembagaan organisasi, administrasi serta pengukuran kinerja kelembagaan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata laksana dan proses kerja Peningkatan fungsi dan kapasitas kelembagaan Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan
			Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM Menyediakan dukungan peningkatan kinerja kepada dan wakil kepala daerah Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratif kota Menlaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
		Meningkatnya kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah
	Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya publikasi informasi publik melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	Memalsimalkan media massa sebagai alat menyebarkan informasi publik
		Meningkatkan penyebaran informasi dan pengenalan produk unggulan daerah	Tersebar nya publikasi informasi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran promosi media cetak dan elektronik
		Mendorong optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar pimpinan, antar lembaga dan antar daerah	Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dan kerja sama antar lembaga, institusi di daerah dan antar daerah
	Tersedianya produk-produk hukum daerah yang mampu mendukung perkembangan dan dinamika yang berkembang	Mengevaluasi, menata dan mengkaji produk-produk hukum daerah	Mereview produk hukum daerah dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika perkembangan yang terjadi
		Pembinaan hukum pada masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus hukum pemerintah kota	Menyediakan dukungan bantuan hukum bagi pemerintah kota dan melakukan edukasi pada masyarakat
	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD	mendorong terciptanya profesionalisme aparatur sekretariat dan Anggota legislatif	peningkatan koordinasi, komunikasi, pendidikan dan pelatihan aparatur serta anggota legislative
	Menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan masyarakat luas Pembinaan dan koordinasi aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat Peningkatan kinerja lembaga kelurahan dan kecamatan

		Menjadikan database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal
2	Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang kota	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan baik substansi maupun ketentuan waktu
				Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan ekonomi kota
				Menyediakan perencanaan dan kebijakan pembangunan sosial budaya kota sesuai dinamika yang terjadi
				Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kota sesuai kebutuhan
				Menyediakan hasil-hasil kajian/studi/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah kota
				Menyebarkan informasi hasil-hasil perencanaan, kajian, studi serta evaluasi pembangunan kepada masyarakat luas
				Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui sistem pengawasan yang baik	Meningkatkan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan intern dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
4	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan berdaya guna optimal	Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu	Menerapkan sistem pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah
		Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan tepat waktu	Menerapkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Terwujudnya penyampaian SPJ dan laporan keuangan tepat waktu	Menerapkan penyelenggaraan sistem penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah berbasis SAP	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai SAP
		Terwujudnya validasi sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah
5	Meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah	Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan sumber daya pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak daerah yang belum terealisasi
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Meningkatkan wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak daerah	Melakukan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak dan wajib pajak daerah

**Misi 3 :**

*Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1 Menciptakan sistem kesiagaan tanggap bencana yang baik	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan relawan di Kota Pontianak	Mengadakan pelatihan kepada petugas pemadam dan relawan pemadam kebakaran	
	Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Memenuhi kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	Pembelian peralatan petugas penanggulangan bencana	
	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Mendata peristiwa bencana dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana	Meningkatkan keterampilan petugas tanggap bencana Pendataan penanganan peristiwa bencana	
	Melakukan pencegahan dini dan menanggulangi korban dari bencana alam	Sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana serta pelatihan rutin untuk relawan dan Tim TRC	Sosialisasi ke SMU/ SMK kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana Pelatihan rutin TRC dan relawan	
	Meningkatkan sarana dan prasarana kebakaran	Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam dan usia pakai peralatan pemadam	Pembelian dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran	
	2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian	Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru Menyediakan database pengendalian jalan/jembatan dan meningkatkan rasio jalan/jembatan berkondisi baik
Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase		Menciptakan sistem drainase yang mampu menanggulangi banjir dan genangan	Optimalisasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran Mengendalikan genangan dan banjir	
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat-alat berat penunjang kegiatan	Pengadaan dan pemeliharaan berkala alat-alat berat	Pengadaan pralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja	
	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektifitas antar wilayah	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air Meningkatkan dan menata parkir perkotaan		Pengembangan serta meningkatkan keandalan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana Pengembangan sistem perparkiran yang baik pada kawasan-kawasan kota
		Mengoptimalkan sistem perangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat		Pengembangan sarana perhubungan sungai sebagai alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di ruas jalan
		Meningkatnya pegendalian dan pengamanan lalulintas		Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Dalam BerLalu Lintas



3 Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Menerangi setiap ruas jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota	Meningkatkan cakupan ruas jalan kota dan lingkungan yang diterangi oleh PJU
	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan	Meningkatkan pelayanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
			Optimalisasi tata kelola Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
			Meningkatkan tata kelola Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pengolahan sampah
			Menggali potensi pembiayaan pengelolaan sampah dari masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pembuangan sampah
		Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya	Meningkatkan partisipasi serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah
	Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Perluasan, penataan dan pemeliharaan kualitas Ruang Terbuka Hijau perkotaan

**Misi 4 :**

*Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	Penegawasan dan penertiban tempat usaha
	Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran udara dan air dari kegiatan usaha	Pemasyarakatan regulasi lingkungan
		Meningkatkan kegiatan penghijauan lingkungan	Mendukung pelestarian lahan melalui penghijauan lingkungan
		Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Respon cepat dan tanggap terhadap pengaduan yang masuk

2	Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penyederhaan perijinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah dsbnya.
			Merwujudkan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat , aman , teratur, harmonis dan berkelanjutan	Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat : bantuan stimulant rumah tidak layak huni/WC
				Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih)
				Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan-jalan lingkungan
Mendorong penyediaan PSU pada kawasan perumahan yang dibangun pengembang dan menyediakan dukungan PSU pada kawasan permukiman				
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat	meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi
			Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan melalui integrasi program/kegiatan
		Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik	Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan	pengembangan dan peningkatan kualitas bangunan dan kawasan di Kota Pontianak
			Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

**Misi 5 :**

*Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan	Memperbaiki kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan capaian kinerja layanan perijinan dan penanaman modal
2 Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif	Terciptanya kemandirian, ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha	Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
		Menegakkan dan memasyarakatkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/ sosialisasi Perda

		Pengamanan aset daerah dan pengawalan pejabat daerah	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta memberdayakan Poskamling di Kelurahan
	Terciptanya kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Optimalisasi koordinasi dan pembinaan	Pembinaan sosial politik dan wawasan kebangsaan bagi parpol dan kelompok masyarakat
3	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan jumlah kunjungan & lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Pontianak, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah
		Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor	Mengembangkan bursa tenaga kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja
			Pengembangan sumber daya, destinasi dan investasi wisata
			Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran
			Meningkatkan informasi pasar kerja
			Menignkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan
	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek	Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu
			Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi KUMKM
		Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan
		Meningkatkan basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
	Meningkatnya produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan peranan UPTD SKPD	Penyediaan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura
4	Meningkatkan ketahanan pangan	meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemenuhan ketersediaan dan distribus barang-barang konsumsi untuk keamanan pangan	Meningkatkan capaian kinerja distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan
5	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan serta kelembagaannya	Menambah keahlian Ketreampilan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan metode baru

### 7.3. RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan serangkaian alur pikir sistematis yang menjadi landasan daerah dalam menetapkan program dan kegiatan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Isu Strategis sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang berbasis hasil. RAD ini menjadi penting dan menjadi acuan, dengan memperhatikan isu strategis penanggulangan kemiskinan Kota Pontianak, Maka disusunlah Rencana Aksi Daerah dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 :

**Tabel 7.3**  
**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN						
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>								
01	01	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Rasio guru terhadap murid (sekolah) SD/MI	25	25	24	23	22	21
				Rasio guru terhadap murid (sekolah) SLTP/MTs	21	21	21	20	20	19
				Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMA	25	25	24	23	22	21
				Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMK	19	19	19	18	17	16
				Rasio guru terhadap murid (sekolah) MA	16	16	16	15	15	15
	01	02	Manajemen pelayanan pendidikan	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,85	105,37	105,90	106,43	106,96	107,50
				Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	119,84	120,44	121,04	121,65	122,25	122,87
				Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Angka Kelulusan SMP/MTs	99,79%	99,84%	99,89%	99,94%	99,99%	100,00%
				Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,90%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Nilai rata - rata ujian SD/MI	7,17	7,24	7,31	7,39	7,46	7,54
				Nilai rata - rata ujian SMP/MTs	7,35	7,42	7,50	7,57	7,65	7,72
				Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA	7,16	7,23	7,30	7,38	7,45	7,53
				Angka Melek Huruf	99,83	99,86	99,89	99,92	99,95	99,98
				Rata-rata lama sekolah	9,85	10,00	10,75	11,30	11,87	12,00
	01	03	Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,47%	115,04%	115,62%	116,20%	116,78%	117,36%
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	111,12%	111,68%	112,23%	112,80%	113,38%	113,93%
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	106,49%	107,02%	107,56%	108,10%	108,64%	109,18%
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	103,38%	103,90%	104,42%	104,94%	105,46%	105,99%
				Rasio murid terhadap sekolah SD/MI	38,80	39,00	39,40	39,80	40,20	40,60
				Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs	33,10	33,40	33,70	34,00	34,40	34,74
				Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI	32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	33,33

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
		Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs	34,00	34,00	34,00	34,00	35,00	35,35	
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI	1,21	1,22	1,20	1,20	1,20	1,21	
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs	1,33	1,34	1,30	1,30	1,30	1,31	
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs	28,39	28,67	28,96	29,25	29,54	29,84	
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI	82,37%	83,19%	84,03%	84,87%	85,71%	86,57%	
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs	55,43	55,98	56,54	57,11	57,68	58,26	
01	04	Pendidikan Menengah Universal	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	101,00%	101,51%	102,01%	102,52%	103,04%	103,55%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	94,04%	94,51%	94,98%	95,46%	95,93%	96,41%	
		Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja	50%	55%	60%	65%	70%	75%	
		Prosentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi	20%	25%	30%	35%	40%	45%	
		Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK	347	350	354	358	361	365	
		Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	32	32	33	33	33	34	
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)	115,77%	116,93%	118,10%	119,28%	120,47%	121,68%	
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK	68,90%	69,59%	70,28%	70,99%	71,70%	72,41%	
01	05	Pendidikan non formal	Angka putus sekolah SD/MI	0,10	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,08	0,07	000	000	000	
		Angka putus sekolah SMA/SMK/MA	0,12	0,11	0,10	000	000	000	
		Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor	1 / 17	1 / 17	1 / 18	1 / 18	1 / 19	1 / 19	
		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A,	80%	85%	87%	90%	92%	95%	
01	06	Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD	37,52%	37,90%	38,28%	38,66%	39,05%	39,44%
		Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)	16,39%	18,03%	19,84%	21,82%	24,00%	26,40%	

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
01	07	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik	50%	53%	58%	64%	70%	77%
<b>02</b>	<b>KESEHATAN</b>								
02	01	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	19	18	17	12	11	10
			Cakupan kunjungan Bumil K4	96,20	96	97	97	98	98
			Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas	94,23	98	95	95	95	95
			Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil	63,58	96	97	97	98	98
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,73	95	98	99	99	100
			Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	98,21	75	96	97	97	98
			Cakupan Pelayanan Nifas	92,87	95	95	95	95	95
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	57,64	75	78	80	82	85
			Cakupan kunjungan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	95,78	95	95	95	96	97
			Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap	95,78	95	95	95	96	97
			Cakupan Kunjungan Bayi	78,43	80	80	85	90	95
			Cakupan Kepesertaan KB Aktif	70,90	70	70	70	73	75
02	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	21,00	20,10	15,00	14,50	14,20	14,00
			Cakupan pelayanan anak balita	60,55	80	80	85	90	95
			Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani	124,30	100	100	100	100	100
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita	82,85	80	82	84	86	88
02	04	Perbaiki Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	13,07	<15	<15	<15	<15	<15
			Persentase Balita Stunting	24,56	<32	<32	<32	<32	<32
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S)	62,53	70	72	75	77	80
			Persentase Balita yang naik berat badannya (N / D)	72,05	76	76	78	78	80

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
		Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita	85,45	85	85	85	87	90	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	96,24	95	95	95	95	95	
		Rumah Tangga dengan garam beryodium baik	98,36	90	90	90	90	90	
		Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif	73,44	75	77	80	80	80	
		Cakupan MP ASI Umur 6 - 24 Bulan GAKIN	100	100	100	100	100	100	
02	05	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100	10.000	100
		Angka Kesakitan Diare per 1000 penduduk	214	214	214	214	214	214	
		Penderita DBD yang Ditangani	100	100	100	100	100	100	
		Angka Bebas Jentik	70	75	80	85	90	95	
		Persentase penderita malaria sesuai standar	80	80	80	80	80	80	
		Persentase Penderita kusta selesai berobat	100	100	100	100	100	100	
		Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	80	80	80	80	80	80	
		Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Infeksi Menular Seksual Diobati	100	100	100	100	100	100	
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	5/100.000	4/100.000	4/100.000	4/100.000	4/100.000	4/100.000	
		Persentase Penyelidikan epidemiologi (PE)	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	58,62	100	100	100	100	100	
		Persentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM	20	20	25	30	35	40	
		Persentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara	5	5	75	10	125	15	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM	25	25	35	50	75	100	
02	06	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak	96,65	76	76	76	76	76
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak	100	100	100	100	100	100	



NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
02	07	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat- Tempat Umum dan Makanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat	77	77	79	81	83	85
			Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat	84,40	87	90	93	96	99
02	08	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga sehat ber PHBS	38,80	40	45	50	55	60
			Persentase Sekolah ber PHBS	40	40	45	50	60	70
			Persentase Tempat-Tempat Umum ber- PHBS	30	30	35	40	45	50
			Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS	50	50	55	60	65	70
			Persentase Tempat Kerja ber-PHBS	40	40	45	50	55	60
			Prosentase Kelurahan Siaga Aktif	89,96	100	100	100	100	100
			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	32,06	63	65	68	70	73
			Rasio Posyandu per Satuan Balita	1 : 2017	1 : 209	1 : 201	1 : 194	1 : 188	1 : 82
			Persentase Pengobatan Tradisional Memenuhi Syarat STPT dan SIPT	25	25	30	35	40	45
			Persentase Ranting SBH Aktif	83	83	100	100	100	100
			Persentase Pesantren dengan Poskestren Aktif	40	40	45	50	55	60
			Persentase POS UKK Aktif	0	100	100	100	100	100
02	09	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar.	85	85	85	85	85	85
02	10	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Berakreditasi	0	20	40	60	80	100
			Persentase Puskesmas ISO	43	10	20	30	40	50
			Kepatuhan Petugas terhadap SOP	80	80	90	40	44	44
			Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat	80	80	80	23	23	23
02	11	Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masya. Miskin	100	100	100	100	100	100
			% Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masya. Miskin	2,49	3	3	3	3	3
			Persentase Rawat Jalan	102,94	100	100	100	100	100
			% Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	91,67	100	100	100	100	100

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
		% Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat	5	5	10	20	30	40	
		% RSUD Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa termasuk NAPZA	10	10	20	30	40	50	
		% RSJ yang memberikan layanan subspecialis utama dan NAPZA	10	10	30	50	70	100	
		Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer	10	10	20	30	40	50	
		Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga	1	4	4	4	4	4	
		% minimal memiliki Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja	4	4	4	4	4	4	
		^ Fasilitas kesehatan pemerintah (RS, Lab, Instalasi Farmasi, & Dinas Kesehatan) yang melaksanakan upaya	50	50	70	80	90	100	
		Rasio Cabut Tambal	2.5 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	
02	12	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas dan Jaringannya berkondisi Baik	34,76	50	60	80	90	100
02	13	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	80	85	90	95	100
			% Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan	60	60	65	70	75	80
02	14	Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Industri Rumah Tangga Memenuhi Syarat	70	70	75	80	85	90
			Persentase instalasi farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar	25	25	30	35	40	45
			% Puskesmas perwatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	90	90	90	95	95	100
			% penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah	30	30	40	50	55	60
02	15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	85	85	85	85	90	90
02	16	Pelayanan prima	Prosentase indeks kepuasan pasien	70	≥70%	≥75%	≥77%	≥80%	≥85%
			Angka pasien pulang paksa	5	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
02	17	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat	N/A	80	>80%	>85%	>90%	>95%
02	18	Pelayanan rumah sakit	Bed Occupation Rate (BOR)	60-85	60-65%	70-85%	70-85%	70-85%	70-85%
			Bed Tur Over (BTO)	40-50	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali
			Turn Over Interval (TOI)	1-3	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari
			Length Of Stay (LOS)	6-9	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari
			Gross Death Rate (GDR)	<45	<45%o	<45%o	<45%o	<45%o	<45%o
			Net Death Rate (NDR)	<25	<25%o	<25%o	<25%o	<25%o	<25%o
02	19	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	20	Pegadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	80	80%	85%	90%	95%	100%
02	21	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase Cakupan pemenuhan alat kesehatan rumah sakit	100	100	100	100	100	100
02	22	Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu SPM	≥ 60%	≥ 60%	≥ 65%	≥ 70%	≥ 75%	≥ 80%
02	23	Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Tersedainya Sistem informasi RS berkualitas	5.833	80%	100%	100%	100%	100%
02	24	Peningkatan kesehatan lingkungan	Persentase Terpenuhinya nilai baku mutu kesehatan lingkungan sekitar RS	100	100	100	100	100	100
02	25	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah dokter spesialis	15	15	17	19	20	25
			Prosentase perawat bersertifikat BTLS	80%	80%	85%	90%	95%	100%
			Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS	80%	80%	85%	90%	95%	100%

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN						
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019		
	<b>03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>								
	03	01	Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring jalan dan jembatan	Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database jalan dan jembatan	15	25	45	65	85	100
				Prosentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak	7,66	35	45	65	85	100
	03	02	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik	77,2	78,70	80,20	82,60	88,90	95,00
	03	03	Pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik	77,2	78,70	80,20	82,60	88,90	95,00
				Prosentase trotoar dengan kondisi yang baik	404	462	521	585	652	722
				Prosentase terbangunnya jalan inner ring road	45	47	65	75	80	95
				Prosentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan	45	65	70	75	85	87
	03	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase/Rasio Jalan dengan kondisi baik	67	70	73	76	80	95
				Prosentase jembatan dengan kondisi baik	67	70	73	76	80	95
	03	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase PJU dalam kondisi baik	73	75	80	85	90	95
				Prosentase PJU ber meter	25	35	45	55	65	75
	03	06	Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring Saluran Drainase	Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database saluran drainase	10	15	35	40	45	65
	03	07	Pembangunan dan Peningkatan turap/talud/bronjong	Prsentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat	3.602	3.653	3.704	3.756	3.807	3.858
				Prosentase turap/talud/bronjong dengan konstruksi yang baik	2.422	2.543	2.648	2.752	2.857	2.961
	03	08	Pembangunan saluran drainase/koker/gorong-gorong	Prosentase Panjang saluran drainase dengan kondisi baik	3.259	336	347	3.587	371	3.838
				panjang saluran drainase kota dengan kondisi baik (m)	197.100	203.223	209.866	216.951	224.406	232.167
	03	09	Peningkatan saluran drainase/koker/gorong-gorong	Prosentase drainase dan gorong-gorong kota dengan kondisi baik	2.106	2.132	2.155	2.176	2.196	2.213
				Saluran drainase lingkungan dengan konstruksi yang baik (m)	127.352	128.915	130.335	131.626	132.800	133.867

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
03	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dipelihara	604.805,00	316.806,80	403.208,71	399.521,80	395.893,18	392.272,07
			Peningkatan Aliran Air (%)	42	52	67	66	65	65
03	11	Pengendalian banjir	Lama genangan (jam)	>3	3	25	22	2	<2
			Luas genangan (ha)	4.445	4.346	4.248	4.149	4.050	3.951
03	12	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Prosentase alat berat yang kondisinya baik	25	30	35	45	50	55
<b>04</b>		<b>CIPTAKARYA DAN TATA RUANG</b>							
04	01	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Prosentase berkurangnya Rasio kawasan kumuh Perkotaan	0,81	0,73	0,65	0,56	0,49	0,42
			Prosentase berkurangnya Rasio Rumah Tak Layak Huni	51,25	51,25	46,26	41,26	36,27	31,27
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	n/a	50	55	60	65	70
04	02	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rasio lingkungan permukiman kota yang berkategori baik	75	79	79	82	87	92
			Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik	71	76	81	86	91	95
04	03	Pengembangan perumahan	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung sarana dan utilitas umum (PSU) (%)	N/A	70	74	79	83	85
04	04	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase rumah tangga yang bersanitasi	70	70	72	74	76	78
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>							
06	04	Prog. Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100
06	05	Prog. Pemb. Prasarana dan Sarana ASDP	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100
06	06	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sungai	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	91,17	95	95	95	95	95
<b>1</b>	<b>08</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>							

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
08	01	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	41%	20%	35%	40%	55%	65%
			Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	8%	8%	8%	8%	8%	8%
08	02	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup	0%	15%	15%	15%	15%	15%
08	03	Pengendalian polusi	Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	55,55%	15%	15%	15%	15%	15%
08	04	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau	0%	15%	35%	45%	65%	80%
08	05	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan	0%	35%	40%	50%	60%	85%
08	06	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	Luas area penyapuan	309.600 m <sup>2</sup>	396.000	510.000	554.400	606.600	693.000
			Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	83,73%	85,81%	87,90	91,01	95,21	100
			Prosentase sampah yang tidak terangkut ke TPA	16,27		12,10	8,99	4,79	0,00
			Prosentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT	89 m <sup>3</sup>	2,25	2,34	2,50	3,20	3,50
			Prosentase lahan TPA yang dikelola dengan sistem sanitary landfill	0	0	0,672	0,960	0,120	0,145
08	07	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	78%	80%	82	85	87	88
			Prosentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik	80%	81%	82	85	87	88
08	08	Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan	9.164 Milyar	5,94%	7,5	8,5	10,0	14,5
			Prosentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum	250 orang	20%	35	60	65	75
08	09	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	Prosentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)	0	23%	25	30	36	41

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN						
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019		
		Persampahan di Lingkungan Masyarakat	Prosentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina	5 kelompok	40%	37,56	27,27	21,43	17,65	
	08	10	Program Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Prosentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	13,41%	13,56	13,71	13,86	14,01	14,16
				Prosentase luasan RTH kawasan perkotaan yang dikelola/dipelihara	99,33%	99,36	99,39	99,45	99,47	99,50
				Prosentase luasan RTH yang dikelola oleh pihak ketiga	8 taman	17,24%	18,97	20,69	22,41	24,14
<b>1</b>	<b>09</b>		<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII</b>							
	09	01	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	28,11%	26,47%	25,69%	24,93%	24,20%	23,48%
				Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	94,61%	95,55%	96,02%	96,49%	96,97%	97,45%
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	43,66%	35,10%	31,89%	29,14%	26,50%	24,23%
				Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,50%	84,19%	88,44%	92,21%	95,86%	99,33%
				Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90,10%	93,98%	92,39%	89,31%	85,20%	80,43%
				Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran	85,13%	88,15%	90,32%	92,87%	95,54%	98,34%
				Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	56,96	65,68	68,46	70,37	71,52	72,05
				Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak (jiwa)	648.120	672.000	680.000	686.000	692.000	698.000
<b>1</b>	<b>10</b>		<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
	10	01	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase penanganan kasus KDRT perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100
	10	02	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG	75	75	90	90	90	90
				Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender	Netral	Sensitif	Sensitif	Sensitif	responsif	responsif
	10	03	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak	Terwujudnya Pontianak sebagai Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
	10	04	Program Keluarga Berencana	Prosentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%	69,26	70,00	7.025,00	704,00	7.055,00	71,00
				Prosentase cakupan unmet need 5%	15,25	14,50	13,70	12,45	11,25	10,00

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
		Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70%	86,00	88,00	90,00	90,20	90,35	90,46	
10	05	Program Bina Keluarga Sejahtera	Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5%	18	2	26	28	31	32
			Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87%	71,49	72,50	73,70	76,80	78,00	80,00
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
	11	01	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat kelurahan	persentase parrtisipasi aktif LPM dalam pembangunan kelurahan	100	100	100	100	100
				Jumlah unit usaha kecil yang dilatih	50	60	75	85	100
	11	02	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta teknologi tepat guna	6	6	6	6	6
	11	03	Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	74	76	78	80	82
	11	04	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	% PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30	40	50	60	70
	11	05	Pembinaan para penyandang cacat trauma	% penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33	40	47	54	61
	11	06	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	% panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	52	59	66	73	80
	11	07	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	% Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang nmenyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	30	35	40	45	50
	11	08	Bantuan sosial korban bencana	% korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
				% korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	10	10	15	20	25
	11	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial	Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial	0	5	15	55	95
<b>1</b>	<b>12</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>							
	12	01	Peningkatan kualitas dan produktivitas tanaga kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompeensi	15	20	25	30	35



NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
		prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat	10	15	20	25	30	35	
		Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	6	12	18	24	30	
12	02	Peningkatan kesempatan kerja	56	62	68	74	82	85	
12	03	Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	100	100	100	100	100	100	
12	04	Perlindungan dan penegakan norma hukum ketenagakerjaan	12	18	24	30	36	45	
		Prosentase Besarannya pemeriksaan alat di perusahaan	14	21	28	35	42	50	
12	05	Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh	90	91	92	93	94	95	
12	06	Pengadaan Saranan dan Prasarana Tenaga Kerja	40	50	60	70	80	90	
		Prosentase kelengkapan peralatan uji	73	78	83	89	95	100	
<b>1</b>	<b>13</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>							
	13	01 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Prosentase UMKM yang dibina	5	6	8	10	12	15
	13		Prosentase koperasi aktif	59,32	59,70	60,57	61,43	62,27	63,11
	13	02 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM	Prosentase peningkatan omzet KUMKM	0,66%	0,66%	1,94%	1,98%	1,98%	2%
	13	03 Peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	Prosentase akses pembiayaan KUMKM	2	3%	3%	3%	3%	3%
	13	04 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya	1000	500	600	700	800	1200
	13	05 Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi	799	804	809	814	819	824
			Jumlah UMKM	5.222	5.326	5.578	5.853	6.138	6.488

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
13	06	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah PKL yang mendapat fasilitas Pemkot	287	300	300	300	300	300
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>							
14	01	Kebijakan penanaman modal	Prosentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan	75	55	60	65	75	100
14	02	Kerja sama penanaman modal	Prosentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	85	45	60	70	85	100
14	03	Promosi Penanaman Modal	Prosentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak	75	70	75	80	85	100
14	04	Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan	Prosentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpadu (SIMYANDU) perizinan teknis daerah	85	50	65	85	90	100
14	05	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal	50	50	65	85	90	100
14	06	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Prosentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	90	50	65	85	90	100
14	06	Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	40	40	50	65	85	100
<b>1</b>	<b>16</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>							
16	01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan	80	82	84	86	99	90
16	02	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Prosentase terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100
16	03	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	80	82	84	86	88	90

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN				
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019
16	04	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	75	77	79	81	83	85
16	05	Pembinaan lembaga masyarakat	80	82	84	86	88	90
16	06	Peningkatan kinerja kelembagaan	100	100	100	100	100	100
16	07	Program Pembinaan dan Bantuan Hukum	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali)	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
			Persentase penyelesaian perkara perdata dan TUN	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase penetapan kelurahan sadar hukum	75%	75%	75%	75%	75%
16	10	Program Promosi daerah	Persentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti	100	100	100	100	100
16	11	Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin	2 Keg. Sosialisasi	2	2	2	2
			Jumlah Laporan Monev pelaksanaan program raskin	2 Dok. Lap. Monev	2	2	2	2
			Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
16	12	Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD	Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	3	3	3	3	3
			Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
16	14	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak	70	80	80	85	90
16	17	Program Intensifikasi Pelayanan masyarakat	Jumlah posyandu yang difasilitasi	300	320	330	340	350
<b>1</b>	<b>17</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>						
17	01	Peningkatan ketahanan pangan	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita	148,805	100	100	100	100
			Persentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,2	80,5	82,5	90,0	93,0
			Persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	90	90	90	95	95
			Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100	100	100	100	100

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN						
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019		
		Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan	90	91	92	93	94	95		
		Jumlah penguatan cadangan pangan (ton)	50	60	70	80	90	100		
		Prosentase penanganan daerah rawan pangan	100	100	100	100	100	100		
17	02	Pemberdayaan penyuluhan pertanian	Prosentase peningkatan kelembagaan petani	51	52	53	54	55	56	
17	03	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani	Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi	165	20	25	30	35	40	
<b>1</b>	<b>18</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
	18	01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.	83,19	85	90	90	95	95
				Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.	76,54	78	80	80	85	85
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>PERTANIAN</b>								
	01	01	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman hortikultura Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)						
			a. Sawi	2	404	612	824	1.041	1.041	
			b. Bayam	2	404	612	824	1.041	1.041	
			c. Kangkung	2	404	612	824	1.041	1.041	
			Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)							
			a. Sawi	-	-	500	710	710	710	
			b. Bayam	-	-	500	710	710	710	
			c. Kangkung	-	-	500	710	710	710	
			Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)							
			a. Pepaya	-	045	233	500	533	583	
			Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)							
			a. Pepaya	-	-	200	404	404	404	

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN				
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)						
		a. Lidah Buaya	-	1.339	1.565	1.792	2.019	2.359
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)						
		a. Lidah Buaya	-	-	-	300	300	3
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)						
		a. Anggrek	-	500	710	924	1.143	1.365
01	02	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan	Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :					
		a. Padi	-	-	-	-	-	-
		b. Jagung	-	-	-	-	-	-
		c. Ubi Kayu	-	-	200	506	821	-
		d. Ubi Jalar	-	-	-	-	-	-
		e. Keladi	-	-	-	300	506	-
	03	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :					
		a. Padi	-	-	-	-	-	-
		b. Jagung	-	-	-	-	-	-
	04		c. Ubi Kayu	-	-	200	506	821
			d. Ubi Jalar	-	-	-	-	-
			e. Keladi	-	-	-	300	506
			Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)					
			a. Sawi	2	404	612	824	1.041
			b. Bayam	2	404	612	824	1.041
			c. Kangkung	2	404	612	824	1.041
			Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)					
			a. Sawi	-	-	500	710	710

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
		b. Bayam	-	-	500	710	710	710	
		c. Kangkung	-	-	500	710	710	710	
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)							
		a. Pepaya	045	045	233	500	533	583	
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)							
		a. Pepaya	-	-	200	404	404	404	
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)							
		a. Lidah Buaya	1.339	1.339	1.565	1.792	2.019	2.359	
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)							
		a. Lidah Buaya	-	-	-	300	300	3	
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)							
		a. Anggrek	5	500	710	924	1.143	1.365	
	05	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi hasil Pertanian	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif	-	4.347	5.652	6.956	8.260	9.560
	06	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal	Presentase peningkatan jumlah ketersediaan pangan asal hewan :						
		a. Daging Sapi	1.457.354	1.486.501,08	1.501.366,09	1.516.379,75	1.531.543,55	1.546.858	
		b. Daging Ayam	5.156.292	5.259.417,84	5.312.012,02	5.365.132,14	5.418.783,46	5.472.971	
		c. Daging Kambing	70.655,00	72.068,10	72.788,78	73.516,67	74.251,84	74.994,00	
		d. Daging Babi	850.058,00	867.059,16	875.729,75	884.487,05	893.331,92	902.265,00	
		e. Telur	25.835,00	26.351,70	26.615,22	26.881,37	27.150,18	27.421,00	
01	07	Peningkatan keamanan Pangan produk hewan	Jumlah Kelompok yang dibina	-	100	200	300	400	5
01	08	Peningkatan penerapan Teknologi peternakan	Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK	-	-	100	200	300	400

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN						
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019		
01	09	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Prosentase penurunan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menular strategis	3,30	3,30	6,66	13,33	20,00	26,70	
01	10	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)	-	-	100	200	300	400	
01	11	Program Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Jangka waktu pelayanan UPTD Agribisnis	100	100	100	100	100	100	
01	12	Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan	Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi	500	500	1.000	1.500	2.000	2.500	
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
	03	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sumbidaya Perikanan Tangkap	Prosentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-	1.025	1.576	2.155	2.578	3.400
				Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan	300	300	600	900	1.200	1.500
	03	02	Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Jumlah kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dibina	60,00	60,00	140,00	200,00	260,00	300,00
				Jumlah paket pengembangan pengolahan hasil perikanan	-	200	300	500	600	700
				Jumlah paket pengembangan pemasaran hasil perikanan	-	-	100	200	300	5
	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya :						
			a. Ikan Lele			1.025	1.577	2.155	2.763	3.401
			b. Ikan Mas			199	506	621	1.113	1.402
			c. Ikan Nila			500	1.025	1.576	2.155	2.763
			d. Ikan Lainnya			269	465	664	856	1.063
	03	04	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal	Persentase Peningkatan Jumlah produksi benih komoditas perikanan air tawar						
			a. Ikan Lele		1.500	1.500	2.650	2.650	3.875	5.250
			b. Ikan Mas		789	789	1.460	2.439	3.659	5.024
			c. Ikan Nila		1.429	1.429	1.500	2.650	3.875	5.250

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN						
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019		
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>PARIWISATA</b>								
	04	01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	5	7	8	9	10	
	04	02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2 hari	3 hari	4 hari	4 hari	5 hari	
	04	03	Pengembangan kemitraan pariwisata	Perkembangan obyek wisata dan destinasi wisata	5	7	8	9	10	
	04	04	Program Revitalisasi Obyek Wisata	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik	5	7	8	9	10	
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>PERDAGANGAN</b>								
	05	01	Pengembangan ekspor	Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API	120	127	132	137	142	147
	05	02	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah gudang yang diawasi	12	12	12	12	12	
	05	03	Perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan	Barang beredar yang diawasi (jenis)	10	11	12	13	14	15
	05	04	Pembinaan dan penataan pasar tradisional	Jumlah pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan (orang)	3760	3765	3775	3785	3795	3800
				Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat	85,71%	85,71%	86%	86%	86%	86%
	05	05	Pengembangan industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH)	Jumlah IKM yang dibina	600	610	620	630	640	650
				Prosentase pemberian rekomendasi TDI/IUI	93%	94%	95%	96%	97%	98%
	05	06	Pengem. industri logam mesin elektronika & aneka	Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi ( Unit Usaha )	40	50	60	70	80	90
	05	07	Pengembangan IKM dan industri kreatif	Rasio IKM yang difasilitasi HaKI	25 : 35	25 : 40	30 : 45	35 : 50	35 : 55	40 : 60
				Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal	-	1 : 5	2 : 6	3 : 7	4 : 8	5 : 9
				Rasio IKM yang difasilitasi PIRT	35 : 50	35 : 60	40 : 60	45 : 70	50 : 70	50 : 75
				Jumlah pengujian produk makanan dan minuman	230	235	245	250	255	270
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>								



NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN					
				Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019	
01	01	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM	78%	80%	82%	84%	86%	88%
			Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran	78%	80%	82%	84%	86%	88%
			Prosentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran	78%	80%	82%	84%	86%	88%
01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Prosentase korban bencana yang mendapatkan bantuan/ pertolongan	80%	85%	87%	89%	91%	93%
			Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	80%	85%	87%	89%	91%	93%
01	03	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Prosentase pemadam kebakaran swasta yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana	85%	90%	92%	94%	96%	98%
			Prosentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	85%	90%	92%	94%	96%	98%
01	04	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan Tim Reaksi Cepat	88%	92%	94%	96%	98%	100%
			Prosentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih	88%	92%	94%	96%	98%	100%
			Prosentase pemahaman masyarakat dan pelajar dalam menghadapi bencana	88%	92%	94%	96%	98%	100%
01	05	Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran	Prosentase peningkatan ketersediaan peralatan pemadam	75%	77%	79%	81%	83%	85%
			Prosentase peningkatan usia pakai peralatan pemadam	75%	77%	79%	81%	83%	85%

**Tabel 7.4**  
**PENGANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN		
			Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>										
01	01	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Rasio guru terhadap murid (sekolah) SD/MI	1.541.597	1.557.013	1.572.583	1.588.309	1.604.192		Dinas Pendidikan	
				Rasio guru terhadap murid (sekolah) SLTP/MTs								

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019			
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMA								
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) SMK								
		Rasio guru terhadap murid (sekolah) MA								
01	02	Manajemen pelayanan pendidikan	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	32.020.806	31.799.336	32.161.318	32.437.483	32.761.857		
		Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA								
		Angka Kelulusan SD/MI	6.029.758	6.632.733	6.699.061	6.766.051	6.833.712			
		Angka Kelulusan SMP/MTs								
		Angka Kelulusan SMA/SMK/MA								
		Nilai rata - rata ujian SD/MI								
		Nilai rata - rata ujian SMP/MTs								
		Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA								
		Angka Melek Huruf	850,364	858,868	887,458	876,131	884,892			
		Rata-rata lama sekolah								
01	03	Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	951,844	961,362	970,976	980,685	990,492		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs								
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	299,000	301,990	305,000	308,060	311,140			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs								
		Rasio murid terhadap sekolah SD/MI	25.350.070	25.603.570	25.859.605	26.118.201	26.379.383			
		Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs								
		Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI								

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019			
		Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs								
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI								
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs								
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs								
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI								
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs								
01	04	Pendidikan Menengah Universal	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	1.269.820	1.282.953	1.295.343	1.308.297	1.321.380		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA								
		Prosentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke pasar kerja								
		Prosentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi								
		Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK	29.567.095	29.862.765	30.161.393	30.463.000	30.767.637			
		Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK								
		Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK								
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)								
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK								
01	05	Pendidikan non formal	Angka putus sekolah SD/MI	209,415	211,510	213,625	215,781	217,918		
		Angka putus sekolah SMP/MTs								
		Angka putus sekolah SMA/SMK/MA								
		Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor	1.298.398	1.311.382	1.324.496	1.337.741	1.351.118			
		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A,								
01	06	Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD	1.475.000	1.489.750	1.504.647	1.519.693	1.534.890		
		Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)								
01	07	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang membutuhkan khusus dengan kondisi baik	164,420	166,064	167,725	169,402	171,096		

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
02	<b>KESEHATAN</b>										
02	01	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran	475,088	574.492	631,941	695,135	762,649		Dinas Kesehatan	
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup								
			Cakupan kunjungan Bumil K4								
			Cakupan Pemberian vitamin A pada Ibu Nifas								
			Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil								
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani								
			Cakupan Pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan								
			Cakupan Pelayanan Nifas								
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja								
			Cakupan kunjungan neonatus dengan komplikasi yang ditangani								
			Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap								
			Cakupan Kunjungan Bayi								
			Cakupan Kepesertaan KB Aktif								
02	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	35,860	60,000	68,000	78,000	90,000			
			Cakupan pelayanan anak balita								
			Persentase Balita dengan Diare yang Ditangani								
			Penemuan Penderita Pneumonia Balita								
02	04	Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	1.063.409	1.169.750	1.276.091	1.382.432	1.418.773			
			Persentase Balita Stunting								
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan								
			Persentase Balita yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/Balita Seluruhnya) (D/S)								
			Persentase Balita yang naik berat badannya (N / D)								
			Cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan Anak Balita								

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke-1 2015	Tahun ke-2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke-4 2018	Tahun ke-5 2019			
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe								
		Rumah Tangga dengan garam beryodium baik								
		Persentase Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif								
		Cakupan MP ASI Umur 6 - 24 Bulan GAKIN								
02	05	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.711.349	6.282.483	6.910.732	7.601.805	8.361.986			
		Penemuan Penderita Diare								
		Angka Kesakitan Diare per 1000 penduduk								
		Penderita DBD yang Ditangani								
		Angka Bebas Jentik								
		Persentase penderita malaria sesuai standar								
		Persentase Penderita kusta selesai berobat								
		Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif								
		Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan								
		Persentase Infeksi Menular Seksual Diobati								
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun								
		Persentase Penyelidikan epidemiologi (PE)								
		Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam								
		Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)								
		Persentase masyarakat melakukan deteksi dini faktor resiko PTM								
		Persentase WUS melakukan deteksi dini kanker rahim dan kanker payudara								
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM								
02	06	Pengembangan Lingkungan Sehat	831,104	914,214	1.005.635	1.106.199	1.216.819			
		Persentase Masyarakat Mengakses Sanitasi yang Layak								
		Persentase Masyarakat yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak								
02	07	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat- Tempat Umum dan Makanan	967,873	977,552	987,327	997,200	1.007.172			
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat								
		Persentase Tempat Tempat Umum memenuhi syarat								

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
02	08	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga sehat ber PHBS	1.019.768	1.132.069	1.307.941	1.463.735	1.688.109			
			Persentase Sekolah ber PHBS								
			Persentase Tempat-Tempat Umum ber- PHBS								
			Persentase Tempat Ibadah ber-PHBS								
			Persentase Tempat Kerja ber-PHBS								
			Prosentase Kelurahan Siaga Aktif								
			Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri								
			Rasio Posyandu per Satuan Balita								
			Persentase Pengobatan Tradisional Memenuhi Syarat STPT dan SIPT								
			Persentase Ranting SBH Aktif								
			Persentase Pesantren dengan Poskestren Aktif								
			Persentase POS UKK Aktif								
02	09	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar.	5.070.400	5.577.440	6.135.184	6.748.702	7.423.573			
02	10	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Berakreditasi	757,121	1.15.00	1.060.000	1.105.000	1.045.000			
			Persentase Puskesmas ISO								
			Kepatuhan Petugas terhadap SOP								
			Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang Memenuhi Syarat								
02	11	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	33.373.303	46.412.000	50.460.000	54.460.000	58.515.000			
			Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin								
			Persentase Rawat Jalan								
			Persentase Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota								
			Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat								
			Persentase RSUD Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa termasuk NAPZA								
			Persentase RSJ yang memberikan layanan subspecialis utama dan NAPZA								

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019			
		Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer								
		Jumlah puskesmas yang menjalankan upaya kesehatan olahraga								
		Persentase minimal memiliki Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja								
		Persentase Fasilitas kesehatan pemerintah (RS, Lab, Instalasi Farmasi, dan Dinas Kesehatan) yang melaksanakan upaya								
		Rasio Cabut Tambal								
02	12	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas dan Jaringannya berkategori Baik	4.739.276	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
02	13	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	3.352.853	2.525.000	3.150.000	3.150.000	3.850.000		
			Persentase Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan							
02	14	Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Industri Rumah Tangga Memenuhi Syarat	48,236	216,518	298,030	333,030	370,636		
			Persentase instalasi farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar							
			Persentase Puskesmas perwatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar							
			Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah							
02	15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	20,920	55,000	60,000	80,000	80,000		
02	16	Pelayanan prima	Prosentase indeks kepuasan pasien	9,925	20,000	25,000	27,500	30,000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Angka pasien pulang paksa							
02	17	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di lingkungan rumah sakit akan perilaku bersih dan sehat	90,000	125,000	156,250	185,000	217,000		
02	18	Pelayanan rumah sakit	Bed Occupation Rate (BOR)	6.073.980	10.130.000	10.861.800	11.475.035	12.283.042		
			Bed Tur Over (BTO)							
			Turn Over Interval (TOI)							
			Length Of Stay (LOS)							

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
		Gross Death Rate (GDR)									
		Net Death Rate (NDR)									
	02	19	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat adan perbekalan kesehatan sesuai formularium	7.350.000	9.800.000	11.033.000	12.687.950	12.790.745		
	02	20	Pegadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	27.032.341	7.728.000	2.772.500	3.062.125	3.159.550		
	02	21	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase Cakupan pemenuhan alat kesehatan rumah sakit	175,000	210,000	262,500	301,875	362,250		
	02	22	Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Terpenuhinya safety patient sesuai standar mutu SPM	135,000	150,000	50,000	50,000	50,000		
	02	23	Penataan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Tersedianya Sistem informasi RS berkualitas	350,000	225,000	25,000	28,750	34,500		
	02	24	Peningkatan kesehatan lingkungan	Persentase Terpenuhinya nilai baku mutu kesehatan lingkungan sekitar RS	5,000	7,500	10,000	11,500	13,800		
	02	25	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah dokter spesialis	870,000	1.044.000	1.305.000	1.500.750	1.790.000		
				Prosentase perawat bersertifikat BTLS							
				Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS							
	<b>03</b>		<b>PEKERJAAN UMUM</b>								
	03	01	Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring jalan dan jembatan	Prosentase Terbangunnya sistem infomasi/database jalan dan jembatan	400,000	300,000	350,000	250,000	150,000		DINAS PEKERJAAN UMUM
				Prosentase Tersedianya data ruas jalan dan jembatan yang rusak	875,000	400,000	550,000	600,000	750,000		
	03	02	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik	90.000.000	75.000.000	105.000.000	92.000.000	85.000.000		
	03	03	Pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase peningkatan dan penambahan kapasitas jalan dalam kondisi baik	26.000.000	25.292.000	25.556.600	25.834.430	26.126.152		
				Prosentase trotoar dengan kondisi yang baik							
				Prosentase terbangunnya jalan inner ring road	5.040.000	5.292.000	5.556.000	5.834.430	6.126.152		
				Prosentase penambahan jumlah jembatan baru dan perbaikan jembatan	6.500.000	5.500.000	4.500.000	3.500.000	2.850.000		
	03	04	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase/Rasio Jalan dengan kondisi baik	35.000.000	38.000.000	32.000.000	30.000.000	34.000.000		
				Prosentase jembatan dengan kondisi baik	8.000.000	7.500.000	8.250.000	7.700.000	9.000.000		
	03	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase PJU dalam kondisi baik	7.480.000	7.745.000	7.730.000	7.700.000	8.700.000		
				Prosentase PJU ber meter	1.800.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000		



NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN		
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019					
	03	06	Pembangunan sistem informasi/database dan Monitoring Saluran Drainase	Prosentase Terbangunnya sistem informasi/database saluran drainase	600,000	1.350.000	600,000	600,000	1.350.000			
	03	07	Pembangunan dan Peningkatan turap/talud/bronjong	Prosentase Panjang tebing sungai/saluran dan bahu jalan yang telah diperkuat	15.974.000	18.166.000	20.357.000	22.549.000	24.740.000			
				Prosentase turap/talud/bronjong dengan konstruksi yang baik								
	03	08	Pembangunan saluran drainase/koker/gorong-gorong	Prosentase Panjang saluran drainase dengan kondisi baik	17.285.000	19.716.000	22.148.000	24.579.000	27.10.00			
				panjang saluran drainase kota dengan kondisi baik (m)								
	03	09	Peningkatan saluran drainase/koker/gorong-gorong	Prosentase drainase dan gorong-gorong kota dengan kondisi baik	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000			
				Saluran drainase lingkungan dengan konstruksi yang baik (m)								
	03	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dipelihara	8.458.000	10.773.000	11.781.000	12.884.000	14.090.000			
				Peningkatan Aliran Air (%)								
	03	11	Pengendalian banjir	Lama genangan (jam)	770,000	830,000	890,000	950,000	1.10.00			
				Luas genangan (ha)								
	03	12	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Prosentase alat berat yang kondisinya baik	9.314.625	3.355.356	3.398.124	4.243.030	990,181			
	04		<b>CIPTAKARYA DAN TATA RUANG</b>									
	04	01	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Prosentase berkurangnya Rasio kawasan kumuh Perkotaan	549,018	576,469	605,293	623,451	642,155		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan	
				Prosentase berkurangnya Rasio Rumah Tak Layak Huni								
				Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau								
	04	02	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rasio lingkungan permukiman kota yang berkategori baik	47.066.205	48.948.853	49.927.830	52.424.223	55.045.433			
				Prosentase jalan lingkungan dengan kondisi baik								
	04	03	Pengembangan perumahan	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung sarana dan utilitas umum (PSU) (%)	4.695.100	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000			
	04	04	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase rumah tangga yang bersanitasi	2.900.000	2.958.000	3.017.160	3.077.503	3.139.053			
1	06		<b>PERHUBUNGAN</b>									

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
	06 04	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	Persentase berfungsinya dermaga sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	455,700	870,000	535,000	1.050.000	905,000			
	06 05	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	133,000	270,000	120,000	100,000	150,000			
	06 06	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan sungai	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	569,192	614,727	663,906	677,184	697,499			
<b>1</b>	<b>08</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>									
	08 01	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	139,577	153,535	168,889	185,778	204,356		Badan Lingkungan hidup	
			Prosentase menurunnya kegiatan usaha yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan hidup	834,000	922,000	1.15.00	1.116.000	1.228.000			
	08 02	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup	73,000	80,000	88,000	97,000	110,000			
	08 03	Pengendalian polusi	Prosentase meningkatnya jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	1.08.00	1.109.000	1.220.000	1.342.000	1.476.000			
	08 04	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Prosentase meningkatnya luas ruang terbuka hijau	302,089	333,398	366,738	403,412	443,753			
	08 05	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Prosentase meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan	57,828	63,610	69,971	76,969	84,665			
	08 06	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	Luas area penyapuan	19.536.072	21.430.842	22.251.911	23.437.548	25.625.652		Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
			Prosentase sampah yang terangkut ke TPA								
			Prosentase sampah yang tidak terangkut ke TPA								
			% peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT								
			% lahan TPA yg dikelola dg sistem sanitary landfill								
	08 07	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang berkondisi baik	4.861.056	5.008.798	5.164.298	5.328.052	5.500.592			
			Prosentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang berkondisi baik								
	08 08	Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan	1.673.099	1.794.002	1.926.637	2.072.125	2.160.705			
			Prosentase Penurunan Pelanggar ketentuan pembuangan sampah yang diproses hukum								
	08 09		Prosentase Penurunan volume sampah di Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)	800,000	800,000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019			
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat	Prosentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dibina							
	08	10	Program Penataan & Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	6.641.618	8.073.268	9.872.059	11.146.398	13.639.624		
			Prosentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota							
			Prosentase luasan RTH kawasan perkotaan yang dikelola/dipelihara							
			Prosentase luasan RTH yang dikelola oleh pihak ketiga							
<b>1</b>	<b>09</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>								
	09	01	Penataan Administrasi Kependudukan	821,968	887,170	1.003.810	1.089.820	1.080.446		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)							
			Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)							
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)							
			Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)							
			Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran							
			Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran							
			Cakupan penerbitan kutipan akta kematian							
			Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak (jiwa)							
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	10	01	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.388.871	1.411.559	1.444.236	1.466.287	1.491.257		Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana
	10	02	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	501,724	523,679	537,432	549,751	556,296		
			Jumlah peserta aktif dalam sosialisasi PUG							
			Terwujudnya pembangunan dengan responsif gender							
	10	03	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak	1.093.878	1.117.468	1.147.780	1.180.640	1.196.963		
	10	04	Program Keluarga Berencana	1.089.721	1.198.693	1.318.524	1.450.418	1.755.006		
			Prosentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65%							
			Prosentase cakupan unmet need 5%							
			Prosentase cakupan anggota BKB berkb 70%							
	10	05	Program Bina Keluarga Sejahtera	327,946	430,946	472,946	518,946	568,946		
			Prosentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya <20 tahun 3,5%							
			Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB 87%							
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>								

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN		
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019					
	11	01	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat kelurahan	persentase partispikasi aktif LPM dalam pembangunan kelurahan	845,000	895,000	945,000	995,000	1.040.000		Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan anak dan Keluarga Berencana	
				Jumlah unit usaha kecil yang dilatih	190,000	217,600	242,000	285,000	285,000			
	11	02	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta teknologi tepat guna	110,000	135,000	160,000	180,000	200,000			
	11	03	Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Prosentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1.162.789	1.279.068	1.406.975	1.547.672	1.702.439		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
	11	04	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Prosentase PMKS skala Kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	941,375	1.035.513	1.139.064	1.252.970	1.378.267			
	11	05	Pembinaan para penyandang cacat trauma	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	298,020	327,822	360,604	396,665	436,331			
	11	06	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Prosentase panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	390,000	429,000	471,900	519,090	570,999			
	11	07	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Prosentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang nmenyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	183,000	201,300	221,430	243,573	267,930			
	11	08	Bantuan sosial korban bencana	Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerimabantuan sosial selama masa tanggap darurat	200,000	260,000	332,000	418,400	522,080			
				Prosentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat								
	11	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial	Prosentase kelengkapan layanan kesejahteraan sosial	100,000	200,000	1.200.000	2.800.000	3.100.000			
<b>1</b>	<b>12</b>		<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
	12	01	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	258,270	284,047	312,505	343,756	378,132		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	
			prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat									
			Prosentase tenaga kerja yang mendapat peltihan kewirausahaan									
	12	02	Peningkatan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	256,200	281,820	310,002	341,002	375,102			

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN		
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019					
12	03	Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	382,500	420,750	462,825	509,108	560,018				
12	04	Perlindungan dan penegakan norma hukum ketenagakerjaan	Prosentase Besaran pemeriksaan alat di perusahaan	377,160	414,876	456,363	501,999	552,199				
			Prosentase Besaran pengujian peralatan di perusahaan									
12	05	Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh	Prosentase besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta BPJS kesehatan	59,140	65,054	71,559	78,715	86,586				
12	06	Pengadaan Saranan dan Prasarana Tenaga Kerja	Prosentase calon tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas pelatihan	200,000	200,000	300,000	300,000	2.200.000				
			Prosentase kelengkapan peralatan uji	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
<b>1</b>	<b>13</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>										
	13	01	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Prosentase UMKM yang dibina	450,000	500,000	550,000	600,000	650,000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Prosentase koperasi aktif								
	13	02	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM	Prosentase peningkatan omzet KUMKM	400,000	450,000	500,000	600,000	700,000			
	13	03	Peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	Prosentase akses pembiayaan KUMKM	1.500.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.500.000			
	13	04	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah UMKM yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan/ kewirausahaan atau sejenisnya	800,000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000			
	13	05	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000			
				Jumlah UMKM								
	13	06	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah PKL yang mendapat fasilitas Pemkot	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000			
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>										
	14	01	Kebijakan penanaman modal	Prosentase tersedianya informasi peluang usaha yaitu bidang usaha unggulan	200,000	220,000	242,000	225,000	275,000		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
	14	02	Kerja sama penanaman modal	Prosentase terselenggaranya fasilitasi kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional	300,000	310,000	330,000	350,000	370,000			
	14	03	Promosi Penanaman Modal	Prosentase terselenggaranya promosi peluang penanaman modal di Kota Pontianak	195,000	100,000	105,000	110,000	115,000			

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019			
	14 04	Pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan perijinan	Prosentase terimplementasikannya sistem pelayanan terpaduy (SIMYANDU) perizinan teknis daeah	150,000	155,000	160,000	165,000	170,000		
	14 05	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal	150,000	155,000	160,000	165,000	170,000		
	14 06	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Prosentase terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	145,000	150,000	155,000	160,000	165,000		
	14 06	Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	250,000	260,000	270,000	285,000	300,000		
<b>1</b>	<b>16</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>								
	16 01	Pembangunan kecamatan dan kelurahan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan	2.312.409	2.543.649	2.798.015	3.077.817	3.385.599		Kecamatan
	16 02	Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	% terselenggaranya kegiatan musrenbang yang tepat waktu	661,373	727,510	800,262	880,288	968,316		
	16 03	Pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	2.336.400	2.570.040	2.827.044	3.109.745	3.420.724		
	16 04	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	844,800	929,280	1.022.208	1.124.429	1.236.872		
	16 05	Pembinaan lembaga masyarakat	Prosentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina	1.496.615	1.646.277	1.810.904	1.991.995	2.191.194		
	16 06	Peningkatan kinerja kelembagaan	Prosentase jumlah dokumen peningkatan kinerja kelembagaan	99,000	108,900	119,790	131,769	144,946		
	16 07	Program Pembinaan dan Bantuan Hukum	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan (kali) Persentase penyelesaian perkara perdata dan TUN Prosentase penetapan kelurahan sadar hukum	909,536	994,369	1.087.379	1.189.369	1.301.221		Sekreariat Daerah
	16 10	Program Promosi daerah	Prosentase pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti	2.544.992	2.672.242	2.805.854	2.946.146	3.093.454		
	16 11	Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan program raskin Jumlah Laporan Monev pelaksanaan program raskin Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan pengendalian pembangunan Prosentase regulasi pengendalian administrasi pengendalian pembangunan yang diterbitkan	125,000	131,250	137,813	144,703	151,938		
	16 12		Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	136,332	143,149	150,306	157,821	165,712		

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
		Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD	Prosentase kontribusi BUMD terhadap PAD								
	16	14	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Persentase kesesuaian program sanitasi dengan implementasi APBD Kota Pontianak	265,210	280,000	289,000	297,000	299,000		
	16	17	Program Intensifikasi Pelayanan masyarakat	Jumlah posyandu yang difasilitasi	1.521.509	1.673.659	1.841.025	2.025.128	2.227.641		
<b>1</b>	<b>17</b>		<b>KETAHANAN PANGAN</b>								
	17	01	Peningkatan ketahanan pangan	Prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita	194,170	195,752	200,752	230,500	250,000		Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
			Prosentase peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
			Prosentase peningkatan mutu dan keamanan pangan								
			Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah								
			Prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan								
			Jumlah penguatan cadangan pangan (ton)								
			Prosentase penanganan daerah rawan pangan								
	17	02	Pemberdayaan penyuluhan pertanian	Prosentase peningkatan kelembagaan petani	110,500	123,000	258,500	148,000	160,500		
	17	03	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani	Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi	266,213	306,145	352,067	404,877	465,609		
					570,883	624,897	811,319	783,377	876,109		
<b>1</b>	<b>18</b>		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
	18	01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.	350,000	375,000	400,000	450,000	500,000		Dinas Perhubungan
			Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi.								
					350,000	375,000	400,000	450,000	500,000		
<b>2</b>	<b>01</b>		<b>PERTANIAN</b>								
	01	01	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman hortikultura Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)	656,140	895,000	1.17.00	1.079.400	1.202.280		Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan
			a. Sawi								
			b. Bayam								
			c. Kangkung								
			Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)								
			a. Sawi								
			b. Bayam								

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019			
		c. Kangkung								
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)								
		a. Pepaya								
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)								
		a. Pepaya								
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)								
		a. Lidah Buaya								
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)								
		a. Lidah Buaya								
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)								
		a. Anggrek								
01	02	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan	70,000	132,000	182,000	184,000	234,000			
		Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :								
		a. Padi								
		b. Jagung								
		c. Ubi Kayu								
		d. Ubi Jalar								
		e. Keladi								
	03	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	300,995	303,050	315,000	315,000	340,000			
		Prosentase peningkatan produktifitas tanaman pangan :								
		a. Padi								
		b. Jagung								
	04									
		c. Ubi Kayu								
		d. Ubi Jalar								
		e. Keladi								
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (sayuran)								
		a. Sawi								
		b. Bayam								
		c. Kangkung								

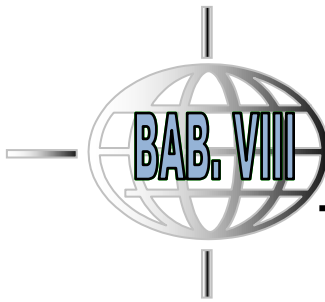


NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
		Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura (sayuran)									
		a. Sawi									
		b. Bayam									
		c. Kangkung									
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (buah-buahan)									
		a. Pepaya									
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (buah-buahan)									
		a. Pepaya									
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (biofarmaka)									
		a. Lidah Buaya									
		Persentase Peningkatan Produktifitas tanaman hortikultura (biofarmaka)									
		a. Lidah Buaya									
		Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (florikultura)									
		a. Anggrek									
	05	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi hasil Pertanian	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif	892,405	650,212	677,500	735,000	775,000			
	06	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal	Presentase peningkatan jumlah ketersediaan pangan asal hewan	183,412	217,953	309,698	301,319	358,328			
		a. Daging Sapi									
		b. Daging Ayam									
		c. Daging Kambing									
		d. Daging Babi									
		e. Telur									
	01	07	Peningkatan keamanan Pangan produk hewan	Jumlah Kelompok yang dibina	168,059	177,965	217,805	232,113	282,704		
	01	08	Peningkatan penerapan Teknologi peternakan	Jumlah kelompok ternak yang masuk KUNAK	351,456	1.757.278	1.933.005	1.159.803	1.275.783		
	01	09	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Prosentase penurunan jumlah kasus kejadian penyakit hewan menukar strategis	174,218	191,640	210,804	231,884	255,073		

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
	01 10	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)		33,458	36,804	40,484	44,532			
	01 11	Program Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Jangka waktu pelayanan UPTD Agribisnis	1.461.503	2.046.104	2.864.546	4.010.365	5.614.511			
	01 12	Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan	Persentase Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi	260,219	718,206	837,906	957,607	1.077.308			
				3056,904	3319,484	39329,517	2997,407	2289,637			
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
	03 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Prosentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	77,498	392,210	485,236	602,109	749,193		Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan	
			Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan								
	03 02	Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Jumlah kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dibina	183,046	291,530	430,422	404,504	471,991			
			Jumlah paket pengembangan pengolahan hasil perikanan								
			Jumlah paket pengembangan pemasaran hasil perikanan								
	03 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya :	420,175	716,882	937,861	1.230.573	1.621.916			
			a. Ikan Lele								
			b. Ikan Mas								
			c. Ikan Nila								
			d. Ikan Lainnya								
	03 04	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal	Persentase Peningkatan Jumlah produksi benih komoditas perikanan air tawar	598,850	779,160	973,348	1.218.065	1.526.943			
			a. Ikan Lele								
			b. Ikan Mas								
			c. Ikan Nila								
				1279,569	2179,782	2826,867	1006,613	1221,184			
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>PARIWISATA</b>									
	04 01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	688,475	792,783	889,200	985,618	985,618			

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019				
	04 02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	65,579	75,000	75,000	77,500	80,000			
	04 03	Pengembangan kemitraan pariwisata	Perkembangan obyek wisata dan destinasi wisata	163,653	165,000	165,000	170,000	175,000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	04 04	Program Revitalisasi Objek Wisata	prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik	137,400	142,000	145,000	145,000	150,000			
				1055,107	1174,783	1274,200	1378,118	1390,618			
2	05	<b>PERDAGANGAN</b>									
	05 01	Pengembangan ekspor	Jumlah pembinaan pelaku usaha yang memiliki API	100,000	150,000	200,000	200,000	147,000		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
	05 02	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah gudang yang diawasi	125,000	130,000	135,000	140,000	145,000			
	05 03	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang beredar yang diawasi (jenis)	250,000	275,000	300,000	325,000	330,000			
	05 04	Pembinaan dan penataan pasar tradisional	Jumlah pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan (orang)	1.800.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000			
			Prosentase pasar tradisional yang berpredikat pasar sehat								
	05 05	Pengembangan industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH)	Jumlah IKM yang dibina	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000			
			Prosentase pemberian rekomendasi TDI/IUI								
	05 06	Pengembangan industri logam mesin elektronika dan aneka	Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi ( Unit Usaha )	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000			
	05 07	Pengembangan IKM dan industri kreatif	Rasio IKM yang difasilitasi HaKI	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000			
			Rasio IKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal								
			Rasio IKM yang difasilitasi PIRT								
			Jumlah pengujian produk makanan dan minuman								
				475,000	555,000	635,000	665,000	622,000			
3	01	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>									
	01 01	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi sesuai SPM	821,981	903,847	994,231	1.093.654	1.203.020		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran								
			Prosentase peningkatan koordinasi antar pemadam kebakaran								
	01 02		Prosentase korban bencana yang mendapatkan bantuan/ pertolongan	61,457	67,602	74,362	81,799	89,979			

NO	KEBIJAKAN/PRIORITAS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
			Tahun ke- 1 2015	Tahun ke- 2 2016	Tahun ke-3 2017	Tahun ke- 4 2018	Tahun ke- 5 2019			
		Pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana							
	01	03	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Prosentase pemadam kebakaran swasta yang mendapatkan pelatihan teknis penanggulangan bencana	504,836	555,320	610,852	671,938	739,131	
			Prosentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana							
	01	04	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan kesiap siagaan dan keterampilan Tim Reaksi Cepat	415,450	456,995	502,694	552,964	608,260	
			Prosentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih							
			Prosentase pemahaman masyarakat dan pelajar dalam menghadapi bencana							
	01	05	Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran	Prosentase peningkatan ketersediaan peralatan pemadam	392,144	431,358	474,494	521,944	574,138	
			Prosentase peningkatan usia pakai peralatan pemadam							
				2195,868	2415,122	2656,633	1828,645	2011,508		



## SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pontianak disusun untuk dijadikan arah dan acuan bagi pemerintah kota, dinas, badan, lembaga, dunia usaha, kelompok peduli dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dari tahun 2015 – 2019.

Dokumen strategi yang dibuat atas kebutuhan bersama, sudah tentu perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 tahun sekali, untuk melihat sejauh mana proses implementasi strategi dapat dilaksanakan. Oleh karena itu kegiatan pemantauan bersifat koordinasi dan rekam proses. Outputnya berupa rekam proses dan catatan – catatan rekomendasi atas permasalahan – permasalahan yang terekam.

**Adapun tujuan Pemantauan dan Evaluasi SPKD Kota Pontianak, yaitu :**

**?**  
*Apa itu Pemantauan dan Evaluasi?*

**Pemantauan** adalah pengumpulan data secara berkala dan tepat waktu untuk menentukan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan merupakan proses yang berjalan terus menerus selama siklus proyek, dari pelatihan dan sosialisasi, hingga perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Hasil pemantauan digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan menyesuaikan perencanaan.

**Evaluasi** adalah menilai secara berkala apa yang telah dihasilkan, untuk mengetahui apakah proyek berhasil mencapai tujuan-tujuan utamanya.

- Memastikan **konsistensi** antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan rencana aksi daerah.
- Menyusun **indikator kinerja** yang menjadi acuan bagi setiap program sektor.
- Memastikan target makro penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat diterjemahkan dan diakomodasikan dalam **target-target mikro/teknis** setiap program sektor.
- Mewujudkan **kepemilikan kolektif** publik terhadap program yang dicerminkan melalui kepedulian publik di dalam memantau pengelolaan program secara luas dan konsisten.
- Memastikan **respon dan umpan balik** pengelola program terhadap pengaduan dan saran publik dilakukan secara cepat dan tepat.
- Mendorong **tercapainya tolok ukur kinerja program** yang secara kolektif mencapai sasaran daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

**MENGAPA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPKD KOTA PONTIANAK PENTING?**

- Pemantauan penting karena memungkinkan para pemangku kepentingan dari program sektor **mengetahui kemajuan yang telah dicapai**. Adanya sistem pemantauan program/kegiatan memungkinkan pemantauan status pelaksanaan program secara terus menerus dan identifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Secara keseluruhan hasil pemantauan dapat menunjukkan apakah program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.
- Pemantauan dan evaluasi adalah alat pengelolaan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan memastikan bahwa **tindakan perbaikan** dapat segera diambil secara cepat dan tepat.
- Pemantauan dan evaluasi penting karena **merekam pengalaman program/kegiatan dan pelajaran yang dapat dipetik**. Pemantauan dan evaluasi memungkinkan pengelola program/kegiatan dan pihak-pihak lain mengetahui apa yang terjadi di lapangan.
- Dari pengalaman penanggulangan kemiskinan, para pemangku kepentingan program/kegiatan dapat mengetahui bukan sebatas apa yang dapat terlaksana dan apa yang tidak dapat dilaksanakan, namun juga situasi dan kondisi apa yang memungkinkan program/kegiatan dapat terlaksana, berbagai inisiatif dalam memperlancar dan mengefektifkan program/kegiatan, usulan-usulan dan kearifan lokal yang patut ditiru terkait dengan proses pembangunan berbasis masyarakat dan pemberantasan kemiskinan.

## PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**Berorientasi Peningkatan Mutu.** Pemantauan dan evaluasi harus dilihat sebagai perangkat pengelolaan yang berguna untuk peningkatan mutu SPKD Kota Pontianak. Jika pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik, banyak pihak akan memperoleh manfaat, karena dengan demikian akan tersedia berbagai informasi untuk peningkatan mutu pengelolaan program selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi hendaknya dilihat sebagai bagian dari proses belajar yang berjalan secara terus menerus.

**Partisipasi dan Transparansi/Akuntabilitas.** Merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan SPKD Kota Pontianak secara keseluruhan yang juga menjadi prinsip dalam proses pemantauan dan evaluasi. Semua pihak yang berkepentingan dengan SPKD harus merasa bebas untuk melibatkan diri dan melapor jika ada permasalahan yang ditemukan dalam program dan kegiatan serta turut memberikan sumbangan pikiran untuk peningkatan mutu program/kegiatan. Pemantauan dan evaluasi sebaiknya dilakukan dalam lingkungan yang mendorong keterbukaan dan dapat menerima dengan tangan terbuka berita baik dan buruk, pujian maupun kritikan.

Perlunya upaya dari pengelola program untuk menggalang keaktifan masyarakat dalam memantau pengelolaan program dan pelaksanaan kegiatan, yang didukung dengan

adanya transparansi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat luas. Pengelola program juga perlu menyampaikan informasi tentang hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dari permasalahan yang diajukan oleh berbagai pihak.

**Akurasi Informasi.** Semua pihak yang berkepentingan dengan SPKD Kota Pontianak hendaknya berupaya memberikan informasi seakurat mungkin. Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dan tidak pula melaporkan apa yang menurutnya enak didengar oleh pihak lain. Jika memungkinkan, informasi perlu diuji silang (*crosscheck*) dengan sumber-sumber lain untuk memastikan dapat tidaknya informasi tersebut dipercaya. Hanya informasi yang akurat, berdasarkan fakta dan sumber-sumber terpercaya, yang dapat membantu meningkatkan mutu SPKD Kota Pontianak.

**Kepastian Tindak Lanjut.** Salah satu yang menyebabkan keengganan pihak-pihak dalam memonitor dan mengadukan berbagai permasalahan program dan kegiatan adalah tidak adanya kepastian dari tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap permasalahan - permasalahan tersebut.

Untuk selanjutnya demi menjamin rasa kepemilikan berbagai pihak, baik yang terkait langsung dengan program/kegiatan maupun yang tidak, diperlukan kepastian tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola program/kegiatan atau pihak lain yang diatur dalam desain program.

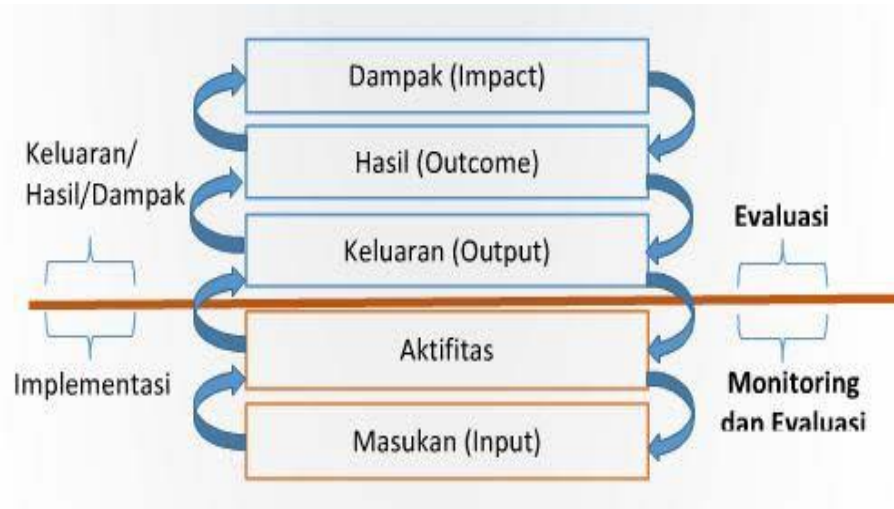
Hasil tindak lanjut ini juga perlu diinformasikan kepada pengadu secara khusus, maupun khalayak secara luas, setidaknya sebagai bahan pelajaran untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus serupa.

#### **SIAPA YANG MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPKD KOTA PONTIANAK?**

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pokja Pengaduan Masyarakat dalam TKPK bersama dengan SKPD terkait yang menjadi Satuan Kerja (Satker) pelaksana dari setiap program dan kegiatan tersebut. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan terhadap :

1. Pemantauan terhadap program – program penanggulangan kemiskinan yang ada di tiap bidang SKPD.
2. Pemantuan terhadap prgram – program penanggulangan kemiskinan bersasaran.
3. Evaluasi terhadap output program – program penanggulangan kemiskinan yang ada di tiap bidang SKPD.
4. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (outcome) kemiskinan

Gambar 8.1  
Alur Monitoring dan Evaluasi



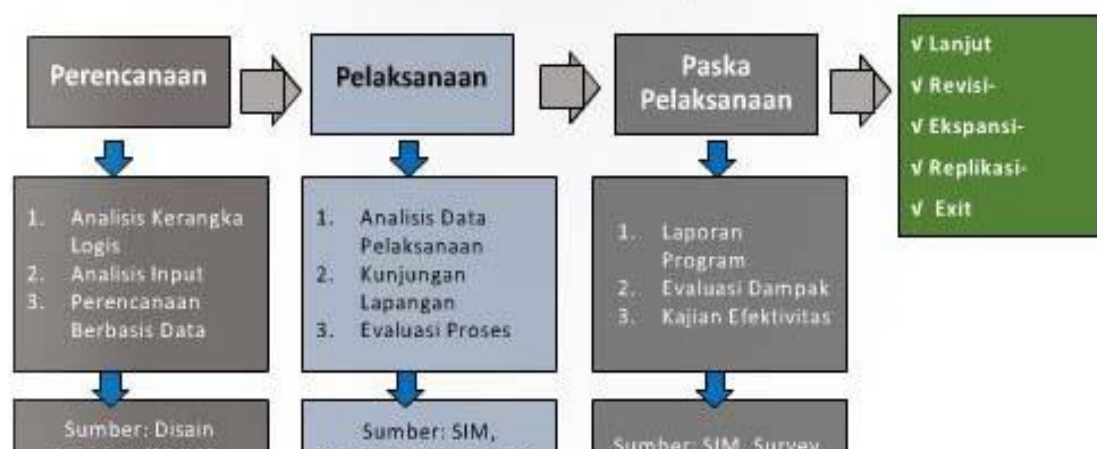
TKPK Daerah dapat memanfaatkan instrumen dan tools yang biasa digunakan dalam proses evaluasi program dan kegiatan reguler. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat dokumen RAD-SPKD merupakan dokumen yang berisikan rencana program dan kegiatan beserta target kinerjanya until 5 (lima) tahun kedepan.

Keterkaitan dengan proses evaluasi RAD-SPKD dengan perencanaan pembangunan reguler dapat memanfaatkan instrumen evaluasi tahunan yang terkait dengan indikator input (masukan), pelaksanaan (aktivitas), *output* (keluaran), maupun evaluasi multi tahunan (5 tahunan), baik kaitan dengan RPJMD maupun renstra SPKD dengan indikator *outcome* (hasil), *impact* (dampak) maupun indikator lainnya.

### SISTEM DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

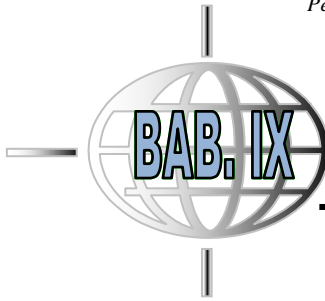
Proses pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara reguler dan isidental, berkala minimal sekali satu tahun sekali, untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi SPKD Kota Pontianak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi bersifat menilai dan eksekusi. Outputnya adalah data – data evaluatif dan rekomendasi – rekomendasi solutif untuk memecahkan permasalahan dalam implementasi strategi.

Gambar 8.2  
Sistem dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi





Lingkup utama kegiatan evaluasi adalah pada keseluruhan wilayah implementasi strategi, mulai bagaimana keterkaitan strategi dengan visi, misi dan strategi Kota Pontianak, hingga keterkaitan kegiatan, program dan kebijakan dengan strategi itu sendiri. Sejuahmana tingkat keberhasilan dan kegagalan serta tingkat partisipasi stakeholder dalam implementasi strategi yang dicirikan oleh : minat, kerelawanan dan keswadayaannya, daya serap APBD dan alokasi dana swadaya untuk implementasi strategi adalah bagian – bagian penting yang termasuk dalam lingkup utama kegiatan evaluasi.



# PENUTUP

## 9.1. RISALAH SPKD

Berpijak kepada misi pembangunan Kota Pontianak, dalam melaksanakan pembangunannya senantiasa mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ini disusun dengan mengacu pada kebijakan umum Kota Pontianak yaitu dengan semangat mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur perkotaan untuk mendukung daya saing.

Termasuk melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's* dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan), pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.

Untuk menuju kemandirian masyarakat miskin, Pemerintah Kota Pontianak memfasilitasi-nya dengan meningkatkan hak – hak ekonomi, sosial, hidup ditempat yang layak, politik, dilibatkan dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sendiri ; meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin (*Capacity Building*) agar tumbuh etos bekerja dan berusaha secara lebih produktif, termasuk di dalamnya memperjuangkan kepentingannya; dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (*Sosial Protection*).

## 9.2. LEGALISASI

Agar SPKD dapat menjadi acuan yang disepakati dan membangun komitmen bersama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak maka perlu dilegalisasi melalui Peraturan Walikota.

### **9.3. SOSIALISASI**

Agar SPKD dapat diketahui oleh seluruh pilar pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan pemegang kepentingan lainnya maka perlu disosialisasikan melalui berbagai media baik cetak maupun audio visual.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) khususnya bagi yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Tim Sekretariat Pembinaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi dan Kabupaten/Kota, 2011, ***"Pedoman Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)"***, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri .
2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2014 ***"Petunjuk Teknis Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)"***
3. Badan Pusat Statistik ***"Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2009 s/d 2014"***
4. Badan Pusat Statistik ***"Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2009 s/d 2014"***
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, 2014 ***"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak 2015-2019"***
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, ***"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pontianak Tahun 2010 s/d Tahun 2014"***
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, ***"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Walikota Pontianak Tahun 2008 – 2013"***
8. Dinas Pendidikan Kota Pontianak, ***"Profil Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2013 dan Tahun 2014"***
9. Dinas Kesehatan Kota Pontianak, ***"Profil Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2013"***